

THE
RESILIENCE

ESIBAL
PERFORMANCE
CORRELATION

MUKHAER PAKKANNA

RESILIENSI EKONOMI:

Gerakan Ekonomi Perempuan,
Kearifan Ekonomi Lokal &
Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

SUARA MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

RESILIENSI EKONOMI:
**GERAKAN EKONOMI PEREMPUAN,
KEARIFAN EKONOMI LOKAL,
DAN GERAKAN EKONOMI
MUHAMMADIYAH**

Mukhaer Pakkanna

SUARA MUHAMMADIYAH



**RESILIENSI EKONOMI:
GERAKAN EKONOMI PEREMPUAN, KEARIFAN EKONOMI LOKAL,
DAN GERAKAN EKONOMI MUHAMMADIYAH**

Penulis — Mukhaer Pakkanna

•

Penyelarar Kata — Ganjar Sri Husodo

Penyelarar Akhir — Diko Ahmad Riza Primadi

Desain Cover — Amin Mubarak

Penata Aksara — Dwi Agus M @2024

Cetakan Pertama — Juli 2024

Penerbit — Suara Muhammadiyah

Jl. KHA Dahlan 107 Yogyakarta 55262

Telp. (0274) 4284110

Homepage: <http://www.suaramuhammadiyah.com>

E-mail: penerbitsm@gmail.com

•

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Copyright@2023 pada Penerbit

xxii + 246 hlm, 16 x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN: 978-623-5303-76-5

Pengantar Penerbit

BUKU berjudul “Resiliensi Ekonomi: Gerakan Ekonomi Perempuan, Kearifan Ekonomi Lokal, dan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah” merupakan sebuah karya komprehensif yang menggali dan menganalisis peran penting perempuan dalam ekonomi, kekuatan dari kearifan lokal dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, serta kontribusi signifikan dari gerakan ekonomi Muhammadiyah dalam masyarakat Indonesia.

Pada era globalisasi yang penuh tantangan ini, resiliensi atau ketahanan ekonomi menjadi kunci utama untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana perempuan, melalui gerakan ekonomi yang mereka pelopori, mampu menghadirkan perubahan signifikan dan menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, penulis juga mengajak kita untuk merenungkan kembali kearifan ekonomi lokal yang telah teruji oleh waktu. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan, kita dapat menemukan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat.

Tidak ketinggalan, buku ini mengulas peran Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi

besar dalam bidang ekonomi. Gerakan ekonomi Muhammadiyah menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara luas.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengapresiasi berbagai inisiatif ekonomi yang berkontribusi pada resiliensi ekonomi bangsa.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi semua pembaca. •

Salam hangat

Suara Muhammadiyah

Resiliensi Ekonomi: Gerakan Ekonomi Perempuan, Kearifan Ekonomi Lokal, dan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

KOMPLEKSITAS persoalan anatomi ekonomi, tidak semata harus dipandang dalam perspektif tunggal, sebagaimana *galibnya* dalam teorema *cateris paribus* yang dianut ilmu ekonomi konservatif-primitif. Persoalan ini jalin berkelindan dengan pelbagai perspektif lain. Ilmu ekonomi lahir dari rahim ilmu sosial, sehingga interaksi dengan realitas kehidupan sebagai fakta ontologi menjadi episteme dalam perjalanan ilmu ekonomi berikutnya.

Faktor sosiologis dan antropologis sangat memengaruhinya, sehingga tatkala ilmu ekonomi diseret-seret ke pendekatan ilmu alam yang *bias* eksakta, pasti pohon ilmunya akan mengalami kekeringan. *Bias*-nya telah memicu akar serabut ilmunya tercerabut. Akar ilmunya, yang sejatinya telah menjalar dalam menopang tanaman dan menyerap air/nutrisi dari tanah, akhirnya metabolismenya tidak berfungsi. Ujungnya, ilmu ekonomi akan “gagap” menghadapi pelbagai persoalan.

Ilmu ekonomi membutuhkan akar (serabut dan tunggang) dan tanah yang subur. Nutrisi tanaman ilmu membutuhkan karbon, oksigen,

yang semuanya diserap dari udara, termasuk nitrogen. Karena itu, ilmu ekonomi akan resiliens tatkala tetap pada habitatnya pada ranah “tanah” ilmu sosialnya. Kendati demikian, ilmu ekonomi harus berkorespondensi, meminjam istilah filsuf Aristoteles (384 SM-322 SM), selain dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, juga ilmu-ilmu alam dalam membangun koherensi keilmuan antara subyektifitas dan obyektifitas, seperti postulat yang pernah dilansir filsuf Immanuel Kant (1724-1804).

Dengan demikian, resiliensi ekonomi harus mampu berkorespondensi dan berkoherensi dengan fakta-fakta kehidupan. Dia harus *engagement* dan mampu memformulasi kebijakan dan praksis ekonomi untuk beradaptasi dengan fakta, yang kemudian dapat memberikan solusi konkret. Resiliensi ekonomi memberi arti, segala aktor ekonomi (individu atau kolektif) harus mampu bertahan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan sekalipun. Resiliensi ekonomi merupakan hasil dari kekuatan yang ada pada diri aktor ekonomi, termasuk aspek kebijakan dan kelembagaannya untuk mampu beradaptasi terhadap kondisi yang tidak menyenangkan itu.

Menukil penjelasan *National Association of Counties* (NACO), resiliensi ekonomi adalah ketahanan ekonomi yang mengacu pada kemampuan untuk memprediksi dan beradaptasi dari krisis ekonomi yang melanda dan atau menyandera di suatu negeri maupun wilayah. Kemudian, merujuk pula *Economic Development Administration's* (EDA) dan *Comprehensive Economic Development Strategy* (CEDS), resiliensi ekonomi memiliki tiga atribut utama yaitu, kapasitas untuk pulih dengan cepat dari turbulensi, kemampuan untuk menahan turbulensi, serta kapasitas untuk menghindari dan memitigasi turbulensi yang acapkali ritmenya selalu menyembul.

Sekadar catatan, resiliensi ekonomi bukan menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi, melainkan membangun ekonomi yang *strong, sustainable and balanced growth*. Kendati bukan menjadi tujuan utama, bukan berarti resiliensi ekonomi dinegasikan. Pasalnya, pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, tidak akan bisa

dicapai jika resiliensi ekonomi tidak terejawantah dan terbangun dengan *solid*.

Saya teringat pada buku *A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening The Human Spirit*, karya Grotberg, E. (1995), mendeskripsikan, bahwa resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat. Kapasitas ini memberi *enabling* untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan mitigasi dampak yang merugikan. Dampak itu bisa memantik kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mentransmisikan kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.

Dengan proposisi tentang resiliensi ekonomi ini, buku kompilasi tulisan ini, sejatinya berpretensi hendak memotret dinamika resiliensi ekonomi dengan 3 (tiga) aktor, yakni kaum perempuan, ekonomi lokal, dan persyarikatan Muhammadiyah sebagai entitas yang tidak sekadar organisasi. Kendati cukup banyak aktor atau subyek dalam resiliensi ekonomi, saya kira 3 (tiga) representasi simplistik dari aktor ini punya kontribusi yang signifikan.

Pada aktor ekonomi perempuan, yang dapat dibaca pada Bagian Pertama dalam buku ini, ingin mengatakan, resiliensi perempuan sejatinya adalah aksesibilitas. Meminjam ulasan Amartya Kumar Sen (1981), kemiskinan terjadi akibat *capability deprivation* (kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang). Ketidakbebasan masyarakat yang substansif itu berkaitan langsung dengan kemiskinan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses. Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Merujuk banyak studi, diuraikan, adanya relasi antara program resiliensi ekonomi perempuan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Jika program resiliensi ini optimal, diasumsikan lebih separuh program pengentasan kemiskinan dianggap sukses. Laporan riset *World Bank*

Group in Women, Business and the Law 2016, mencatat, pada era 1990-an, hanya sedikit negara yang punya aturan hukum melindungi perempuan dari kekerasan. Namun, pada 2016, jumlahnya mencapai 127 negara, yang dipicu meningkatnya kesadaran terhadap biaya ekonomi dan manusiawi yang harus ditanggung akibat salah memperlakukan perempuan.

Tatkala perempuan diijinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan dan dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, maka kaum perempuan bukan saja lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi, melainkan juga berumur panjang.

Semakin banyak perempuan punya kendali terhadap pendapatan rumah tangga, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, semakin banyak perempuan masuk sekolah menengah, semakin besar pula keuntungan untuk anak-anak mereka, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, resiliensi perempuan terkait erat dengan dampak kemandirian. Kemandirian perempuan miskin terkait akses dan kontrol perempuan di rumah tangga dan di luar rumah tangga.

Pada intinya, setiap perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menjalani dan menghadapi setiap tantangan. Kemampuan perempuan untuk berpikir dan belajar dari lingkungan, menjadikan perempuan sosok yang tangguh dalam menghadapi keadaan apapun, termasuk tatkala perempuan berada di tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan atau keprihatinan. Keberadaan budaya patriarki secara langsung maupun tidak langsung, telah menempatkan perempuan sebagai kelas kedua.

Terdapat dalam masyarakat, terutama pada wilayah perdesaaan, sebagai misal, masih berlaku nilai-nilai yang mengekspresikan subordinasi perempuan, seperti ungkapan *kanca wingking* (teman pendamping). Ungkapan tersebut berarti, perempuan tidak dapat melampaui suaminya dan perempuan tidak berdaya dan tidak berkuasa atas dirinya (Harmona, 2006). Subordinasi pada perempuan berdampak pula kondisi permasalahan,

apalagi sebagai perempuan yang di tinggalkan oleh suaminya dan mempunyai tanggungan anak yang masih berusia sekolah.

Resiliensi merupakan gambaran, proses dan hasil kesuksesan beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup sangat menantang, terutama keadaan tingkat stres, yang tinggi atau kejadian-kejadian traumatis (Mulyani, Nasution Sri. 2011). Individu dianggap sebagai seorang yang memiliki resiliensi, yang jika mereka mampu secara cepat dan tepat kembali kepada kondisi sebelum trauma dan terlihat kebal dari pelbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang negatif.

Beberapa catatan yang termuat dalam Bagian Pertama tentang Perempuan, Kesetaraan dan Pertumbuhan Ekonomi, Resiliensi Ekonomi Perempuan, Wakaf Uang Dan Perempuan Miskin Perdesaan, Membumikan Zakat Untuk Korban Kekerasan, Koperasi Perempuan, Rokok, Kemiskinan dan Perempuan, Ketidakadilan Ekonomi bagi Perempuan, Perempuan dan Keuangan Inklusif, Perempuan dan Keuangan Mikro, Aisyiyah dan Pemberdayaan Ekonomi, Gerakan Ekonomi Perempuan, serta Mudik dan Ekonomi Perempuan.

Sementara pada Bagian Kedua dalam buku ini mengupas resiliensi ekonomi lokal. Sejatinya, khasanah dan ragam kekayaan budaya yang bertebaran di seantero nusantara menjadi potensi lokal yang bisa dikapitalisasi menjadi kekuatan ekonomi lokal. Jika kekuatan ekonomi lokal dianyam atau dirajut bersamaan dengan strategi yang jitu dan dikelola dengan kompetensi sumber daya insani yang mumpuni, bisa menjadi kekuatan dahsyat bagi ekonomi nasional.

Peleburan antara kekuatan budaya dan kekuatan sosiologis yang sifatnya *intangible asset* dengan kekuatan sumberdaya alam (*tangible asset*) berupa letak geografis, kekuatan pertanian, kelautan, dan kandungan sumberdaya alam serta kapasitas kelembagaan yang selama ini dimiliki masyarakat, secara turun temurun seperti gotong royong, misalnya, melalui kearifan lokal, maka bisa menjadi modal sosial (*social capital*) untuk memantik resiliensi ekonomi lokal.

Maka, per definisi, potensi ekonomi lokal sejatinya sebagai “kapasitas ekonomi lokal yang bisa dan patut untuk dikembangkan secara kontinu dan menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar, bahkan dapat memengaruhi peningkatan perekonomian daerah seutuhnya untuk lebih berkembang”. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja melalui potensi lokal (Blakely and Bradshaw, 1994).

Pengembangan ekonomi nasional, misalnya diukur dengan satuan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ukuran kualitatif lain, sejatinya harus dimulai dengan membangun ekonomi lokal. Ekonomi nasional bisa berjalan kokoh, berkualitas, dan berkesinambungan di atas pondasi ekonomi lokal yang kuat. Sementara ekonomi lokal bisa teguh berdiri di atas kokohnya kearifan lokal (*local wisdom*). Karena itu dibutuhkan penguatan ekonomi nasional disokong kuatnya kearifan ekonomi lokal.

Kearifan, menurut Sternberg dalam *Why Schools Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings* (Mahpur, 2008), menyebutkan bahwa kearifan dapat dijelaskan dalam cakupan *Tacit Knowledge* (TK). TK merupakan jantungnya kearifan. Ia adalah pengetahuan informal yang tidak diajarkan di sekolah formal, seperti tradisi di mana pengetahuan formal dipelajari dan diprioritaskan. Kearifan akan memediasi nilai yang disokong kinerja inteligensi praktis.

Kearifan lokal, merupakan sebuah sistem dalam pranata kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, yang hidup di dalam masyarakat lokal. Karakter unik dalam kearifan lokal, sifatnya dinamis, kontinu dan diikat dalam komunitasnya, hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Karena itu, dalam kearifan lokal dikenal adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang dianggap melanggar tata kehidupan yang disepakati.

Karena itu, dalam kearifan lokal dikenal adanya sanksi bagi anggota

masyarakat yang dianggap melanggar tata kehidupan yang disepakati. Jadi, kearifan lokal merupakan *common-sense* bagi masyarakatnya. Intinya, dalam kearifan lokal mengejawantah dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi.

Itulah yang meneguhkan, mengapa kearifan lumbung padi lokal, misalnya, sebagai varian ketahanan pangan di pelbagai pelosok wilayah, masih eksis dalam mendukung ketahanan pangan lokal (*local food security*) (Christophe Béné, 2020). Dalam kasus masyarakat di tatar Sunda meliputi wilayah kultural *Galuh* dan Banten sebagai studi kasus, dikenal adanya kearifan *Leuit*. Pada *Leuit* sebagai tempat menyimpan padi gabah yang sudah kering. *Leuit* berperan sebagai penyangga ketahanan pangan dan subsistensi masyarakat.

Di Minangkabau, dikenal dengan istilah *Rangkang*, Tanah Toraja dikenal *Alang*, Lombok dikenal *Sambik* dan seterusnya. Tradisi ini tentu mengingatkan kita pada spirit gotong royong. Spirit ini dianggap salah satu akar peradaban bangsa. Semangat gotong royong dalam tradisi *leuit*, terlihat tatkala penduduk desa (pemilik lahan) dengan sukarela menyimpan hasil penennya dalam lumbung.

Perangkat desa (adat) dapat memberikan akses terhadap cadangan padi lumbung kepada pemilik lahan yang menyerahkan hasil panennya. Tentu, ada sanksi berupa pelarangan akses terhadap cadangan padi lumbung kepada pemilik lahan yang tidak menyetorkan hasil penennya. Kepemilikannya tentu dipegang oleh setiap keluarga atau secara kolektif oleh desa.

Dalam kearifan lokal, lumbung dianggap sebagai simbol kekayaan bagi pemiliknya. Penyimpanan padi secara kolektif dapat menumbuhkan sikap gotong royong sesama warga desa. Selain itu, lumbung ini dapat menstabilkan ketersediaan pangan, keguyuban warga dan pola tanam yang teratur.

Resiliensi ekonomi lokal, sejatinya proses di mana daerah, masyarakat

dan negara dapat bertahan atau bahkan berhasil menghadapi turbulensi sosial-ekonomi yang berkelindan dan terjadi. Perekonomian Indonesia dapat dikatakan resiliens jika dapat meredam atau bahkan memitigasi dan meminimalisir turbulensi yang dihadapi.

Kalau hanya mengandalkan pada kebijakan yang sifatnya karitatif (*charity*), seperti pengguayuran kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) apalagi berkedok politik, tentu yang tumbuh bukan resiliensi, melainkan ketergantungan keluarga miskin pada bantuan pemerintah. Dan, dalam jangka panjang pasti tidak akan mendidik. Sampai kapan pun ikhtiar untuk menekan signifikan angka kemiskinan, pasti akan lambat. Pola karitatif pun acapkali dituduh sebagai kebijakan atau program untuk mengawetkan kemiskinan.

Untuk dapat membangun resiliensi ekonomi yang benar-benar tangguh, secara garis besar yang dibutuhkan adalah membangun resiliensi ekonomi dalam kerangka ekonomi lokal atau regional. Sehingga dibutuhkan kapasitas untuk mengantisipasi risiko, mengevaluasi bagaimana risiko tersebut dapat berdampak pada aset ekonomi utama, dan membangun kapasitas yang responsif.

Di tingkat daerah atau masyarakat lokal, praktisi atau aktivis pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berperan penting dalam membangun kapasitas ketahanan ekonomi. Para profesional dan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi acapkali menjadikan titik fokusnya pada koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pasca-insiden, menggerakkan penyebaran informasi, menanggapi pertanyaan eksternal, dan lainnya.

Dalam konteks ini, Bagian Kedua dalam buku ini, penulis teringat pada Koentjaraningrat (15 Juni 1923-23 Maret 1999), menegaskan, harus digali nilai kearifan lokal sebagai praktik dinamika dalam mendorong mentalitas membangun, niscaya ia akan merangkai capaian berbangsa sebagai semangat kreatifitas, tanggung jawab, pencapaian kebahagiaan masa depan yang dihidupi oleh mentalitas lokal. Spirit inilah yang akan

memacu penguatan ekonomi nasional di atas kokohnya kearifan lokal yang berkarakter gotong royong.

Lebih lanjut, berkaitan pada Bagian Ketiga dalam buku ini, mengangkat ulasan tentang kontribusi Muhammadiyah sebagai entitas, yang tidak semata kekuatan organisasi, tapi ia merupakan entitas “persyarikatan”. Bagian Ketiga ini membahas peran Muhammadiyah dalam membangun resiliensi ekonomi nasional. Ruh Muhammadiyah adalah Persyarikatan, yang dimaknakan sebagai imperasi kekuatan bersyarikat antarkomponen warga dan amal usahanya (AUM) seperti Rumah Sakit, lembaga pendidikan (formal, informal, dan nonformal), pelbagai lembaga keuangan, panti asuhan/jompo, tempat penitipan anak, lembaga ZIS/wakaf, dan lainnya. Bersyarikat berarti warga Muhammadiyah selalu berikhtiar berjamaah, termasuk dalam bidang muamalat.

Kekuatan bersyarikat ini diekspresikan, dalam bahasa sosiologis, sebagai gotong royong. Dalam rumusan Tanfidz, hasil Mukhtamar Muhammadiyah di Makassar pada 2015, dirumuskan gerakan ekonomi sebagai pilar ketiga dakwah Muhammadiyah, selain bidang Pendidikan dan Kesehatan/Sosial. Maka, dalam gerakan ekonomi sebagai pilar ketiga memiliki 3 (tiga) sasaran utama.

Pertama, memajukan ekonomi Persyarikatan, yaitu menjadikan Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia melalui pengembangan dan pendirian amal usaha yang berorientasi bisnis. Secara institusional, Muhammadiyah memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri ke arah tersebut.

Kedua, memajukan ekonomi warga Persyarikatan, yaitu mendorong, membimbing dan memberdayakan ekonomi warga Muhammadiyah sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi saudagar-saudagar besar di Indonesia. *Ketiga*, memajukan ekonomi umat dan bangsa melalui sinergitas dengan semua komponen umat dan bangsa dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat dan bangsa.

Dengan rentang kiprah Muhammadiyah yang demikian panjang

sejak kali pertama digerakkan, hingga seratus lebih tahun usianya, telah banyak mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan, Muhammadiyah terbukti mampu menghasilkan sosok tokoh dan pemimpin besar yang turut andil dalam memastikan arah yang dituju oleh dan untuk masa depan bangsa Indonesia. Para tokoh dan pemimpin Muhammadiyah itulah, yang secara sukarela membaktikan hidupnya mengemudikan dan mengawal Muhammadiyah agar tetap konsisten berpijak pada khittah perjuangannya. Sehingga dapat dipastikan kehadiran Muhammadiyah bukan hanya sekadar rutinitas sejarah. Melainkan juga, jawaban atas dialektika dan tuntutan zaman yang terus bergerak.

Namun, dalam kiprah perkembangan lebih seratus tahun perjalanan persyarikatan pada pentas kebangsaan di Tanah Air, dalam ranah aktivitas ekonomi, ternyata belum berjalan optimal, bahkan dinilai terdegradasi. Muhammadiyah hanya sebagai gerakan sosial dan dakwah, bukan gerakan ekonomi yang digerakkan oleh kelembagaan ekonomi Muhammadiyah.

Padahal sejarah mengukir dalam tinta emas, KH. Ahmad Dahlan adalah seorang pengusaha batik dan kerap berdagang di berbagai kota di Jawa. Dalam perjalanan dagangnya, Kiai Dahlan selalu singgah bersilaturahmi kepada para alim setempat, membicarakan perihal agama Islam dan masyarakatnya. Perjalanan demikian, selain berdagang juga dimaksudkan mempelajari sebab-musabab kemunduran kaum Muslim. Selain itu, fakta sejarah juga berbicara bahwa banyak warga Muhammadiyah berprofesi sebagai pedagang (saudagar). Warga Muhammadiyah di Sumatera Barat, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Pekajangan Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain adalah aktivis Muhammadiyah sekaligus aktivis bisnis di daerahnya.

Implikasi dari profesi ganda seperti itu menjadikan Muhammadiyah cukup disegani. Banyak kegiatan persyarikatan Muhammadiyah didanai secara swadaya, tanpa terlalu tergantung pendanaan dari rezim yang berkuasa. Bisa jadi kuatnya kultur dan mental saudagar warga Muhammadiyah menjadikan Muhammadiyah cukup mandiri dalam mengelola

organisasinya. Kuatnya jiwa *entrepreneurship* (wiraswasta) menciptakan kultur aktivisme warga yang mandiri, disegani dan diperhitungkan oleh kawan dan lawannya.

Namun, roda perubahan zaman terus berputar. Kekuatan kultur bisnis mulai cair dan redup tatkala roda perpolitikan memasuki zaman Orde Baru. Banyak warga Muhammadiyah diserap dalam mekanisasi rezim birokrasi yang ditandai mayoritasnya warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN). Boleh jadi lumpuhnya kemandirian disebabkan oleh perilaku rezim birokrasi, yang berkonsekuensi melemahnya proses kaderisasi dan jiwa kewiraswastaan di kalangan warga persyarikatan.

Dalam Bagian Ketiga buku ini, menjelaskan bahwa dengan peta kondisi ekonomi Indonesia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, maka Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, perlu merumuskan pola gerakan ekonomi yang mampu melibatkan *bottom of the pyramid*. Dengan demikian, gerakan ekonomi Muhammadiyah, tidak sekadar gerakan paguyuban untuk membangun bisnis individual, tapi harus memiliki misi pemberdayaan.

Dalam kaitan itu, arah gerakan ekonomi Muhammadiyah juga memerlukan, *pertama*, membangun usaha ekonomi masyarakat rentan (mikro). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia 55,162 juta unit usaha atau 99,91 persen dari total unit usaha di Indonesia. Usaha mikro dan kecil di Indonesia menyerap 98,877 juta pekerja atau 94,52 persen dari total pekerja di Indonesia. Mereka ini dicitrakan sebagai *small is beautiful*. Usaha-usaha mikro seperti ini, masih lebih kuat dicirikan pada “zona nyaman”, yang kerap sulit dipacu menjadi besar.

Dalam ketidakpastian ekonomi global dewasa ini agaknya penguatan terhadap kelompok ini memerlukan dukungan karena di tangan merekalah denyut sektor riil berputar setiap hari. Karena itulah, konsep *one village one BMT/BTM*, perlu mendapat sambutan. Hanya persoalannya, sejauhmana

fungsi-fungsi pemberdayaan BMT/BTM di masyarakat dalam mengangkat derajat usaha *small is beautiful* ini.

Kedua, membangun jejaring usaha yang memiliki manfaat sosial yang tinggi. Usaha-usaha yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, usaha kerajinan rakyat, usaha padat karya, usaha yang menyerap konsumen (pasar) masyarakat menengah ke bawah (usaha retail, usaha distribusi, usaha ekonomi kreatif, dan lainnya) perlu banyak difokuskan. Karena itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah perlu memeta jenis usaha yang mampu memproduksi jenis substitusi impor. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor usaha mikro jika Muhammadiyah tidak segera mengantisipasinya.

Pelbagai peta yang dijelaskan di atas, terutama pada penguatan resiliensi ekonomi perempuan, ekonomi lokal, dan harapan pada entitas gerakan ekonomi Muhammadiyah, menjadi urgen memperhatikan, bahwa ekonomi nasional tidak mesti silau pada kekuatan ekonomi skala besar. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia pasca deraan pandemi Covid-19 dan makin eskalatifnya tensi perang terbuka serta perubahan konstelasi geoekonomi global, maka penopang utama pranata ekonomi Indonesia, justru terletak pada kekuatan domestik. Mengapa ekonomi Indonesoia masih bisa tumbuh dalam kisaran 5 persen? Itu tidak lain, karena kekuatan konsumsi domestik masih kokoh. Di sinilah resiliensi ekonomi yang diulas dalam buku ini menjadi penting dan relevan untuk didiskusikan.

Akhirnya, penulis mengakui, bahwa isi buku ini hanyalah rakitan tulisan (artikel) penulis dari pelbagai media massa, terutama yang pernah dipublikasikan di media cetak dan media sosial *online* serta dalam wahana forum-forum diskusi/seminar baik *webinar* maupun dalam *luring*. Sehingga, penulis merasa bersalah jika banyak ditemui pelbagai pengulangan-pengulangan gagasan (*tautology*) antara satu tulisan dengan tulisan lain. Tentu, penulis sulit menghindari pengulangan-pengulangan tersebut. Oleh karena itu, penulis minta maaf atas ihwal itu.

Kemudian dalam penulisan buku ini, penulis banyak dibantu oleh istriku (Ferry Yanthy Burhan) dan anak-anakku (Afkar Aristoteles Mukhaer, Az-Zahra Einstenia Mukhaer, dan Alexander Adam Mukhaer). Setidaknya mereka memberikan dukungan moral dan waktu setiap penulis menulis artikel dan menuntaskan buku ini

Demikian juga pada tim PT Unilever Indonesia, Tbk, tempat di mana penulis acapkali berdiskusi dan juga mensponsori terbitnya buku ini. Tentu, kepada penerbit Suara Muhammadiyah (SM) di Yogyakarta dan kawan-kawan Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang selalu menyiapkan data tentang isu-isu perempuan. Tak lupa pula pada kawan-kawan pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, tempat penulis berkhidmat sebagai tenaga pengajar.

Akhirnya, isi buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Masukan dari khayalak pembaca menjadi relevan sebagai pemantik. Hanya kepada Allah SwT penulis serahkan untuk menilainya. *Wallahu a'lam bishawab.* •

Jakarta, 14 Januari 2024

Mukhaer Pakkanna

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit — v

Narasi Penulis — vii

Daftar Isi — xix

BAGIAN PERTAMA: EKONOMI PEREMPUAN

1. Perempuan, Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi — 3
2. Resiliensi Ekonomi Perempuan — 9
3. Wakaf Uang dan Perempuan Miskin Perdesaan — 13
4. Membumikan Zakat untuk Korban Kekerasan — 33
5. Koperasi Perempuan — 43
6. Rokok, Kemiskinan dan Perempuan — 49
7. Ketidakadilan Ekonomi bagi Perempuan — 55
8. Perempuan dan Keuangan Inklusif — 61
9. Perempuan dan Keuangan Mikro — 67
10. Aisyiyah dan Pemberdayaan Ekonomi — 71
11. Gerakan Ekonomi Perempuan — 77
12. Mudik dan Feminisasi Pekerja Migran — 81

BAGIAN KEDUA: KEARIFAN EKONOMI LOKAL

1. Lumbung Pangan dan Kearifan Lokal — 89
2. Mendaras Tangisan Pilu Daeng Ba'du (Cerpen Ekonomi) — 95

3. Menjadi Tuan di Negeri Sendiri — 105
4. Arus Mudik Dana Remitansi — 113
5. Universalisme Kemanusiaan — 117
6. Menyemai Keragaman — 121
7. Saudagar Muhammadiyah — 125
8. Pulang Malu, Tidak Pulang Rindu — 129
9. Tangis Pilu Buruh Pabrik: Bunuh Diri dan PSK — 135
10. Bisnis Aplikasi = Bisnis Berbagi? — 139
11. Toleransi Agama (Ekonomi) Kiai Hasyim — 143

BAGIAN KETIGA: **GERAKAN EKONOMI MUHAMMADIYAH**

1. Gerakan Muhammadiyah — 153
2. Inkorporasi Muhammadiyah — 157
3. Jaringan Saudagar Muhammadiyah — 161
4. Jihad Ekonomi Muhammadiyah — 165
5. Etos Saudagar Muhammadiyah — 171
6. Kemandirian Keuangan Muhammadiyah — 175
7. Bank Muhammadiyah? — 179
8. Baitut Tamwil Muhammadiyah — 183
9. Mental “Saudagar” Kiai Dahlan — 187
10. Muhammadiyah, Deradikalisme, dan Gerakan Ekonomi — 193
11. Muhammadiyah dan Resesi Ekonomi — 197
12. Muhammadiyah *Metaverse* — 201
13. Muhammadiyah dan Amnesti Pajak — 205
14. Perilaku *Flexing* Pada Bulan Suci — 211
15. Sertifikasi Produk Halal — 215
16. Token Wakaf — 219
17. Rokok dan Kemiskinan — 223
18. Kampus Merdeka, Dosen Terkekang? — 227
19. Akreditasi PTS — 231

Tentang Penulis — 235

Indeks — 237

BAGIAN PERTAMA

EKONOMI PEREMPUAN

1 | PEREMPUAN, KESETARAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

JAUH sejak sebelum proklamasi kemerdekaan, perempuan Indonesia sudah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Tidak heran, mereka menggalang kekuatan, salah satunya melalui Kongres Perempuan.

Pada kongres pertama, digelar pada 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta dan dijadikan patokan peringatan Hari Ibu Nasional, dirumuskan, “Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Oleh karena itu, zaman ini sudah waktunya mengangkat derajat kaum perempuan agar kita tidak terpaksa duduk di dapur saja. Kecuali harus menjadi nomor satu di dapur, kita juga harus turut memikirkan pandangan kaum laki-laki sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan umum.”

Pernyataan liberatif yang dinukil itu menegaskan, kian terbukanya aksesibilitas bagi perempuan ke sumber daya-sumber daya ekonomi akan menjamin terangkatnya derajat perempuan. Ihwal itu penting untuk menjaga resiliensi, pemulihan, pemerataan hingga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks itu, peran perempuan bisa dilihat sejauh mana aktivitas mereka dalam setiap kategori ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa lembaga keuangan internasional dan domestik memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 tidak jauh dari angka 5 persen. Demikian pula untuk 2023. Ini artinya, angka itu relatif stabil di tengah mendukungnya pertumbuhan ekonomi global. Pertanyaannya, bagaimana kontribusi kaum perempuan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan?

Dalam diktum pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Maka, komponen pengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yang merujuk data resmi BPS. Data yang bersifat *unreported economy* tentu tidak tercakup, termasuk aktivitas *shadow economy*. Padahal data PPATK, *shadow economy* diperkirakan kisaran 8.3-10 persen dari PDB (2021).

Sayang sekali, aktivitas ekonomi perempuan, banyak yang masuk dalam kategori *unreported economy*, seperti usaha kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh, kuli, petani, nelayan, dan lainnya. Belum ada data resmi, berapa jumlah perempuan dalam usaha ultramikro seperti itu. Namun, mengonfirmasi *BRI Research Institute* (2021) ada 45 juta pelaku usaha ultramikro di Indonesia. Namun, 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan keuangan formal.

Besarnya jumlah perempuan dalam usaha ultramikro itu menjadi kekuatan aktual jika mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Mereka perlu dioptimalkan seperti usulan riset Yaron, Yacob, Benjamin. dan Piprek (1997), dengan pendekatan formal dan informal.

Pendekatan formal, dilakukan dengan kebijakan afirmatif dan mendampingi usaha perempuan melalui wadah resmi, misalnya, melalui lembaga keuangan, koperasi, jaminan dan perlindungan usaha, aksesibilitas, dan lainnya. Sementara pendekatan informal, mendampingi dengan basis nilai dan norma yang sudah lama hidup di masyarakat, seperti gotong royong, keguyuban, sanksi sosial, dan lainnya.

Kesetaraan Perempuan

Ada tiga penghela pertumbuhan ekonomi saat ini, konsumsi, investasi dan ekspor. Dalam komposisi konsumsi, tergambar, pemantik utamanya, yakni kelas ekonomi menengah. Untuk investasi, merujuk data BKPM, pemantik utamanya industri manufaktur. Sementara ekspor, mencatat sektor ekstraktif atau berbasis sumberdaya alam: batubara, sawit mentah (CPO), minyak mentah, timah, nikel, masih mendominasi dan bergerak signifikan.

Pertumbuhan tiga komposisi tidak akan bergerak kuat, inklusif dan berkesinambungan, jika partisipasi perempuan hanya bergerak minimalis. Tidak heran, jika dalam Side Event Presidensi G20 pada November 2022, Seminar Internasional tentang Transformasi Digital Inklusi Keuangan Perempuan, Anak Muda, dan SMEs untuk Mempromosikan Pertumbuhan Inklusif, merekomendasikan agar kokohnya resiliensi perempuan terutama pada basis ekonomi masyarakat termarginalkan, menjadi pondasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas ke depan.

Bahkan, usaha berbasis daring (internet) jadi peluang yang bisa mendorong perempuan mengembangkan usaha di tengah transisi usaha global ke ekonomi digital. Apalagi, sejumlah riset menunjukkan 54 persen UMKM perempuan memakai internet, lebih besar dari pria yang hanya sekitar 39 persen. Perempuan dinilai lebih proaktif mengambil langkah mengembangkan produk secara sektor, lokasi, dan jenis barang.

Rekomendasi itu sejurus hasil riset Danareksa (2021) yang menemukan fakta, adanya peningkatan akses perempuan ke sektor jasa keuangan termasuk *fintech*. Perempuan yang memiliki produk keuangan pada 2020 mencapai 75,19 persen, meningkat 8,99 persen dari 2016 sebesar 66,20 persen. Riset itu juga menggambarkan, peranan perempuan dalam perekonomian meningkat juga ditopang oleh ketimpangan gender yang semakin mengecil. Kesetaraan gender di Indonesia semakin baik sebagaimana ditunjukkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang terus meningkat.

Pada *Country Gender Assessment* (CGA), digelar World Bank Indonesia pada 2020 dalam *Program Riset dan Analisis Kesetaraan Gender untuk Pertumbuhan Ekonomi*, memberikan gambaran luas tentang kondisi kesetaraan gender dan pelbagai isu terkait perempuan.

Beberapa isu utama mengemuka: *Pertama*, Indonesia secara aktif berupaya meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja melalui pelbagai kebijakan dan program pasar tenaga kerja. Banyak program seperti itu bergerak *bias*, mengarah kepada perbedaan jenis kelamin dalam pekerjaan yang memicu perempuan digiring ke arah pekerjaan-pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang lebih rendah.

Kedua, karena Indonesia sedang menjalani transisi menuju ke lebih banyak pekerjaan kelas menengah dan pertumbuhan yang lebih besar di bidang manufaktur dan jasa, maka hubungan antara pekerjaan dengan perawatan keluarga semakin mengemuka sebagai kendala gender.

Analisis *World Bank*, menyoroti tidak terpenuhinya kebutuhan perawatan yang berdampak pada keluarga yang memiliki anak, terutama yang dibebankan kepada perempuan. Guna memenuhi kebutuhan perawatan itu, banyak perempuan keluar dari pasar tenaga kerja dan sebagian besar kembali lagi menjadi pengusaha skala ultramikro atau pekerja mandiri.

Ketiga, perempuan menguasai usaha ultramikro. Menurut *studi International Finance Corporation (IFC) World Bank Group*, ada 15 persen perempuan Indonesia yang memiliki usaha uktramikro, mikro, dan kecil memiliki “cita-cita pertumbuhan yang tinggi” dibandingkan dengan hanya 5 persen secara global.

Banyak dari cita-cita pertumbuhan ini terhambat oleh akses yang lebih rendah terhadap kredit dan pasar, dibandingkan usaha yang dimiliki laki-laki. Membuka layanan keuangan mikro menjadi sangat penting untuk mendorong kewirausahaan perempuan.

Dengan modalitas dan hambatan akses perempuan seperti itu, pendekatan kelembagaan formal dan informal menjadi solusi. Selain itu,

perlu pendekatan pendampingan dan formalisasi posisi perempuan dalam pasar tenaga kerja (Kabeer, 1999).

Dalam pendekatan kelembagaan, kegiatan ekonomi perempuan perlu diwadahi oleh lembaga keuangan mikro formal. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat marjinal, dibanding lembaga keuangan lainnya. Salah satunya, memanfaatkan modal sosial berbasis pendekatan kelompok sebagai pengganti kolateral. Solusi ini, tentu mampu mengangkat derajat kaum perempuan di tingkat akar rumput. •

Dimuat Harian *KOMPAS*, 22 Desember 2022.

2 | RESILIENSI EKONOMI PEREMPUAN

LEBIH setahun, pandemi Covid-19 kebersamaian kita. Dan, hampir semua lini kehidupan terdisrupsi. Pelaku usaha yang paling berdampak, yakni mereka yang berjuang di aras bawah piramida ekonomi: usaha ultramikro, mikro, dan kecil.

Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2020), mengonfirmasi 94,69 persen pelaku usaha ultramikro dan UMKM mengalami penggerusan penjualan sejak pandemi. Bahkan, 49,01 persen pelaku usaha ultramikro mengalami penurunan penjualan lebih dari 75 persen. Demi bertahan hidup, pelaku usaha ultramikro rela untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang, jauh di atas jam kerja normal.

Sementara itu, belum ada data pasti berapa jumlah kaum perempuan yang bergulat dalam usaha ultramikro. Rapuhnya data jumlah usaha ultramikro lebih dipicu karena mereka tidak teregistrasi dan legalitasnya diragukan. Mereka distigmakan sebagai bagian dari *under ground economy*, *hidden economy*, *shadow economy*, dan lainnya sebagai aktivitas nonpasar. Mereka tidak tercatat dalam perhitungan BPS dan PDB (Produk Domestik Bruto). Bagaimanapun juga, jumlah kaum perempuan sebagai pelaku usaha ini lebih banyak dibanding laki-laki, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Masa pandemi, perempuan riskan mengalami pelbagai masalah, mulai dari *triple burden of women* (Sadli, 2008; Asmorowati, 2005). kehilangan mata pencarian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, pandemi juga membuka akses bagi perempuan berkontribusi memerangi Covid-19 dan mendukung perekonomian yang dapat dimulai dari tingkat keluarga.

Merujuk survei “*Women Count*” dari UN Women dan *The United Nations (UN) Covid-19* dalam judul: “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, melaporkan bagaimana Covid-19 mengekspos kerentanan perempuan (*vulnerability of women*) terhadap turbulensi ekonomi dan memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada di Indonesia sejak sebelum pandemi.

Beberapa temuan menarik dari laporan ini di antaranya; *pertama*, perempuan di Indonesia banyak bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82 persen dari mereka mengalami penurunan dalam sumber pendapatan. Kendati 80 persen laki-laki juga mengalami penurunan serupa, fakta membuktikan bahwa laki-laki mendapatkan keuntungan dari sumber pendapatan yang lebih luas.

Kedua, sejak pandemi, 36 persen perempuan, dibandingkan 30 persen laki-laki pekerja informal, harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka. *Ketiga*, pembatasan sosial membuat pekerjaan rumah tangga tak berbayar menjadi layanan dasar penting, tetapi perempuan memikul beban terberat:

69 persen perempuan dan 61 persen laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga tak berbayar. Demikian pula, 61 persen menghabiskan lebih banyak waktu untuk kerja pengasuhan tak berbayar, dibandingkan 48 persen laki-laki.

Resiliensi Perempuan

Topik utama resiliensi perempuan sejatinya adalah aksesibilitas. Seperti yang diutarakan Amartya Sen (1981), kemiskinan terjadi akibat *capability deprivation* (kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup

seseorang). Ketidakbebasan masyarakat yang substansif itu berkaitan langsung dengan kemiskinan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses. Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Dalam banyak studi juga diuraikan, adanya relasi antara program resiliensi ekonomi perempuan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Jika program resiliensi ini optimal, diasumsikan lebih separuh program pengentasan kemiskinan dianggap sukses. Laporan riset *World Bank Group in Women, Business and the Law 2016*, mencatat, pada era 1990-an, hanya sedikit negara yang punya aturan hukum melindungi perempuan dari kekerasan.

Namun, pada 2016, jumlahnya mencapai 127 negara, yang dipicu meningkatnya kesadaran terhadap biaya ekonomi dan manusiawi yang harus ditanggung akibat salah memperlakukan perempuan.

Tatkala perempuan diijinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan dan dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, maka kaum perempuan bukan saja lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi, melainkan juga berumur panjang. Semakin banyak perempuan punya kendali terhadap pendapatan rumah tangga, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, semakin banyak perempuan masuk sekolah menengah, semakin besar pula keuntungan untuk anak-anak mereka, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, resiliensi perempuan terkait erat dengan dampak kemandirian. Kemandirian perempuan miskin terkait akses dan kontrol perempuan di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Dalam kaitan itu, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mengaitkan dengan program *financial inclusion* (inklusi keuangan) yakni berikan porsi pembiayaan lebih besar kepada nasabah perempuan dalam proses resiliensi. Model inklusi keuangan seperti ini akan mampu memacu

pembangunan ekonomi di aras bawah piramida melalui peningkatan kebiasaan menabung, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan tingkat monetisasi.

Inklusi keuangan tentu berbasis ekonomi digital. Digitalisasi dapat menjadi sebuah solusi. Merujuk studi Lestariningsih *et al* (2017) bahwa peningkatan 10 persen akses internet terhadap perempuan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,51 persen. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan dengan pria, yaitu 0,43 persen. Jika digerakkan secara efektif, usaha mendigitalisasi pelaku usaha ultramikro dan mikro perempuan juga dapat berkontribusi meningkatkan angkatan kerja perempuan dan selanjutnya memperkecil indeks ketimpangan gender di Tanah Air.

Mengonfirmasi studi UNDP (2020), partisipasi perempuan dan laki-laki pada angkatan kerja Indonesia masih timpang, 82 persen laki-laki dan 53 persen perempuan di atas usia 15 tahun pada 2019. Digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjadi salah satu cara efektif agar pelaku usaha ultramikro dan mikro tetap dapat menjalankan usahanya. Menurut survei BPS pada 2020, empat dari lima pengusaha yang memasarkan produknya secara daring mengalami peningkatan penjualan.

Bukti ini diperkuat oleh laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) yang menyatakan, terdapat peningkatan konsumen digital sebanyak 37 persen akibat pandemi. Karena itu, sejatinya baik pemerintah, sektor privat, organisasi kemasyarakatan (Ormas), hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melaksanakan program-program resiliensi ini untuk memudahkan transformasi digital usaha ultramikro dan mikro secara masif dan terukur. •

Dimuat Harian *KOMPAS*, 4 Mei 2021

3 | WAKAF UANG DAN PEREMPUAN MISKIN PERDESAAN

MENARIK membicarakan relasi wakaf uang dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Menariknya, karena wakaf uang sendiri pernah menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Dalam wakaf uang, yang menjadi *nazhir* (pengelola wakaf) syaratnya lebih ketat, tidak boleh sembarangan, karena menyangkut tanggung jawab uang, sementara wakaf non-uang, lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Jika *nazhir* wakaf non-uang, boleh berasal dari perseorangan, yayasan, ataupun Ormas, maka *nazhir* wakaf uang harus lembaga wakaf formal berbadan hukum dan mempunyai keahlian dan reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan berdasarkan syariat. Jadi, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga, di mana *nazhir* harus teregistrasi secara formal.

Istilah wakaf uang atau wakaf tunai belum dikenal di zaman Rasulullah saw. Wakaf uang baru dipraktikkan sejak awal abad ke-2 Hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka yang paling awal memfatwakan wakaf uang. Imam Az-Zuhri menganjurkan wakaf dinar dan

dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sejak itu, wakaf uang mulai populer di kalangan muslim (Abu Su'ud, Dar Ibn Hazm, 1997: 20-21).

Di Turki, pada awal abad ke-4 Hijriyah, praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Pihak yang berwenang di Ottoman telah menyetujui wakaf uang dan dipraktikkan hampir 300 tahun, dimulai rentang 1555-1823 Masehi. Lebih dari 20 persen wakaf uang di kota Bursa, Selatan Istanbul, telah bertahan lebih dari seratus tahun (Tanjung, 2014).

Sedangkan di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang kemudian pemerintah memberi nama Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Komisi Fatwa MUI menetapkan, 1) wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) termasuk dalam wakaf adalah surat-surat berharga; 3) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; 4) nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

GNWU sudah dimulai ketika dikeluarkannya fatwa MUI. Dalam kurun waktu 2011-2018, gerakan ini telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 255 miliar. Realisasi angka tersebut dinilai masih sangat jauh. Pasalnya, potensi yang diperkirakan bisa mencapai Rp 180 triliun.

Ada beberapa tantangan dalam realisasi program GNWU di Indonesia, yakni tata kelola yang kurang baik, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf uang serta keterbatasan instrumen keuangan. Belakangan muncul upaya dukungan melalui program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang menempatkan dana wakaf pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam skema GNWU.

Dalam kaitan literasi yang rendah dan berbagai masalah pelaksanaan GNWU di lapangan, maka gagasan tentang wakaf uang untuk pem-

berdayaan ekonomi perempuan yang berkeluarga mendapat justifikasi empiris. Artinya, apa yang diusulkan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta meneguhkan, bahwa alokasi wakaf uang harus tepat pemanfaatan, terutama mereka yang membutuhkan (*mauquf alaih*). Memang, pada awalnya, wakif berikrar bahwa wakaf harta, misal uang atau ladang. Lalu, harta diserahkan kepada *nazhir* untuk dikembangkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Pengembangan instrumen wakaf tergantung dari kesepakatan dan ikrar antara wakif dan *nazhir* yang manfaatnya diserahkan atau dirasakan oleh *mauquf alaih*.

Terdapat dua jenis penerima manfaat wakaf, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Untuk *ghairu mu'ayyan* yaitu penerima manfaat yang tidak spesifik, contohnya yaitu masyarakat umum seperti fakir atau miskin. Lalu, *mauquf alaih mu'ayyan* adalah penerima manfaat yang terdiri dari hanya sekumpulan orang atau satu orang saja.

Wakaf merupakan aset jangka panjang dan dana abadi, maka golongan *mauquf alaih* sebagai penerima wakaf harus tersasar dengan benar dan tepat. *Mauquf alaih* menerima manfaat dari wakaf uang misalnya, harus tersasar pada komunitas tertentu. Kaum perempuan terutama perempuan berumah tangga, *mauquf alaih mu'ayyan* adalah sasaran komunitas yang harus diberdayakan, dibantu, dan diadvokasi terutama dari komunitas perempuan miskin. Bahkan lebih spesifik lagi, komunitas perempuan di wilayah pedesaan.

Makna Kemiskinan

Saya ingin mengonfirmasi studi yang dilakukan *The International Fund for Agricultural Development* (IFAD) yang mengonsentrasikan diri pada studi negara-negara berkembang yang berkarakteristik negara agraris memperlihatkan, 75 persen kemiskinan ada di wilayah pedesaan (2018). Bahkan secara ekstrem, Todaro (2006) di negara-negara Afrika dan Asia, sekitar 80 persen kelompok miskin bertempat tinggal di pedesaan.

Menurut Todaro, bagian terbesar dari pengeluaran sebagian besar pemerintah negara berkembang selama seperempat abad terakhir justru tercurah ke daerah-daerah perkotaan dan pelbagai sektor ekonominya, yaitu sektor-sektor manufaktur modern dan sektor kemersial.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Secara umum, beberapa data yang mengesahkan alasan di atas. Terlihat, *pertama*, komposisi penduduk pedesaan lebih tinggi dibanding dengan perkotaan. Pada tahun 1980 penduduk perkotaan sebesar 77,6 persen, kemudian menurun menjadi 69,1 persen pada tahun 1990, dan 50,3 persen pada tahun 2015.

Kedua, komposisi penduduk miskin lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan. Pada Maret 2017, angka kemiskinan di desa berjumlah 18,97 juta orang dari 17.220 desa, dan kemiskinan di kota 11,05 juta orang. Sedangkan pada tahun 2020, angka kemiskinan di desa berjumlah 19,93 juta orang, sedangkan di kota berjumlah 11,10 juta orang.

Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT; 2018), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori sangat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori sangat tertinggal.

Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum ada sarana kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Rata-rata keluarga miskin di desa tertinggal adalah 46,44 persen dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46 persen.

Sementara itu, merujuk data dari BPS (2016) dalam Indikator Sosial Perempuan Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat 63,54% penduduk perempuan yang bekerja dalam pekerjaan utama di desa, sementara untuk laki-laki sebesar 61,43%. Selain itu data BPS (2016) juga menunjukkan bahwa perempuan memegang 44,29% kepemilikan usaha mikro di Indonesia (usaha kecil hanya 10,28%). Kendati jumlah ini lebih kecil dibanding kepemilikan laki-laki atas usaha mikro (yaitu 52,21%), diyakini secara riil,

persentase ini jauh lebih besar karena data BPS tersebut didasarkan pada kepemilikan usaha secara formal dan bukan pelaku riil di lapangan.

Sejatinya, permasalahan kemiskinan terutama dalam cakupan studi wilayah pedesaan, sudah cukup banyak diulas. Pendekatannya pun sudah cukup variatif, bahkan tergantung konteks ruang dan waktu permasalahan kemiskinan itu berada. *Food Agriculture Organization* (FAO, 2005), IFAD (2009), Deutsch dan Silber (2005), misalnya, ketika mereka ingin mendefinisikan dan mengukur kondisi kemiskinan, maka mereka membuat kategorisasi, sehingga terjadi distingsi antara kategori. Kategorisasi yang dibuat, yakni pendekatan tradisional, unidimensional, dan multidimensional.

Pada pendekatan tradisional dan unidimensional, hanya mengacu pada satu variabel, seperti pendapatan atau konsumsi, yakni kemiskinan yang diukur seberapa besar pendapatan dan konsumsi individu per hari. Demikian pula pendekatan multidimensional, mereka merujuk teori kapabilitas (*capability*) Amartya Sen (1987) atau studi yang berasal dari konsep *fuzzy set*, yakni perluasan ukuran jumlah dimensi kemiskinan.

Bagaimanapun juga, untuk menangkap fenomena kemiskinan terasa sulit jika menggunakan unit tunggal dalam pengukuran. Dalam kerangka penyusunan implikasi kebijakan yang bersifat jangka panjang sebagai misal, maka pendekatan unidimensional dan multidimensional kerap kali menghadapi pertentangan. Tapi, dalam penyelesaian kebijakan jangka pendek, pendekatan unidimensional lebih relevan, sementara dalam jangka panjang, pendekatan multidimensional bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk mematahkan pelbagai persoalan struktural dan mekanisme reproduksi antargenerasi kemiskinan.

Memang diakui, dalam pendekatan tradisional, pengukuran kemiskinan sering dikritik karena lebih mengandalkan pada ukuran kekurangan keuangan (*lack of financial*). Padahal pendekatan yang lebih modern, yang mengarah pada pendekatan multidimensional, yang berkaitan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, keadaan psikologis, patologi sosial, dan lainnya harus dilakukan untuk memadukan pelbagai aspek,

sehingga mampu memiliki konstruksi teoritik yang utuh dan tepat dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Tidak heran, jika Luzzi, Flückiger, dan Weber (2008) banyak mengkritisi bahwa ukuran keuangan, kerap dijadikan indikator, dan cara mengatasinya pun lebih banyak bersifat *charity*, seperti bantuan keuangan langsung dan pelbagai kebijakan sosial lainnya yang lebih protektif. Aspek kebijakan peningkatan pendapatan minimum, pengangguran atau manfaat perumahan, lebih bersifat *charity*, padahal aspek deprivasi sosial masyarakat miskin masih kurang dikaji.

Menurut laporan *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, FAO (2015), pendekatan unidimensional lebih menitikberatkan pada, misalnya, aspek pendapatan, sementara pendekatan multidimensional menitikberatkan pada, misalnya, pendapatan, kondisi kesehatan, status keluarga, dan lainnya.

Dalam pendekatan *pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai kemiskinan pendapatan, ukuran standar hidup dinilai dari ukuran kesejahteraan ekonomi. Sementara pendekatan *kedua*, konsep kemiskinan lebih dekat dengan kesejahteraan, di mana indikator kesejahteraan lainnya mendukung pendapatan dalam mendefinisikan kemiskinan. Setiap pilihan memerlukan masalah tambahan.

Menghampiri pendekatan multidimensional, pendekatan yang sedikit berbeda dirumuskan oleh UNDP (2007), di mana kemiskinan ditafsirkan sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia (HAM), yaitu hak-hak yang melekat pada setiap orang dan milik sama untuk semua manusia. Menurut UNDP, pendekatan berbasis HAM terhadap pengurangan kemiskinan mengemban prinsip-prinsip universal dan tidak terpisahkan, pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Di sisi lain, UNDP (2007) menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kondisi yang diperlukan (*neccesery condition*) untuk hasil sosial ekonomi. Ini tantangan penanggulangan kemiskinan yang berbasis hak asasi manusia, sehingga dalam batas tertentu, kesempatan

bahwa kemiskinan harus diukur dengan kriteria unidimensional dan multidimensional berdasarkan pendapatan dan/atau tingkat pengeluaran.

Dengan demikian, maka kemiskinan sejatinya tidak memiliki definisi yang ajek, tergantung sudut pandang dari obyek yang ditelaah. Sehingga Sen (1987) menggambarkan, kemiskinan adalah kurangnya "*capability*" (kemampuan) berfungsi dalam suatu masyarakat tertentu. Pelbagai definisi tentang kemiskinan, intinya bermuara sebagai status di mana standar hidup yang layak tidak tercapai (World Bank, 2015).

Dalam kaitan definisi itu, Bellù dan Liberati (2015), FAO (2015) menguraikan bahwa *lack* (kekurangan) ditafsirkan sebagai situasi di mana individu tidak memiliki kemampuan atas sumber daya ekonomi. Sebagai contoh, seorang individu dapat dianggap miskin jika ia tidak memiliki makanan pokok atau tempat tinggal atau, sama, jika dia tidak memiliki penghasilan untuk membeli kebutuhan dasar (*basic needs*). Sementara *inability* (ketidakmampuan) terkait dengan kegagalan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Sejatinya, ujar Sen (1987), individu memiliki ruang "*function*" (fungsi) di mana setiap individu menyadari fungsinya, yakni fungsi ruang yang antara lain, seperti kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan pelengkap (kebebasan, harga diri, inklusi sosial, dan lainnya). Ketidakmampuan untuk mencapai fungsi-fungsi ini membuat individu menjadi miskin. Misalnya, disabilitas yang dialami seseorang tidak hanya mengurangi kemampuan untuk memperoleh pendapatan (yang berarti kurangnya akses terhadap sumber daya), tetapi juga bagaimana mengubah pendapatan menjadi berfungsi.

Selanjutnya, *standard of living* (standar hidup), menurut FAO (2005) tergantung pada: a) suatu standar yang dapat diterima secara sosial oleh suatu masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam masyarakat di mana kebanyakan orang telah memiliki mobil misalnya, maka mereka yang menggunakan angkutan umum dapat dianggap miskin. Demikian juga, mereka yang tidak memiliki TV dalam masyarakat berteknologi

maju, maka mereka ini dijadikan indikator miskin, b) standar ini diukur, yaitu, apa variabel atau himpunan variabel yang digunakan untuk “menangkap” standar hidup. Dalam kaitan itu, langkah-langkah dalam menentukan konsep kemiskinan dapat dilihat dalam table di bawah ini:.

Tabel: Langkah-Langkah Menentukan Konsep Kemiskinan

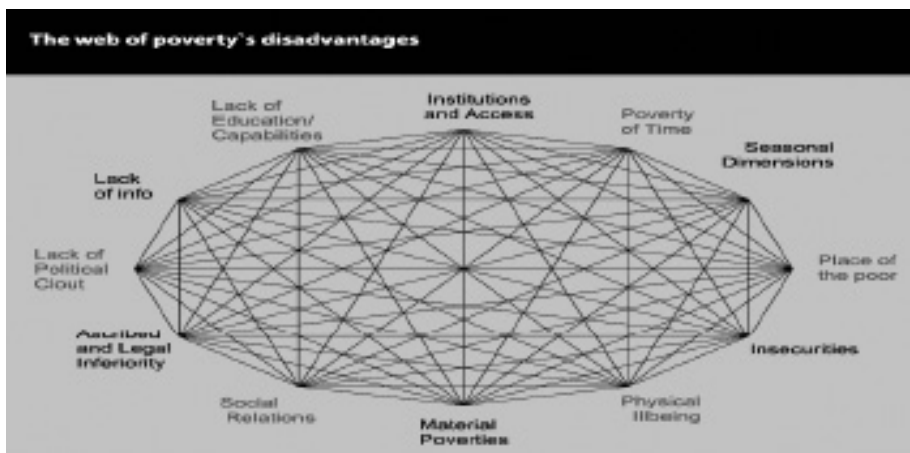
Step	Operational Content
I	Analisis tentang lingkungan di mana kemiskinan itu harus diukur. Kemudian menyesuaikan konsep kemiskinan dengan konteks dengan menggunakan analisis makro variabel sosio-ekonomi yang relevan.
II	Pilih dimensi analisis. Sebuah titik waktu. Waktu yang tepat. Melebihi ruang (kontes) yang ada. Dan mengacu pada hasil step-1
III	Tentukan sumber daya ekonomi yang kurang yang telah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mencapai standar hidup yang dapat diterima. Bagaimana dgn penghasilan? Kepemilikan barang? Dan, memperhatikan hasil step-1
IV	Pilih nilai indikator terbaik yang tercantum dalam Step-2. Tentukan apakah pendekatan harus unidimensional (misalnya pendapatan) atau terkait dengan indikator sosial lainnya (misalnya status kesehatan, tingkat pendidikan, dll).
V	Pilih konsep kemiskinan. Kemiskinan absolut atau relatif? Pertimbangan Step-1.

Sumber: Bellù & Liberati (2005) dan FAO (2005)

Selanjutnya, merujuk program MDGs (*Millenium Development Goals*) dalam rangka pengurangan kemiskinan setidaknya UNDP (2005) telah merumuskan empat kelompk (*cluster*) yang perlu dilihat (Chambers, 2006), yakni: “*Pertama, income-poverty* yang diartikan sebagai tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin yang rendah. *Kedua, material lack or want* yang diarahkan pada makna kurangnya materi. Rendahnya pendapatan ini berimplikasi juga pada rendahnya kualitas asset, seperti tempat tinggal, pakaian, perabot rumah tangga, sarana transportasi, radio atau televisi, dan seterusnya. Tentu hal ini mencakup rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan publik. *Ketiga, capability deprivation*, seperti yang pernah singgung Sen (1989). Hal ini mengacu pada apa yang orang bisa atau tidak bisa dilakukan, tentu termasuk minimnya

kemampuan keterampilan dan kemampuan fisik, dan rendahnya harga diri dalam masyarakat. *Keempat*, berkaitan pandangan multidimensional terhadap apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuarangan materi itu”.

Dalam konteks makna multidimensional itu, maka kemiskinan dapat dilihat dalam gambar 2.1, yang meliputi 12 (dua belas) dimensi yang salah mengait.



Gambar Pandangan Multidimensional Kemiskinan (UNDP (2005))

Dengan konstruksi gambar di atas, kemiskinan pada dasarnya dapat dilihat dalam konteks yang lebih sederhana (sempit) maupun yang lebih kompleks (luas). Dalam konteks sederhana, kemiskinan dapat diuraikan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian konteks lebih luas (multidimensional) seperti yang tercakup dalam gambar di atas, kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap pelbagai hal, dan lain-lain.

Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek non ekonomi masyarakat miskin. Sedikitnya,

menurut UNDP (2005) terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (a) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan perumahan); (b) aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi); (c) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital; (d) rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal; (e) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam; (f) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; (h) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan; (i) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan (j) mengalami ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Sejurus dengan kemiskinan perempuan berkeluarga di pedesaan, riset yang penulis lakukan, dan kemudian dibukukan dalam judul: *Ekonomi Perempuan Dalam Pusaran Ekonomi Pedesaan* (2017) yang membandingkan tiga kawasan (pesisir/nelayan, sekitar kawasan perumahan/industri, dan pertanian) di Kabupaten Tangerang, terpotret dinamika perempuan berkeuarga pedesaan dipengaruhi dinamika kehidupan *bias* perkotaan.

Terjadinya aglomerasi perkotaan, seperti disinggung Markusen (1998) dalam Kuncoro (2002) dan Viladecans-Marsal (2004), di mana terjadi konsentrasi aktivitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi berdekatan. Konsentrasi itu, sejatinya mampu meningkatkan kesejahteraan wilayah-wilayah sekitar tetapi justru telah menggeser nilai-nilai budaya lokal.

Fakta di lapangan terlihat bahwa kehidupan masyarakat pedesaan di kabupaten Tangerang, interaksi sosial secara horizontal awalnya terasa masih guyub. Corak masyarakatnya secara relatif masih ditandai dengan rasa kebersamaan dan keramahtamahan.

Selain itu, kehidupan gotong-royong masyarakat lokal menjadi etos subsistensi yang melahirkan norma-norma moral sosial masyarakat masih terasa. Merujuk Scott (1999), karakteristik masyarakat desa

terutama masyarakat pertanian di tanah air, pada dasarnya menginginkan kedamaian dan hubungan patron-klien paternalistik yang memberi jaminan dan keamanan sosial (*social security*).

Menurut Scott, kondisi ini tidak dapat dipertahankan, *tatkala* masyarakat urban (migran) bergerak membuka aksesibilitas pasar. Dengan demikian, semaraknya pembangunan sentra-sentra perumahan (yang dilengkapi fasos, fasum, dan pusat-pusat perdagangan) dan kawasan industri besar di Kabupaten Tangerang sebagai daerah penyangga ibu kota, meminjam istilah Scott, secara struktural telah menciptakan komersialisasi pasar, yang telah melemahkan hubungan *patron-klien* menjadi hubungan ekonomis (upah/majikan-buruh).

Begitu pula fakta yang saya temukan pada masyarakat pedesaan Kabupaten Tangerang. Aksesibilitas pasar mulai menggeser nilai-nilai keguyuban (*gemeinschaft*) dan menciptakan dekohesivitas sosial (Yunus, 2011). Padahal masyarakat pesisir/nelayan misalnya, yang merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan khas, terkait ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir (Satria, *et al.* 2004). Tentu, masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah, buruh ikan, bahkan pedagang.

Karakteristik masyarakat pesisir secara geografis berbeda dengan karakteristik masyarakat pertanian. Pada segi penghasilan, masyarakat pertanian mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan (Adnyana, *et al.* 2000). Berbeda dengan masyarakat pesisir yang mata pencariannya didominasi nelayan. Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol (Karim, *et al.* 2004 dan Satria, *et al.* 2003).

Kendati subyek studi ini adalah kaum perempuan (berumah-tangga) pedesaan, pada dasarnya karakter sosial dan budaya pada setiap sub

wilayah yang sama tidaklah jauh berbeda. Pada sub wilayah Pakuhaji sebagai sampel wilayah pesisir/nelayan misalnya, karakter sosial budayanya mirip dengan karakter desa di sub wilayah Mauk dan Mekar Baru, yang juga dijadikan sampel wilayah pesisir/nelayan.

Demikian juga pada pengelompokan wilayah di sekitar perumahan dan industri, karakternya juga mirip dengan sampel sub wilayah yang sejenis. Demikian juga, terjadi pada wilayah pertanian berkarakter lahan kering yang banyak berada di wilayah Selatan dari Tangerang, kemiripan pola-pola kehidupan sosial dan budaya tidak jauh berbeda. Pada sub wilayah Cisauk misalnya, sebagai sampel wilayah pertanian, karakter sosial budayanya mirip dengan karakter sub wilayah Panongan dan Tigaraksa.

Dengan demikian, masyarakat wilayah pesisir/nelayan secara umum konstruksi sosial budayanya dibentuk nilai-nilai alam pantai (pesisir) yang lebih terbuka, egaliter, dan agresif (Ginkel, 2007). Pada masyarakat wilayah sekitar perumahan/industri, akibat pengaruh *bias* perkotaan (urban/migran), secara umum konstruksi sosial budayanya dibentuk nilai-nilai perkotaan yang cenderung lebih individualis, mengerjakan sendiri, dan relatif lebih agresif.

Sementara masyarakat wilayah pertanian, terutama area tanah kering, cenderung lebih defensif, kurang agresif, *safety first*, dan egaliter (Lubis, 1992 dan Adnyana, *et al.* 2010).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, ternyata nilai-nilai *bias* gender kurang diperdebatkan dan dirasakan di tingkat rumah tangga anggota di masing-masing wilayah. Bahkan, di tingkat publik, misalnya, dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, perdebatan tentang kesetaraan gender dianggap kurang relevan.

Selanjutnya jika diamati tiga karakter wilayah yang dijadikan obyek studi, terlihat, bahwa pada batas-batas tertentu setiap wilayah memiliki karakter berbeda, sekaligus persamaan dalam proses sosiologis pemberdayaan. Masyarakat pada tiga wilayah itu, terutama kaum perempuan (ibu rumah tangga), memiliki keunikan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing.

Ragam perbedaan itu, jelas bukan saja dibentuk oleh dinamika atau dialektika sosial budaya, tapi juga faktor eksternal berupa kondisi alam, geografis, dan demografis. Faktor alam dan geografis wilayah pesisir/nelayan misalnya, sangat memengaruhi karakter atau perilaku masyarakatnya (Boelaars, 1984 dalam Kusnadi, 2010). Demikian pula, wilayah pertanian dan di sekitar kawasan industri/perumahan memengaruhi cara pandang mereka terhadap dinamika kehidupan itu sendiri (Lubis, 1992 dan Adnyana, *et al.* 2010).

Di sisi lain, pada titik persamaan, seperti yang diuraikan di atas, cara pandang mereka terhadap relasi suami dan istri dalam rumah tangga dianggap bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap. Sehingga optimalisasi potensi yang dimiliki perempuan, seperti yang diungkap dalam riset Fisher dalam Agusni (2008) dan *Asia Development Bank* (ADB, 2001) yang menganggap perempuan sukses memanfaatkan potensi (sumber daya) lokal, lebih berhati-hati, lebih tekun, dan lebih waspada, belum maksimal dimanfaatkan.

Sehingga karakter sejati kaum perempuan dalam konteks teori kesetaraan gender, yang memiliki modal sosial (*social capital*) yang unik dibanding lelaki belum memberikan ruang yang besar kepada mereka. Dalam kaitan ini, peran keuangan mikro —yang dianggap sebagai agen pemberdayaan oleh Rajivan (2003)— yang beroperasi pada tiga wilayah studi tersebut belum optimal melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan sesuai yang diharapkan.

Kendati demikian, riset yang saya lakukan, pengelolaan wakaf uang melalui LKM di pedesaan harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya lokal. Proses pemberdayaan dan karakteristik wilayah yang dilakukan LKM yang saya teliti, tergambar bahwa masing-masing wilayah memiliki keunikan dalam proses pemberdayaan. Kekhasan itu sangat dipengaruhi faktor sosiologis, berupa konstruksi sosial budaya yang tercipta dalam proses dialektika dan dinamika masyarakat yang cukup panjang. Nilai-nilai agama dan norma-norma sosial budaya ikut

berinteraksi sehingga membentuk sudut pandang bagi warga dalam melihat setiap permasalahan yang muncul.

Selain faktor sosiologis (internal) yang membentuk karakter, faktor eksternal juga ikut menentukan. Karakter ibu rumah tangga di wilayah pesisir/nelayan misalnya, yang kehidupannya banyak diliputi oleh ketidakpastian atau ketidakbersahabatnya kondisi alam (geografis) telah membentuk karakter membedakan dengan wilayah-wilayah lain. Karakter lebih agresif, mandiri, spekulatif, konsisten, disiplin, dan lebih tahan banting menjadi karakter khas bagi warga pesisir/nelayan.

Demikian juga, karakter kehidupan ibu rumah tangga pada wilayah masyarakat sekitar kawasan industri/perumahan. Oleh karena kondisi geografisnya berbeda, misalnya, dipenuhi tingkat kepadatan penduduk, variasi latar belakang, tingkat kriminalitas relatif tinggi, dan berhimpitnya dengan sentra-sentra bisnis, karakter individualisme lebih kental. Karakter khas pada wilayah ini adalah, agresif terhadap sumber-sumber daya ekonomi, memiliki banyak pilihan, kepastian usaha relatif lebih baik, dan mobilitas warga sangat tinggi.

Pada karakter kehidupan ibu rumah tangga di wilayah pertanian, kendati pada obyek studi ini telah terjadi proses marjinalisasi kehidupan pertanian beralih menjadi kegiatan non pertanian secara masif, wilayah ini tampaknya tetap memberikan kekhasan. Pada wilayah pertanian ini lebih dominan didiami oleh warga “asli” sehingga karakter *guyub*, menjaga kebersamaan dan keharmonisan, menghindari spekulasi, *safety first*, dan kebutuhan terhadap kepastian hidup, menjadi kekhasan. Dampak kekhasan karakter ini memengaruhi perilaku dalam pemanfaatan fasilitas dari LKM yang beroperasi di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan terkait erat dengan dampak kemandirian. Kemandirian perempuan miskin terkait akses dan kontrol perempuan di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Kemandirian perempuan dan kekuasaan sosial merupakan fungsi dari kemampuan perempuan memperoleh sumber-sumber daya strategis da-

lam rumah tangga dan masyarakat (Mayoux, 1999 dan Kabeer, 2007).

Kemampuan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan fisik tentu akan berbeda-beda dalam setiap lapisan masyarakat. Perempuan memiliki kemampuan akses dan kontrol terhadap sumber daya lebih leluasa pada lapisan masyarakat dengan penguasaan modal dalam bentuk material dan imaterial, pendidikan, keterampilan, pengalaman, ekonomi, sosial. Semakin perempuan dalam ketidakberdayaan, maka kemampuan akses dan kontrol terhadap sumber daya juga menjadi terbatas.

Penguasaan terhadap sumber daya bergantung pada kemampuan individu dan sumber daya pribadi. Derajat kemampuan perempuan dalam kontrol dan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan anak, penghargaan diri sendiri, mobilitas, kebebasan dari kekerasan domestik, kesadaran, dan partisipasi berpolitik dan berekonomi merupakan fungsi kemandirian ibu rumah tangga (Argawala dan Lynch, 2006).

Kontrol dan akses terhadap sumber daya meliputi kesempatan memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ekonomi, sosial, lingkungan. Dampak pada kemandirian perempuan juga dilihat dari kemampuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Keputusan ataupun pilihan pada peran-peran pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, tetapi juga melakukan pengelolaan kegiatan pertanian, peternakan, investasi, perbaikan rumah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemandirian perempuan lebih berarti pada kondisi semakin terdapatnya perluasan bagi ibu rumah tangga mengembangkan kemampuan, kesempatan, dan partisipasi perempuan dalam kontrol dan akses terhadap sumber daya. Kemandirian perempuan berdampak pada kesempatan lebih terbuka memperoleh pendapatan dan menjangkau setiap sumber daya strategis lain yang tersedia di rumah tangga dan lingkungan.

Dalam kaitan itulah, instrumen wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan me-

nafkahi seluruh anggota keluarga, melalui lembaga keuangan mikro (LKM) di pedesaan sangat relevan. LKM ini dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat serta dilakukan dengan prinsip gotong royong atau kebersamaan. Artinya, LKM misalnya koperasi, *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT), dan sejenisnya lebih tepat untuk mengelola wakaf uang tersebut. Tentu LKM yang dimaksud adalah LKM yang memiliki kinerja dan tata kelola organisasi yang baik, laporan keuangan yang akuntabel, dan berprinsip *bottom-up* (kebersamaan).

Dengan demikian, kemandirian perempuan sangat menentukan proses penguatan ekonomi perempuan di pedesaan. Namun, proses penguatan itu tidak semata berjalan secara alami tapi diperlukan kebijakan pemberdayaan dan *affirmative action* (aksi pemihakan) terhadap eksistensi perempuan yang menjadi pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Ujung dari penguatan ekonomi perempuan adalah mengurangi tingkat kemiskinan dengan titik masuk (*entry point*) kaum perempuan berumah tangga. Dalam konteks inilah, wakaf uang melalui LKM menjadi salah satu instrumen ke sasaran langsung, keunikan perempuan sebagai *mauquf alaihi*. Wallahu a'lam. •

Ciputat, 27 September 2022

Daftar Pustaka

- Abu Su'ud Muhammad (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm., h. 20-21).
- Adnyana, M.O., Sumaryanto. M. Rachmat, Kustiari, R. Susilowati, S.H., Supriati, Suryani and Soeprapto. 2000. *Assesing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia*, CASER, Bogor, Indonesia, The World Bank, Washington, D.C. and Biro Pusat Statistik. Berbagai Tahun (2000-2003). Jakarta.
- Agusni, Sulikanti. 2010, Koperasi Wanita dengan Perbankan dalam Penyaluran Kredit Mikro Bagi Usaha Perempuan. *Jurnal Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI*. Jakarta. hlm. 1-11.

- Agarwal, Pankaj., and Sinha, S.K. 2010, Financial Performance of Microfinance Institutions of India: A cross-Sectional Study. *Delhi Business Review*. Vol. 11, No. 2 (July-December 010). Page 37-46.
- Asia Development Bank (ADB). 2003. *Asian Development Bank: Special Evaluation of the Asian Development Fund VI-VII Operations*. Evaluation Report. March 2003. Manila, Philippines.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013, *Nomor Katalog: 4102004. Nomor Publikasi: 07330.1412. ISBN: 0215-4641. Tanggal Rilis: 2014-11-13*
- Badan Pusat Statistik (BPS), Propinsi Banten. 2013. *Laporan Statistik Pripinsi Banten Tahun 2009-2012*, Serang. h. 40-45.
- Bellù. Lorenzo Giovanni, Liberati., and Paolo. 2005. *Impacts of Policies on Poverty The Definition of Poverty*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. EASY Pol . USA.
- Kabeer, N. 2008. *Mainstreaming Gender in Social Protection for the Informal Economy*. London: Commonwealth Secretariat.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Penerbit: UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Laporan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). 2008. Tentang Kategorisasi Desa Maju, Sangat Maju, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. *Kementerian PDPT*, Jakarta.
- Luzzi, G., Flückiger, Y., and Weber, S. 2008. *A Cluster Analysis of Multidimensional Poverty in Switzerland*. Quantitative Approches to Multidimensional Poverty Measurement. pp. 63-79. London: Palgrave-Macmillan.
- Mayoux, L. 1999. Questioning Virtuous Spiral: Micro-Finance and Women's Empowerment in Africa. *Journal of International Development*, Vol. 23.p. 323-334

- Rajivan, Anuradha. 2003. *Microcredit and Women's Empowerment: A Case Study of SML* (SHARE Microfinance Ltd.), United Nations Development Program (UNDP) DRAF, (<http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblizn/casestudy/ofsm1.htm>).
- Rural Poverty Report. 2012. *New Realities, New Challenges: New Opportunities for Tomorrow's Generation*. The International Fund for Agricultural Development (IFAD), Roma, Italia.
- Satria, Arif. 2009. *Laut dan Pesisir untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit: IPB Press. Bogor.
- Scott, D.R. 1993. Veblen not an Institutional Economist. *The American Economic Review*. Vol.23. No.2. June 1933. pp. 274-277.
- Sen, Amartya., and James E. Foster.1987, *On Economic Inequality*. Edisi Expanded (Oxford: Clarendon Press), pp: 165-194.
- Tanjung, Hendri. Tjetjep Suhandi, Widdy Tanzila (2020), *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)*. Al Maal, UMT. Vol 2, No 1 pp. 21-32
- The Asian Development Bank, 2001. SME Constrains and Needs with Special Focus on Gender Issues. *Annual Report*.
- The State of Food and The Agriculture. 2005. *Agricultural trade and poverty Can trade work for the poor?* Rome, 2005. Publishing Management Service Information Division FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.
- The World Bank. 2010. *World Development Report. Prosperity for All. Ending Extreme Poverty*. A Note for The World Bank Group, Spring Meetings 2014, New York: Oxford Universities Press.
- The World Bank, FAO, IFAD, 2009, *Agriculture and Rural Development: Gender in Agriculture Sourcebook*. Washington, DC.
- Todaro, Michael P., and Smith, Stephen, C. 2006. *Economic Development Edition*. Pearson Education Limited, United Kingdom. Haris Muandar (penterjemah). 2006. *Pembangunan Ekonomi*. (edisi terjemahan). Penerbit: Erlangga, Jakarta.

- Viladecans-Marsal, Elisabet. 2004, Agglomeration economies and industrial location: city- level evidence, *Journal of Economic Geography*, Vol. 4, No. 5, © Oxford University Press. 2004, Oxford Review of Economic Policy.
- Yunus, Muhammad, and Alan, Jolis. 1999. *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle against World Poverty*, New York: Public Affair.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Creating World Without Poverty*. (terjemahan: Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan), Penerbit: Gramedia Jakarta. .
- UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU No. 14 Tahun 2002 tentang Wakaf.

4 | MEMBUMIKAN ZAKAT UNTUK KORBAN KEKERASAN

PUSAT Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang telah berjuang keras mengepaskan sayap, menggelar pelbagai kajian dan merentangkan jejaring dengan horizon yang cukup luas. Fokus utama PSIPP, sejatinya meinterkoneksi kajian perempuan sebagai subyek isu dengan isu-isu keislaman dan pembangunan secara universal.

Pada kajian kali ini, PSIPP ITB-AD Jakarta tetap melanjutkan kajian tentang dana zakat dan penyulurannya untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendati demikian, berbeda dengan kajian-kajian zakat sebelumnya, fokus utama pada kajian kali ini berbicara tentang skema kelembagaannya agar zakat betul-betul memiliki nilai kemaslahatan yang konkret. Karena itu, PSIPP menyusun buku Standar Operasional Penerimaan Dana Zakat dan Penyaluran Zakat, terutama dalam perspektif lembaga filantropi di Indonesia.

Pada praktik di lapangan, masih adanya kesenjangan yang cukup jauh antara ibadah sholat dan ibadah zakat. Padahal dua ibadah itu, ibarat koin dengan dua mata sisi. Dalam Islam, diajarkan dan ditekankan untuk beribadah yaitu ibadah yang bersifat *habluminallah wa habluminannas*.

Shalat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Muslim yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dan dikerjakan di 5 (lima) waktu. Zakat yaitu sebagian harta yang dikeluarkan untuk kaum yang berhak menerima (fakir miskin). Zakat berarti membersihkan dan menyucikan diri dari sifat iri dan sombong.

Kedua ibadah ini diwajibkan sebagai umat muslim untuk melaksanakannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan zakat nampaknya masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan shalat. Shalat ternyata jauh diutamakan dibanding zakat. Abdullah bin Masud sahabat yang terkenal penguasaannya atas Al-Qur'an, diriwayatkan pernah berkata, "*Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat maka shalatnya tidak berarti baginya.*"

Artinya, shalat seseorang tidak akan diterima Allah selama ia belum membayar zakatnya. Dengan demikian, shalat dan zakat adalah satu paket yang harus sama-sama dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi segala persyaratannya.

Penjelasan normatif seperti itu, tentu karena zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyyah*. Artinya, zakat di samping merupakan ibadah yang bersifat vertikal (*habluminallah*), juga bersifat horizontal (*habluminanas*). Sebagai ibadah yang bersifat vertikal, zakat termasuk ibadah *mahdhah* yang tidak perlu diperdebatkan. Maka, melihat peluang zakat yang sangat besar tersebut, zakat mestinya tidak hanya ditempatkan pada posisi ibadah *mahdhah* yang bersifat *ta'abbudi*, akan tetapi diletakkan juga pada posisi *muamalah* yang bersifat *ta'aqquli*.

Dengan ditematkannya zakat pada posisi *ta'aqquli*, maka pengembangan dan pendayagunaan zakat akan bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga betul-betul bisa memberikan kemaslahatan dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk manfaat bagi kelompok masyarakat yang tertindas secara struktural dan kultural

Dalam konteks itulah, membumikan zakat untuk berbagai spektrum sosial sangatlah penting. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh

terhadap dinamika atau perubahan sosial. Maka, pemahaman mengenai zakat dari waktu ke waktu harus ditafsir sesuai konteks situasi dan kondisi, termasuk format hingga skema kelembagaan zakat. Kendati demikian, masih ada satu pertanyaan yang perlu didalami lagi.

Karena itu, merujuk ajaran Islam, dikenal ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*), yakni *fakir* (kaum papa), miskin (kaum ekonomi prasejahtera), *amil* (petugas zakat), *mu'alaf* (lemah iman), *gharim* (orang yang tak mampu membayar utang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibnu sabil* (*musafir* yang kekurangan bekal), dan *riqab* (budak). Selain budak, tujuh golongan *mustahik* lain mudah didefinisikan. Tujuh golongan *mustahik* lain dapat diukur berdasarkan kriteria kapasitas finansial.

Dalam forum webinar yang digelar Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, pada Sabtu (6/2/2022), Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, mulai mempertanyakan, bagaimana dengan budak atau *riqab* sebagai gejala ketimpangan kelas sosial, politik dan ekonomi?

Pertanyaan ini perlu dijawab karena zakat punya potensi besar dalam solidaritas finansial sekaligus ekonomi-politik umat Muslim kontemporer. Praktik zakat secara hakiki merupakan tindakan untuk “membersihkan jiwa” sekaligus “mewujudkan keberpihakan dalam menolong kaum yang lemah, demikian juga membantu mereka yang tertindas”.

Dinamika zaman, patut menjadi pertimbangan bagi lembaga amil zakat dalam merumuskan ulang definisi *asnaf* (kelompok penerima zakat). Tujuan utamanya, kata Abdul Mu'ti, agar cakupan zakat lebih banyak menjangkau kelompok yang lemah, termasuk kelompok yang dilemahkan secara struktural.

Dalam kaitan itu, merujuk kembali sejarah Islam, pernah suatu ketika Ibnu Abbas RA sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seseorang menemuinya untuk meminta tolong terhadap suatu keperluan. Ia pun bergegas keluar masjid menghentikan ibadah *iktikaf*nya seraya

berkata, *“Aku mendengar pemilik makam ini, yaitu Rasulullah saw bersabda, ‘Barang siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya dari beriktikaf selama 10 tahun,’”* (HR Thabrani).

Jadi, pembelaan terhadap kaum *mustadl’afin* bukanlah bermaksud untuk mengedepankan ideologi tertentu. Melainkan panggilan batin (*inner call*) untuk dakwah dan terjun langsung dalam usaha mengubah sistem yang terjadi, terutama untuk masyarakat lemah atau tertindas. Dalam Islam disebutkan, *“Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),”* (QS: Al-Qasash: 5)

Dalam ayat ini menceritakan Raja Fir’aun yang semena-mena menindas bani Israil, yang pada masanya adalah orang-orang terpilih, dia mempekerjakan mereka sebagai pekerja kasar (rendahan). Memperbudak mereka sepanjang siang dan malam untuk berkerja dengannya. Lebih dari itu, dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan untuk hidup. Ihwal ini dilakukan untuk menghina mereka dan ketakutan terhadap akan datangnya seorang.

Salah satu komunitas yang seringkali tertindas adalah kaum perempuan, terutama berkaitan kekerasan yang acapkali menimpanya. Kekerasan tampaknya makin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam catatan akhir 2021, Komnas Perempuan melaporkan, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021). Pada 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi pada 2019.

Ada beberapa jenis KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian Komnas Perempuan pada 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta ke-

kerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Di samping itu, data pada 2021 juga menunjukkan, perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami kekerasan, yakni sebanyak 22 kasus dan diikuti perempuan dengan disabilitas ganda sebanyak 13 kasus. Data tersebut tidak berbeda dengan 2020, yakni kelompok tertinggi yang dilaporkan mengalami kekerasan adalah golongan perempuan dengan disabilitas intelektual.

Perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi yang berlapis sebagai perempuan dan sekaligus sebagai disabilitas, kondisi ini membuat perempuan dengan disabilitas tidak mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang baik, bahkan banyak dari mereka yang disembunyikan oleh keluarganya.

Dilaporkan lagi, bahwa selama lima tahun terakhir, terkonfirmasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Di beberapa kasus di daerah, juga terjadi peningkatan kekerasan. Di kota Ambon, berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sejak 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 13 kasus, 2018; 34 kasus, 2019; 40 kasus, 2020; 55 Kasus, 2021; 59 kasus, dan hingga Mei 2022; 21 kasus.

Jumlah kasus tersebut untuk kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemerkosaan, penganiayaan, hingga pencemaran nama baik. Sementara untuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak, lanjutnya, pada 2017 berjumlah 21 kasus, 2018; 28 kasus, 2019; 85 kasus, 2020; 60 kasus, 2021; 90 dan 2022; 38 kasus.

Dari data di kota Ambon tersebut kekerasan seksual persetubuhan anak menempati urutan pertama, kemudian pencabulan, kekerasan, kasus ITE, sampai *bully* atau perudungan. Untuk faktor penyebab meningkatnya

kasus tersebut perlu kajian khusus, namun ditengarai faktor ekonomi turut berpengaruh, apalagi di era pandemi.

Selanjutnya, laporan kasus dari Yogyakarta, juga setali tiga uang. Disampaikan, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan. Selama 2021, berdasarkan data Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Provinsi DIY, terdapat 817 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mayoritas kasus KDRT.

Selain kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belakangan juga semakin marak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Namun, ada yang menarik dari Yogyakarta, bahwa salah satu indikator yang harus dicapai adalah menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan pada usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir pada 2021.

Namun, jika dilihat dari angka kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan aduan dalam *Simfoni* PPA, diketahui, DIY merupakan provinsi dengan angka rate kasus tertinggi ke-2 di Indonesia dengan angka 49,02 per 100.000 perempuan. Sementara itu berdasarkan data dari DP3AP2 Provinsi DIY, diketahui jumlah pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Provinsi DIY terus mengalami penurunan hingga 2021.

Paralel dengan peningkatan kekerasan terhadap perempuan, untuk kekerasan terhadap anak juga masih tinggi. Tercatat, setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (*Simfoni*) sepanjang tahun 2021. Kementerian PPPA menyebutkan, dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus.

Kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang sama, Kementerian PPPA juga mencatat ada 8.478 kasus kekerasan ter-

hadap perempuan pada 2021 di mana 15 persen di antaranya atau 1.272 kasus, merupakan kasus kekerasan seksual.

Bertitik tolak dengan data kekerasan itu, maka perlu advokasi dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam konteks ini, pemahaman zakat yang dikontekstualisasi terhadap situasi dan kondisi, seperti yang disarankan Abdul Mu'ti menjadi relevan untuk dikaji mendalam dan komprehensif dengan melibatkan pelbagai pemangku kepentingan.

Kemudian, saya teringat ucapakn Allah SwT berfiman, *"Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan"* (QS. al-Anfal: 72). Artinya, urusan pembelaan dan pemberdayaan kaum tertindas atau dilemahkan merupakan pengejawantahan panggilan iman, panggilan keislaman, dan panggilan kedamaian. Zakat sebagai panggilan, harus difungsionalkan untuk merealisasi panggilan-panggilan itu.

Dalam konteks ini, zakat berarti *inna shalataka sakanun*. Zakat itu harus memberikan ketenangan dalam kehidupan sosial karena tidak ada kesenjangan yang begitu mencolok antara orang kaya dan miskin, atau antara yang berkuasa dan tanpa kuasa. Zakat menjadi skema filantropi dalam mengerem diskriminasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, teringat ucapan Syamsul Anwar, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa urengsi fikih zakat kontemporer perlu dibumikan. Sejumlah prinsip-prinsip universal yang bersumber dari nilai dasar teologis, moral, dan yuridis, di antaranya: pertama, harta tidak boleh terkonsentrasi pada seseorang. Dalam artian harta harus terus mengalir tidak boleh hanya berputar pada poros kelas atas.

Prinsip universal ini merupakan turunan dari nilai solidaritas dan keadilan distributif-terkoreksi yang terdapat dalam nilai-nilai dasar di atas. Bisa juga turunan dari nilai kemaslahatan. Dari prinsip universal ini memiliki konsekuensi untuk tidak boleh ada penumpukan harta keka-

yaan. Dalam QS. Al-Hasyr: 7, Allah melarang aliran harta hanya beredar di antara segelintir orang kaya saja. Sementara dalam QS. Ali 'Imran: 180 dan QS. At-Taubah: 34-35 Allah mengancam bagi siapa pun yang menimbun harta dengan ancaman api neraka.

Kedua, pada harta setiap orang terdapat hak orang lain. Prinsip universal ini merupakan turunan dari nilai solidaritas. *Ketiga*, wajib mengeluarkan sebagian harta berbentuk: zakat dan infak wajib. Selain zakat yang harus dibayarkan, ada juga infak wajib yang harus ditunaikan. Contoh: seseorang yang terkena infak wajib adalah nasabah lembaga keuangan yang menunda-nunda melunasi utangnya dengan sengaja padahal mampu membayar (agar tidak terkena wajib zakat), maka orang tersebut dihukum dengan sebuah kewajiban yang lain, yaitu infak. Jadi, penundaannya dalam melunasi utang sehingga diwajibkan membayar infak bukan dipandang sebagai denda, sebab dalam prinsip utang-piutang denda itu tidak boleh.

Keempat, pengeluaran zakat berlandaskan prinsip: (a) harta yang dikenai zakat harus harta kekayaan yang berkembang. Sifat dari harta yang dizakati itu harus berkembang, atau yang bisa tumbuh, bukan harta yang mandek. Seperti sapi, kelapa, rumah yang dikontrakkan, dan lain-lain. (b) harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan. Hal tersebut terkait dengan zakat profesi. Dan, (c) aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat.

Berdasarkan urgensi dana zakat bagi kekerasan perempuan dan anak, saya teringat kembali teologi *Al-Ma'un*, yang menjadi pijakan PSIPP ITB Ahmad Dahlan mengintroduksi konsep TABF (Teologi *Al-Ma'un* Berperspektif Feminisme). Teologi ini didasarkan pada surah *Al-Ma'un*, yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam. Surah ini pendek, hanya tujuh ayat. Tapi, secara impresif maknanya sangat menggetarkan jiwa, tidak sekadar menjadi bacaan di kala shalat *fardhu*, melainkan juga memberikan inspirasi melahirkan sebuah kesadaran kolektif: kesadaran atas realitas sosial yang timpang, termasuk soal ke-

kerasan terhadap perempuan dan anak.

Surah Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan: Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Diksi yang digunakan oleh Al-Qur'an terasa sangat menohok: "pendusta agama". Siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Qur'an dengan ungkapan "pendusta agama" itu?

Tatkala menafsirkan surah Al-Ma'un (QS: 107) secara berulang-ulang tanpa diteruskan dengan surah-surah lain, Kiyai Ahmad Dahlan, sang pendiri gerakan Muhammadiyah, sejatinya ingin menguji kepekaan batin para muridnya dalam memahami Al-Qur'an, apakah sekadar untuk dibaca atau langsung diamalkan. Para murid itu paham, Al-Qur'an tidak saja menyangkut dimensi kognitif, tetapi juga sebagai pedoman bagi aksi sosial. Aksi pemberdayaan, aksi advokasi, dan aksis afirmatif. Diktum inilah yang mengonfirmasi mengapa pembelaan terhadap korban kekerasan harus dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen ajaran Islam, semacam perintah zakat.

Dalam konteks inilah, konsep TABF bukan hanya membantu perempuan kepala keluarga *dhuafa*, tetapi mengubah paradigma masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi bagi *dhuafa*. Inilah perbedaan signifikan pemberdayaan ekonomi berbasis Teologi *Al-Ma'un* Berperspektif Feminisme dengan pemberdayaan lainnya, bahwa yang dibantu adalah perempuan kepala keluarga miskin, yang rata-rata mereka adalah korban KDRT, dan bila berhasil mereka akan membantu yang lain (korban lainnya) melalui zakat, sehingga jaring laba-laba dan lingkaran dukungan semakin kuat bagi perempuan kepala keluarga dan korban. •

Ciputat, 22 September 2022

5 | KOPERASI PEREMPUAN

BADAN Pusat Statistik (BPS) melansir, PDB sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada triwulan I 2021 mencatat pertumbuhan positif, 3,64 persen. Dalam konteks sektor kegiatan sosial itu, banyak fakta dan studi menjustifikasi, bahwa perilaku solidaritas sosial pada masa pandemi Covid-19, justru makin meningkat.

Laporan teranyar *World Giving Index* (WGI) yang dipublikasikan *Charities Aid Foundation* (CAF) pada 14 Juni 2021 menegaskan kembali komponen solidaritas sosial itu, Indonesia tetap sebagai negara paling dermawan di dunia. Skor nya mencapai 69 persen, terdongkrak signifikan dari skor sebelumnya, 59 persen. Ada tiga indikator dinilai. Indonesia memiliki skor tertinggi pada dua indikator, yaitu menyumbang uang dengan nilai 83 persen dan meluangkan waktu mengikuti aktivitas kesukarelawanan dengan nilai 60 persen.

Ini mengirim pesan, perilaku kedermawanan sebagai ekspresi rasa kekeluargaan atau jiwa gotong royong di masyarakat, ternyata belum luruh. Bahkan, di tengah pandemi di mana 69,5 persen masyarakat mengalami tekanan pendapatan, justru masyarakat tetap semangat berderma dan saling membantu. Hampir 8 dari 10 responden mengaku rutin berderma (LazisMu, 1/7/2021).

Spirit Koperasi

Modal sosial utama koperasi adalah saling membantu, berempati, dan saling bergotong royong. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal atau uang. Koperasi bukan semata-mata mau melipatgandakan uang atau kapitalisasi modal, tetapi kebersamaan. Karakter khas koperasi adalah kolegalisme dan kolektivisme.

Tak heran jika Bung Hatta dalam *Demokrasi Kita* (1966) menyebut, demokrasi dalam bidang ekonomi tergambar "...semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Kejakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakyat".

Dengan dasar kekeluargaan, sejatinya peran perempuan sebagai "penjaga gawang" rumah tangga bisa lebih optimal. Meminjam survei *International Labor Organization* (ILO) dan *International Cooperative Alliance* (ICA) (2017) menunjukkan, 75 persen responden merasakan partisipasi perempuan dalam berkoperasi bergerak naik dalam rentang 20 tahun terakhir. Koperasi oleh 80 persen respondennya, dianggap lebih baik dibandingkan organisasi bisnis perseorangan ataupun bisnis publik dalam meningkatkan kesetaraan gender.

Bagaimana dengan di Indonesia? Laporan Pembangunan Manusia yang disampaikan UNDP 2017, yang dilansir 22 Maret 2017, menegaskan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia antara laki-laki dan perempuan. Indeks kaum perempuan hanya bertengger 0,660, tertinggal dibandingkan laki-laki sebesar 0,712.

Problem kesetaraan adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Perempuan tertinggal dalam rerata lama sekolah, jumlah yang tamat pendidikan menengah, pendapatan nasional per kapita, dan partisipasi kerja. Kesenjangan pendapatan dan partisipasi kerja antara lelaki dan perempuan adalah paling mencolok.

Kesenjangan adalah produk diskriminasi, di mana perlakuan ketidakadilan selalu dirawat dalam setiap kebijakan publik dan domestik. Terlepas

faktor mentalitas kebudayaan masyarakat yang pernah disinggung Koen-tjaraningrat (1974) dan Soemardjan (1982), sejatinya kesenjangan sosial, termasuk kesenjangan pendapatan laki-laki dan perempuan, lebih dilatari adanya hambatan struktural, kurangnya ruang memanfaatkan etalase kesempatan. Bagi Breman (1985), kaum miskin “jalan ke atas acapkali dirintangi”, sedangkan “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui.”

Banyak studi yang membedah persoalan kemiskinan, dan ternyata posisi terawat berada di tangan kaum perempuan. Muhammad Yunus (pemenang Nobel 2009) menyampaikan, kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan, ibulah yang pertama mengalaminya. Ibu rumah tangga juga akan menderita pengalaman traumatis karena tidak mampu menyusui bayinya selama masa kelaparan dan paceklik.

Studi Kabeer (2008) di Bangladesh dan Pakistan menunjukkan, dalam konteks pemberian pinjaman koperasi kepada laki-laki, cenderung meneruskan bahkan memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Artinya, kebijakan itu menguatkan posisi laki-laki dengan memberi mereka sumber daya di mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat aktivitas perolehan pendapatan.

Dalam faktanya, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (termasuk beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan, bahkan merendahkan kaum perempuan, meski bagi kaum perempuan di kalangan berada. Dibanding dengan laki-laki, kaum perempuan acapkali kurang menyadari dan menggali potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Hal ini disebabkan, ketidakadilan gender telah menjadi penghambat mengakses sumberdaya keuangan yang diperlukan (Kabeer, 2008; Mahmud, 2003).

Koperasi Perempuan

Riset yang penulis lakukan di wilayah Banten (2015-2017) mengaitkan

antara keuangan mikro dan kaum perempuan pedesaan, mengonfirmasi bahwa keuangan mikro yang dimotori koperasi berbasis perempuan memiliki fleksibilitas dalam menjangkau nasabah pedesaan, dibanding lembaga keuangan lainnya.

Salah satunya adalah memanfaatkan modal sosial berbasis pendekatan kelompok (tanggung renteng) – mirip arisan – sebagai pengganti *collateral*. Studi penulis mengkategorisasikan nasabah perempuan dengan laki-laki.

Terdapat bukti, kaum perempuan lebih memanfaatkan pinjaman dan tanggungjawab yang baik, didukung tingkat pengembalian pinjaman lebih taat dan disiplin dibanding laki-laki. Bahkan, terungkap fakta, tingkat NPL (*Non Performing Loan*) perempuan mendekati angka 0%.

Demikian pula, pada studi yang lain, misalnya merujuk riset Rajivan (2015), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan di Indonesia mencapai sebesar 98 persen, sementara program lain yang ber-target group laki-laki persentasenya hanya 82 persen. Koperasi yang melayani jenis usaha kecil dan jenis usaha yang tidak menentu (informal), ternyata dapat menekan “biaya tinggi” dalam pelayanan.

Dengan demikian, perempuan yang selalu bersahabat dengan kesulitan ekonomi, dengan tetap bekerja keras tanpa mengeluh, kendati harus menguras hampir seluruh waktu dan energi mereka.

Perempuan miskin belum sepenuhnya dapat melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi yang tersedia. Keberadaan koperasi berbasis perempuan, yang selalu bersentuhan masyarakat paling miskin di antara yang miskin, bisa memberi peluang menguatkan kemandirian ekonomi perempuan, terutama pada masa pandemi ini.

Kemandirian ekonomi perempuan di rumah tangga, bukan berarti perempuan memutuskan segala sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga lain. Kemandirian memiliki makna, bahwa perempuan miskin tidak menggantungkan ekonomi rumah tangga hanya kepada suami. Perempuan ikut bekerja semata-mata membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan koperasi perempuan akan menguatkan partisipasi perempuan di ranah publik tanpa menanggalkan fungsi-fungsi sebagai kaum perempuan. •

Dimuat Harian Kompas, 12 Juli 2021

6 | ROKOK, KEMISKINAN DAN PEREMPUAN

SETIAP 31 Mei dikenal gerakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Gerakan ini diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 1987. Secara imperatif, menyerukan agar para perokok berpuasa merokok (mengisap tembakau) selama 24 jam, serentak di seluruh dunia. Bagi WHO, peringatan ini bertujuan, menarik perhatian publik terkait beranak-pinaknya kebiasaan merokok dan efek buruknya terhadap kesehatan. Mengonfirmasi WHO (2018) diestimasi, kebiasaan merokok setiap tahunnya memantik kematian 7,2 juta jiwa.

Indonesia, salah satu negara produsen tembakau dan “surga” konsumen rokok terbesar yang belum meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), yang berupa kesepakatan global pengendalian tembakau di masing-masing negara. Padahal, fakta miris menyebutkan, kelompok anak-anak dan remaja cukup banyak terpapar rokok.

Menukil studi Sekolah Kajian Strategik dan Global Pusat Kajian Jaminan Nasional Universitas Indonesia, ada 33,03 persen pemuda usia 18-24 tahun menjadi perokok aktif, disusul usia 39 tahun sebanyak 41,75 persen. Sementara perokok paling aktif berada pada usia 25-38 tahun dengan 44,75 persen.

Bahkan, data Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018, menyebutkan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun naik dari 7,2 persen (2013) menjadi 9,1 persen (2018). Padahal janji RPJMN 2019-2024, menargetkan perokok anak harus turun menjadi 8,7 persen pada 2024. Maka, jika pola dan kebiasaan ini diteruskan, hampir bisa dipastikan 10 tahun ke depan, usia anak-anak dan remaja, presentase perokok aktifnya akan lebih dominan, dan tentu mengancam nasib bonus demografi.

Kemiskinan

Terdapat fakta dalam pelbagai studi relasi rokok dan kemiskinan, bahwa terjadi surplus ekonomi masyarakat kelas bawah bergeser menjadi surplus ekonomi pemilik modal (industri rokok). Dalam pendekatan teori strukturalis, Andre Gunder Frank (1978) menyebut *disarticulated socio-economic structure* di mana masyarakat miskin (perokok, buruh industri, dan buruh tembakau) berkontribusi signifikan mendongkrak surplus profitabilitas industri rokok besar. Ihwal ini tidak jauh berbeda dengan sistem *cultuurstelsel* (tanam paksa) zaman VOC di Hindia Belanda.

Justifikasi historis seperti itu telah mengonfirmasi fakta-fakta teranyar. *Pertama*, harga rokok di Indonesia termasuk salah satu negara termurah setelah Nigeria, Kazakhstan, Pakistan, Vietnam, Armenia, Paraguay, dan Ghana (2021). Sementara komposisi perokok di dunia, 80 persen adalah negara-negara miskin dan berkembang.

Di antara negara-negara tersebut, Indonesia dan Timor Leste meraih predikat pertama atau *baby smoker countries* jumlah pria perokok di atas 15 tahun. Merujuk data *The Tobacco Atlas* (2018), ada 66 persen pria di Indonesia adalah perokok. Artinya, dua dari tiga pria usia di atas 15 tahun adalah perokok.

Kedua, merujuk hasil riset Lembaga Studi Demografi UI, banyak rumah tangga termiskin atau berpenghasilan rendah di Indonesia terperangkap konsumsi rokok; sebanyak tujuh dari sepuluh rumah tangga (hampir 70 persen) memiliki pengeluaran membeli rokok. Sedangkan, enam dari sepuluh rumah

tangga termiskin (57 persen) memiliki pengeluaran membeli rokok.

Ketiga, hasil Survei Sosial Ekonomi BPS (2021), merujuk data alokasi belanja rokok yang dikeluarkan masyarakat telah melampaui besaran belanja beras. Rokok masih menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Rata-rata pengeluaran rokok dan tembakau sebesar Rp 76.583 perkapita per bulan pada Maret 2021. Konsumsi rokok tersebut terkerek 4,3 persen dari Rp 73.442 per kapita per bulan pada Maret 2020. Selain itu, pengeluaran rokok merupakan yang kedua tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya.

Keempat, meminjam data kemiskinan BPS (September 2022), mengungkapkan kontribusi rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan di kota sebesar 11,10 persen per September 2022. Sementara itu, di desa, sumbangannya 10,48 persen. Data ini berbicara, orang dikategorikan miskin banyak yang mengonsumsi rokok. Namun, bukan berarti orang kaya tidak merokok tetapi bagi mereka share pengeluaran rokok ini sangatlah kecil dibandingkan pengeluaran barang mewah lainnya karena kurangnya *inelastis demand*.

Kontras fakta miris itu, kinerja tiga pemain besar industri rokok di Tanah Air, yakni: PT Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Djarum terdongkrak signifikan. PT HM Sampoerna Tbk misalnya, dalam laporan keuangan 2022 menorehkan laba kotor Rp 17,16 triliun dan penjualan bersih Rp 111,21 triliun atau naik 12,48 persen. Sejak dibeli *Philip Morris International* pada 2005, Sampoerna Tbk menunjukkan rerata pertumbuhan laba bersih per tahun hingga 13 persen.

Demikian juga PT Gudang Garam Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 2,77 triliun (2022) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5,60 triliun. Selanjutnya, PT Djarum, melalui anak-anak perusahaannya makin agresif menjadi pemain di pelbagai sektor bisnis seperti *e-commerce*, properti, media, hingga sektor perkebunan/pertanian.

Buruh Perempuan

Dalam proses produksi tembakau dan rokok, kontribusi perempuan me-

mainkan peran penting. Meminjam riset *World Bank* (2018), sebaran wilayah dalam hal penyediaan lapangan kerja di pabrikaan tembakau 94 persen terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Lebih spesifik, terdapat beberapa daerah yang mayoritas menggantungkan serapan tenaga kerja di IHT (Industri Hasil Tembakau) seperti Kudus (30 persen), Temanggung (27,6 persen) dan Kediri (26 persen). Mayoritas pekerja yang ada di IHT ini, perempuan berusia muda, terutama untuk produksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Menukil riset Ratna Saptari (2020) dengan mengambil kasus buruh perempuan pabrik rokok HM Sampoerna (Surabaya dan Jombang), ditemukan pabrik rokok lebih banyak mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki. Alasan, pekerja laki-laki banyak terlibat di serikat buruh dan kerap melakukan aksi mogok kerja sehingga dianggap dapat menghambat proses produksi.

Dalam industri ini, para buruh dituntut untuk mengikuti suatu standar kerja yang mengharuskan mereka untuk memproduksi rokok sesuai target. Bahkan, rerata buruh perempuan bekerja 12 jam dengan rincian 7 jam bekerja disektor publik sebagai buruh pabrik dan 5 jam bekerja di sektor domestik, sehingga jam kerja perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki.

Bahkan, merujuk laporan Kebijakan Penelitian Bank Dunia (2015), pada umumnya di beberapa Negara berkembang, jam kerja perhari perempuan lebih lama 1 jam atau lebih daripada laki-laki. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, para buruh pabrik rokok bekerja 12 jam perhari dan suaminya bekerja 10 jam perharinya.

Padahal dalam konvensi ILO Nomor 100, menunjukkan, upah yang dimaksud tidak hanya upah pokok saja, tetapi juga tunjangan untuk kesejahteraan lainnya yang diberikan perusahaan kepada pekerja perempuan. Dalam praktiknya, jika buruh perempuan yang sejatinya memperoleh tunjangan kesejahteraan, kenyataannya ditiadakan, seperti tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan bagi suami dan anaknya.

Dalam perspektif gender, pemberian upah yang rendah bagi pekerja perempuan disebabkan perempuan diposisikan sebagai pekerja yang bersedia diberi upah rendah. Dianggap, bukan penghasil utama dan hanya merupakan pencari nafkah kedua (komplementer). Selain itu, adanya anggapan, buruh perempuan mudah diatur dan rendah daya resistensinya (Uli, 2005).

Kondisi diskriminasi perempuan sebagai buruh industri rokok dan tembakau makin menjustifikasi bahwa perempuan di ranah publik (industri) masih menjadi obyek eksploitatif dari rezim pemilik modal besar. Padahal perempuan, terutama ibu rumah tangga berkeluarga dibebani tiga fungsi simultan (*triple burden of women*), yakni harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat (Sadli, et al. 2008).

Secara nasional, merujuk data resmi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2019) menyebutkan kondisi perempuan sebagai pekerja keluarga merupakan gambaran dari keadaan riil ketenagakerjaan di Indonesia. Kaum perempuan berumur 15 tahun ke atas, umumnya memiliki kegiatan mengurus rumah tangga (36,43 persen), dan membantu menambah penghasilan dengan ikut bekerja membantu kepala rumah tangga sebagai “Pekerja Keluarga”. Dalam Profil Perempuan Indonesia (2019), persentase perempuan berstatus pekerja keluarga mencapai 33,30 persen, sedangkan laki-laki cukup kecil, hanya 7,70 persen..

Kaum perempuan identik dengan kemiskinan. Banyaknya buruh perempuan di industri rokok atau buruh tembakau, menandakan sejatinya, buruh perempuan dan masyarakat miskin perokok, justru memberikan sumbangsih sangat besar terhadap keuntungan super jumbo yang diperoleh pemilik modal raksasa industri rokok.

Ketidakadilan seperti itu harus diakhiri, dengan cara naikkan harga rokok, tingkatkan literasi pengendalian tembakau dan rokok, buat ekosistem hidup sehat tanpa asap rokok, serta *political will* dan konsistensi pemerintah untuk menyelamatkan bonus demografi kita. •

Dimuat Harian Kompas, 3 Juni 2023

7 | KETIDAKADILAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN

DALAM membedah kemiskinan, stratum terawat sesungguhnya berada di tangan kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan perempuan. Meruyaknya kasus kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, *trafficking*, dan kekerasan lainnya, secara tidak langsung diatributkan pada kemiskinan perempuan.

Ironisnya, di bidang ekonomi, kaum perempuan yang jumlahnya 52,7 persen dari total populasi penduduk dunia, ternyata hanya memiliki seperseribu dari jumlah kekayaan dunia, dan hanya menerima 10 persen dari total gaji (World Bank, 2020).

Yunus, pemenang Nobel 2009 menyampaikan, tidak mungkin bicara kemiskinan jika tidak melibatkan perempuan. Yunus melihat, perempuan peminjam lebih produktif menggunakan uangnya daripada suami. Kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan lebih hebat dari laki-laki. Jika ada anggota kerluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan, ibulah yang pertama-tama akan mengalaminya.

Memang, perempuan menjadi korban kemiskinan yang paling besar.

Data World Bank (2020) melaporkan, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70%-nya adalah perempuan. Di Indonesia (BPS, 2020), dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan.

Karena itu, topik utama untuk mereduksi tingkat kemiskinan perempuan, yakni pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan sejatinya adalah aksesibilitas. Amartya Sen (1981) menyatakan, kemiskinan terjadi akibat *capability deprivation* (kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang).

Ketidakbebasan masyarakat yang substansif itu berkaitan langsung dengan kemiskinan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses. Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Pada masa pandemi Covid-19 yang bergulir sejak awal 2020, perempuan riskan mengalami pelbagai masalah, mulai dari *triple burden of women* (Sadli, 2008; Asmorowati, 2005). Kehilangan mata pencarian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, pandemi juga membuka akses bagi perempuan berkontribusi memerangi Covid-19 dan mendukung perekonomian yang dapat dimulai dari tingkat keluarga.

Merujuk survei “*Women Count*” dari UN Women dan The United Nations (UN) Covid-19 dalam judul: “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, melaporkan bagaimana Covid-19 mengekspos kerentanan perempuan (*vulnerability of women*) terhadap turbulensi ekonomi dan memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada di Indonesia sejak sebelum pandemi.

Beberapa temuan menarik dari laporan ini di antaranya; *Pertama*, perempuan di Indonesia banyak bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82 persen dari mereka mengalami penurunan dalam sumber pendapatan.

Kendati 80 persen laki-laki juga mengalami penurunan serupa, fakta membuktikan bahwa laki-laki mendapatkan keuntungan dari sumber pendapatan yang lebih luas.

Kedua, sejak pandemi, 36 persen perempuan, dibandingkan 30 persen laki-laki pekerja informal, harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka. *Ketiga*, pembatasan sosial membuat pekerjaan rumah tangga tak berbayar menjadi layanan dasar penting, tetapi perempuan memikul beban terberat: 69 persen perempuan dan 61 persen laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga tak berbayar. Demikian pula, 61 persen menghabiskan lebih banyak waktu untuk kerja pengasuhan tak berbayar, dibandingkan 48 persen laki-laki.

Oleh karena itu, tatkala perempuan diijinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan dan dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, maka kaum perempuan bukan saja lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi, melainkan juga berumur panjang.

Semakin banyak perempuan punya kendali terhadap pendapatan rumah tangga, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, semakin banyak perempuan masuk sekolah menengah, semakin besar pula keuntungan untuk anak-anak mereka, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan terkait erat dengan dampak kemandirian. Kemandirian perempuan miskin terkait akses dan kontrol perempuan di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Dalam kaitan itu, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mengaitkan dengan program *financial inclusion* (inklusi keuangan) yakni berikan porsi pembiayaan lebih besar kepada nasabah perempuan dalam proses pemberdayaan.

Inklusi keuangan tentu berbasis ekonomi digital. Digitalisasi dapat menjadi sebuah solusi. Merujuk studi Lestariningsih et al (2017) bahwa peningkatan 10 persen akses internet terhadap perempuan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,51 persen.

Peningkatan ini lebih besar dibandingkan dengan pria, yaitu 0,43 persen. Jika digerakkan secara efektif, usaha mendigitalisasi pelaku usaha mikro perempuan juga dapat berkontribusi meningkatkan angkatan kerja perempuan dan selanjutnya memperkecil indeks ketimpangan gender di Tanah Air.

Mengonfirmasi studi UNDP (2020), partisipasi perempuan dan laki-laki pada angkatan kerja Indonesia masih timpang, 82 persen laki-laki dan 53 persen perempuan di atas usia 15 tahun pada 2019. Digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjadi salah satu cara efektif agar pelaku usaha ultramikro dan mikro tetap dapat menjalankan usahanya. Menurut survei BPS pada 2020, empat dari lima pengusaha yang memasarkan produknya secara daring mengalami peningkatan penjualan.

Bukti ini diperkuat oleh laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) yang menyatakan, terdapat peningkatan konsumen digital sebanyak 37 persen akibat pandemi. Karena itu, sejatinya baik Pemerintah, sektor privat, organisasi kemasyarakatan (Ormas), hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melaksanakan program-program pemberdayaan ini untuk memudahkan transformasi digital usaha ultramikro dan mikro secara masif dan terukur.

Sejak dikeluarkan regulasi tentang bank nirkantor yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif, OJK mulai merangsek jauh ke pelosok desa. Bank nirkantor adalah transformasi pelayanan konvensional bank di kantor-kantor menjadi pelayanan di agen-agen. Namun, jauh sebelumnya, hasrat untuk mengefektifkan keuangan inklusif mendapat momentum.

Pemicunya, *Pertama*, secara eksternal, adanya kesepakatan G-20 Pittsburgh Summit 2009, di mana anggota G-20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok *in the bottom of the pyramid*. Ada 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pe-

ngembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut, *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework*.

Kedua, secara internal, mengonfirmasi data Bank Indonesia (2018), rakyat kita yang berhubungan dengan bank masih rendah, yakni sekitar 48% dengan layanan perbankan yang masih terpusat di Jawa. Sementara, hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, Tiongkok 64%, India 35%, dan Filipina 25%.

Demikian pula pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat belum signifikan dengan pangsa kredit sekitar 20% atau Rp 612 triliun. Konsekuensinya, *Deposit to GDP ratio* masih di bawah 50% dan *Loan to GDP ratio* masih kisaran 35%, jeblok di bawah rerata di kawasan Asia Pasifik.

Rendahnya tingkat literasi lembaga keuangan formal pada kelompok perempuan pada level *in the bottom of the pyramid* tentu bukan tanpa alasan. Alasan klasikalnya, mereka tidak memiliki kolateral, bank lebih familiar membiayai usaha berskala besar, dan prosedur permohonan pembiayaan yang *rigid*. Konsekuensinya, solusi ditempuh rakyat kecil dan kaum perempuan rentan, meminjam pada individu atau lembaga non-keuangan ilegal, dengan pelbagai risiko, yakni pengenaan bunga mencekik. •

Disampaikan dalam Diskusi, BEM ITB-AD Jakarta, 12 Juni 2018.

8 | PEREMPUAN DAN KEUANGAN INKLUSIF

GERAKAN kebangkitan perempuan di Tanah Air kerap disimbolisasikan dengan peringatan lahirnya Raden Ajeng Kartini, pada 21 April 1879. Simbolisasi ini telah menginspirasi dan mengemansipasi gerakan perempuan hingga saat ini dalam melawan ketidakadilan, diskriminasi, pembodohan, dan keterbelakangan. Namun, gerakan yang dilakukan oleh pelbagai kelompok yang *concern* dalam proses pemberdayaan perempuan, hingga saat ini pun belum memetik hasil yang maksimal.

Bahkan dari sisi jumlah kemiskinan saja, kisaran 70,21 persen dari jumlah penduduk miskin (BPS, 2015) yang mencapai 28,59 juta jiwa (11,22), adalah kaum perempuan. Kemiskinan yang menimpa perempuan, dilatari banyak faktor. Angka buta aksara perempuan sebesar 12,28 persen, sedangkan lelaki 5,84 persen. Dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama. Angka Kematian Ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup.

Selain itu, rerata gaji (upah) perempuan pun selalu tertinggal dibandingkan lelaki. Keadaan yang sama juga terlihat pada rerata gaji (upah) berdasarkan tingkat pendidikan tercermin dari perbandingan upah perempuan dan lelaki.

Rasio upah yang kurang dari 100 pada setiap jenjang pendidikan. Perbedaan yang mencolok terpapar pada tingkat pendidikan tidak tamat SD, di mana rasio upah adalah 61,97 yang berarti, besarnya upah (gaji) bersih perempuan dibanding lelaki adalah 61,97 berbanding 100 (BPS RI - Sakernas Februari 2015).

Data ini mengonfirmasi bahwa posisi perempuan belum beringsut jauh, masih tertinggal, terbelakang, dan termiskin. Salah satu persoalan utamanya adalah aksesibilitas. Maka, dengan adanya kebijakan keuangan inklusif yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014, setidaknya peluang perempuan ke sumber daya ekonomi, terutama pada lembaga keuangan semakin terbuka lebar.

Artinya, OJK dalam operasionalisasi kebijakannya jangan sampai *bias* gender dalam memperlakukan nasabah, terutama di masyarakat miskin perdesaan.

Keuangan Inklusif

Sejak dikeluarkan regulasi tentang bank nirkantor yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif, OJK mulai merangsek jauh ke pelosok desa. Bank nirkantor adalah transformasi pelayanan konvensional bank di kantor-kantor menjadi pelayanan di agen-agen. Namun, jauh sebelumnya, hasrat untuk mengejawantahkan keuangan inklusif mendapat momentum.

Pemicunya, *pertama*, secara eksternal, adanya kesepakatan G-20 Pittsburgh *Summit* 2009, di mana anggota G-20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok *in the bottom of the pyramid*. Ada 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut, *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework*.

Kedua, secara internal, mengonfirmasi data Bank Indonesia (2014), rakyat kita yang berhubungan dengan bank masih rendah, yakni sekitar

48% dengan layanan perbankan yang masih terpusat di Jawa. Sementara, hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, Tiongkok 64%, India 35%, dan Filipina 25%.

Demikian pula pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat belum signifikan dengan pangsa kredit sekitar 20% atau Rp612 triliun. Konsekuensinya, *Deposit to GDP ratio* masih di bawah 50% dan *Loan to GDP ratio* masih kisaran 35%, jeblok di bawah rerata di kawasan Asia Pasifik.

Rendahnya tingkat literasi lembaga keuangan formal pada kelompok perempuan pada level *in the bottom of the pyramid* tentu bukan tanpa alasan. Alasan klasikalnya, mereka tidak memiliki kolateral, bank lebih familiar membiayai usaha berskala besar, dan prosedur permohonan pembiayaan yang *rigid*. Konsekuensinya, solusi ditempuh rakyat kecil dan kaum perempuan rentan, meminjam pada individu atau lembaga non-keuangan ilegal, dengan pelbagai risiko, yakni pengenaan bunga mencekik.

Selain itu, lembaga keuangan formal kerap gagap memahami karakteristik atau kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat. Padahal banyak lembaga keuangan lokal yang telah bersemayam hidup bersama rakyat, perlu diajak bekerjasama dan diberdayakan dalam memanfaatkan *financial inclusion*.

Memang dalam UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah mengakomodir aturan hukum adat. Sehingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat sebagai lembaga keuangan produk kearifan lokal misalnya, tentu tidak harus tunduk pada UU LKM karena eksistensinya telah diakui berdasarkan hukum adat itu. Sayangnya, kedua LKM lokal itu kurang mendapat *supporting* kerjasama dan mediasi dari pihak pemerintah.

Aksesibilitas

Topik utama pemberdayaan perempuan sejatinya adalah aksesibilitas.

Seperti yang diutarakan Amartya Sen (1981), kemiskinan terjadi akibat *capability deprivation* (kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang). Ketidakbebasan masyarakat yang substansif itu berkaitan langsung dengan kemiskinan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan diakibatkan keterbatasan akses.

Jika manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, akibatnya manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Dalam banyak studi diuraikan, adanya relasi antara program pemberdayaan perempuan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Jika program penguatan perempuan ini optimal bergerak, diasumsikan lebih dari separuh program pengentasan kemiskinan dianggap sukses.

Laporan riset *World Bank Group in Women, Business and the Law 2016* yang disampaikan Mulyani (2015), bahwa pada era 1990-an, hanya sedikit negara yang punya aturan hukum melindungi perempuan dari kekerasan. Namun, pada 2014, jumlahnya mencapai 127 negara, yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran terhadap biaya ekonomi dan manusiawi yang harus ditanggung akibat salah memperlakukan perempuan.

Tatkala perempuan diizinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan dan tatkala mereka dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, kaum perempuan bukan saja lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi, melainkan juga berumur panjang. Semakin banyak perempuan punya kendali terhadap pendapatan rumah tangga, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, semakin banyak perempuan masuk sekolah menengah, semakin besar pula keuntungan untuk anak-anak mereka, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan terkait erat dengan dampak kemandirian. Kemandirian perempuan miskin terkait akses dan kontrol perempuan di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Dalam kaitan itu, yang perlu dipertimbangkan dalam membangun *financial in-*

clusion, yakni berikan porsi lebih besar kepada nasabah perempuan dalam proses pemberdayaan. Model *financial inclusion* seperti ini akan mampu memacu pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan kebiasaan menabung, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan tingkat monetisasi di masyarakat lokal. •

Terbit Koran SINDO, 21 April 2016.

9 | PEREMPUAN DAN KEUANGAN MIKRO

KENDATI sudah lebih satu abad buku kumpulan surat Kartini yang terajut dalam “Habis Gelap Tertbitlah Terang” (*Door Duisternis Tot Licht, 1911*) dirilis, nasib kaum perempuan tetap saja dirundung problem, yang nyaris tak beringsut.

Cahaya yang dipancarkan oleh sosok Kartini, lambat-lambat makin redup. Laporan Pembangunan Manusia yang disampaikan UNDP 2016, yang dilansir akhir Maret 2017, kembali meneguhkan ihwal itu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2015 untuk perempuan hanya 0,660, tertinggal dibandingkan laki-laki sebesar 0,712.

Masalah kesetaraan adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Perempuan tertinggal dalam rata-rata lama sekolah, jumlah yang tamat pendidikan menengah, pendapatan nasional per kapita, dan partisipasi kerja. Kesenjangan pendapatan dan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan adalah paling mencolok.

Sejatinya, kesenjangan adalah produk diskriminasi, di mana perlakuan ketidakadilan selalu diawetkan dalam setiap kebijakan publik dan domestik. Kesenjangan merupakan *sub-altern* dalam istilah Antonio Gramsci (1983) di mana perempuan selalu ditempatkan sebagai subordinat

oleh kelompok yang berkuasa.

Maka, kesenjangan sosial, termasuk kesenjangan pendapatan laki-laki dan perempuan lebih dilatari adanya hambatan struktural yang membatasi, kurang memberi ruang memanfaatkan etalase kesempatan tersedia.

Biang Kemiskinan

Dalam pelbagai studi membedah persoalan kemiskinan, posisi tergawat berada di tangan kaum perempuan. Bahkan, Muhammad Yunus (pemenang Nobel 2009), kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan, ibulah yang pertama mengalaminya. Ibu rumah tangga juga akan menderita pengalaman traumatis karena tidak mampu menyusui bayinya selama masa kelaparan dan *paceklik*.

Bagaimana dengan posisi laki-laki? Studi Kabeer (2008) di Bangladesh dan Pakistan menunjukkan, dalam konteks pemberian pinjaman (kredit) kepada laki-laki, cenderung meneruskan bahkan memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga (domestik). Artinya, kebijakan itu menguatkan posisi laki-laki dengan memberi mereka sumber daya di mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat aktivitas perolehan pendapatan.

Dalam faktanya, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (termasuk beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan, bahkan merendahkan kaum perempuan, meski bagi para perempuan di kalangan berada. Dibanding dengan laki-laki, kaum perempuan acapkali kurang menyadari dan menggali potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Hal ini disebabkan, ketidakadilan gender telah menjadi penghambat mengakses sumberdaya yang diperlukan (Kabeer, 2008; Mahmud, 2003).

Di sinilah kredit mikro perempuan berperan mengarahkan sumber

daya keuangan. Dengan pengelolaan kredit mikro oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkinerja sehat (*financial sustainability*) dan menjangkau seluruh strata masyarakat (*outreach*), program kredit mikro dapat menjadi dasar bagi para perempuan menghadapi pelbagai ketidakadilan gender.

Tentu, selain sehat dan menjangkau, LKM harus mampu melakukan proses pemberdayaan, yakni mencakup proses *enabling* (kemampuan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang, *empowering* (kemampuan menguatkan potensi atau daya yang dimiliki perempuan), dan *advocation* (kemampuan melakukan perlindungan dan pemihakan kepada perempuan di perdesaan).

Keuangan Mikro

Riset yang penulis lakukan di kabupaten Tangerang (2015-2016) yang mengaitkan antara keuangan mikro dan kaum perempuan perdesaan, mengonfirmasi bahwa keuangan mikro yang dimotori LKM memiliki fleksibilitas dalam menjangkau nasabah perdesaan, dibanding lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah memanfaatkan modal sosial (*social capital*) berbasis pendekatan kelompok masyarakat sebagai pengganti *collateral*.

Studi penulis mengategorisasikan nasabah perempuan dengan laki-laki. Terdapat bukti, nasabah perempuan lebih memanfaatkan pinjaman dengan baik, yang didukung tingkat pengembalian pinjaman lebih disiplin dibanding nasabah laki-laki. Hanya kelemahannya, nasabah perempuan kurang memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan.

Demikian pula, tingkat pengembalian program-program mikro kredit bertargetkan perempuan, rata-rata mencapai di atas 98,8 persen. Merujuk riset Rajivan (2003), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan di Indonesia mencapai sebesar 95 persen, sementara program lain yang bertarget group laki-laki persentasenya hanya 82 persen. Institusi keuangan mikro yang melayani jenis usaha kecil dan jenis

usaha yang tidak menentu (pedagang kaki lima), ternyata dapat menekan “biaya tinggi” dalam pelayanan.

Kesulitan ekonomi yang diterima perempuan miskin, dengan tetap bekerja keras tanpa mengeluh, kendati harus menguras hampir seluruh waktu dan energi mereka. Perempuan miskin belum sepenuhnya dapat melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang tersedia.

Kemandirian di rumah tangga, bukan berarti perempuan miskin memutuskan segala sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga lain. Kemandirian memiliki makna, bahwa perempuan miskin tidak menggantungkan ekonomi rumah tangga hanya kepada suami. Perempuan miskin ikut bekerja semata-mata membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun demikian, tingkat kemandirian keuangan LKM yang dijadikan studi kasus oleh penulis, ternyata belum berpengaruh signifikan menaikkan tingkat kesejahteraan anggota. Ihwal ini dilatari, *pertama*, tingkat pinjaman, pendapatan, dan pengeluaran anggota relatif rendah. *Kedua*, kapasitas institusi LKM yang membuat aturan, prosedur, dan mekanisme yang ketat membuat keleluasaan anggota menjadi terbatas.

Sehingga, anggota LKM sangat berhati-hati dalam meningkatkan kapasitas usahanya dan lebih memilih usaha yang risiko rendah.

Oleh karena itu, keuangan mikro yang diharapkan kaum perempuan dalam meningkatkan kapasitas dirinya adalah keuangan mikro yang dikelola dengan menyeimbangkan pendekatan *welfarist* (kesejahteraan dan *institutionalist* (kelembagaan), yakni selain mampu meningkatkan kesejahteraan anggota yang paling miskin, juga secara kelembagaan, LKM harus sehat dan mandiri. Bekerja efektifnya LKM seperti itu di perdesaan, secara otomatis mampu mereduksi kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, perempuan semakin terberdayakan dalam ruang publik. Akhirnya, spirit Hari Kartini makin terwujud. •

Koran SINDO, 23 April 2018.

10 | AISYIYAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

SANGAT menarik tema yang diangkat Tanwir 'Aisyiyah di Surabaya pada 19-21 Januari 2018, yakni "Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pilar Kemakmuran Bangsa". Tema ini sangat relevan, setidaknya terlihat dari mulai maraknya gerakan-gerakan ekonomi berbasis komunitas. Gerakan ini yang jika tidak diorganisir dengan kelembagaan dan jejaring yang apik, maka bukan tidak mungkin hanya sekadar euforia. Melalui Tanwir ini, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di bawah payung Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, ingin menghentakkan kesadaran kolektif bangsa, bahwa modalitas yang dimiliki perempuan bisa menjadi fundamen dan pilar membangun ekonomi. Lantas, modalitas apa yang dimiliki perempuan?

Dalam studi Dasgupta, Partha dan Ismail Saralgedin (2000) berjudul: *Social Capital-A Multifaceted Perspective*, (Washington, DC: World Bank), perempuan memiliki modal sosial (*social capital*) yang kuat akan memantik pertumbuhan pelbagai sektor ekonomi.

Modal sosial mengejawantah dalam bentuk kohesifitas sosial, semangat gotong-royong, tolong-menolong, rasa dan semangat saling memberi (*reciprocity*), *trust* (rasa saling percaya) dan jejaring sosial (*social networking*).

Modalitas ini menjadi energi dalam membangun keberlanjutan usaha dan bertahannya kekuatan ekonomi suatu masyarakat, terutama ekonomi keluarga.

Modalitas ini yang membuat banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di pelbagai pelosok dunia, melirik kekuatan ekonomi perempuan tersebut. Studi Mayoux (1999), misalnya, yang mengelaborasi peranan LKM dan pemberdayaan perempuan di beberapa wilayah Afrika (Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Kenya, dan Uganda), dengan Sudan sebagai acuan (*benchmark*) dalam pemberdayaan perempuan penerima kredit mikro.

Mayoux mengemukakan, asumsi utama pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan merupakan inti dari keluarga. Penurunan jumlah kemiskinan perempuan, secara otomatis menurunkan jumlah kemiskinan. Dengan pendekatan studi kasus, program kredit mikro di beberapa negara yang dijadikan sampel di Afrika, secara nyata memberi kontribusi mengubah tatanan gender.

Oleh karena perempuan lebih ditekankan dalam akses kredit mikro, secara otomatis, kegiatan ekonomi perempuan berkembang jauh lebih besar (Tundui & Mgonja, 2010; Ifelunini & Wosowe, 2013).

Merawat Gerakan

Salah satu contoh autentik sosok perempuan 'Aisyiyah yang mampu merawat perjuangan dalam tiga fungsi simultan (fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat) dapat dibaca dalam *White Papers* yang dikeluarkan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia pada Kamis (23/11/2017). Salah satu yang mencuat adalah aktivis perempuan, bernama Syamsiah.

Syamsiah, aktivis 'Aisyiyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Setidaknya untuk wilayah kampung Kaili, Bonto Lebang, Kabupaten Bantaeng. Syamsiah bergerak melalui Balai Sakinah 'Aisyiyah, yang menceburkan

diri secara aktif dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

Dengan perjuangannya keluar-masuk perkampungan (desa) dalam mengedukasi kaum ibu, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jejak perjuangan aktivis Aisyiyah itu, tertuang dalam *White Papers* DFAT (2017).

White Papers adalah dokumen internasional yang komprehensif tentang kebijakan luar negeri Australia selama 14 tahun terakhir dengan isu pemberdayaan kaum ibu sebagai salah satu prioritas utama. Syamsiah dianggap sebagai sosok ibu yang gigih melakukan pemberdayaan dan mampu menyadarkan kaum perempuan, yang didasarkan pada potensi dan modalitas sosial yang dimiliki perempuan itu sendiri.

Perjuangan Syamsiah tentu tidak lepas dari tempaan organisasi 'Aisyiyah. Sebagai organisasi yang berdiri sejak 19 Mei 1917, yang memiliki perhatian khusus memajukan agama, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial kepada masyarakat umum, organisasi ini menekankan pada peningkatan kualitas hidup perempuan agar dapat mencapai sebuah keluarga sakinah dan *qaryah thayyibah*.

Kekuatan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan terletak pada gerakannya di tingkat akar rumput dan melalui amal usaha, yang meliputi antara lain 13 ribu amal usaha pendidikan anak usia dini, amal usaha pendidikan dasar dan menengah; 13 pendidikan tinggi; 568 koperasi; 1.029 Bina Usaha Ekonomi Keluarga; dan amal usaha di bidang kesehatan yang dikelola Muhammadiyah-'Aisyiyah berupa 87 Rumah Sakit Umum, 16 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 70 Rumah Sakit Bersalin, 106 Balai Pengobatan, 20 Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), 76 BKIA, 105 Rumah Bersalin, serta Posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan potensi itu, sejumlah lembaga donor internasional menawarkan kerjasama dengan 'Aisyiyah di antaranya adalah *Asia Foundation*, *UNICEF*, *Global Fund for Children*, *Family Health International*, *John Hopkins*

University, dan *Advance Family Planning*. Selain itu, juga bekerjasama dengan pemerintah, misalnya dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk promosi kontrasepsi non-hormonal dan program kesehatan reproduksi, Kementerian Kesehatan RI berkaitan program perilaku hidup yang bersih dan higienis, Program Desa Siaga, dan program kesehatan reproduksi.

Dengan program yang terstruktur dan terlembaga seperti itu, tidak mengherankan jika 'Aisyiyah sebagai perkumpulan kaum ibu telah mengukir prestasi, terutama dalam membangun basis kader dan gerakan.

Namun, dalam bidang gerakan pemberdayaan ekonomi, gerakan 'Aisyiyah masih minim kontribusinya jika dibanding beberapa organisasi perempuan yang berbasis gerakan ekonomi. Padahal empat pilar konsentrasi yang telah dicanangkan 'Aisyiyah, yakni bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada faktanya, empat konsentrasi itu masih berjalan pincang dan belum berjalan simultan.

Pemberdayaan Ekonomi

Gerakan 'Aisyiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial, hanya bisa tegak dan berkesinambungan jika ditopang kemandirian gerakan ekonomi. Oleh karena itu, gerakan ekonomi 'Aisyiyah harus berorientasi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi anggota.

Pada aspek penguatan kelembagaan, harus dipastikan bahwa kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan ekonomi, menekankan pada aspek organisasi, mekanisme, kepemimpinan, nilai, norma, dan aturan-aturan formal dan informal yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan, banyak studi membuktikan, lembaga keuangan mikro (LKM) mampu memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Contoh fenomenal yakni praktik penyelenggaraan pemberian kredit mikro bagi masyarakat miskin yang dilakukan Muhammad Yunus dengan institusi *Grameen Bank* (GB) di Bangladesh.

GB secara signifikan mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin

di pelbagai wilayah perdesaan. Seperti diungkap Parveen (2009), GB telah memberi kredit ke hampir 7 (tujuh) juta orang miskin di 73.000 desa Bangladesh, 97 persen di antaranya ibu rumah tangga (perempuan).

Dalam konteks itulah, gerakan ekonomi 'Aisyiyah harus mandiri dan mampu memandirikan ibu-ibu rumah tangga. Namun, kemandirian ekonomi kaum ibu, bukan berarti kaum ibu memutuskan segala sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga lain. Kemandirian memiliki makna, bahwa kaum ibu tidak menggantungkan ekonomi rumah tangga hanya kepada suami. Perempuan ikut bekerja semata-mata membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga. •

Terbit Koran SINDO, 18 Januari 2018.

11 | GERAKAN EKONOMI PEREMPUAN

TANWIR ‘Aisyiyah di Surabaya yang digelar pada 19-21 Januari 2018, kali ini mengangkat tema menarik, yakni: “Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pilar Kemakmuran Bangsa”. Tema ini memberikan aksentuasi, bahwa dalam mewujudkan kemakmuran suatu bangsa titik awalnya harus dimulai dengan penguatan gerakan ekonomi perempuan, terutama ekonomi keluarga. Kuatnya gerakan ekonomi perempuan akan memantik “efek berganda” pertumbuhan pelbagai sektor ekonomi lainnya di masyarakat.

Kontras dengan harapan itu, Laporan Pembangunan Manusia yang dipublikasikan UNDP (2017) mengungkap hal lain tentang fakta sosial kaum perempuan. Dilaporkan, kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2016 antara laki-laki dan perempuan. Indeks kaum perempuan sebesar 0,66, tertinggal dibandingkan laki-laki sebesar 0,712. Perempuan tertinggal dalam rata-rata lama sekolah, jumlah yang tamat pendidikan menengah, pendapatan nasional per kapita, dan partisipasi kerja. Kesenjangan pendapatan dan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan, yang paling mencolok.

Mengurai Kesenjangan

Kesenjangan acapkali merupakan produk diskriminasi, di mana

perlakuan ketidakadilan selalu dirawat dalam setiap kebijakan publik dan domestik. Terlepas faktor mentalitas kebudayaan masyarakat yang pernah disinggung Koentjaraningrat (1974) dan Soemardjan (1982), sejatinya kesenjangan sosial, termasuk kesenjangan pendapatan laki-laki dan perempuan, lebih dilatari adanya hambatan struktural, yakni kurangnya ruang yang diberikan dalam memanfaatkan peluang tersedia. Bagi Breman (1985), kaum miskin “jalan ke atas acap kali dirintangi,” sedangkan “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”.

Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan bisa direduksi dengan tindakan kesengajaan (*affirmative action*). Selama ini, banyak studi yang membedah persoalan kemiskinan, dan ternyata posisi terburuk berada di tangan kaum perempuan.

Muhammad Yunus (pemenang Nobel Perdamaian 2009) menyampaikan, kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan, ibulah yang pertama mengalaminya. Ibu rumah tangga juga akan menderita pengalaman traumatis karena tidak mampu menyusui bayinya selama masa kelaparan dan *paceklik*.

Bagaimana dengan laki-laki? Studi Kabeer (2008) di Bangladesh dan Pakistan menunjukkan, dalam konteks pemberian pinjaman (kredit) kepada laki-laki, cenderung meneruskan bahkan memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga (domestik). Artinya, kebijakan itu menguatkan posisi laki-laki dengan memberi mereka sumber daya di mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat aktivitas perolehan pendapatan.

Faktanya, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (termasuk beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan, bahkan merendahkan kaum perempuan, meski bagi para perempuan di kalangan kaum berada. Dibanding dengan laki-laki, kaum perempuan acapkali kurang menyadari dan menggali potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Hal ini disebabkan, ketidakadilan gender telah menjadi

penghambat mengakses sumberdaya yang diperlukan (Kabeer, 2008; Mahmud, 2003).

Urgensi Kredit Mikro

Banyak studi membuktikan, bahwa kebijakan *affirmative action* dengan model kredit mikro bagi kaum perempuan, berperan mengarahkan sumber daya keuangan. Dengan pengelolaan kredit mikro oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkinerja sehat (*financial sustainability*) dan menjangkau seluruh strata masyarakat (*outreach*), program kredit mikro dapat menjadi dasar bagi para perempuan menghadapi pelbagai ketidakadilan gender. Tentu, selain sehat dan menjangkau, LKM harus mampu melakukan proses pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan, merujuk Friedman (1992), meliputi tiga hal pokok, yakni: proses *enabling* (kemampuan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang), *empowering* (kemampuan menguatkan potensi atau daya yang dimiliki perempuan), dan *advocation* (kemampuan melakukan perlindungan dan pemihakan kepada perempuan di perdesaan).

Dalam studi yang dilakukan penulis, yang mengambil kasus kabupaten Tangerang (2015-2016) mengaitkan antara keuangan mikro dan kaum perempuan perdesaan, mengonfirmasi bahwa keuangan mikro yang dimotori LKM memiliki fleksibilitas dalam menjangkau nasabah miskin perdesaan, dibanding lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah memanfaatkan modal sosial (*social capital*) berbasis pendekatan kelompok masyarakat (tanggungan renteng) sebagai pengganti *collateral*.

Dalam studi itu mengategorisasikan nasabah (anggota) perempuan dengan laki-laki. Terdapat bukti, kaum perempuan lebih memanfaatkan pinjaman dengan baik, yang didukung tingkat pengembalian pinjaman yang lebih tinggi dan disiplin dibanding nasabah laki-laki. Bahkan, fakta juga menunjukkan bahwa tingkat NPL (*nonperformingloan*) anggota perempuan mendekati angka nol persen. Hanya kelemahannya, nasabah perempuan

kurang memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Demikian pula, pada studi yang lain, misalnya merujuk riset Rajivan (2003), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan di Indonesia mencapai sebesar 98 persen, sementara program lain yang bertarget group laki-laki persentasenya hanya 82 persen. Institusi keuangan mikro yang melayani jenis usaha kecil dan jenis usaha yang tidak menentu (pedagang kaki lima), ternyata dapat menekan “biaya tinggi” dalam pelayanan.

Dalam konteks itulah, peranan keuangan mikro selain membuka aksesibilitas permodalan dalam skala yang kecil terutama bagi perempuan miskin, juga mampu menguatkan dan memandirikan kaum perempuan. Dalam kaitan itu, gerakan ekonomi ‘Aisyiyah tidak semata bersifat *inward looking*, yang melihat hanya anggotanya saja. Tapi juga harus melihat fakta sosial kemiskinan di sekitarnya.

Salah satu tugas utama Aisyiyah, melakukan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan secara menyeluruh sehingga perempuan, terutama yang berada pada level yang rentan dan miskin kembali harus mandiri dengan memanfaatkan modal sosial (*social capital*) yang perempuan miliki.

Modal sosial yang dimiliki perempuan, seperti studi Dasgupta, Partha dan Ismail Saralgedin (2000), mengejawantah dalam bentuk kohesifitas sosial, semangat gotong royong, tolong menolong, rasa dan semangat saling memberi (*reciprocity*), *trust* (rasa saling percaya) dan jejaring sosial (*social networking*).

Namun, perlu diingat, kemandirian ekonomi perempuan yang dimaksud, bukan berarti kaum perempuan (ibu rumah tangga) memutuskan segala sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga lain. Kemandirian memiliki makna, bahwa kaum ibu tidak menggantungkan ekonomi rumahtangga hanya kepada suami. Perempuan ikut bekerja semata-mata membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. •

Terbit: Republika, 19 Januari 2018.

12 | MUDIK DAN FEMINISASI PEKERJA MIGRAN

PROSESI mudik di Indonesia menjadi ritual tahunan umat Islam berskala masif. Diestimasi pada 2023 ini, hasil survei Potensi Pergerakan Nasional Masyarakat yang dilakukan Kementerian Perhubungan RI, proyeksi jumlah pemudik mencapai 45,8 persen atau 123,8 juta orang. Artinya, hampir separuh penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

Bahkan, Bank Indonesia (2023) menyiapkan Rp195 triliun selama Lebaran 2023. Nilai ini tumbuh 8,22 persen dari 2022. Tentu, jumlah ini lebih banyak mengalir ke daerah atau desa-desa lewat aktivitas mudik warga dan proses transfer menjelang Lebaran. Belum lagi dana remitansi atau jumlah uang yang dibawa pulang para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, pada 2019 sebagai puncak jumlah remitansi sebelum masuk pandemi Covid-19, nilainya sebesar Rp 158 triliun kemudian 2021 hanya Rp97 triliun. Dengan nilai sebesar itu, kontribusi pekerja migran perempuan 69,25 persen (2019) dan 87,92 persen pada 2021. BPS (2020) mencatat, jika remitansi itu dikonversi dalam proporsi PDB 2019, mencapai angka tertinggi dalam empat tahun (2015–2019), dengan nominal setara 1 persen PDB.

Dengan nilai sebesar itu, tampaknya belum optimal menggerakkan ekonomi desa. Pemudik cenderung memanfaatkan uang mereka untuk keperluan konsumtif. Ini karena minimnya sektor usaha dan literasi usaha yang bisa dikembangkan di desa. Lantas, bagaimana mengoptimalkan puluhan triliun rupiah itu untuk menggerakkan ekonomi perdesaan dalam jangka singkat?

Feminisasi Pekerja Migran

Bekerja di luar negeri adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Maka, bagi siapa pun, termasuk kaum perempuan memiliki akses yang besar dalam bekerja di manapun dan kapanpun. Dengan dasar itu, merujuk World Migration Report 2020, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki.

Timgginya jumlah pekerja migran perempuan, memunculkan feminisasi migran (feminization of migration). Dalam *The Female Face of Migration, Background Paper*, CARITAS Internationalis. feminisasi migrasi dapat dipandang sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya, mobilitas perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia, seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah.

Merujuk studi Atnike Nova Sigiro (*Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020), tingginya feminisasi migrasi dapat dilihat dari meningkatnya permintaan terhadap jenis pekerjaan feminin atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks di Negara penempatan.

Konsep feminisasi migrasi ini amat penting untuk mendapatkan gambaran wajah migrasi yang terjenderisasi. Konsep ini mengekspresikan, kontribusi perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus

migrasi tenaga kerja, sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan di desa melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya.

Dalam faktanya, feminisasi pekerja migran di Negara penempatan tidak berjalan mulus. Cukup banyak rintihan dan tangis pilu dihadapi oleh kaum perempuan, Oleh karena banyak migran perempuan yang bekerja di sektor domestik, tentu bersentuhan langsung dengan majikan, maka mereka dianggap relasi subordinat.

Konsekuensinya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi, human trafficking, dan bentuk kekerasan di negara-negara penempatan. Kasus-kasus ini masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran.

Di dalam negeri, perempuan pekerja migran juga menghadapi dilema. Komitmen relasi keluarga, terutama dengan suami dan atau anak-anak yang ditinggal di kampung halaman, tidak sepenuhnya berjalan lancar. Banyak bukti kecurangan suami atau istri dalam kaitan pengelolaan kiriman dana, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula relasi dengan anaknya. Kasus teranyar yang terjadi pada Sabtu (15/4/2023), peristiwa berdarah di Dusun Krajan, Desa Urek-urek, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur (TribunJatim, 16/4/2023).

Sunarsih (48), yang baru saja pulang dari Hongkong dan telah bekerja hampir 28 tahun sebagai asisten rumah tangga (ART), tewas mengenaskan, di tangan putra semata wayangnya, David Humaidi (28). David ditinggal ibunya bekerja migran, sejak masih berumur 36 hari dan diasuh neneknya, yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Padahal Sunarsih rutin mengirim uang ke David dan neneknya untuk kebutuhan hidupnya. Hanya karena soal sepele, David menusuk ibunya.

Feminisasi pekerja migran menyisahkan cerita suka dan duka. Terlepas itu semua, bagaimana hasil remitansi dari perempuan pekerja migran itu bisa dimanfaatkan optimal untuk keluarga dan desanya, terutama purna migran. Tidak satu pun perempuan yang ingin berlama-lama bekerja di

Negara penempatan, dengan meninggalkan sanak keluarganya. Suatu saat, hati kecil mereka akan terpanggil pulang. Maka, program seperti Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Migrant CARE dan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan program strategis bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka.

Perempuan dan Desa

Merujuk program Desbumi dan Desmigratif itu, model pelembagaan dana-dana desa yang berasal dari dana pekerja migran yang ratusan triliun jumlahnya, harus segera diarsenkan dengan melibatkan program pemberdayaan perempuan. Model yang lebih sederhana, bagaimana dana-dana itu dilembagakan dalam bentuk lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis kearifan lokal, seperti koperasi, BMT, dan sejenis. Mengapa mesti melibatkan program pemberdayaan perempuan?

Studi Mayoux (2009), yang mengelaborasi peranan LKM dan pemberdayaan perempuan di beberapa wilayah Afrika (Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Kenya, dan Uganda), dengan Sudan sebagai benchmark, pemberdayaan ekonomi perempuan penerima kredit mikro. Mayoux mengemukakan, perempuan merupakan inti dari keluarga. Penurunan jumlah kemiskinan perempuan, secara otomatis menurunkan jumlah kemiskinan di desa.

Dengan demikian, perlunya kesadaran bahwa menggerakkan ekonomi desa, partisipasi kaum perempuan menjadi prioritas. Melalui sistem pembagian saham, iuran atau model crowdfunding melalui basis aplikasi, setiap pemudik bisa menyetorkan saham untuk kepentingan usaha LKM. Dana yang terkumpul inilah yang sejatinya bisa menstimuli dan memobilisir dana untuk investasi riil dan layak untuk berbagai kebutuhan produktif masyarakat desa.

Untuk itu, dibutuhkan peran aparat desa dan tokoh-tokoh kharismatik untuk menjadi pelopor mengkoordinasi pemanfaatan maksimal dana-dana mudik, terutama hasil remitansi itu, dengan aransemen kelembagaan ekonomi desa yang produktif dan diintegrasikan dengan program BUMDes. Demikian juga, hasil feminisasi pekerja migran untuk purna migran, bisa lebih tepat sasaran pemanfaatanya untuk membangun desanya. •

Republika, 21 April 2023

BAGIAN KEDUA

KEARIFAN EKONOMI LOKAL

1 | LUMBUNG PANGAN DAN KEARIFAN LOKAL

SALAH satu topik hangat yang diperdebatan dalam sesi Debat Paslon Presiden/Wakil Presiden yang lalu, terkait program lumbung pangan (*food estate*). Program ini, semakin menuai kontroversi karena dijadikan jualan politik antarkandidat, terutama jika direlasikan dengan konsep “keberlanjutan pembangunan” dan “pembangunan berkelanjutan”.

Sejatinya, program lumbung pangan ini memiliki cita-cita luhur. Saat Hari Ulang Tahun ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) digelar di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Jum’at (18/08/2023).

Presiden Jokowi menegaskan, proyek lumbung pangan dibutuhkan untuk menampung cadangan pangan nasional. Apalagi, saat ini hampir semua kawasan masih menghadapi krisis pangan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pangan (*Kompas*, 19/8/2023).

Dalam keterangannya, Kepala Negara menuturkan, pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah, bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Angka keberhasilan panen pada tanaman, tambah Presiden, akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.

Kendati proyek ini luhur, merealisasikannya tidak semudah “mem-

balikkan telapak tangan”, tidak boleh terburu-buru. Ini adalah program strategis, bukan proyek *ad hoc*, tapi merupakan program berdurasi panjang. Karena melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat lokal. Pelbagai disiplin ilmu terlibat dan berjibaku, termasuk ilmu sosiologi, antropologi, hukum, dan lainnya.

Hingga saat ini, penulis belum menemukan hasil kajian kelayakan akademik yang dipublikasi dan mumpuni. Padahal program ini dijadikan kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Bahkan, proyek lumbung pangan ini, sudah tersebar di seantero Tanah Air: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Harap diingat, penggarap proyek dilakukan secara lintas: Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Dan, eksekutornya masing-masing wilayah lumbung pangan yang mengembangkan komoditas yang variatif.

Kearifan Lokal

Ketiadaan konsep akademik yang konkret dan realisasi proyek yang tergopoh-gopoh memicu banyak lumbung pangan yang gagal (*Kompas*, 11/2/2024). Termasuk, minimalisnya perhatian terhadap kearifan lokal, ekosistem lingkungan, jenis komoditas yang layak, karakter lahan, ketersediaan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas, ketersediaan pasar, dan aspek pendukung lainnya.

Dalam konteks kearifan lokal (*local wisdom*), proyek ini kurang memperhatikan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat (*indigenous communities*). Padahal, kearifan, merujuk Sternberg dalam *Why Schools Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings* (Mahpur, 2008), dijelaskan dalam cakupan *Tacit Knowledge* (TK).

TK merupakan jantungnya kearifan. Ia adalah pengetahuan informal yang tidak diajarkan di sekolah formal. Kearifan akan memediasi nilai yang disokong kinerja inteligensi praktis.

Kearifan lokal, merupakan sebuah sistem dalam pilar kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, yang hidup di dalam masyarakat lokal. Karakter unik dalam kearifan lokal, sifatnya dinamis, kontinu dan diikat dalam komunitasnya, hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Karena itu, dalam kearifan lokal dikenal adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang dianggap melanggar tata kehidupan yang disepakati.

Itulah yang meneguhkan, mengapa kearifan lumbung padi lokal, sebagai varian ketahanan pangan di pelbagai pelosok wilayah, masih eksis dalam mendukung ketahanan pangan lokal (*local food security*) (Christophe Béné, 2020).

Dalam kasus masyarakat di *tatar* Sunda meliputi wilayah kultural Galuh dan Banten misalnya, dikenal adanya kearifan *Leuit*. *Leuit* adalah tempat menyimpan padi gabah yang sudah kering. *Leuit* berperan sebagai penyangga ketahanan pangan dan subsistensi masyarakat.

Di Minangkabau, dikenal dengan istilah *Rangkang*, Tanah Toraja dikenal *Alang*, Lombok dikenal *Sambik* dan seterusnya. Tradisi ini tentu mengingatkan kita pada spirit gotong royong. Spirit ini dianggap salah satu akar peradaban bangsa. Semangat gotong royong dalam tradisi *Leuit*, terlihat tatkala penduduk desa (pemilik lahan) dengan sukarela menyimpan hasil penennya dalam lumbung.

Perangkat desa (adat) dapat memberikan akses terhadap cadangan padi lumbung kepada pemilik lahan yang menyerahkan hasil panennya. Tentu, ada sanksi berupa pelarangan akses terhadap cadangan padi lumbung kepada pemilik lahan yang tidak menyetorkan hasil penennya. Kepemilikannya tentu dipegang oleh setiap keluarga atau secara kolektif oleh desa.

Gotong Royong

Dalam kearifan lokal, lumbung dianggap sebagai simbol kekayaan bagi pemiliknya. Penyimpanan padi secara kolektif dapat menumbuhkan

sikap gotong royong sesama warga desa. Selain itu, lumbung ini dapat menstabilkan ketersediaan pangan, keguyuban warga dan pola tanam yang teratur.

Meminjam studi Arsyad (2008), menyebutkan dalam membangun ekonomi lokal, dibutuhkan kearifan lokal. Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali misalnya, karena mampu memadukan kearifan lokal yang bersifat informal dan tata kelola LPD melalui pranata formal.

Pendekatan pranata informal melalui penguatan nilai, norma, dan sanksi sosial. Sementara pendekatan formal melalui membangun tata kelola LPD mencakup organisasi, prosedur rekrutmen, mekanisme simpan pinjam, dan sistem renumerasi.

Pola Gianyar menjadi kasus menarik, bagaimana pengembangan masyarakat (*community development*) memperhatikan pengetahuan dasar masyarakat asli secara historis dan sosio-budaya.

Dan, bagaimana pengetahuan itu membentuk pengalaman. Tatkala pengalaman dan pengetahuan historis ini dicoba dipaksakan, niscaya pengetahuan dan komunitas lokal kerap tersingkir sebagai kelompok marginal.

Dalam konteks itulah, pendekatan pranata informal dan formal seperti yang dipraktikkan di Gianyar, bisa menjadi solusi. Solusi itulah yang membuat budaya pertanian Subak di Bali yang merupakan warisan budaya, basis pertanian, yang mengenal tradisi *palemahan*, *parwongan* dan *parahyangan* memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Maka, program lumbung pangan yang sifatnya jangka panjang dan berbasis pembangunan berkelanjutan, jangan sampai menegasikan kearifan-kearifan lokal masyarakat. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka ikut terlibat dari proses perencanaan awal, pelaksanaan hingga evaluasi/monitoring akhir. Semangat gotong royong yang merupakan reproduksi dari kearifan lokal harus dipupuk.

Tentu, diperlukan *political will* pemerintah untuk melakukan kemi-

traan dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat lokal. Pola proyek *food estate* yang digalakkan pemerintah selama 4 (empat) tahun ini, tanpa mempertimbangkan faktor sosial-budaya lokal diyakini akan gagal dan makin memboroskan anggaran.

Dalam konteks itulah, pendekatan "proyek" harus digantikan dengan pendekatan pranata partisipatif yang berjalan berkesinambungan.

Akhirnya, teringat Koentjaraningrat (1994), menegaskan, harus digali nilai kearifan lokal sebagai praktik dinamika dalam mendorong mentalitas membangun, niscaya ia akan merangkai capaian membangun sebagai semangat kreativitas, tanggung jawab, pencapaian kebahagiaan masa depan yang dihidupi oleh mentalitas lokal. Sprit inilah yang akan memacu penguatan ekonomi nasional di atas kokohnya kearifan lokal yang berkarakter gotong royong. •

Terbit: KOMPAS, 27 Februari 2024

2 | MENDARAS TANGISAN PILU DAENG BA'DU (Cerpen Ekonomi)

NYARIS saban hari, di depan rumahku berjejeran armada angkutan becak. Maklum, di depan rumahku para pengayuh becak, menjadikannya sebagai pangkalan. Entah sejak kapan, mereka mulai mangkal.

Yang pasti, sejak aku mulai memiliki rekaman memori seperti yang diungkap JR Anderson (2012) dalam buku *Learning & Memory an Integrated Approach*, kira-kira usia tiga tahun, para penarik becak telah familiar dengan lokasi itu. Selain teduh, karena pohon asam berusia ratusan tahun, berdaun lebat bergelayut, menjuntai, dan juga tempatnya adem strategis di perempatan jalan utama.

Usai sekolah, hampir setiap petang, aku mampir dan menegur sapa mereka. Bahkan, sesekali aku larut dalam cengkerama santai dan sendau gurau. Banyak kronika kehidupan yang mulai kurekam. Gaya *guyub* mereka cukup kental. Mereka ibarat satu keluarga besar, mereka saling asah, asih, dan asuh. Kendati hidupnya cukup keras di tempa alam. Panas di santap terik mentari hingga dingin diguyur hujan telah membalut, tidak lekang dalam goresan hidupnya.

“Becak... becak.. *daeng* becak..!” teriak calon penumpang dari sebe-

rang perempatan jalan Merpati Raya. Ibarat koloni, para pengayuh becak pun sigap merespon panggilan. Tanpa perintah, mereka saling *mafhum*, antri menjemput calon penumpang.

Mereka tampaknya sudah terbiasa disiplin dalam berjamaah, tanpa saling seradak-seruduk berebutan calon penumpang. Padahal tingkat pendidikan mereka, rerata kelas 2 SD. Mereka putus sekolah karena ketiadaan biaya. Prinsip mereka, yang penting bisa baca tulis. Titik.

Mereka yakin dan ikhlas, rezeki tumpangan akan datang lagi. Mereka yakin, pasar penumpang di depan rumahku sangat menggiurkan. “Yang penting sabar,” ujar daeng Ba’d� berkhutbah. Padahal *daeng* Ba’d� adalah sosok yang tidak pernah terlihat batang hidungnya mengaji dan tadarusan di musholla reot di sekitar rumahnya. Ia sibuk dengan urusan becaknya.

Suatu hari, tumpangan mulai terasa sepi. “Maklum tanggal tua! Kalau sudah tanggal 15-an ke atas, yah kita banyak santai. Penumpang kurang. Banyak yang berjalan kaki,” ujar *daeng* Majid, pengayuh becak yang paling senior.

“Kalau tanggal tua, paling bisa bawa pulang Rp 10.000,- per hari!” timpal *daeng* Ba’d� lagi.

“Wah, mau makan apa yah anak istri kalau penumpang sepi melulu,” sambut *daeng* Pe’té.

“Masih mending, kalau tumpangan sepi, becakku juga selalu rusak. Tali rantainya selalu copot. Piringan *gear*nya makin aus. Bagaimana anak-anakku bisa makan? Beli rantai dan piringan gear baru saja susah,” resah *daeng* Baco.

“Tapi, kenapa yah, walau kita selalu menggerutu, tapi *kan* dapur kita masih bisa *ngepul*. Anak-anak kita masih pada bernafas?” timpal *daeng* Majid dengan seloroh khas Makassarinya.

Jelang adzan maghrib berkumandang, ibuku lazim memanggilku dari teras rumah. Tugas rutinku memasukkan anak ayam kampung peliharaan masuk ke kandangnya. Maklum, di antara kami bersaudara kandung, kami sudah terbiasa berbagi tugas. Untuk urusan anak ayam dan

menimba air dari sumur, itu dianggap kompetensiku. Itu secara alamiah dianggap keahlianku.

“Sudahlah, kenapa kamu termenung anakku?” Penuhilah air bak mandi itu, *Attamu* (ayah, red) mau mandi sekarang. Sekarang *kan* sudah hampir maghrib!” tegur ibuku. “Apa anak ayam sudah masuk kandang? Apa yang kau pikirkan lagi?” tambahnya sambil melirikku.

Aku pun sigap. Usai *Attaku* mandi, aku pun menyusul mandi sambil bergumam mengingat pembiasaan dengan para pengayuh becak tadi. Entah kenapa, percakapan mereka melekat dalam hatiku. Pikiranku agak terbebani, sampai-sampai tidak terasa air segar dingin yang mengguyur dari balik pancuran bak mandi yang tatakannya lebih tinggi, ludes sudah.

“Yang terpikir olehku hanya satu, kok bisa yah hanya dengan penghasilan Rp 10.000/hari atau Rp 300.000 per bulan, mereka sekeluarga bisa hidup? Padahal mereka tidak punya warisan tanah, tabungan, dan lainnya dari orangtuanya? Tidak juga ada warisan ilmu dari sekolah? Apakah ini yang disebut kemiskinan kultural atau struktural? Apa memang sengaja Tuhan tidak memihak kepada nasib mereka?

“Mungkin pak Arsyad, guru ekonomi yang kusegani dan inspiratif di sekolahku, SMAN I Bantaeng, yang bisa menjawabnya. Besok, saya akan tanyakan ke beliau,” ujarku dalam hati.

Usai sholat magrib berjamaah, dari balik jendela kamarku, kuintip lagi para pengayuh becak itu. Rasanya aku ingin berdiskusi, dan mendengar banyak rintihan dari mereka. Banyak pelajaran hidup yang bisa kutarik hikmahnya. Mata pelajaran ekonomi dari pak guru Sutia Budi di kelas pada minggu sebelumnya yang bercerita banyak tentang penderitaan dan kesenjangan sosial, cukup banyak mengganggu pikiranku.

Aku ingin membuktikan fakta-fakta ucapannya itu. Maklum, cita-citaku sejak SD hingga sekarang (SMA), ingin menjadi ahli ekonomi, plus memahami peta realitas sosiologis dan antropologis kehidupan manusia. Aku tidak mau buta dengan fakta. Pikiran dan fakta mesti sejalan.

Aku berambisi, bahwa selain aku bisa jadi ekonom handal, ilmuku

harus memberi manfaat sebanyak orang. Bermanfaat bagi masyarakat, memberi jalan terang bagi masyarakat.

Terus terang, aku terinspirasi kisah inspiratif dari pemenang hadiah Nobel, Muhammad Yunus, dalam bukunya *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (2009), yang sadar segera melepas mantel gelar PhD-nya. Kisah Yunus menjadi "tamparan" bagi para ekonom "menara gading" untuk bergumul dalam lumpur persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

"Aku ingin menjadi Yunus," ujarku membatin. Yunus itu ingin melepaskan diri dari kesombongan yang menyertai seorang PhD-nya, yang cenderung melihat situasi dengan sudut pandang mata burung. Para ekonom seyogyanya, mendapatkan sudut pandang mata cacing, yakni berfokus pada satu persoalan kecil dan mencoba berada di atasnya – sebuah strategi yang lebih efektif karena beranjak dari kenyataan lapangan.

"Saatnya sekarang, di depanku, ada fakta kemiskinan dari para pengayuh becak. Ini laboratorium hidup yang perlu dicarikan solusinya," batinku memberontak. "Mestinya, semakin banyak orang terpelajar di kampung itu, kemiskinan harus semakin berkurang. Tapi kenapa, semakin banyak orang terpelajar, kemiskinan makin meningkat? Apa yang mereka pelajari dari kaum terpelajar itu di bangku-bangku sekolah?

"Aku ingin seperti Yunus, karena ia rela turun gunung," bisikku dalam hati. Yunus telah menemukan pencerahan, tatkala pada salah satu acara berkeliling ke desa bertemu dengan seorang perempuan pembuat bangku dari bambu. Namun, karena ketiadaan modal perempuan tersebut meminjam kepada rentenir untuk membeli bambu sebagai bahan baku. Setelah bangku tersebut jadi harus dijual kepada rentenir dan dia hanya mendapatkan selisih keuntungan sekitar 1 *penny*. "Inilah rantai kemiskinan yang perlu diurai dan diputus tuntas," kata Yunus.

"Aku harus menjadi *problem solver*, bukan part of problem. Terus terang aku terobsesi dengan perkataan Albert Einstein yang pernah kubaca waktu mata pelajaran Fisika SMA Kelas I: "*It's better to light a candle than curse the darkness*" alias "Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk

kegelapan.”

Lamat-lamat kuintip para pengayuh becak di depan rumahku, dan tidak terasa aku keluar rumah melalui jendela. Aku melompat. Aku yakin, kalau pamit keluar rumah melalui pintu ruang tamu, pasti aku harus ikut tadarusan hingga menunggu waktu sholat isya.

Sudah menjadi *kegaliban*, di dalam keluarga kami, orangtuaku mewajibkan seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Selain tadarusan, pasti *Attaku* selalu memberikan beberapa nasihat dan cerita-cerita sejarah tentang kisah para Nabi, Rasul dan para sahabat-sahabatnya.

“Kenapa kau ada di sini?” tegur *daeng* Ba’d�.

“Memangnya kamu mau jadi pengayuh becak? Sudah, masuk rumah sana! Nanti *Attamu* pasti mencarimu.”

“*Daeng* Ba’d�!” ujarku lirih memulai pertanyaanku.

“Memangnya, sejak kapan *daeng* Ba’d� narik becak?”

“Apa tidak capek? Berangkat usai shalat Subuh dan balik ke rumah usai shalat Isya *kan*?”

“Bagaimana dengan anak-anak *daeng* Ba’d�?”

Apa mereka sekolah? Apa mereka bisa makan cukup dengan penghasilan Rp 10.000 per hari?

Tiba-tiba *daeng* Ba’d� membentak: “Memang kenapa, apa salah. Kerjaan saya *kan* halal. Saya bukan maling alias koruptor yang kerap menghiasi media-media elektronik?”

“Terus terang, aku idak habis berpikir, bagaimana bisa menghidupi keluarga *daeng* Ba’d� dengan hidup Rp 10.000 per hari? Punya istri dan tiga anak lagi?

Sambil tertegun, terdiam. Ekpresi wajah *daeng* Ba’d� pun berubah. Matanya pun berkedap-kedip dan menggaruk-garuk kepala, yang saya yakin kepalanya tidak gatal. Rambutnya yang *kribo* tak beraturan, pertanda ia tidak siap dengan serangan pertanyaanku.

Sambil menunggu sekian menit, suasana menjadi hening. Lalu lalang keramaian lalu lintas menjadi senyap dalam interaksi batin kami berdua.

“Tapi, aku ingin ada jawaban dari daeng Ba’du,” ujarku berharap. Sambil menatapku, ia pun menjawab terbata-bata.

“Sejak tiga minggu ini, tiga anakku sedang sakit,” ujar *daeng* Ba’du mengawali tuturnya. Entah kenapa, sekujur tubuh anak-anaku memerah dan timbul bisul-bisul bernanah. Aku mengobatinya dari daun jarak dan rebusan daun pepaya, yang daunnya kuambil di pelataran kuburan dekat rumah. Awalnya, yang kena anak paling kecilku. Terus menular ke kakak-kakaknya. Sekarang, istriku pun kena. Kata dokter di Puskesmas Mallilingi, itu bukan cacar, tapi penyakit kulit.

“Dokter Puskesmas merekomendasikan ke dokter spesialis kulit. Tapi, spesialis kulit *kan* tidak ada di Bantaeng ini. Saya harus membawa mereka berobat ke Kota Makassar, sekitar 124 kilometer. Tentu butuh biaya tidak sedikit.”

“Sebelum saya ke Puskesmas, saya antar anak-anak ke dokter Farid. Tapi, tidak sembuh-sembuh juga. Malah menular ke yang lain.” Saya sudah pinjam dana biaya berobat ke bank keliling di dekat pasar sentral. Alhamdulillah, cukup membantu. Tapi saya *kan* harus melunasi utang segera.”

“Tapi saya yakin mereka akan segera sembuh. Karena saya yakin, siapa yang berusaha sungguh-sungguh pasti ada obatnya, pasti ada jalan keluarnya. Hanya waktu yang akan bicara,” tambah lelaki kurus kering kecil berusia 35 tahun itu.

“Apa perlu saya bantu?” ujarku tak sadar menawarkan diri.

“Sudahalah, kau *kan* masih pelajar, masih kelas II SMA. Kau pikirkan saja masa depanmu. Jalanmu masih panjang,” timpal *daeng* Ba’du lagi.

“Tidak usah kau ceritakan masalahku dengan orangtuamu, aku malu. Aku masih bisa mencari jalan keluar.”

“Teman-temanku sesama pengayuh becak pun tidak tahu, tidak usah kau pikirkan. Kamu anak baru kemarin!”

Daeng Ba’du, sosoknya tidaklah perkasa. Perawakannya malah tergolong kecil untuk ukuran becaknya atau orang-orang yang menggunakan

jasanya. Tetapi, semangatnya luar biasa untuk bekerja keras. Mulai jam lima pagi setelah melakukan rutinitasnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian dia melalang dijalan, di atas becaknya untuk mengantar para pelanggannya. Dan, ia akan mengakhiri kerja kerasnya setelah jam delapan malam, usai shalat Isya.

Para pelanggannya sangat menyukai *daeng* Ba'du. Karena ia pribadi yang ramah dan senyum tak pernah lekang dari wajahnya. Dan, ia tak pernah mematok berapa orang harus membayar jasanya. Namun karena kebaikan hatinya itu, beberapa orang yang menggunakan jasanya membayar lebih.

Mungkin karena tidak tega, melihat bagaimana tubuh yang kurus kering dan kecil malah tergolong ringkih itu, dengan nafas yang *ngos-ngosan* (apalagi kalau jalan mulai menanjak) dan keringat bercucuran berusaha mengayuh becak tuanya.

Daeng Ba'du tinggal di sebuah gubuk reot yang nyaris sudah mau rubuh, bersama istri dan tiga anaknya. Tetangganya juga banyak penarik becak, para penjual asongan dan pemulung lainnya. Perlengkapan di gubuk itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah tikar tua yang telah robek-robek di pojok-pojoknya, tempat di mana ia biasa merebahkan tubuh penatnya setelah sepanjang hari mengayuh becak.

Gubuk itu hanya merupakan dua ruang kecil di mana ia biasa merebahkan tubuhnya beristirahat. Di ruang utama, ia menerima tamu yang butuh bantuannya, di ruang itu juga ada sebuah kotak dari kardus yang berisi beberapa baju tua miliknya dan sebuah selimut tipis tua yang telah bertambal-tambal.

Di pojok ruangan tergantung sebuah lampu *templok* minyak tanah, lampu yang biasa dinyalakan untuk menerangi kegelapan di gubuk tua itu bila malam telah menjelang.

Sambil aku termenung dan gagap, segera aku kembali dan masuk ke halaman rumahku. Aku pun teringat ucapan *daeng* Ba'du sambil mengigat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari: "*Tidaklah Allah turunkan penyakit*

kecuali Allah turunkan pula obatnya.”

Berat rasanya aku melangkahakan kaki balik ke rumah, dan kemudian permisi ikut bergabung kembali tadarussan di ruang tamu. Lagipula, aku yakin, aku mendapat hukuman (sanksi) dari attaku karena kabur usai shalat Maghrib berjamaah tadi. Aku pun bingung!

Tapi, aku membatin, terus terang, aku malu yah Tuhan. Rutinitasku sholat berjamaah, berdoa dan tadarassan saban magrib hingga usai sholat Isya, belum memberi efek internalisasi dalam diriku. Aku belum memberi manfaat kepada banyak orang. Aku takut dituduh Allah sebagai orang yang sombong karena tidak perduli kepada mereka yang rentan, miskin, dan teraniaya, yang ada disekeliling rumahku.

Aku pun teringat pada bunyi pesan surah al Ma’un, yang selalu dikutip Kiyai Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta, tatkala membengkali santri-santrinya dengan metode pembelajaran (*sorogan/halaqah*) dan model klasikal: “Tuhan mengancam terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama, yakni mereka yang menghardik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, *riya’* dalam shalatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna.”

Hari berganti hari, sepanjang malam, ada pergolakan batin dalam diriku. Aku pun bergumam protes, untuk apa kita sholat, puasa, naik haji, umroh berkali-kali, kalau ilmu kita tidak bermanfaat pada banyak orang? “Itu namanya merugi.”

Demikian juga, untuk apa kita sekolah dengan titel yang berjubel, tapi tidak mampu memberi jalan keluar bagi masyarakat. “Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa?” itulah kalimat pemberontakaku di 3/4 malam yang hening jelang Subuh di suatu hari.

Tidak terasa, selang beberapa tahun berikutnya, terdengar kabar, *daeng* Ba’dü telah diajak oleh Tuhannya untuk bertemu dalam alam kesejatan. *Daeng* Ba’dü tampaknya memaksa takdir dan kehendak Tuhan. Akhirnya, aku pun membuat goresan kalimat untuknya dengan tetesan tangisan pilu, yang rasanya sulit kuterima dalam fakta. Inilah goresanku:

Sahabatku Pergi ...!

Lukamu masih menganga dalam nuraniku. Sembilu itu tak lekang di telan masa. Guratan wajahmu masih tertusuk tajam dalam memoriku.

Bayangan keceriaanmu masih menjuntai di pelupuk bulu mataku. Sorotan matamu, meniscayakan ingatanmu kugiring untuk selalu berontak.

Berontak atas nasibmu. Berontak atas ketidakadilan yang kerap menjadi sahabat karibmu.

Pagi itu, kau begitu ceria, bercanda, bergurau dalam kerasnya roda waktu. Seolah rasa damai lekat dihatimu. Seolah kebahagiaan adalah milikmu. Seolah beban hidupmu tidak menggelayut sedikitpun ada noktah.

Tapi, aku yakin, rautan wajahmu itu tidak seindah keceriaanmu. Ada beban yang kau tutup rapat-rapat. Ada bau anyir yang kau endapkan dalam beban hidupmu. Kumembatin, kau hidup dalam dua dunia.

Petang itu, terhirup kabar dari sekawanan burung elang yang mengepakkan sayapnya di atas nyiur melambai. Sementara, di pelataran jalan tampak sepi. Canda dan gurau tertelan dalam keheningan.

Para pengayuh becak yang kerap ceria menghampiri depan halaman rumahku, menghilang bagai di telan bumi.

Tiba-tiba tersiar kabar dari seberang mushola reot, berita yang tak mengenakkan hati. Ibarat di sambar petir di siang bolong, aku tidak sanggup menerima kabar itu.

Sahabatku, *daeng* Ba'du, pergi untuk selamanya ke dunia lain, tanpa pamit menggenggam dua dunia yang kontras.

Hidupnya yang keras dalam kayuh penarik becak, terlilit beban. Beban struktural. Beban ketidakadilan. Beban utang, beban lintah darat, beban kemiskinan.

Daeng Ba'du, menjuntai di atas langit-langit rumah *manzil* yang sepi, yang hanya diintip seekor kelelawar.

Ia “memaksa” Tuhan untuk segera meminangnya. Ia “memaksa” sang takdir segera mendekap dirinya. Ia hirau dalam hitungan *sunatullah*.

Sahabatku, kau pergi dalam kesunyianmu. Pergi di tengah ketidakpedulian kita. Pergi tatkala “keadilan sosial” menjadi barang dagangan. Pergi ketika rajutan cinta kemanusiaan hanyalah retorika hidup. Sahabatku, selamat jalan... selamat jalan... Tersenyum indahlah di hadapan kekasih-Mu. •

Sumber: Tulisan ini pernah dimuat dalam *Buku Milad ke 51 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)*, 14 Maret 2015

3 | MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI

PROKLAMASI kemerdekaan, 17 Agustus 1945, yang seyogianya telah mampu melepaskan nasib anak bangsa dari belenggu penderitaan. Namun, dalam perjalanannya, penjajahan dalam format baru belum mampu dienyahkan di bumi pertiwi ini. Kekuasaan ekonomi masih diakumulasi oleh segelintir orang dengan sokongan kuasa politik negeri. Dalam konteks inilah, untuk membangkitkan prakarsa rakyat yang sudah lama terhempas di negerinya sendiri dan telah lama “membungkuk-bungkuk” di hadapan bangsa asing, maka tema utama kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian, memperoleh justifikasi teoritis dan empiris.

Dalam diktum pemikiran pembangunan strukturalis, Sritua Arief (1998) pernah menyampaikan, bahwa, proses akumulasi dan perubahan sosial-ekonomi di negeri-negeri jajahan dimulai dengan adanya pengaruh eksternal yang datang dari negara-negara kapitalis sebagai penjajah. Pengaruh eksternal ini, mengejawantah dalam bentuk menyeruaknya sektor ekspor bahan-bahan mentah dalam struktur ekonomi negeri-negeri jajahan yang khusus dimaksudkan untuk menopang ekspansi sektor industri di negara-negara penjajah. Dalam konteks ini, negara-negara jajahan diperas (dieksploitasi) untuk menyokong surplus ekonomi negara-

negara kapitalis maju.

Relasi Keterjajahan

Secara umum, pola relasi antara negeri terjajah dan negeri penjajah, sesungguhnya masih awet dan sangat kental aromanya dengan pelbagai derivasinya hingga kini. Dengan dalih liberalisasi investasi dan perdagangan yang mengiringi desakan globalisasi, kian menguatkan relasi negeri jajahan dan penjajah. Bahkan, negeri penjajah bukan saja dari benua Eropa dan Amerika, tapi telah menular secara masif ke negara-negara yang telah memiliki akumulasi kapital kuat.

Jika zaman kolonialisme primitif dilakukan secara kasar, bahkan dengan pendekatan fisik dan militer, maka saat ini proses relasinya dilakukan secara *sophisticated*, bahkan dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi canggih. Jika pada zaman kolonialisme primitif, menggunakan sistem *cultuurstelsel* (tanam paksa) untuk menopang surplus ekonomi negara kapitalis maju, maka dewasa ini menggunakan logika perdagangan bebas yang dikendalikan jaringan sistem teknologi informasi.

Kendati pendekatan relasi negeri jajahan dan negara penjajah antara kolonialisme primitif dan kolonialisme *sophisticated* berbeda, tapi yang pasti “bola liar” dari efek negatif yang dimunculkannya tetap sama. Surplus ekonomi tetap mengalir dari negeri jajahan ke negara penjajah, dari rakyat yang miskin ke orang-orang kaya. Akumulasi kapital terus-menerus menumpuk ke segelintir penduduk, sementara mayoritas rakyat miskin dan jelata masih mengais-ngais rezeki yang tidak pasti untuk mempertahankan kesinambungan hidupnya.

Itu tandanya, kesenjangan masih mengemuka. Kesenjangan terjadi karena distribusi kekayaan tidak berjalan lancar. Terjadi akumulasi kekayaan yang menumpuk pada segelintir elite ekonomi dan politik, seperti yang pernah terjadi pada era *cultuurstelsel*. Dalam rancangbangun pola *cultuurstelsel* itu, di mana realitas ekonomi rakyat dipisahkan dari

dinamika modernisasi ekonomi, telah menjadikan massa rakyat hanya sebagai tukang dan penonton. Penguasaan ekonomi lebih banyak ditentukan penguasa sumberdaya domestik, yang telah berkolaborasi pihak asing dan jaringan korporatokrasi global. Surplus ekonomi tersedot keluar di sertai modernisasi ekonomi yang tampil semu.

Apa yang kemudian terjadi di Tanah Air? Ekonomi bangsa sulit keluar dari dekapan pemilik modal asing. Nyaris semua barang dan jasa yang kita konsumsi tiap hari saat ini, ternyata bukan lagi produk dan karya anak bangsa, tapi produk pemodal dan pemilik asing. Pada produk barang konsumsi, seperti sabun Lux dan pasta gigi Pepsodent, yang sudah sekian turunan kita gunakan, ternyata milik Inggris, air mineral Aqua (Danone milik Prancis); susu SGM (Numico, milik Belanda); teh Sari Wangi dan kecap Bango (Unilever milik Inggris); kecap, sirup, saus ABC (HJ Heins milik AS); rokok Sampoerna (Philip Morris milik AS).

Di bidang telekomunikasi, operator Indosat, XL, Telkomsel dimiliki Qatar, Singapura, dan Malaysia. Di bidang ritel, dengan Giant dan Hero (milik Malaysia), Circle K (milik AS), pabrik-pabrik semen, misal; semen Gresik (milik Meksiko), semen Cibinong (milik Swiss), semen Tiga Roda (Heidelbergh milik Jerman).

Di industri perbankan, dari 120 bank umum di Tanah Air, lebih separohnya telah dimiliki asing. Mereka dibiarkan bebas memiliki 99 saham, yang tentu secara otomatis bisa merambah ke seantero pelosok negeri. Di Negara-negara lain, misalnya China (hanya 25 persen), Malaysia (hanya 30 persen), Thailand (hanya 49 persen). Luar biasa memang liberalnya negeri Pancasila kita!

Selanjutnya, dengan dalih liberalisasi investasi dan perdagangan, negeri ini diseret secara sistemik dan rasional dalam kubangan analogi “tanam paksa”. Nyaris, semua sumberdaya ekonomi potensial telah digadai. Demi tuntutan pragmatisme yang tuna-ideologi konstitusi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tergerek ambisius dalam jebakan *decoupling economy* (keterlepasan antara pertumbuhan dengan realitas kemiskinan).

Kasus penghisapan para komparador yang berkhidmat bagi korporatokrasi asing, telah menciptakan luka kesenjangan luar biasa. Bayangkan, menurut versi majalah *Forbes* (Desember 2012), 40 orang di negeri ini memiliki kekayaan US\$ 88,6 miliar atau Rp 841,7 triliun (kurs Rp 9.500). Sementara 110 juta orang (World Bank, 2011) berjibaku di dalam lumpur kemiskinan.

Di tengah PDB terdongkrak naik mencapai Rp 7.116 triliun (2012), pendapatan per kapita US\$ 3.543, dan posisi Indonesia sebagai negara 16 kekuatan ekonomi dunia, di sudut lain, fakta menyayat hati dikonfirmasi Indeks Gini Ratio (IGR) sebesar 0,41, yang mendeskripsikan keakutan tingkat kesenjangan, yakni 1 persen penduduk menguasai hingga 41 persen total kekayaan Indonesia. Padahal sebelumnya, IGR hanya 0,37 (2009) dan meningkat menjadi 0,38 (2010). Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tahun 2012 menunjukkan, 51 persen dari total deposito perbankan senilai Rp 1.700 triliun hanya dimiliki 0,13 persen nasabah

Sementara itu, nasib rakyat yang hidup di pelosok-pelosok desa sebagai petani miskin semakin menjerit-jerit. Mereka pun mengambil pilihan meninggalkan lahan pertaniannya dengan mengambil pilihan hidup baru. Tidak aneh, jika saat ini, sekitar 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti ojek, dagang dan pekerja kasar.

Bahkan, usia rerata petani penggarap saat ini, sudah di atas 60 tahun, yang tentu secara otomatis dalam rentang 10 tahun ke depan, involusi sektor pertanian kian mengerikan nasibnya. Itulah yang mengonfirmasi, mengapa sektor pertanian menghadapi “kiamat”. Maka, sumbangan usaha tani padi pun, dalam struktur pendapatan rumah tangga petani, tentu terus merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen pada 2010. Demikian juga kemiskinan nelayan, nasibnya kian parah dan nestapa. Bahkan, nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinannya, seolah menerima “takdirnya”.

Studi Kuntjoro (2010) menyebutkan fakta, bahwa prestasi pertumbuh-

an ekonomi yang dicapai hanya dinikmati oleh 40 persen golongan menengah dan 20 persen golongan orang terkaya, sisanya sebanyak 40 persen makin tersisihnya kelompok penduduk berpendapatan terendah. Data BPS 2010 menunjukkan, kelompok penduduk berpendapatan terendah ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2 persen, makin mengecil dari 20,92 persen dibanding tahun 2000. Sebaliknya, 20 persen kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19 persen menjadi 45,72 persen.

***Cultuurstelsel* Berdaur-Ulang**

Kebijakan struktural, yang memosisikan pemilik modal besar dan komparador asing sebagai pelaku utama ekonomi nasional, justru telah menciptakan penjajahan baru. Model *cultuurstelsel* berdaur-ulang lagi, karena massa rakyat hanya dijadikan konsumen dari produsen dan jaringan distribusi pemilik modal raksasa.

Dalam konteks regional misalnya, negara melakukan pembiaran penghisapan oleh para “drakula”. Kasus Kalimantan Timur yang dirujuk studi Aji Sofyan Effendi (2011), dalam rentang tahun 2000-2010, terjadi Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) oleh *Multi National Corporation* (MNC) sebesar 85,6 persen, yang tersisa untuk negara hanya 14,4 persen. Selanjutnya, yang diperoleh oleh Kaltim hanya 2,23 persen.

Karena itu, Mubyarto dalam bukunya, “Ekonomi Terjajah” (2005) menjelaskan, setelah lebih 60 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah. Keterjajahan kembali ekonomi Indonesia mewujudkan dalam bentuk “penghisapan ekonomi” yang sangat tinggi dan penciptaan ketidakadilan sosial. Karena penghisapan tersebut, Indonesia tidak akan mungkin menciptakan keadilan sosial melalui strategi pembangunan.

Kita diingatkan pula Pramoedya Ananta Toer (1995), “Selama beratus-ratus tahun lamanya negeri ini dijajah oleh bangsa Barat, negeri ini dihisap, dirampas kekayaan alamnya, negeri yang begitu kaya, disulap

menjadi negeri pengemis karena tidak adanya karakter pada kaum elit." Meminjam istilah Bung Karno (1952), "Kemerdekaan berarti mengakhiri untuk selama-lamanya penghisapan bangsa oleh bangsa yang tak langsung maupun yang langsung".

Sayang sekali, karakter pemimpin kuat yang ingin menjadikan negeri ini mandiri dan bermartabat, yang jauh dari perbudakan, tampak kian minim. Pemimpin yang ada, justru menempatkan penguasaan sumber daya ekonomi kepada pihak asing. Pesan konstitusi ekonomi yang berkarakter ekonomi Pancasila, sudah semakin usang ditelan kebijakan pragmatisme yang tuna ideologi.

Demokrasi ekonomi yang memberi ruang partisipasi ekonomi rakyat, menjadi sayup-sayup. Maka, kesenjangan kian menganga menjadi *symptom*, demokrasi ekonomi kehilangan relevansi.

Merajut Kapasitas Negeri

Melihat persoalan dinamika ekonomi seperti itu —yang tampil kemilau dalam pencitraan— menjadi jelas akar persoalan ekonomi, telah memproduksi kesenjangan dan ketidakadilan, maka seyogianya tidak semata diselesaikan dengan pendekatan teori ekonomi primitif (*mainstream*). Pendekatan politik, sosial, hukum, dan budaya, harus ikut angkat bicara. Penguatan ekonomi domestik, yang dimaknakan penguatan produksi, distribusi, jaringan, dan konsumsi domestik misalnya, menjadi prioritas membangun ketahanan ekonomi rakyat.

Ini menandakan, subtema pertama "kerakyatan", menjelaskan bahwa semangat membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai landasan sistem kehidupan politik dan ekonomi nasional menjadi wahana untuk mempercepat proses pembebasan bangsa dari kemiskinan dan ketergantungan asing. Kuatnya ketahanan ekonomi rakyat akan mengokohkan kegiatan kerakyatan.

Kerakyatan dimaknakan di sini, adanya rasa senasib dan seperjuangan dalam proses perjuangan kebangsaan, yang terus bergulir dalam mewu-

judkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Sikap gotong-royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar demokrasi ekonomi harus mampu mewujudkan persaudaraan sesama anak bangsa atas dasar persamaan dan keadilan dalam membangun kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, subtema kedua “kemartabatan”, menjelaskan bahwa harga diri sebagai bangsa yang terhormat, yang lahir dari proses genangan darah dan air mata serta tulang belulang para pejuang bangsa, jangan sampai digadai begitu saja demi tuntutan perut (ekonomi).

Raibnya rasa kemartabatan inilah, yang membuat penguasa negeri kita, demi pencitraan ekonomi nasional, demi peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, menggadaikan apa saja yang dimiliki bumi pertiwi kita. Konsekuensinya, bangsa kita telah diseret menjadi bangsa budak atau bangsa kuli di negeri sendiri.

Demikian juga untuk subtema “kamandirian”, menegaskan arah bahwa ekonomi Indonesia harus berdaulat, harus menjadi tuan di negeri sendiri. Yang paling tahu dan memahami seluk beluk di negeri ini, hanya kita, rakyat Indonesia sendiri, bukan bangsa asing. Di mana pun negara yang maju ekonominya, mesti yang berdaulat dan menguasai kegiatan ekonomi adalah kaum bumi puteranya.

Karena itu, berangkat dari realitas keanekaragaman kearifan lokal yang bertebar di seantero Nusantara, harus kita gali demi memacu dan memakmurkan rakyat. Kekuatan kearifan lokal ini, harus menjadi modal sosial (*social capital*) merekatkan seluruh rakyat Indonesia untuk bahu membahu membangun bangsa.

Sprit gotong-royong dan kekeluargaan yang bersumber dari inspirasi kearifan lokal itu, harus terus digelorakan dan dibangkitkan. Sprit ini tergerus seiring perilaku konsumerisme dan pragmatisme yang melumat mental anak-anak bangsa.

Kemandirian meniscayakan bahwa kita memiliki kekuatan yang dahsyat. Selain memiliki kekayaan modal sosial, manusia-manusia Indonesia ternyata masih memiliki potensi dan prestasi luar biasa untuk

dikembangkan, sumber daya alam yang masih tersedia, letak geografis dan iklim yang potensial, dan pelbagai keunggulan lainnya. Kata Bung Karno: Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam konteks inilah, satu kata kunci yang pas untuk merajut semangat kita, “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”. Stop! menjadi penonton, kuli, dan jongos di negeri sendiri. Karena itu, pergulatan membangun semangat kerakyatan, yang menegaskan terbangunnya semangat perasaan senasib dan sepenanggungan, yang disertai semangat kemartabatan dan kemandirian, yang meneguhkan eksistensi terhadap harga diri sebagai anak bangsa dan percaya pada kekuatan sendiri, harus senantiasa terpatri pada diri anak bangsa. •

Sumber: Makalah DAP DPP IMM, Palembang, 2 Agustus 2015

4 | ARUS MUDIK DANA REMITANSI

SETIAP menjelang Idul Fitri, dana remitansi yang masuk ke wilayah pedesaan asal TKI migran, mengalir cukup deras. Remitansi yang masuk ke provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, sebagai salah satu lumbung terbesar asal TKI, tercatat Januari 2017 saja, telah berada dikisaran Rp 111,9 miliar. Pada 2016, tercatat total remitansi yang arus mudik ke NTB sebesar Rp 1,78 triliun (*Bisnis*, 2/3).

Secara nasional, data Bank Indonesia (BI), total remitansi TKI pada 2015 mencapai Rp 119 triliun. Besaran dana ini ternyata mampu melampaui target capaian program monumental pemerintah, yakni amnesti pajak per 25 Januari 2017 yang hanya Rp 110 triliun dan berselisih sempit dana repatriasi yang dijanji-maniskan para konglomerat yang mencapai Rp 140 triliun (Hindharno, 2017).

Mengalir derasnyanya arus remitansi ini tidak boleh dianggap sepele, karena setidaknya berdampak, *pertama*, terjadi penguatan ekonomi keluarga TKI. Kokohnya ekonomi keluarga, menjadi basis pengurangan tingkat kemiskinan nasional. *Kedua*, mampu menggerakkan ekonomi desa.

Masuknya dana remitansi memberi *multiplier effect* terhadap penguatan jaring pengaman sosial, yang tentunya melindungi masyarakat miskin dari pelbagai turbulensi ekonomi yang bisa memicu mereka kembali

terjerembab jerat kemiskinan.

Jaring pengaman sosial ini penting dalam membangun interaksi program asuransi sosial, kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, penyediaan utilitas dan program dana desa yang digelontorkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang anggarannya dalam APBN 2017 sebesar Rp 60 triliun.

Penguatan Ekonomi

Besaran dana remitansi itu, sejatinya mampu memompa ekonomi perdesaan tempat TKI berasal. Studi Bank Dunia (2010) di beberapa negara berkembang mengonfirmasi, arus remitansi mampu menekan angka kemiskinan. Dalam 2000-2007 misalnya, remitansi mengurangi angka kemiskinan 26,7 persen, menekan ketimpangan 55,3 persen dan meningkatkan pengeluaran marjinal konsumsi makanan 8,5 persen.

Untuk konteks remitansi TKI, komposisi kontribusi TKI perempuan ternyata lebih tinggi dibanding TKI pria dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Besarnya kontribusi itu, menurut data BNP2TKI (2015), karena jumlah TKI migran lebih banyak perempuan dibanding pria. Data tercatat, pada 2015, jumlah TKI migran sebesar 429.872 dengan persentase perempuan 57 persen dan pria 43 persen.

Sementara merujuk survei *Asia Research Institute* (ARI), para TKI perempuan dominan bekerja di sektor domestik, cenderung mengirimkan remitansinya lebih besar dibandingkan tiga jenis pekerjaan lainnya yang didominasi pria, misalnya, sektor pertanian, konstruksi, dan produksi. Dominan dana remitansi dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari (35 persen), selain biaya pendidikan dan keperluan anak-anak (26 persen) (Mila Arlini, 2013).

Merujuk hasil survei itu menegaskan, arus remitansi TKI perempuan ternyata menasar pada aspek penguatan ekonomi keluarga inti (*nucleus family*). Yakni, ekonomi entitas rumah-tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota keluarganya (Page & Thomas, 2007). Riset BNP2TKI

menyebutkan, keberadaan satu orang TKI setidaknya dapat menghidupi tiga sampai empat orang dalam keluarganya. Dengan jumlah TKI migran sebesar 4 juta orang yang tersebar lebih dari 100 negara, setidaknya mampu menyelamatkan 20 juta orang di dalam negeri sehingga tidak jatuh miskin.

Maka, dalam menggerakkan ekonomi perdesaan, alokasi dana remitansi seyogianya diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan usaha-usaha produktif keluarga. Bagaimanapun, TKI perempuan tidak ada yang mau menjadi TKI migran dalam rentang yang lama. Karena itu, pengelolaan dana hasil remitansi itu, tidak semata untuk kegiatan konsumtif dan fisik tapi harus diatur dalam manajemen lembaga keuangan yang kredibel.

Koperasi Perempuan

Dalam pengelolaan dana remitansi di pedesaan, peran lembaga keuangan mikro (LKM) terutama koperasi setidaknya harus hadir menyapa keluarga TKI yang ditinggalkan. Model KSU Bina Sejahtera di Desa Sumberboto, Wonotirto Blitar, misalnya, yang anggotanya dominan perempuan, secara signifikan mampu memanfaatkan hasil remitansi itu.

Dengan dipelopori Ibu Tukirah, KSU ini membentuk Arisan Hari Raya dan menggerakkan kegiatan produktif, misalnya, mendirikan toko, membeli sawah, hewan ternak, mesin produksi, dan lainnya, serta pinjaman modal kepada anggota. KSU yang dikelola ibu-ibu ini menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mengubah pola pikir masyarakat (Srirahayu, 2013).

Model KSU Bina Sejahtera ini cukup sukses karena mampu memanfaatkan kearifan lokal, seperti memanfaatkan tradisi hari raya, tradisi keagamaan, keguyuban masyarakat, dan ketekunan kaum perempuan dalam mengelola usaha. Tentu tidak lupa pula, KSU ini menggunakan manajemen kelembagaan usaha dan keuangan akuntabel serta memiliki tata kelola yang baik, prosedur rekrutmen, mekanisme simpan pinjam,

dan sistem renumerasi. Sehingga optimalisasi dana remitansi menjadi lebih diproduktifkan.

Konsep yang ditawarkan Kementerian Tenaga Kerja RI dengan model Desmigratif atau Desa Migran Produktif pada awal 2017 misalnya, sejatinya sudah mewakili. Desmigratif dikelola dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun, jangan sampai dana remitansi dalam model Desmigratif itu digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana (saprass) desa, seperti listrik, jembatan, jalan desa, sekolah, dan lainnya. Karena pengadaan saprass sejatinya sudah teralokasi dari dana APBN melalui Dana Desa. Dana remitansi yang dikelola oleh LKM harus difokuskan pada penguatan ekonomi keluarga (pendidikan, kesehatan, kegiatan produktif, dan lainnya).

Dengan pengelolaan dana remitansi oleh LKM yang dikelola kaum perempuan, bisa mempercepat penekanan angka kemiskinan. Studi Mayoux (2009), yang mengelaborasi peranan LKM dan penguatan perempuan di beberapa wilayah Afrika (Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Kenya, dan Uganda).

Mayoux mengemukakan, perempuan merupakan inti dari keluarga. Penurunan jumlah kemiskinan perempuan, secara otomatis menurunkan jumlah kemiskinan. Dengan demikian, perlunya kesadaran bahwa menggerakkan ekonomi desa, partisipasi kaum perempuan menjadi prioritas. Karena itu, dibutuhkan dukungan aparat desa dan tokoh-tokoh karismatik untuk menjadi pelopor mengkoordinasi pemanfaatan maksimal dana arus mudik remitansi dengan aransemen kelembagaan ekonomi desa yang produktif. •

Terbit: *Media Indonesia*, 24 Juni 2017

5 | UNIVERSALISME KEMANUSIAAN

“Anda sudah lama ingin tahu apa filsafat, tetapi selalu tidak sempat, terlalu kabur, terlalu abstrak, terlalu susah, terlalu bertele-tele? Bacalah buku manis ini di mana Sophie, anak putri 14 tahun, menjadi terpesona karenanya.”

—Prof. Franz Magnis Suseno—

SAYA bukan maniak penziarah pelbagai langgam dan jenis novel. Bukan pula doyan mengkhataamkan isi novel. Tapi, di ruang perpustakaan keluarga di kediaman saya, anak sulung saya, Afkar Aristoteles Mukhaer dan istri saya, Ferry Yanthy Burhan, justru selalu melahap pelbagai novel klasik dan teranyar.

Sehingga setiap saya ke ruang baca keluarga, teretalase dan teronggok beragam buku di atas meja, termasuk novel-novel itu. Kalaupun saya ikut melahap, pasti saya akan larut jika saya sudah kena provokasi oleh mereka itu setelah mereka membaca bukunya.

Satu tarikan nafas yang sama dalam keluarga, kami penikmat buku-buku yang bertema kemanusiaan dan filsafat. Karena doyan mencerna tema-tema itu, saya yang berlatar belakang studi-studi ekonomi pembangunan pun acapkali mencandra ekonomi dari sisi kemanusiaan dan filsafat.

Bahkan, saya beberapa kali menulis cerpen berseri yang bertema ekonomi dan kemanusiaan. Tampaknya, isi cerpennya lebih hidup dan penuh gairah. Kendati tentu sesekali mengutip beberapa angka atau data ekonomi dalam isi cerpen tersebut.

Suatu ketika, pada awal pandemi Covid-19, April 2020, saya lebih banyak berdiam di rumah (*work from home*). Nah, di atas meja depan jejeran rak buku di ruang perpustakaan keluarga telah terpajang novel baru yang judulnya unik, *Dunia Sophie* buah karya Jostein Gaarder, yang sudah diterjemahkan penerbit Mizan, Bandung. Novel itu tampaknya sudah dikhatamkan oleh putra sulung saya, karena terbukti sudah banyak lipatan dan mulai lecet.

Terus terang, awalnya novel itu saya anggap berisi cerita sukses pendiri aplikasi *Shopee*, loka belanja yang lagi tren di zaman Covid ini. Namun, setelah sejenak saya telisik dan membaca beberapa caption di balik halaman belakang novel, ternyata sangat menarik. Apalagi yang memberikan komentar caption itu berasal dari kalangan yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Dari situlah saya mulai melahap novel itu.

Secara generikal, isi novel itu memberikan imperatif moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bayangkan dari awal sudah diceritakan, bahwa si mungil Sophie menjalani kehidupan sebagai gadis biasa, gadis lugu. Di situ diceritakan adanya pesan mengejutkan, dan jujur telah mengganggu konsentrasi saya setelah mulai membaca. Ada rangsangan, semacam libido untuk melanjutkan pada halaman-halaman berikutnya.

Dikisahkan, tatkala Sophie menerima dua pesan misterius di kotak posnya, yang bertulis, "Siapaakah dirimu? Dari mana asalnya dunia?" bersama dengan sebuah kartu pos yang dialamatkan kepada: 'Hilde Møller Knag, d/a Sophie Amundsen'. Tak lama kemudian, dia juga menerima sebuah paket berisi pelajaran filsafat.

Pesan cerita itu tentu sungguh menggelitik nalar dan mengaduk-aduk perasaan. Karena secara mendasar mulai mengkritisi tentang eksistensi

kemanusiaan kita. Maka, tidak heran jika caption dari Prof. Franz Magnis Suseno menuliskan bahwa “Anda sudah lama ingin tahu apa filsafat, tetapi selalu tidak sempat, terlalu kabur, terlalu abstrak, terlalu susah, terlalu bertele-tele? Bacalah buku (novel) manis ini di mana Sophie, anak putri 14 tahun, menjadi terpesona karenanya.”

Dalam cerita itu diulas panjang, Sophie menjadi murid seorang filsuf kenamaan, Alberto Knox. Dia mulai menghubungi Sophie tanpa menyebutkan identitasnya. Taoi, dalam rentang cerita itu, perlahan memunculkan identitasnya yang sebenarnya. Dari dialah semua surat-surat dan pelajaran filsafat yang dikirimkan kepada Sophie. Alberto melanjutkan pelajaran filsafat kepada Sophie, mulai dari masa Yunani sebelum Socrates hingga ke Jean-Paul Sartre, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh remaja.

Dari sinilah pengembaraan sejarah filsafat dimulai. Novel filsafat dan fiksi ini yang terkesan sulit dan berat untuk dipelajari. Namun, renyah dan mudah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan berseni. Ini penting mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sejatinya terkait dengan kepentingan kemanusiaan dan nilai yang *embedded* di dalamnya. Sehingga, bukan semata para filosof yang mencernanya secara akademis, tapi juga ruang publik tanpa strata.

Kemudian, gairah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan hidup, bagaimana cara hidup yang baik dan tentang asal-usul alam semesta, misalnya, tak dibatasi oleh usia dan tempat. Setelah semua yang telah dicapai dalam hidup ini, lagi-lagi orang akan terbentur pada pertanyaan yang sama, yang berujung universalisme kemanusiaan.

Universalisme kemanusiaan sejatinya harus disebut diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia tak peduli apa pun warna kulit, etnis, agama, golongan, suku, jenis kelamin, usia, la-

tar belakang, dan seterusnya.

Dengan tidak mempertimbangkan dan memedulikan sekat-sekat itu membuat hidup dijalani dengan tidak sadar. Tapi tak banyak orang yang berani menghadapi pertanyaan mendasar hidupnya dengan terbuka karena prosesnya akan sulit dan menyakitkan. Novel ini, melalui gaya tuturnya yang ringan, mengajak kita untuk menjadi yang berani menghadapi tantangan filosofis itu.

Dalam konteks itulah, uraian buku yang menafsirkan novel filsafat dan fiksi tentang dunia Spohie yang dirumuskan dalam kalimat dan diksi menarik: “Novel Dunia Sophie karya Jostein Gaarder: Perspektif Nilai Moral dan Kepribadian,” (Widodo, 2021).

Tentu, pretensi saudara Widodo dalam menafsirkan novel ini yakni ingin memberikan kabar bahwa novel ini sarat makna dan pesan moral. Pesan ini penting untuk dikontekstualisasi karena berkait dinamika kehidupan kemanusiaan saat ini di mana manusia mulai kehilangan jati dirinya, mengalami disorientasi.

Eksistensi kemanusiaan universal mulai dirampas atau dirampok oleh teknologi. Teknologi inilah yang telah mengendalikan kehidupan, mengatur dengan algoritmanya, sehingga terjadi dehumanisasi. Interaksi kemanusiaan yang konvensional dan impersonal tercerabut dari akar nilai-nilai tradisionalnya.

Maka, buku ini penting untuk mengingatkan kita, manusia dan kemanusiaan kita, bahwa di tengah perkembangan ilmu dan teknologi sejatinya manusia harus selalu mempertanyakan eksistensi, seperti yang tergores dalam awal novel *Dunia Sophie* ini. •

Pengantar Buku: Jakarta, 18 Juni 2021

6 | MENYEMAI KERAGAMAN

REST in Peace (RIP). *In my deepest condolence*, itulah ucapan terakhirku melepas kepergiannya. Kamis (29/11) sore yang gerimis, di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan, salah seorang mahasiswaku pamit menemui Tuhannya, setelah sekian lama berpeluk sakit, jantungnya yang bocor sehingga mengidap hipertensi paru akut.

Seferiana Eka Pasih, itulah nama pemberian orang tuanya. Mahasiswi asal pelosok Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mendiang adalah pemeluk Katolik, bersama puluhan rekannya berasal daerah yang sama aktif kuliah dan aktif di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Institut Teknologi dan Bisnis, Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta (STIE-AD Jakarta).

Menariknya, banyak di antara mereka menjadi anggota dan pengurus aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan telah mengikuti tahapan perkaderan *Darul Arqam Dasar* (DAD) kendati mereka itu *istiqamah* dengan agamanya.

Bahkan, jika ada kegiatan seremoni kampus, mereka kerap tampil sebagai tim paduan suara, menyanyikan Mars Muhammadiyah, Mars IMM, dan tentu di antara mereka mulai fasih belajar al-Qur'an dan bahasa Arab. Sesekali mereka berkelakar, "Kami sudah bermuhammadiyah, tapi belum berislam."

Pada Jum'at (30/11), sesuai melepas jenazah Seferiana di bandara Soekarno-Hatta untuk dimakamkan di kampung halamannya, saya mengundang beberapa mahasiswa beragama Katolik dan Kristen yang berasal dari NTT, Maluku Tengah, dan Tanah Toraja. Kami bersilaturahmi, menanyakan suka duka hidup di tanah rantau, menceritakan bagaimana keadaan keluarganya, dan pengalaman batinnya kuliah di ITB-AD Jakarta.

Remi Iusfay, mahasiswa Prodi Akuntansi yang aktif di IMM, menceritakan kebahagiaannya kuliah di kampus Sang Pencerah. Padahal, dia juga aktivis pemuda gereja di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anak dari Ferdinands dan Theresia, petani serabutan di pelosok Miomaffo Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, menikmati proses belajar di ITB-AD yang terbuka, demokratis, partisipatif, dan tidak eksklusif.

Sosok Remi Iusfay adalah sosok mahasiswa Kristen-Muhammadiyah, Kris-Mu, yang pernah dipopulerkan Abdul Mu'ti (2009) dalam riset doktoralnya yang mengambil kasus SMA Muhammadiyah Ende, NTT.

Sosok Kiyai Dahlan

Terus terang, saya teringat dan terinspirasi pada sosok kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah 106 tahun lewat. Sejak awal, beliau menekankan agar Muhammadiyah bukanlah organisasi bergerak di bidang politik. Tapi lebih banyak bergerak di bidang sosial, terutama pendidikan masyarakat. Bagi kiyai Dahlan, Muhammadiyah sebagai wahana berdakwah dan pendidikan untuk membawa ideologi pembaruan, untuk kemajuan bangsa.

Saat merintis dan membangun sekolah berbasis agama, kiai Dahlan, berkunjung ke sekolah sahabatnya, seorang pastor Katolik berdarah Belanda, Pastur van Lith. Persahabatan Dahlan dengan pastor tersebut untuk berdialog, berdiskusi bagaimana memajukan pendidikan pribumi yang bermartabat dan memanusiakan manusia.

Selain itu, kiai Dahlan tentu juga banyak bergaul dengan tokoh dari berbagai lintas, seperti pendeta, kelompok Boedi Utomo, bahkan dari

Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak mengherankan jika Dokter Soetomo, seorang elit *priyayi* Jawa dan salah seorang pemimpin Budi Utomo (BU) penasaran dengan Muhammadiyah dan bersedia menjadi *Advisor Hooft Bestuur* Muhammadiyah masa itu.

Bahkan, belakangan, sosok kiai Azhar Basyir (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1990-1995), selalu menyampaikan kuliah tentang Muhammadiyah di Akademi Kateketik Katolik Yogyakarta.

Dalam Pedoman Hidup Islami (PHI) yang beredar resmi di kalangan warga Muhammadiyah, secara eksplisit menuntun, bahwa Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan Non-Muslim, dalam hubungan ketetanggaan.

Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.

Keapikan inklusifitas dalam pengelolaan pendidikan dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah seperti gambaran di atas, harus senantiasa dirawat dan dikampanyekan. Islam mengajarkan keramahan, kemanusiaan, tidak diskriminatif, dan senantiasa menjunjung tinggi keadilan.

Jangan sampai hanya kepentingan politik sesaat yang *myopic*, telah mengoyak sulaman kebangsaan kita. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) harus istikamah menyemai keragaman, sikap inklusif, dan tentu di atas nilai-nilai cinta dan kasih sayang. *Wallahu a'lam bish-shawab*. •

Dimuat Harian Kompas, 14 Desember 2018

7 | SAUDAGAR MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH *International Business Forum* (MIBF) digelar di Denpasar, Bali, 25-27 November 2019. Forum itu melibatkan sekitar 450 saudagar dari dalam dan luar negeri. Selain itu, forum itu juga mengagendakan konsolidasi dan penguatan potensi ekonomi Muhammadiyah dengan mengundang Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), terutama *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Lazismu, Dana Pensiun Muhammadiyah (DPM), BPRS Muhammadiyah, dan dekan-dekan fakultas ekonomi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, menjadi titik awal gerakan ekonomi Muhammadiyah dijadikan pilar ketiga. Jauh sebelumnya, Muhammadiyah lebih banyak berfokus pada pilar pendidikan dan pilar sosial dan kesehatan masyarakat. Padahal dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah pasal 3 ayat 6 dijelaskan, usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi adalah, “Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas”.

Secara konseptual, kalimat itu cukup imperatif, ingin memajukan perekonomian dan kewirausahaan yang dapat dicapai dengan pelbagai strategi dan taktik. Karena itu, dalam tanfidz Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2015-2020, bidang ekonomi dirumuskan visi: “Bang-

kitnya etos dan kreativitas ekonomi dalam menguatkan kemandirian Muhammadiyah sebagai wujud kontribusi Persyarikatan bagi kebangkitan ekonomi umat dan bangsa”.

Dalam konteks visi itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah dirumuskan menjadi, *pertama*, menjadikan Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia melalui pengembangan dan pendirian AUM berorientasi bisnis. Secara institusional, Muhammadiyah memiliki potensi yang besar. *Kedua*, memajukan ekonomi warga, yaitu mendorong, membimbing dan memberdayakan ekonomi warga untuk tumbuh dan berkembang menjadi saudagar-saudagar besar. Dan *ketiga*, memajukan ekonomi umat dan bangsa melalui sinergitas dengan semua kelompok umat dan bangsa dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat dan bangsa.

Gerakan Ekonomi

Potensi ekonomi dan bisnis Muhammadiyah, sungguh sangat besar. Sumber daya manusia (anggota dan simpatisan), amal usaha, aset (bergerak dan tidak bergerak), dana (deposito, giro, tabungan, obligasi) dan lainnya, hingga modal sosial (*social capital*) yang dimilikinya, sejatinya menjadi dasar untuk menggerakkan potensi besar itu hingga menjadi kekuatan nyata. Tentu, kekuatan yang mampu *men-drive* dan memberikan *sibgoh* serta tawar-menawar dalam membangun kekuatan ekonomi dan bisnis umat dan bangsa.

Muhammadiyah sebagai entitas kemasyarakatan di tanah air, ikut bertanggung jawab dalam membangun kekuatan dan kemandirian ekonomi umat dan bangsa. Dengan modal yang dimilikinya, Persyarikatan harus mampu mengonsolidasi sumberdaya yang ada. Di tubuh persyarikatan, sungguh banyak perusahaan komersial (korporasi) baik yang dimiliki persyarikatan, warga (pribadi) maupun gabungan warga dan pengurus Muhammadiyah. Baik itu di AUM maupun dalam strata kepengurusan Muhammadiyah.

Banyaknya korporasi (Perseroan) ini, di satu sisi bisa menjadi ke-

kuatan potensial bagi Persyarikatan. Tapi, di sisi lain, justru bisa menjadi permasalahan tersendiri jika tidak dikordinasi dan diorganisir secara apik dengan manajemen profesional. Oleh karena itu, korporasi-korporasi ini terutama yang mengatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah, seyogianya ikut dalam jamaah ekonomi dan gerakan bisnis persyarikatan. Tentunya, memiliki konsekuensi berupa adanya regulasi yang disusun dan diputuskan oleh PP Muhammadiyah.

Dalam konteks AUM, semua AUM harus dipahami sebagai bentuk kekayaan persyarikatan dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Semua aset tidak boleh diakui oleh pengurus, karena semua kekayaan dan amal usaha itu adalah milik persyarikatan. Maka, penguatan pilar gerakan ekonomi melalui usaha yang *didrive* Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah tidak semata mencari laba, tapi juga berdampak positif bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

Di luar itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah juga menggelorakan spirit saudagar. Salah satunya melalui inisiasi Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di pelbagai wilayah/daerah. PP Muhammadiyah punya imbauan agar mereka berkontribusi bagi masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi produktif. Pelayanan umat oleh BUMM (Badan Usaha Milik Muhammadiyah) maupun para saudagar ini tidak harus berupa uang, tapi bisa dalam bentuk lain yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bangsa.

Kado Untuk Bangsa

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang mengandung makna sebagai entitas pergerakan. Dakwah Muhammadiyah lebih banyak tertuju pada dakwah *bil hal*, tidak semata dakwah *bil lisan*. Dengan gerakan yang dakwah lebih konkret dan aktual, maka animo masyarakat terhadap AUM, sangat besar. Bahkan, sejatinya di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, siswa atau mahasiswanya jauh lebih banyak bukan berasal dari warga Muhammadiyah.

Begitu juga di AUM bidang kesehatan, panti jompo, panti asuhan dan

lainnya, juga lebih banyak melayani warga masyarakat umum lintas agama, lintas etnis, suku dan golongan. Juga pada AUM ekonomi, misalnya nasabah BTM, BPRS, koperasi dan lainnya. Artinya, Muhammadiyah berdakwah secara universal, menyemai keberagaman dalam melayani masyarakat terutama level masyarakat lapis bawah.

Maka dalam konteks gerakan ekonomi/bisnis dan jaringan saudagar Muhammadiyah, selain melakukan konsolidasi internal, juga berkiprah pemajuan ekonomi umat dan bangsa. Beberapa gerakan ekonomi yang digelorakan saudagar Muhammadiyah, setidaknya, di bidang pengembangan jasa keuangan syariah, industri produk halal, jejaring industri retail dengan merek SuryaMart, pengembangan agro industri dengan fokus produksi dan distribusi, membangun ekosistem usaha berbasis e-komunitas, dan sektor riil yang berjejaring internasional.

Dalam konteks sektor riil, usaha kecil dan menengah yang dimiliki Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, telah mampu memompa sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Sektor ini penting dalam menopang agregasi ekonomi nasional yang secara makro gejalanya sedang *slow down*. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berorientasi sosial dan usaha bisnis Muhammadiyah yang berorientasi profit, telah memberi efek berganda (*multiplier effect*) bagi pemajuan struktur ekonomi bangsa.

Dalam konteks industri produk halal, Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar dunia, seyogianya menjadi pemain utama. Mengonfirmasi data *State of the Global Islamic Economy* (2017), penduduk Muslim Indonesia menghabiskan US\$ 218,8 milyar untuk sektor ekonomi Islam. Sayang sekali, Indonesia belum optimal memainkan potensi pasar tersebut. Maka, Muhammadiyah merasa terpanggil dan ikut bertanggungjawab memberi solusi dan sebagai aktor mencegah melepuhnya kondisi ekonomi bangsa. •

Sumber: Muhammadiyah International Business Forum (MIBF),

Denpasar, Bali, 25 November 2019

8 | PULANG MALU, TIDAK PULANG RINDU

JUDUL tulisan ini terinspirasi kisah pilu yang amat sangat, termuat dalam salah satu judul tulisan dalam buku *Pejuang Devisa* (Zai & Edy, 2022). Membaca tuntas 10 (sepuluh) kisah suka dan duka yang termuat dalam buku dua penulis muda ini, rasanya tidak tertahankan jika kita tidak ada jeda untuk sesekali menyeka air mata yang tak terasa mengalir. Sayangnya, mata akan berkaca-kaca dibawa oleh keharuan setiap bait cerita fakta yang ditulis dan dideskripsikan secara mengalir oleh penulis.

Dalam kaitan itu, saya tuliskan bait puisi di bawah ini:

Pejuang devisa

Roda kehidupan selalu berputar

Dalam hamparan riski yang penuh ketidakpastian

Tapi yakin, Tuhanlah pemilik mutlak hamparan itu.

Di mana dan kapan pun#

Tatkala kau meninggalkan kampung halaman

Berjuang mengikuti garis hamparan itu,

Pasti, suka dan duka menyertaimu setia.

Boleh jadi, bertahun-tahun kau tinggalkan

*Jauh dari sanak keluarga yang kau cintai,
Bahkan, jauh dari anakmu yang masih belia
Tapi, tekadmu mencari penghidupan yang layak
Tekadmu menjemput riski
Tekadmu mengubah masa depanmu#*

*Demi tekad itu
Kau rela tinggal di negeri orang
Acapkali kau diasingkan di negeri itu
Tidak diperdulikan, selalu dicampakkan dengan cibiran.
Kau tetap tegar menghadapi semua hinaan*

Karena tekadmu mulia, membahagiakan keluarga#

*Demi tekad itu, kau tetap bertahan
Semua itu, kau anggap hanyalah sebuah cobaan
Perjuangan memerlukan tantangan
Kesuksesan diawali dengan penderitaan#*

*Demi tekad itu,
Kau tak pernah memperdulikan
Harapanmu, kau kembali sebagai kebanggaan keluarga
Membawa harum nama bangsa di negeri orang,
Karena kau adalah duta bangsa
Duta yang menjadi kebanggaan kita semua#*

(Jakarta, 16 Februari 2020)

Puisi di atas tentu mengisahkan tekad sebagai pejuang devisa. Para pejuang itu, telah terpisahkan oleh jarak dan waktu. Jauh dari orang tua, keluarga dan orang yang dicintai. Mereka tersebar di ujung penjuru-penjuru dunia. Mereka jalani hari-harinya bekerja di luar negeri demi satu tujuan pasti agar mampu mengubah kehidupannya agar lebih layak. Mereka bulatkan tekad untuk terus maju agar bisa bekerja di negara yang

memang mereka tuju.

Maka, kisah soal TKI di luar negeri acapkali berupa lakon susah hati, cerita pilu. Dihukum, dimarjinalkan, bahkan juga ada yang dipancung hingga mati. Kesusahan, kesedihan, kasus dan masalah sepertinya jadi stigma bagi mereka, pahlawan devisa.

Mengapa pahlawan devisa? Yah, karena mereka layak menyandang kata pahlawan. Mereka bukan dari panggung mewah atau ruangan yang berpendingin, justru di tengah segudang kesusahan dan cercaan yang mereka alami, gepokan kesenangan tercipta dari bergudang uang yang mereka kirimkan dari negeri tempat bekerja. Mereka adalah pahlawan devisa untuk Indonesia. Menyumbang sangat banyak remitansi untuk negara.

Bekerja adalah hak setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dinyatakan “setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bagaimanapun juga, sebagai warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, TKI tetap memiliki kewajiban-kewajiban WNI, apalagi TKI adalah “duta” Indonesia tempat di mana mereka bekerja. Tentunya para pahlawan devisa itu membawa nama dan citra (*image*) Indonesia di luar negeri.

Selain itu, harap diingat, tidak patut bagi Pemerintah abai atas nasib para pahlawan devisa itu yang kerap dirudung malang. Terlebih mengambil untung dari mereka yang sudah bekerja keras membanting tulang. Sebab para pekerja migran (pahlawan devisa) yang berkontribusi banyak bagi Indonesia.

Mengonfirmasi data Bank Indonesia (BI-2019), jumlah total buruh migran Indonesia berjumlah 3,89 juta jiwa pada 2018. Mereka, tersebar di lima benua. Buruh migran asal Indonesia paling banyak bekerja di negeri jiran Malaysia. Jumlahnya nyaris dua juta jiwa, setara lebih dari separuh jumlah total buruh migran asal Indonesia. Negara kedua dengan populasi tenaga kerja Indonesia terbanyak adalah Arab Saudi dengan 1,012 juta jiwa. Lantas disusul Hongkong, dengan populasi pekerja Indonesia sebanyak 180 ribu jiwa.

Berkirim uang bagi mereka yang layak disebut para pahlawan devisa. Berikirm uang ke orang-orang yang dicitainya. Itu merupakan hal yang lumrah. Hasil perasan keringat mereka di negeri jauh tak pernah lupa mereka bagi kepada keluarga di kampung halaman, nyaris setiap bulan.

Tercatat dari data Bank Indonesia (BI), nilai remitansi atau transfer uang dari para pahlawan devisa ke dalam negeri mencapai US\$ 8,8 miliar dalam setahun. Apabila dihitung berdasar kurs Rp 14.530 per dolar AS, nilai remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu ekuivalen dengan Rp 128 triliun. Dahsyat *kan*?

Kendati cukup tinggi, nilai remitansi itu belum ideal untuk ukuran negara sebesar Indonesia. Coba tengok, remitansi dari pekerja migran asal Filipina jauh lebih besar. Filipina, negara lebih kecil dari Indonesia itu, tingkat remitansinya US\$ 24 miliar setahun. Meskipun demikian, minimnya angka remitansi belum tentu disebabkan oleh jumlah dana kiriman pahlawan devisa itu yang sedikit.

Sebab, bisa jadi ada transfer dana dari mereka yang tidak tercatat. Rendahnya angka remitansi yang tercatat bisa jadi dipicu karena banyak pekerja migran dan keluarganya di Indonesia belum menggunakan layanan perbankan secara maksimal.

Padahal sudah tercapai 62 persen remitansi sudah menggunakan transaksi non-tunai. Namun demikian, sebagian dari pembayaran tersebut kerap tidak memakai rekening asli pengirim maupun penerimanya. Banyak transfer uang dari pekerja migran yang dilakukan melalui nitip ke orang yang dipercaya. Latas, kemana larinya duit kiriman TKI?

Ratusan triliun itu memang tak bertumpuk di satu meja hingga bisa dimanfaatkan sekaligus. Kirimannya datang berkala, bisa per bulan, bahkan lebih. Menurut BNP2TKI dari jumlah total remitansi yang masuk, sekitar 65 persen di antaranya digunakan untuk keperluan konsumsi. Masih sangat sedikit yang dipakai investasi.

Namun demikian, di balik gemerincing triliunan duit remintasi para punggawa devisa Indonesia, tersimpan cerita kemalangan, kisah yang

mengharu biru. Ribuan pengaduan setiap tahunnya diterima Pemerintah dari para pahlawan devisa yang membanting tulang di negeri jauh.

Menurut data BNP2TKI sesuai pengawasannya, ada sebanyak 78 jenis aduan yang biasanya dikeluhkan para buruh migran. Mulai dari persoalan gaji tidak dibayar, kekerasan, putus hubungan komunikasi, wafat di negara penempatan, pekerjaan tak sesuai kontrak, melarikan diri dari majikan, perkosaan, hingga masalah sihir. Dari data BNP2TKI itu pula, tiga pengaduan terbanyak biasanya seputar permasalahan gaji. Menyusul setelah itu soal kontrak kerja dan kekerasan.

Malaysia dan Arab Saudi merupakan dua negara asal datangnya pengaduan terbanyak. Sebabnya, dua negara itu juga merupakan tujuan para pencari kerja migran. Hal itu dibuktikan dengan tingkat remitansi tertinggi juga datang dari dua negara tersebut.

Secara makro, tatkala para pahlawan devisa itu mengirimkan uang ke tanah air terjadi sumbangan devisa negara. Karena para pekerja migran ini harus “membeli” rupiah dengan menggunakan mata uang asing.

Secara teoritikal, semakin banyaknya mata uang asing, yang ditukarkan untuk sejumlah rupiah akan berakibat pada 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, bertambahnya simpanan uang asing yang menjadi sumber devisa. *Kedua*, kebutuhan terhadap rupiah meningkat, dan sesuai hukum *supply and demand*, maka nilai mata uang rupiah akan menguat dibanding mata uang asing

Semakin banyak para pejuang devisa itu menghasilkan upah dan mengirimkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Tentu, semakin besarnya juga pertumbuhan devisa negara maka akan berimbas pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dewasa ini, nilai devisa yang dihasilkan para pejuang devisa ini berada di posisi kedua setelah sektor migas dalam hal pendapatan devisa negara. Itu pun merupakan kontribusi devisa dari pekerja migran jalur legal. Selain para pejuang devisa yang memang terdaftar atau resmi dan mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia, terdapat pula pekerja mi-

gran yang pergi mencari nafkah dari jalur ilegal.

Maka, sebagai pahlawan devisa, jika mereka yang menjadi legal maupun ilegal dikumulatifkan dengan disertai pembenahan dan peningkatan penanganan pekerja migran, tentu diprediksi akan menjadi sektor utama penghasil devisa negara Indonesia. Namun sayang, jika dibandingkan dengan negara yang juga banyak memiliki pahlawan devisa di luar wilayahnya, sebagai sampel, Filipina dan India, Indonesia masih cukup jauh tertinggal.

Kendati demikian, bagaimanapun juga, kita patut bangga kepada para pahlawan devisa kita yang mencari nafkah di luar negeri. Dengan peluh dan terkadang bertaruh nyawa, mereka membawa hasil jerih payahnya ke Tanah Air. Remitansi yang mereka alirkan ke negeri tercinta yang sedang mengalami “kurang darah” karena defisit akun lancar (*current account*) telah mencapai dua digit. Dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin jumlahnya bakal melampaui penerimaan devisa dari turis asing.

Sumbangsih para pahlawan devisa dalam perolehan devisa pada 2018 melebihi ekspor minyak (US\$ 7,9 milyar), ekspor gas (US\$ 6,8 milyar), dan nyaris menyamai surplus dagang non-migas (US\$ 11,2 milyar). Maka, moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara tidak membuat nilai remitansi turun, karena semakin banyak TKI lebih terampil yang berkiprah di luar negeri dengan gaji/upah yang lebih tinggi.

Para pahlawan devisa ini patut memperoleh penghargaan setimpal karena telah mengurangi tekanan eksternal yang dialami perekonomian Indonesia. Mereka juga telah berkontribusi mengurangi penduduk miskin dengan membantu keluarganya di kampung halaman, dan juga angka pengangguran.

Maka, apresiasi yang cukup tinggi untuk para sahabat, saudara kita, para pahlawan devisa yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara kita. Cerita yang dikisahkan dalam buku *Pejuang Devisa* (Zai & Edy, 2022) memantik kita terharu, bahwa para pekerja migran layak disebut mujahid-mujahid bangsa. Tetesan air matamu dan kisah perjuanganmu, menyentakkanku bahwa sesungguhnya kau harus dibela, diadvokasi, dan didampingi agar perjuanganmu tidak sia-sia. *Wallahu a'lam.* •

9 | TANGIS PILU BURUH PABRIK: BUNUH DIRI DAN PSK

SEPANJANG Ahad (3/5/2020), saya mem-*browsing* beberapa berita pilu terkait derita rakyat kecil di perkotaan. Tampaknya, efek wabah Covid-19 telah banyak meluluhlantakkan fakta kehidupan.

Kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan kian getir meningkat. Setali tiga uang, kriminalis (perampokan, pencurian, penjambratan, dll) tumbuh bagai cendawan di musim hujan.

Dua berita yang menyentuh hati, *pertama*, Ada PHK Massal Dampak Covid-19, Karyawan Pabrik Bunuh Diri di Sukamulya (*Kabar6.com*). *Kedua*, Kena PHK saat Wabah Corona, Buruh Pabrik di Bandung Terpaksa Jadi PSK (*Suara.com*).

Pada berita pertama, tertuju pada kisah warga Kampung Ceplak, RT 01/02, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Tangerang. Korban ditemui sudah tak bernyawa di kamar tidurnya. Ia meninggal setelah bunuh diri dengan cara memotong urat nadi tangan menggunakan sebilah pisau.

“Kemungkinan depresi karena di pabrik almarhum banyak yang di-PHK sampai dua ribuan orang, karena almarhum kebanyakan cuti jadi sudah ketakutan duluan takut di PHK,” ungkap kerabat dekatnya.

Amarhum diketahui bekerja di PT Shyang Yao Fung, berlokasi di kawasan industri Jatiuwung, Kota Tangerang. Pabrik sepatu itu sedang melakukan PHK massal akibat terdampak pandemi Covid-19.

Kerabatnya menduga almarhum depresi atas rentetan persoalan yang membelitnya. Istri korban yang bekerja di PT PWI Serang kecelakaan hingga patah kaki dan kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS). Istrinya sudah tiga minggu dirawat di Serang akibat kecelakaan waktu berangkat kerja menggunakan angkutan umum.

“Almarhum pulang malam habis *nengok* istrinya di RS. Sebelumnya, almarhum memang sudah *ngeluh* sakit masuk angin. Nah pulang dari situlah *ngurung* diri di kamar pintu pun dikunci. Karena posisi ruang tamunya gelap jadi gak kelihatan *tuh* si darah udah ngalir ke bawah pintu akhirnya ketahuannya siang jam 9,” ujar tetangganya.

Pada berita kedua, tertuju kisah seorang buruh perempuan pabrik yang menjadi korban PHK. Sudah tiga minggu ini, Rani (nama samaran), setiap pukul 16.30 WIB, langsung bersiap untuk ke tempat kerjanya yang baru. Berangkat dari rumah, ia hanya berbekal lipstik dan beberapa peralatan *make up* lainnya. Penampilannya tidak mencolok.

Namun, sesampainya di tempat kerjanya yang baru, wanita itu langsung bersolek sambil menunggu adanya instruksi dari seseorang untuk melayani tamu. Sebelumnya, ia hanya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik garmen, di kawasan Holis, Kota Bandung.

Semenjak wabah corona merebak, dirinya harus diberhentikan perusahaan. Alasannya, karena pabrik harus berhenti beroperasi, semenjak pemerintah gencar untuk meminta *work from home* atau bekerja di rumah.

Berstatus sebagai pegawai kontrak sejak 2009, perempuan asal Kota Cimahi, yang lahir pada 1985 ini, tidak mendapat apa-apa dari perusahaan tersebut. Hanya gaji terakhir yang ia dapatkan, itu pun tidak mencapai upah minimum kabupaten atau kota, tempat ia bekerja.

“Status kontrak, jadi udah pas diputus kerja, enggak dapat apa-apa selain gaji,” katanya, saat ditemui, di salah satu apartement, di Kota Ci-

mahi, tempat ia bekerja. Di apartemen itu, ia tidak bekerja sebagai staf atau manajemen. Melainkan, ia menjajakan dirinya kepada setiap pria hidung belang, yang didapat dari aplikasi ponsel pintar berbasis internet.

Memiliki tubuh yang cukup gempal, dengan tinggi tak lebih dari 160 sentimeter, wanita berambut pirang itu mengaku baru menjajal dunia tersebut. Ia diajak oleh rekannya, yang dulu ia pernah kenal saat masih bekerja di pabrik garmen. “Baru semingguanlah. Semenjak corona *weh*, jadi harus gini,” ucap dia.

Kesehariannya, ia menjadi *single parent* bagi kedua anaknya. Semenjak bercerai tiga tahun lalu, ia menghidupi anaknya yang duduk di bangku SMA kelas XII serta satu anak lainnya di TK. Kisah percintaannya cukup pelik. Beberapa kali, ia mengaku diselingkuhi, oleh mantan suaminya itu.

Dalam pekerjaan yang baru ini, ia mulai berangkat sore hari setelah pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, hingga membantu mengerjakan pekerjaan sekolah anak-anaknya. Selepas itu, ia langsung berangkat dengan alasan, kerja *sift* malam. “*Yah* paling jam 9 atau jam 10 (malam) baru pulang,” tutur dia.

Bukannya tak ingin mencari pekerjaan lain. Dirinya mengungkapkan, di situasi seperti saat ini, pekerjaan yang mudah dan cepat menghasilkan uang hanya dengan cara seperti ini. Berkedok dengan menjajakan pelayanan pijat, setiap tamu yang ia layani, kerap ditawarkan untuk menjajal tubuh wanita itu.

Menyinggung soal bantuan sosial dari pemerintah, yang saat ini tengah digadang-gadangkan, ia mengaku tidak dapat bantuan tersebut. Pengurus warga tempat ia tinggal, katanya lebih mementingkan kerabat dan keluarganya sendiri daripada warganya. “RWnya *weh* itu, *mentingin* saudaranya *weh* daripada warga. Dianggapnya mungkin saya masih bisa kerja,” katanya.

Dua kisah pilu di atas, saya kira telah mewakili jutaan orang yang menjadi korban PHK. Data teranyar menyebutkan, sudah ada 76.000 perusahaan yang mem-PHK karyawannya, belum termasuk perusahaan

yang merumahkan.

Skenario terpahit, jika wabah ini tidak berhenti hingga November 2020, jumlah yang akan di PHK sebanyak 12 juta jiwa. Saya sulit membayangkan, bagaimana nasib masyarakat kita ke depan? bagaimana fakta patologi sosial yang bakal menyeruak, kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran?

Pantaskah kita masih terbahak-bahak melihat fakta ini? Pantaskah jika ada segelintir orang masih memancing di air keruh untuk memperkaya diri dan kelompoknya? Pantaskah, jika para elite politik dan para korban residu politik masih cakar-cakaran dan membelah-belah kehidupan ini? Di mana sensitivitas sosial kita?

Tapi, saya masih yakin, semua ini ada hikmahnya. Ada *blessing in disguise*. Kita masih memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Memiliki empati untuk membantu sesama tanpa melihat sekat-sekat latar belakang.

Saya pun teringat, modal sosial kita berupa hidup gotong-royong. Saya juga mengingat bahwa bangsa kita, merujuk survei *Charity Aid Foundation* (2019), bahwa rakyat Indonesia sebagai orang yang paling dermawan di planet ini. Masyarakat kita selalu tulus membantu orang yang tidak dikenal, selalu berdonasi, dan selalu berpartisipasi dalam gerakan filantopi. Itulah modal sosial yang harus kita lipatgandakan. •

Refleksi Covid-19, PC IMM Kota Tangerang, Karawaci, 3 Mei 2020

10 | BISNIS APLIKASI = BISNIS BERBAGI?

KERICUHAN yang dipicu demo anarkis para sopir taksi dan pengemudi umum telah mengganggu aktivitas ekonomi ibukota negara, DKI Jakarta, pada Selasa (22/3). Perseteruan antara bisnis layanan taksi konvensional dengan bisnis layanan taksi berbasis sistem aplikasi *online* menjadi biang pemantiknya.

Bukan saja terjadi di ibukota negara, tapi sebelumnya telah menyeruak di pelbagai penjuru ibukota negara maju lain, terutama belahan Eropa dan Amerika, hingga ke India dan Cina.

Tidak pelak lagi, masyarakat di ibukota pun terpecah. Bagi pelaku bisnis konvensional yang telah berada dalam zona nyaman (*comfort zone*) merasakan sistem aplikasi itu dianggap wabah *unnatural*.

Bisnis yang *unnatural* ibarat *bubble economy*, mudah ambruk karena tidak disokong fundamental manajerial yang kokoh. Sementara, bagi pelaku bisnis berbasis aplikasi menganggap bisnis konvensional sudah di ujung tanduk.

Tingkat produktivitas jenuh dan tergerus, karena disandera oleh efisiensi dan efektifitas rendah. Bahkan, pada kasus taksi konvensional, terjadi *high cost economy* karena dijerat pelbagai regulasi, pungutan ilegal dan banyak kepentingan *rent seeker*.

Lantas mengapa bisnis berbasis aplikasi ini begitu menarik? Bukan saja bagi para investor kakap multinasional tergiur menanamkan investasinya, tapi juga masyarakat umum kelas menengah ke bawah pun ikut menikmati layanan murah, ramah, transparan, dan akuntabel. Pertanyaan selanjutnya, apakah layanan mereka itu kompatibel dengan spirit ekonomi Islam dan nasionalisme ekonomi kita?

Dalam konteks itulah, ada dua pendekatan dari bisnis sistem aplikasi online, yakni *sharing economy* dan *disruptive innovation*, yang perlu ditelaah karena ia telah bersentuhan langsung pada segmentasi basis ekonomi masyarakat bawah perkotaan.

Dua Pendekatan

Keunggulan sistem aplikasi dalam bisnis, terutama untuk jasa transportasi, karena memanfaatkan pendekatan *sharing economy* dan *disruptive innovation*. Dalam *sharing economy*, seperti yang diulas Georgios Petropoulos dalam *Uber and the economic impact of sharing economy platforms* (22/2/16), menekankan pelibatan bisnis *public sharing*, bukan lagi dalam kerangka *owning sharing*.

Artinya, bisnis yang melibatkan ruang partisipasi publik dengan sistem aplikasinya membuat publik ikut merasakan manfaatnya. Bukan saja bagi driver atau pemilik kendaraan tapi juga bagi konsumen. Pelibatan dua *stakeholders* ini, telah memacu efisiensi dan produktivitas tinggi dalam bisnis.

Dalam konteks operasionalisasi *sharing*, juga terlihat dalam rumusan bagi hasil melalui platform *online*, di mana 80-95% dari setiap tarif dimiliki driver dan sisanya diserahkan ke Uber. Uber hanya menyewakan aplikasi yang dihitung per tarif penumpang, sementara driver tidak terobsesi mengejar target atau setoran sehingga *user-friendly*.

Maka tidak mengherankan, jika ukuran pertumbuhan ekonomi Uber dianggap *unnatural*, tumbuh tidak terkendali. Hingga akhir Desember 2015, misalnya, aplikasi *Uber* memperoleh nilai valuasi US\$ 6 milyar

atau Rp 780 triliun sejak berdirinya enam tahun lalu. Tentu valuasi ini melampaui valuasi perusahaan selama 100 tahun, terutama dibandingkan perusahaan kakap, General Motors dan Ford, serta perusahaan “tradisional” jaringan jasa transportasi dunia, seperti Hertz dan Avis di USA (<http://bruegel.org>).

Bagaimana dengan pendekatan *disruptive innovation*? Clayton Christensen dkk dalam *What Is Disruptive Innovation?* (25/12/05), menguraikan bahwa inovasi ini telah memanfaatkan aplikasi sederhana dengan menggarap segmentasi basis masyarakat bawah yang selama ini kurang digarap serius oleh pendekatan konvensional.

Dengan pendekatan *disruptive*, perusahaan tidak perlu berdiri secara formal, tidak perlu organisasi yang rapi dan ketat, tidak banyak melibatkan karyawan dan rantai kendali manajemennya pun sederhana.

Tentu, model pendekatan bisnis seperti ini menyulitkan pihak regulator (pemerintah) dalam *treatment policy*. Demikian pula, lambat atau cepat, *disruptive innovation* akan segera merontokkan bisnis dengan pendekatan formal yang konvensional.

Nilai Berbagi

Secara prinsip, pendekatan *sharing economy* sangat kompatibel dengan prinsip berbagi dalam ajaran Islam. Dalam Islam, dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia paling bermanfaat (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni). Tatkala menjalankan roda bisnis, hendaknya kaum Muslim lebih mengutamakan akhlak mulia daripada sekadar mencari keuntungan.

Sedangkan keuntungan merupakan *side effect* akibat menjalankan bisnis yang benar sesuai syariat. Dalam *sharing economy*, selain dibutuhkan akad yang transparan dan akuntabel, juga dibutuhkan niat yang tulus. Ketulusan inilah melahirkan prinsip saling membagi (*sharing*).

Allah SwT berfirman bahwa, “*Dia akan membalas setiap kebaikan hamba-hamba-Nya dengan 10 kebaikan.*” Bahkan, di ayat yang lain dinyatakan

700 kebaikan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan, “*Pancinglah rezeki dengan saling membagi.*” Selain itu, saling membagi dapat menolak bala. Rasulullah saw bersabda, “*Bersegeralah saling membagi sebab yang namanya bala tidak pernah bisa mendahului saling membagi.*”

Bahkan, prinsip saling membagi itu dapat menyembuhkan penyakit. Rasulullah saw menganjurkan, “*Obatilah penyakitmu dengan saling membagi, dan saling membagi dapat menunda kematian dan memperpanjang umur.* Kata Rasulullah saw, “*Perbanyaklah saling membagi, sebab saling membagi bisa memanjangkan umur.*”

Dalam konteks pendekatan *sharing economy* di dalam bisnis aplikasi *online*, sejatinya telah memanfaatkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hanya persoalannya, tatkala bisnis aplikasi ini menggurita, banyak pihak kapitalis jahat memanfaatkan bisnis sistem layanan ini untuk mengeruk surplus ekonomi.

Menurut CK Prahalad dalam *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits* (2004), sejatinya surplus ekonomi itu terletak pada segmentasi masyarakat bawah (*bottom of the pyramid*). Secara kuantitatif, empat miliar orang miskin di dunia dan sekitar 30 juta di Indonesia, adalah pasar potensial yang besar.

Dari sudut daya beli riil, potensi pasar *bottom of the pyramid* lebih dari 13 triliun dollar AS, melebihi nilai total pasar Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia. Sehingga tidak mengherankan, eksistensi bisnis sistem aplikasi tentu secara telanjang memanfaatkan untuk mengeruk surplus ekonomi pada pasar *bottom of the pyramid* untuk kepentingan kapitalis jahat. Tentu, dengan memafaatkan komparadornya di setiap negara berkembang yang berpenduduk besar. Jika ini terjadi, nasionalisme ekonomi bisa dipertaruhkan. *Wallahu ‘alam.* •

Republika, 24 Maret 2016

11 | TOLERANSI AGAMA (EKONOMI) KIAI HASYIM

SECARA pribadi, saya tidak begitu dekat dengan almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Tapi secara batin, saya bisa menangkap makna, pesan, dan gagasan toleransi yang kerap beliau lontarkan di pelbagai kesempatan. Intinya, bagaimana bangsa Indonesia yang besar dengan keanekaragaman budaya, etnis, agama, suku, ras, bahasa, hingga keanekaragaman pulau, topografi, dan seterusnya, yang diwariskan oleh nenek moyang dan para *the founding fathers* ini, kita rawat dengan baik sehingga bisa menjadi modal sosial mewujudkan bangsa yang berwibawa dan bermartabat.

Menurut Kiai Hasyim, bagaimana kekuatan umat Islam, sebagai kekuatan mayoritas secara populasi harus selalu menjaga NKRI dan menguatkan konsep kebangsaan melalui sikapnya yang *tasamuh* (toleran), *tawassuth* (moderat), dan *tawazun* (seimbang). Tiga rangkaian konsep ini sudah tepat, bukan semata diartikan sempit. Sejatinya, juga menyangkut kebhinekaan dan keragaman kehidupan berbangsa, termasuk melindungi minoritas secara populasi.

Dalam ceramahnya sebagai pemimpin *World Conference on Religions for Peace* (WCRP) dan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS), dalam sidang PBB di Jenewa, Swiss, Kiai Hasyim menyampaikan, “Se-

lama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun yang setoleran Indonesia.”

Apa makna pernyataan itu? Artinya, masyarakat Indonesia selalu mampu merawat toleransi, terutama merawat relasi mayoritas dan minoritas. Esensinya, menurut Kiai Hasyim, agar mayoritas melakukan toleransi bahkan perlindungan terhadap minoritas. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia selalu ditempatkan pada posisi intoleran dan tidak Bhinneka Tunggal Ika.

Padahal fakta mayoritas dan minoritas di Indonesia ada dua spektrum. Menurut Kiai Hasyim, spektrum yang dimaksud adalah mayoritas dan minoritas dilihat dari jumlah (populasi) dan mayoritas/minoritas dari segi potensi dan peranan termasuk potensi ekonomi di Indonesia. Lazimnya, menyebut mayoritas ditinjau dari segi populasi, yang artinya adalah pribumi. Sedangkan jika ditinjau dari segi keagamaan yang dimaksud adalah umat Islam.

Bertalian dengan sistem ketatanegaraan yang masih liberalistik, ungkap Kiai Hasyim, dalam politik yang justru membuahkan sub-sistem ekonomi yang sentralistik, terjadilah mayoritas dalam jumlah baik tinjauan populasi maupun agama berposisi sebagai minoritas di bidang kapasitas ekonomi, bahkan kapasitas dalam tata kelola nasional atau internasional. Dalam konteks ini, minoritas mempunyai potensi ekonomi jauh lebih besar dibanding dengan mayoritas dalam jumlah yang posisi ekonominya masih rendah.

Kiai Hasyim mangkonstatir, bahwa mayoritas dalam populasi dan agama relatif telah melakukan toleransi dan perlindungan sekalipun belum optimal, dikarenakan terjadinya pergesekan secara sporadis di pelbagai wilayah. Justru, yang belum terlihat adalah toleransi minoritas yang berkekuatan mayoritas di bidang ekonomi dan peranan membagi toleransinya kepada mayoritas yang rendah potensi ekonominya. Kiai Hasyim mengakui, toleransi di bidang ekonomi dan peranan global tidak mungkin dengan sendirinya terjadi tanpa usaha keras dari negara dan

bangsa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, perlu dimaknai bahwa toleransi tidak semata dilihat dalam spektrum populasi, tapi juga dalam spektrum kekuatan ekonomi. Mereka yang memiliki potensi atau kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang (oligarki ekonomi) yang justru minirotas secara populasi, harus sadar terhadap bahayanya eksplosi atau ledakan sosial jika ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik.

Dengan demikian, makna toleransi harus diperluas dan dirawat dengan kebijakan dan regulasi yang adil. Karena sejatinya, Indonesia akan bisa menjadi bangsa besar dan tangguh ke depan, jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai makna imperatif Sila ke-V Pancasila, ditegakkan dengan penuh kesungguhan, bukan retorika panggung politik.

Intoleransi Ekonomi

Menyimak apa yang disampaikan Kiai Hasyim itu, bahwa bagaimana toleransi minoritas yang berkekuatan mayoritas di bidang ekonomi, menegakkan makna toleransinya. Tidak semata toleransi mayoritas dalam populasi memahami mereka yang minoritas dalam populasi. Sebab bagaimanapun, kekuatan mayoritas secara ekonomi jika tidak dikendalikan dengan kebijakan dan regulasi yang tepat akan mengakibatkan relasi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi.

Sejak dari awal, saya memahami paparan kiai dalam konteks intoleransi ekonomi itu. Makanya, dari awal juga saya memahami bahwa akar kegaduhan politik bangsa saat ini, bukan semata soal penistaan agama, tapi lebih dipicu semakin akutnya patologi sosial berupa intoleransi ekonomi, yakni ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi.

Bung Hatta (1975) jauh hari telah berpesan, bahwa damai hanya bisa tegak di atas keadilan sosial. Dengan demikian, jangan berharap ada perdamaian (toleransi) jika keadilan tidak tegak (intoleransi). Karena itu,

fakta-fakta ketidakadilan dan intoleransi ekonomi harus diamputasi.

Bagaimana mungkin kita bisa hidup toleran jika pendapatan negara, dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sementara 80 persen penduduk –atau lebih dari 205 juta orang– rawan merasa tertinggal. Ataukah 50 orang terkaya di Indonesia kekayaannya mencapai US\$ 102 miliar atau sekitar Rp 1.326 triliun. Nilai kekayaan sebesar ini ekuivalen dengan 16 persen dari PDB Indonesia (2015).

Dalam rentang 2005-2014, bagian 10 persen terkaya di Indonesia menambah konsumsi mereka sebesar 6 persen per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40 persen masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka hanya tumbuh kurang dari 1,6 persen per tahun. Bahkan, pada 2014 konsumsi dari 10 persen penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54 persen penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014).

Bagaimana mungkin kita bisa hidup toleran, jika tanah (lahan) di Indonesia dikuasai pemilik modal raksasa dan asing? Bayangkan jika 0,2 persen penduduk, menguasai 66 persen aset lahan nasional. Merujuk riset Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2015), sekitar 35 persen daratan

Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Seperti yang diungkap *the Institute For Global Justice* (IGJ) kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Sehingga, hingga kini 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing.

Bagaimana kondisi ketimpangan di Jakarta sebagai titik episentrum kegaduhan politik nasional saat ini? Mahalnya harga tanah di Jakarta tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis properti. Merujuk konsultan properti, Knight Frank, menobatkan Jakarta peringkat tertinggi dalam perkembangan dari 30 kota lain di dunia. *Global Cities Index* (2014) meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia.

Konsekuensinya apa? Tentu warga miskin kota menjadi korban peng-

gusuran lahan, bahkan secara biadab. Demikian juga, lahan di kawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Mengonfirmasi hasil riset Universitas Tarumanagara (2012), ada 28 kota baru di area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai tujuh pengembang besar. Ketujuh pengembang tersebut adalah Sinarmas Land, Jaya Real Property, Lippo Group, Sumarecon, Paramount Land, Alam Sutera dan Bakrieland Development. Bahkan, MNC Group, salah satu kerajaan bisnis di Indonesia, membangun sebuah tempat wisata mewah berlokasi di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata mewah itu memerlukan tanah seluas 2000-an hektar. Tempat wisata mewah itu tentu diperuntukkan bagi kalangan berduit, bukan kaum melarat yang tidak punya tanah.

Nasionalisme Ekonomi

Dengan fakta patologi sosial ekonomi yang makin akut, saya setuju apa yang acap disampaikan Kiai Hasyim tentang makna nasionalisme. Nasionalisme tidak semata cinta terhadap Tanah Air, tapi bagaimana menegakkan ungkapan *hubbul wathan minal iman*, yakni nasionalisme Islam yang menyatu dengan keindonesiaan. Atau dengan kata lain, bagaimana prinsip moral kebangsaan harus dibarengi dengan pemahaman keagamaan. Jika tidak, pergeseran fungsi dari menegakkan keadilan sosial-ekonomi akan menjadi sebuah tindakan keserakahan.

Dengan demikian, dalam konteks toleransi ekonomi, maka nasionalisme ekonomi jangan sampai memberi “karpet merah” kepada pemilik oligarki modal dan politik untuk berdaulat.

Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi tidak lagi “disusun” sesuai makna konstitusi ekonomi nasional, tapi dibiarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar yang telah dirampas oleh kekuatan oligarki.

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi *jongos* bagi sekelompok kecil elite ekonomi dan politik. Dengan demikian, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raya tetapi rakyatnya banyak melarat. Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme ekonomi Indonesia memang merawat kolektivisme dan menentang kapitalisme.

Demokrasi ekonomi, meniscayakan terbukanya ruang partisipasi dan emansipasi pelaku ekonomi rakyat. Karena itu, diperlukan simultansi transformasi sosial dan ekonomi, guna membangkitkan gerakan ekonomi yang berwajah kebersamaan dan kekeluargaan.

Maka langkah *pertama*, lakukan segera reformasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, termasuk sertifikasi lahan rakyat yang hanya bergerak di mulut pejabat pemerintah. Redistribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran. Perlunya kebijakan batas maksimum, agar setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya.

Kedua, negara harus selalu menyapa rakyatnya. Berikan aksesibilitas yang seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat, dan jangan biarkan ekonomi rakyat dieksploitasi oleh pemilik modal dengan dalih modernisasi ekonomi.

Dalam kaitan itu, Kiai Hasyim juga memandang bahwa “Kita sulit menunggu terjadinya *homo homini sosius* (ekonomi berwatak sosial) karena pada hakikatnya ekonomi itu bersifat *homo homini lupus* (eksploitasi dari ekonomi kuat kepada ekonomi yang lemah).” Namun demikian, Hasyim mengingatkan ada tiga syarat besar dan berat untuk menciptakan *homo homini sosius* di bidang ekonomi yaitu:

Pertama, sistem ekonomi di dalam ketatanegaraan dan konstitusi serta perangkat aturan perundangan di Indonesia yang menjamin ter-

selenggaranya pemerataan ekonomi. *Kedua*, penyelenggara negara yang konsisten dalam menjalankan jalur-jalur pemerataan tersebut. hal ini tidaklah gampang karena menyangkut masalah kepentingan dan masalah keinginan seseorang di dalam menumpuk kekayaan. *Ketiga*, kesiapan mental ekonomi kerakyatan, *skill*, dan kesempatan yang sama di dalam mencari rezeki serta perlindungan usaha-usaha kecil.

Dengan demikian, kata kiai Hasyim, bahwa tiga hal tersebut yang merupakan syarat mutlak pemerataan dan kemakmuran masih terlihat sangat dini di Indonesia. Kendati masih sangat dini, saya yakin harapan yang dicitakan oleh Kiai Hasyim menjadi jiwa dan spirit untuk kita perjuangkan. Jasad Kiai Hasyim boleh ditelan bumi, tapi spirit mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial ekonomi tidak boleh padam. Akhirnya, selamat Kiai Hasyim menempuh “hidup baru” dipangkuan kekasihmu, Sang Pencipta. •

Kontribusi Tulisan Takziah Mengenang Kiyai Hasyim Muzadi,

28 Maret 2017

BAGIAN KETIGA

GERAKAN EKONOMI MUHAMMADIYAH

1 | GERAKAN MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH lahir 111 tahun lampau, tepatnya 8 Zulhijjah 1330 H atau 18 November 1912. Menyitir keterangan Kiai Syudja, murid Kiai Ahmad Dahlan, bahwa ide inti pendirian Muhammadiyah merujuk pada QS. Al-Anfal; 24, *‘Wahai orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila kamu telah dipanggil kepada apa yang dapat menghidupkan kamu...’*

Apa makna diktum dari pesan ayat tersebut? Kiai Dahlan menafsirkan, Islam sebagai agama *rahmat lil ‘alamin* bukan sekadar agama pemuas spiritualitas, tapi Islam adalah agama amalan, agama praxis. Islam harus kompatibel dengan modernitas. Islam harus aktual dalam proses perubahan. Ajaran Islam menurut Muhammadiyah harus senantiasa ditafsir ulang sesuai perubahan.

Pola berpikir Dahlan, Islam ditafsir dalam konteks praktis, maka Islam harus memiliki implikasi jauh ke depan. Karena itu, Dahlan sejatinya berani melakukan pembumian ajaran Islam dalam konteks sosio-historis. Dengan demikian, Dahlan melakukan modernisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Konon, Kiai Dahlan dalam membahas dan mengkaji surah Al-Ma’un ayat 1-7 hingga 50 kali. Salah seorang jamaah beliau memprotes, kenapa Kiai berulang kali membahas hingga jamaah menjadi bosan. Kata Kiai Dahlan, kita tidak akan membahas ayat lain jikalau kita (jamaah)

belum melakukan tindakan aksi.

Aksi pembumian ajaran Islam yang dilakukan Dahlan, tidak sebatas pada persoalan tindakan nyata. Tapi beliau juga membuat *framework* ter-institusionalisasi secara sistematis, terprogram dan terukur. Manajemen institusi digerakan secara modern, bahkan mengikuti pola-pola Barat.

Rahmatan lil 'alamin

Makna modernisasi adalah pembumian. Konsekuensinya, perlu dilakukan desakralisasi, yakni upaya mentransformasikan ihwal yang tabu dan sakral dari obyek-obyek yang mestinya tidak tabu dan tidak sakral menjadi hal-hal yang empirik dan operasional. Hal yang normatif dan konseptual menjadi hal yang konkret dan aktual. Dalam bahasa Cak Nur, modernisasi mirip dengan sekularisasi dalam sosiologi, yang mengandung makna pembebasan (liberasi).

Dengan demikian, pembumian ajaran Islam berorientasi pada sofistikasi (*sophisticated*). Dalam konteks ini, ajaran Islam dalam al-Qur'an tidak saja berhenti pada kisaran konsepsional, apalagi pada kisaran sakralitas, tapi ia harus beroperasi dalam tataran praksis universal (*rahmatan lil 'alamin*). Operasionalisasi ajaran Islam dalam konteks sosio-historis-kultural hanya bisa dilakukan jika umat mampu menangkap roh universalisme dan kosmopolitanisme Islam.

Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sangat terbelakang dan miskin di awal abad 20. Keterbelakangan dan kemiskinan ini semakin diperparah oleh imprealisme dan kolonialisme asing serta drakula kompradornya, yang terus menghisap kekayaan alam. Sumber-sumber produksi masyarakat yang potensial dilumat kaum imprealis. Masyarakat Indonesia hanya memperoleh ampas kekayaan alam. Konsekuensinya, tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah. Hanya 1,8 persen masyarakat Indonesia yang mencicipi pendidikan.

Bertalian dengan itu, tingkat pemahaman keagamaan masyarakat sangat primitif dan lebih banyak berorientasi mitos (Kuntowijoyo, 1992).

Kondisi kompleksitas persoalan dan psikologi umat Islam yang sangat terbelakang, “sekularisasi” yang digerakkan Kiai Dahlan pada zaman itu tentu menemui kendala yang luar biasa.

Ada dua kendala, *pertama*, kendala internal, berkaitan dengan serangan terhadap kaum tradisional yang menggugah kemapanan keberagamaan mereka yang sarat dengan mitos. Malah, pada banyak hal, Muhammadiyah sudah dianggap kafir karena telah meniru pola laku dan gaya hidup Barat.

Kedua, kendala eksternal terutama berkaitan dengan kaum imperialis. Kendati Muhammadiyah pada beberapa sisi telah meniru pola Barat dalam ihwal metode pendidikan dan pengajaran serta pemberdayaan masyarakat, imperialis sesungguhnya merasa terusik.

Menurut Van der Plas, seorang ahli Islam Belanda yang pernah melakukan riset ke masjid-masjid di beberapa daerah pada saat itu, sangat mafhum karena mengetahui umat Islam yang membaca al-Qur’an di masjid-masjid kurang mengetahui isinya. Kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan imperialis, karena itu perlu dibiarkan saja.

Keberadaan Muhammadiyah di tengah masyarakat telah membuat imperialis semakin khawatir. Karena mereka paham bahwa jika al-Qur’an dibaca dan ditafsirkan secara empiris dan *sophisticated* akan menjadi *psychological striking force*, sehingga umat Islam semakin sadar dan bangkit melakukan perlawanan.

Dalam kondisi seperti itu, imperialis kerap kali melakukan siasat politik *divide et impera* antara kaum tradisional dengan Muhammadiyah.

Kendala di atas oleh Dahlan, setidaknya dapat diatasi dengan menunjukkan kemandirian dan kewibawaan warga Muhammadiyah dalam berdakwah. Pada awal berdirinya, *the founding fathers* Muhammadiyah berasal dari para saudagar (*entrepreneur*).

Kiai Dahlan sendiri adalah pedagang batik dan kerap berdagang di berbagai kota di Jawa. Dalam perjalanan dagangnya, Kiai Dahlan selalu *bersilaturahmi* kepada para *alim* setempat, membicarakan perkembangan

Islam dan masyarakat. Selain itu, fakta sejarah juga berbicara, banyak warga Muhammadiyah berprofesi sebagai saudagar.

Redefinisi Ajaran

Untuk mengembalikan *elan vital* gerakan sosial Muhammadiyah, diperlukan Dahlan-Dahlan baru yang memiliki visi *tajdid* dan keberanian melakukan pembumian dan *sofistikasi* yang terlembaga.

Hanya persoalannya, warga Muhammadiyah dalam beberapa dasawarsa terakhir ini mulai kehilangan *ghirah tajdid*. Bahkan amal-amal usaha yang ada sekarang banyak yang merupakan duplikasi sehingga tidak ada kreatifitas yang *genuine*.

Dalam spektrum *tajdid*, Muhammadiyah sudah jauh tertinggal dibanding beberapa lembaga sosial keagamaan. Wawasan keagamaan dan kemanusiaan warga Muhammadiyah selain kering, juga hampa perspektif. Kurang memiliki keberanian intelektual melakukan *sofistikasi* tafsir ajaran agama. Sehingga yang muncul adalah nostalgia dan duplikasi. •

Sumber: dimuat *Republika*, 18 November 2023

2 | INKORPORASI MUHAMMADIYAH

ANDAI Kiai Ahmad Dahlan kembali hidup saat ini dan menyaksikan dinamika Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang telah dirintisnya sejak 1912, setidaknya ia akan tersenyum. Tersenyum bangga, karena melihat puluhan ribu AUM telah mengukir sejarah bangsa.

Dalam bidang *schooling* (pendidikan), *healing* (pelayanan kesehatan), dan *feeding* (pelayanan sosial). Tercatat, jumlah lembaga pendidikan dasar-menengah 11.143, Perguruan Tinggi 174, lembaga kesehatan 318, pelayanan sosial (panti asuhan, jompo, rehabilitasi cacat, dll) 482, BTM 263, Lazis 121, dan luas lahan 20.945.594 M² (Abbas, 2013).

Di sisi lain, bisa jadi kiai Dahlan pun akan ikut prihatin. Karena, penjumlahan AUM ternyata kurang diiringi penguatan kapasitas institusi dan kualitas manajerial. Setidaknya, pada Muktamar Muhammadiyah-47 di Makassar lalu, *ihwal* ini kurang dielaborasi.

Mengapa prihatin? *Pertama*, pengelolaan organisasi/administrasi makin muskil. Garis koordinatif kerap mulai terputus dan rentang organisasi acap *out of control* sehingga banyak AUM berjalan sendiri-sendiri. *Kedua*, banyak AUM dibangun berdasarkan spirit *bottom up*.

Spirit ini dalam perjalanan sejarahnya kerap melembaga menjadi “raja-raja kecil” di lokasinya. *Ketiga*, menjamurnya AUM, menjadikan

visi dan ruh Muhammadiyah mengalami disorientasi arah. Beberapa AUM, bukan lagi sebagai lahan penggemblengan kader dan ideologi persyarikatan, tapi menjadi ladang pragmatisme pengelolanya.

Bahkan, pada aspek finansial, dana yang mengalir dalam rekening AUM kurang terkoordinasi. Padahal, Muhammadiyah memiliki potensi luar biasa dalam *cash flow*, kisaran Rp 15 triliun per tahun dan aset tidak Bergeraknya telah menembus angka Rp 85 triliun. Tercatat, sekitar 44,8 persen berada di rekening giro, 20,50 persen di tabungan, 34,18 persen di deposito yang berserak pada 118 rekening, serta 0,45 persen di saham (Buku Iuran Anggota, 2014).

Inkorporasi

Dengan jumlah AUM yang besar, sejatinya Muhammadiyah dikelola dalam sebuah manajemen *Muhammadiyah Incorporated* (Inkorporasi Muhammadiyah). Sebuah *incorporated*, adalah penggabungan manajemen untuk menguatkan jaringan baik vertikal maupun horizontal (Kotler, 2010). Galibnya, bicara *incorporated*, pemahaman masyarakat tertuju pada cerita sukses bangsa Jepang dalam pengelolaan *Japan Incorporated*.

Japan Incorporated berhasil karena menerapkan budaya dan aktivitas *Keiretsu*. Pola ini dipicu oleh perusahaan ternama yakni Mitsubishi, Mitsui, Dai-ichi Kangyo, Sumitomi, Sanwa, Fuyo, yang kerap disebut *the big six* (Saragih, 2007).

Nyaris semua bidang operasional, pengadaan bahan baku, pendanaan, penjaminan, asuransi, pemasaran, distribusi dan transportasi, mereka menyerahkan aktivitas tersebut kepada kelompok usaha terkait, sehingga membentuk *networking* yang solid. Bentuk sinergi lainnya dilakukan dalam hal kontrak kerjasama dagang, struktur kepemilikan silang, dan hubungan pendanaan.

Bentuk hubungan kerjasama tersebut mampu memberdayakan ribuan perusahaan Jepang di berbagai sektor. Aktivitas *Keiretsu* dikoordinasikan oleh *sogososha* yang bergerak sebagai *trad ing house*. Empat besar *sogososha*

yaitu Mitsubishi, Mitsui, Itochu dan Sumitomo merupakan perusahaan dengan total penjualan terbesar di dunia (Wibisono, 2008).

Kemampuan Jepang membangun *Japan Incorporated* tentu tidak bisa dilihat hanya sekejap. Kemampuan itu dilalui dengan proses kultural yang cukup panjang, terutama dari sisi nilai, norma, dan etos kerja yang telah mendarah daging. Dari sisi nilai dan norma, telah menciptakan kekuatan modal sosial yang terkonstruksi dari proses budaya.

Spirit *Restorasi Meiji*, telah menggelorakan semangat masyarakat Jepang untuk senantiasa membangun kekompakan tatakalanya berhadapan dengan masyarakat luar.

Spirit *Restorasi Meiji* yang melahirkan semangat *social trust*, disokong pula oleh etos kerja masyarakat Jepang. Dari sisi etos kerja, hasil penelitian seorang sarjana Injil, Yamamoto Shichihei yang meneliti etos kerja dan bisnis masyarakat Jepang. Dalam bukunya *Hakirishitan* (Menelanjangi Mitos Kristen) Shichihei menemukan ajaran pendeta Buddha Zen, Suzuki Shoshun (1579-1955) sebagai pemicu kuat etos kerja masyarakat Jepang.

Kekuatan kultural itu telah menjadi modal sosial (*social capital*) masyarakat Jepang dalam berbisnis (Fukuyama, 2004). Dalam konteks spirit kekuatan dan keagungan kultural, pebisnis Jepang dengan sangat mencengangkan menjaga ruh kekompakan dalam membangun *Japan Incorporated*. Dengan *Japan Incorporated* telah mengharumkan nama dan produk-produk Jepang di dunia.

Pengawinan aspek pembinaan pengusaha menengah dan kecil, pendanaan perbankan, pengadaan prasarana pelabuhan, jalan raya, kawasan industri, pelatihan, riset, dan pengembangan, serta *trading house* membuat Jepang merajai pasar dunia.

Tampaknya, Malaysia pun meniru keberhasilan ini, dan pada 2013, Malaysia berada di urutan ke-23 sebagai eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor US\$ 228 milyar dan surplus perdagangan US\$ 22,29 milyar (WTO, 2013). Dan, cara kerja *incorporated* ini telah pula dilakukan Tiongkok dan India untuk bangkit merajai pasar dunia saat ini.

Muhammadiyah?

Cerita sukses *Japan Incorporated* didasarkan pada prinsip kerjasama (kyôryoku). Di Tanah Air, prinsip kerjasama telah dirumuskannya dalam Pasal 33 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam ajaran Islam, prinsip itu didasarkan pada ajaran *At-Ta’wun* (QS, 5: 2) dan *syirkah* (QS, Shaad: 24). Di awal pendiriannya, Muhammadiyah pun meletakkan dasarnya pada QS. Ali Imran: 104, yang secara imperatif mengajak mengelola organisasi secara baik dan unggul.

Dengan pengalaman Jepang dan pesan normatif itu, Inkorporasi Muhammadiyah dapat dibentuk jika, *pertama*, setiap strata Pimpinan Muhammadiyah harus bersikap tegas dan asertif. Perlu konsolidasi visi, misi dan strategi gerakan jamaah dalam rangka menyatukan langkah organisasi yang berserak. *Kedua*, karena banyaknya variasi AUM, diperlukan *mapping* dan *focusing*.

Perlu dilakukan klasifikasi dalam beberapa bentuk *incorporated* amal usaha. *Ketiga*, dalam jangka singkat, diperlukan beberapa *prototype* (percontohan) inkorporasi Muhammadiyah dalam suatu wilayah atau daerah tertentu untuk “dicangkokkan” dalam skala lebih besar.

Konsep *cash management* bagi AUM misalnya, yang menggandeng 7 (tujuh) bank syariah sejak 2014, harus diwajibkan dan diperluas secara nasional. Konsep ini meniscayakan adanya ajaran *at-ta’wun* dan *syirkah* antara AUM.

Sekiranya konsep *cash management* ini diterapkan, dengan langkah pertama mengalihkan dana-dana Muhammadiyah dari giro ke rekening deposito dan tabungan ke beberapa bank yang ditunjuk, rasanya gerakan Muhammadiyah secara masif akan memperoleh amunisi lebih banyak dan mandiri. Selain itu, iuran anggota, iuran ZIS, dan iuran AUM harus terus digelorakan secara sadar, sehingga menjadikan Persyarikatan ini makin diperhitungkan secara organisasi (jamaah) dan finansial. •

Terbit *Republika*, 12 September 2015

3 | JARINGAN SAUDAGAR MUHAMMADIYAH

PADA 11-13 Desember 2015, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah menggelar temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan ini tidak sekadar membangkitkan romantisme dan nostalgia terhadap masa-masa kebangkitan para saudagar Muhammadiyah di awal-awal berdirinya.

Bukan sekadar amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 Makassar yang ditanfidzkan dalam visi, yakni bangkitnya etos dan kreatifitas ekonomi dalam menguatkan kemandirian Muhammadiyah sebagai wujud kontribusi Persyarikatan bagi kebangkitan ekonomi umat dan bangsa.

Tapi, pertemuan ini merupakan momentum dari kesadaran baru bahwa saudagar Muhammadiyah harus bergerak dan berjamaah dalam membangun etos dan praksis *ta'awun* warga. Upaya ini dilakukan agar Muhammadiyah dan warganya mandiri, dalam membangun agama dan bangsa.

Romantisme sejarah membuktikan, bahwa pada periode awal pergerakan, Muhammadiyah selalu diinisiasi oleh kaum saudagar. Mereka ini berfungsi ganda, selain sebagai juru dakwah, juga sebagai saudagar dalam mensyiarkan Islam di mana mereka berkunjung. Periode awal, para saudagar Muhammadiyah sukses membangun kemandirian organi-

sasinya. Figur Kiai Dahlan sebagai tokoh sentral dan merupakan *prototipe* saudagar sejati, kerap berdagang di berbagai kota.

Bahkan, Kiai Dahlan selalu mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Hasilnya, cukup mence-
ngangkan. Pada tahun 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota per-
syarikatan Muhammadiyah, tercatat dalam sejarah mencapai 47% dari
total anggota Muhammadiyah.

Momentum Kebangkitan

Dalam aspek momentum, saatnya sekarang saudagar Muhammadiyah
bangkit berjamaah. Di tengah rendahnya jumlah saudagar yang hanya 0,8
persen dibanding negara tetangga. Penduduk Singapura yang menjadi
saudagar mencapai 7,2 persen, Malaysia 2,1 persen, Thailand 4,1 persen,
Korea Selatan 4 persen, China dan Jepang mencapai 10 persen, sedangkan
yang tertinggi adalah AS sebesar 11,5-12 persen.

Teringat kembali uraian, David McClelland (1961) menulis, suatu
negara akan menjadi makmur jika jumlah saudagar mencapai 2 persen
dari penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 215 juta jiwa, me-
rupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Chi-
na, India, dan AS. Namun, di balik jumlah penduduk yang begitu besar,
potensi ini belum diimbangi dengan jumlah saudagar.

Dengan angka di bawah 1 persen, dikhawatirkan kualitas angka-angka
makro ekonomi Indonesia, masih disangsikan nasibnya ke depan. Bank Dunia
(2013), PDB Indonesia berada di atas angka US\$ 706,558 milyar atau berada
pada posisi 17 besar ekonomi dunia, bahkan diprediksi pada tahun 2025, PDB
Indonesia berada pada posisi US\$ 3,8-4,5 triliun atau pendapatan perkapita
sebesar US\$ 13.000-16.100. Dalam kondisi ini, Indonesia akan berada pada
posisi 12 negara sebagai kekuatan “episentrum” ekonomi besar dunia.

Sejatinya, kualitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
tinggi, harus paralel dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,
tereduksinya disparitas ekonomi, dan tertekannya angka pengangguran.

Data BPS 2013 mengonfirmasi, sekitar 20 persen atau 47,6 juta penduduk Indonesia — dua kali penduduk Malaysia— hidup makmur dengan pendapatan di atas Rp 120 juta atau US\$13.000 per tahun.

Mereka inilah yang memacetkan jalan raya dengan mobil dan sepeda motor, memenuhi bandara untuk bepergian dengan pesawat terbang, meramaikan *mall* dan pusat perbelanjaan, serta membeli produk properti. Di atas itu terdapat 5 persen atau 12 juta penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan di atas Rp 500 juta atau US\$ 55.000 setahun. Kelompok inilah yang memiliki portofolio investasi di saham, obligasi, dan reksadana. Sisanya, sebanyak 75% adalah masyarakat miskin yang jumlah pengeluarannya sekitar Rp 7000 per hari.

Dalam piramida pendapatan penduduk Indonesia, sekitar 40 persen penduduk ada di tengah dan 40 persen lainnya di bagian paling bawah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Indonesia, diiringi melebarnya angka disparitas atau kesenjangan ekonomi antarpenduduk dan wilayah mengindikasikan, dinamika ekonomi Indonesia pada strata bawah dalam piramida ekonomi Indonesia tidak ditopang oleh jumlah dan kualitas saudagar di level menengah-bawah.

Data itu mengonfirmasi, ekonomi Indonesia ternyata hanya dinikmati segelintir kekuatan strata atas piramida penduduk, atau dimaknakan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia kurang melibatkan strata bawah masyarakat. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita tidak berkualitas (semu).

Maka, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak ada jalan lain, kecuali meningkatkan kualitas kekuatan ekonomi strata menengah-bawah piramida ekonomi. Jika ingin membangun etos saudagar, tidak ada jalan lain, mentransformasikan sesuatu yang “kurang bernilai” yang letaknya dalam level bawah (*bottom of the pyramid*), menjadi sesuatu bernilai tinggi, bahkan bernilai tambah yang luar biasa (Prahalad, C.K, 2011).

Membangun Jaringan

Dengan peta kondisi ekonomi Indonesia di atas, Muhammadiyah se-

bagai organisasi kemasyarakatan, perlu merumuskan pola gerakan ekonomi yang mampu melibatkan *bottom of the pyramid*. Dengan demikian temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), tidak sekadar pertemuan paguyuban dan membangun bisnis pribadi antarwarga, tapi harus memiliki misi pemberdayaan. Karena itu, JSM harus mampu merumuskan.

Pertama, membangun usaha ekonomi masyarakat rentan (mikro). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2014), jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia 55,162 juta unit usaha atau 99,91 persen dari total unit usaha di Indonesia. Usaha mikro dan kecil di Indonesia menyerap 98,877 juta pekerja atau 94,52 persen dari total pekerja di Indonesia.

Mereka ini dicitrakan sebagai *small is beautiful*. Usaha-usaha mikro seperti ini, masih lebih kuat dicirikan pada “zona nyaman”, yang kerap sulit dipacu menjadi besar. Dalam krisis finansial global dewasa ini agaknya penguatan terhadap kelompok ini memerlukan dukungan karena di tangan merekalah denyut sektor riil berputar setiap hari.

Karena itulah, konsep *one village one BMT/BTM* yang digulirkan Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil (Absindo), perlu mendapat sambutan. Hanya persoalan, sejauhmana fungsi-fungsi pemberdayaan BMT/BTM di masyarakat dalam mengangkat derajat usaha *small is beautiful* ini?

Kedua, membangun jejaring usaha yang memiliki manfaat sosial yang tinggi. Usaha-usaha yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, usaha kerajinan rakyat, usaha padat karya, usaha yang menyerap konsumen (pasar) masyarakat menengah ke bawah (usaha ritel, usaha distribusi, usaha ekonomi kreatif, dan lainnya) perlu banyak difokuskan. Karena itu, JSM perlu memeta jenis usaha yang mampu memproduksi jenis substitusi impor. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor usaha mikro jika saudagar Muhammadiyah tidak segera mengantisipasinya. •

Terbit *Republika*, 12 September 2015.

4 | JIHAD EKONOMI MUHAMMADIYAH

MAKNA jihad sejatinya merujuk pada upaya serius memperjuangkan kebaikan, jihad dilakukan sesuai konteksnya. Saat ekonomi umat dan bangsa Indonesia terpuruk, wajib hukumnya seluruh warga berjuang untuk memulihkannya. Dalam konteks gerakan dakwah Muhammadiyah, tatkala ada warga atau ada sebagian komponen institusi Muhammadiyah terpuruk secara ekonomi, wajib hukumnya kita berjihad membantunya.

Berjihad ekonomi Muhammadiyah berarti mengerahkan segenap potensi ekonomi persyarikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak semata sifatnya reaktif, konfrontatif, dan berkoar-koar, tetapi jauh lebih elok bergerak bersifat proaktif, konstruktif, dan memberi solusi berkesinambungan.

Teologi gerakan Muhammadiyah, berkarakter gerakan teologi al-Ma'un dan al-Ashr, yang mendeskripsikan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah, selain bersifat pemberdayaan dan advokasi bagi golongan rentan dan teraniaya secara struktural, pun harus bersifat inovatif dalam merespon waktu dan bersifat jangka panjang.

Dengan teologi al-Ma'un, mengirim pesan bahwa jihad ekonomi Muhammadiyah lebih bersifat kebersamaan (*syirkah*) dan gotong-royong

(*at-ta'awun*) terutama dengan kelompok usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Dengan teologi al-Ashr, mengirim pesan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah harus memberikan solusi, bersifat melampaui zamannya, tidak semata berbasis karitatif (*charity*) tapi harus lebih berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreatifitas.

Maka, tatkala terjadi revolusi teknologi yang telah mengembangbiakkan disrupsi terhadap pelbagai lini kehidupan dan jenis usaha, sejatinya gerakan ekonomi Muhammadiyah mampu menghadirkan gerakan ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Modal Ekonomi

Kekuatan Muhammadiyah karena memiliki potensi atau modal yang luar biasa besarnya. Sayang sekali, kekuatan potensial itu masih sulit digerakkan dan ditransformasikan menjadi kekuatan aktual yang efektif dan bermanfaat. Muhammadiyah, meminjam istilah Danah Zohar & Ian Marshall, dalam bukunya *SQ: Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence* (London: Great Britain, 2000), memiliki modal spiritual, sosial, dan finansial (material) yang harus digerakkan.

Pada modal spiritual, termasuk di dalamnya modal keimanan, kepercayaan, moralitas, etika, dan akhlak. Modal ini dibentuk oleh kecerdasan spiritual, dengan mengeksplorasi secara spiritual dan interaktif atas pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang “Untuk apa saya ada, apa tujuan hidup saya, apa yang sebenarnya ingin saya capai?” ataukah dalam terminologi persyarikatan, “Untuk apa Muhammadiyah ada, apa tujuan hidup persyarikatan, apa yang sebenarnya ingin Muhammadiyah capai?”

Kecerdasaan spritual seperti ini, sesungguhnya harus menjadi hakikat dan membatin dalam setiap ritme gerakan ekonomi Muhammadiyah, sehingga menjadi pemandu moral dalam menggerakkan segala potensi yang ada.

Sementara, modal sosial diukur dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*social trust*), saling merasakan, empati, serta komitmen terhadap

kesehatan masyarakat. Modal ini dibentuk oleh kecerdasan emosional, berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perasaan warga atau masyarakat.

Pilar gerakan Muhammadiyah selama ini yang berfokus pada gerakan *schooling*, *feeding*, dan *healing*, kemudian bergerak pada penanggulangan bencana, gerakan *ziswa*f (zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf), pemberdayaan masyarakat, serta gerakan ekonomi dan bisnis Muhammadiyah menjadi modal dalam menjawab kebutuhan masyarakat itu.

Selanjutnya, pada aspek modal material, dibentuk oleh kecerdasan rasional, dan berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan rasional, bahkan yang bersifat teknokratik. Merebaknya puluhan ribu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), seperti institusi pendidikan, kesehatan, panti asuhan, hingga gerakan finansial (BTM, BMT, Koperasi, BPRS, Dana Pensiun) dan gerakan ekonomi (BUMM, Jaringan Saudagar, Jaringan Distribusi, Jaringan Produksi, dan lainnya) menjadi modal rasional dari logika material yang memberikan dampak bagi kemaslahatan umat dan warga bangsa.

Kendati gerakan ekonomi Muhammadiyah yang sejatinya telah memiliki 3 (tiga) modal di atas, tidak akan dirasakan manfaatnya dalam jihad ekonomi jika gerakan itu berserakan (sporadis), tidak dalam satu jamaah atau ekosistem ekonomi yang tertib. Dalam QS. As-Saff ayat 4, tentu Allah telah mengingatkan, bahwa “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Dalam konteks itulah, jihad ekonomi harus mampu memadukan atau mengintegrasikan segala potensi dalam satu ekosistem gerakan ekonomi jamaah. Konsep dan implementasi *closed-loop economy* Muhammadiyah, meniscayakan optimalisasi segala potensi “Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Kita.”

Artinya, bagaimana memanfaatkan potensi sektor riil (produksi dan distribusi), sektor finansial/keuangan (BTM, BMT, Koperasi Syariah,

BPRS, Dana Pensiun), dan potensi *captive market* (warga Persyarikatan, mahasiswa, murid, santri, guru, dosen, dokter, paramedis, karyawan) dalam satu ekosistem yang didukung dan dipandu oleh sistem informasi digital.

Pendekatan digitalisasi ekonomi dan bisnis dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah akan mampu menghela segala potensi *data base* dan *big data* Muhammadiyah yang selama ini terendap. Dengan pendekatan digitalisasi ini akan memudahkan pula terbentuknya konsep Muhammadiyah *incorporated*.

Hadirnya Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) baik berasal dari persero yang dimiliki dan atau mayoritas sahamnya oleh AUM maupun badan usaha baru, memberi koridor dalam membangun inkorporatisasi itu, sekaligus gerakan jamaah ekonomi Muhammadiyah sendiri.

Memang diakui saat ini, BUMM yang dimiliki Muhammadiyah masih bersifat parsial (sporadis). Untuk membangun gerakan ekonomi jamaah seperti itu, diperlukan peta jalan (*road map*) dan arsitektur kegiatan ekonomi dan bisnis yang aransemen dan dirigen dilakukan *super holding* BUMM yang sudah terbentuk dan disahkan oleh PP Muhammadiyah, tentu tanpa melepaskan kepemilikan saham di masing-masing AUM dan atau dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah (PRM, PCM, PDM, dan PWM).

Namun demikian, implementasi konsep *closed-loop economy* harus diiringi *opened-loop economy*. Di tengah gelombang keterbukaan, kolaborasi, dan ekonomi jaringan, kegiatan ekonomi dan bisnis, tidak otomatis Muhammadiyah mampu menyediakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Karena itu, diperlukan prinsip *syirkah* (kerjasama) dengan pihak eksternal yang memiliki visi yang sama dengan gerakan ekonomi Muhammadiyah.

Dengan prinsip keterbukaan dan jejaring seperti itu, tidak membatasi atau menyandera kegiatan ekonomi Muhammadiyah. Karena itu, AUM dan atau struktur kepengurusan dari ranting hingga pusat harus terbuka,

cerdas, dan inovatif dalam melakukan kiat jejaring usaha.

Selain itu, Muhammadiyah terutama BUMM harus mampu melibatkan pula Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) yang anggotanya memiliki spektrum usaha yang luas. Selain JSM, masih banyak jaringan usaha yang lain, misalnya, jaringan tani Muhammadiyah, jaringan nelayan Muhammadiyah, perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem jamaah.

Intinya adalah, jihad ekonomi Muhammadiyah harus mampu mengimplementasikan gerakan ekonomi berbasis jamaah. Dalam gerakan jamaah terlihat jelas siapa imam, makmum, muadzin, takmir serta pelbagai tertib aturan kelembagaan jamaah. Jangan sampai warga Muhammadiyah hanya mampu dan tertib dalam ibadah *mahdhah*, terutama ibadah shalat, tapi abai dalam ibadah *muamalah* terutama dalam membangun ekosistem jamaah ekonomi.

Last but not least, dalam jihad ekonomi diperlukan pelipatgandaan jumlah saudagar dalam tubuh Persyarikatan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah wajib menjadi kawah candradimuka untuk menggembleng lahirnya jiwa-jiwa yang mandiri. Merekalah yang menjadi pion terdepan dalam menebar misi *enterprenurship* Muhammadiyah.

Jika kita bernostalgia, sejatinya, Kiai Dahlan telah mengajarkan dan mempraktikkan hal itu. Kiai Dahlan selalu mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Demikian juga, secara kelembagaan, kemandirian Persyarikatan hanya bisa dibangun dengan mental *entrepreneurship*, mental saudagar.

Tentu, warga persyarikatan selalu ingat, bahwa gerakan saudagar merupakan jalan cepat mandiri. Riwayat Rasulullah saw, “*Sembilan persepuluh dari sumber rezeki itu dari berdagang.*” Malah dinukilkan “*Pedagang yang jujur dan amanah (akan ditempatkan) beserta para nabi, shidiqin dan para syuhada,*” (HR. At-Tirmidzi).

Etos saudagar telah terpatri dalam diri generasi awal Muhammadiyah. Hasilnya, tatkala itu Muhammadiyah cukup disegani dalam berdakwah, baik oleh pemerintah (kolonial dan pemerintah Indonesia) maupun ma-

syarakat sipil lainnya. Karena itu, langkah yang perlu dilakukan Muhammadiyah adalah ikut bertanggung jawab membangun etos budaya saudagar. Jika umat dan Muhammadiyah ingin diperhitungkan kembali, gerakan saudagar harus menjadi kesadaran dan gerakan kolektif. •

(Terbit: *Republika*, 2 Agustus 2017)

5 | ETOS SAUDAGAR MUHAMMADIYAH

PADA 13-14 Mei 2016, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah menggelar temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di Yogyakarta. Wahana ini tidak sekadar ritual membangunkan romantisme terhadap masa-masa awal kebangkitan para saudagar Muhammadiyah, tapi menjadi momentum membangkitkan etos kemandirian Persyarikatan.

Mengapa etos ini perlu digelorakan? Fakta berbicara, di tengah masyarakat masih banyak menyeruak stigma terhadap profesi saudagar, yang diasumsikan sebagai; sifat eksploitatif, agresif, ekspansif, egois, tidak mau rugi, hitung-hitungan, pelit, tidak jujur, curang, tidak terbuka, sumber penghasilan tidak stabil, ketidakpastian kehidupan, kurang terhormat, dan lainnya. Tidak mengherankan, jika banyak orangtua yang tidak menginginkan anak-anaknya terjun dalam profesi sebagai saudagar.

Bahkan, banyak orangtua mengatakan “untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika hanya menjadi saudagar alias pedagang”. Sayangnya, stigma ini pula menjangkiti saudagar-saudagar Muslim generasi pertama, yang dulunya sukses mengembangkan jaringan usaha di beberapa sentra bisnis di Tanah Air, yang awalnya dikuasai saudagar Islam, tapi pada periode

generasi berikutnya, akhirnya gagal. Generasi pertama sukses, tapi pada generasi keduanya gagap melanjutkan.

Stigma seperti itu sudah mengental dan menjadi pemahaman umum masyarakat. Padahal menjadi saudagar adalah kegiatan mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah saw, ditanya para sahabat, *“Pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah?”* Rasulullah saw menjawab, *“seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih,”* (HR. al-Bazzar).

Konstataasi tersebut mengabarkan, Islam mengajarkan umatnya menjadi saudagar, dan bahkan sepanjang sejarah Muhammad saw dan para sahabatnya tidak sedikit sebagai pelaku usaha (saudagar). Dan tidak dipungkiri, masuknya Islam ke Indonesia juga melalui jalur saudagar.

Bagaimana Muhammadiyah?

Melacak sejarah, bahwa pada periode awal pergerakan, Muhammadiyah selalu diinisiasi oleh kaum saudagar. Mereka ini berfungsi ganda, selain sebagai juru dakwah, juga sebagai saudagar dalam mensyiarkan Islam di mana mereka berkunjung. Pada periode awal, para saudagar Muhammadiyah sukses membangun kemandirian organisasinya. Figur KH Ahmad Dahlan sebagai tokoh sentral dan merupakan prototipe saudagar sejati, kerap berdagang di pelbagai kota.

Etos saudagar telah terpatrit dalam diri generasi awal Muhammadiyah. Hasilnya, tatkala itu Muhammadiyah cukup disegani dalam berdakwah, baik oleh pemerintah (kolonial dan pemerintah Indonesia) maupun masyarakat sipil lainnya. Tidak heran, telah menjadi kenangan indah, bagaimana para saudagar Muhammadiyah di Sumatera Barat, Bugis-Makassar, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain, mampu menggerakkan organisasi Muhammadiyah dengan kekuatan bisnisnya.

Namun kenangan indah, bahwa Muhammadiyah selalu dimotori kaum saudagar telah menjadi cerita masa lalu. Generasi Muhammadiyah dalam empat dekade belakangan ini bukan lagi dimotori kaum saudagar, tapi dijejali oleh kaum pamong praja dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahkan, dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Pusat (PP) hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), sulit lagi ditemukan kaum saudagar. Pelbagai perhelatan organisai pun selalu berharap sponsor pemerintah, pejabat dan pengusaha di luar kalangan warga Muhammadiyah. Pertanyaannya, mengapa etos saudagar warga persyarikatan semakin pudar?

Etos Saudagar

Hambatan terbesar untuk menjadi saudagar adalah etos keberanian. Budaya penakut dan bayangan terhadap risiko gagal, kerap kali menjangkiti setiap orang yang mau melangkah berbisnis. Rasa takut itu bermula dari dalam diri, karena tidak terbiasa dengan tanggung jawab. Boleh jadi, budaya kita sejak kecil selalu ditakut-takuti, baik oleh orang tua, guru maupun masyarakat (Khamsa, 2011).

Kita diajari “tidak boleh ini dan tidak boleh itu”, karena dikhawatirkan akan terjadi “begini atau begitu.” Akibatnya, kita jadi penakut untuk melakukan sesuatu, karena takut gagal dan disalahkan orang. Orangtua, pendidik (guru), pendakwah agama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan lingkungan masyarakat, sejak dulu tidak mendidik kita untuk berani mengambil risiko, terutama berkaitan dalam risiko usaha.

Padahal keberanian adalah modal awal dalam menjejakkan kaki menjadi saudagar. Tanpa keberanian, tidak akan pernah bisa dimulai. Orang akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan takut rugi. Kesuksesan selalu dicapai dengan sebuah proses setelah melewati berbagai hambatan, sehingga tidak alasan untuk takut gagal. Karena kegagalan adalah, sebuah proses pembelajaran (Suyanto, 2008).

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Setiap orang akan melalui suatu proses pembelajaran, maka tentu kemampuan orang juga akan semakin meningkat, *sense of business* juga meningkat sehingga kemampuan orang dalam menilai dan memilih bisnis semakin tepat. Sebenarnya, kata gagal hanyalah milik orang yang berhenti mencoba, ber-

henti berinovasi, dan berhenti berbuat. Artinya, orang yang takut gagal adalah orang yang keluar dari *fitrah* kemanusiannya, atau orang yang menginterupsi *sunatullah*.

Selain etos keberanian sebagai modal awal dalam memulai usaha, hal yang sangat penting adalah selalu berpikir positif, selalu optimis bahwa kita akan berhasil. Berpikir positif dan optimis dapat dicapai dengan selalu berinteraksi dengan orang-orang yang bermental positif dan optimis dalam melakukan banyak hal. Maka, seringkalilah bergaul dengan komunitas yang sama visinya dengan kita karena energinya akan ikut mengalir kepada kita (Chandra & Deryandri, 2010).

Etos keberanian, tanggung jawab, jujur, amanah, berpikir positif, adalah serangkaian modal utama untuk menjadi saudagar. Tapi, sebagai umat Islam, yang mungkin boleh jadi, sebelum lahir sudah menjadi “Islam turunan”, bahwa serangkaian etos itu (keberanian, tanggung jawab, jujur, amanah, berpikir positif), sesungguhnya sudah diajarkan dan ditebar oleh Allah SwT melalui ayat-ayat-Nya atau *sunatullah*-Nya dalam al-Qur’an dan di alam semesta.

Bahkan, Rasulullah saw dan para sahabatnya pun telah memberikan *uswah* (contoh teladan), bagaimana sejatinya berbisnis menurut ajaran dan perilaku Islam (Antonio, 2009). Tapi, mengapa umat Islam, terutama Muhammadiyah generasi sekarang ini, kurang memiliki perhatian dan keberanian untuk bergumul dalam dunia usaha?•

Dimuat di Koran *SINDO*, 13 Mei 2016.

6

KEMANDIRIAN KEUANGAN MUHAMMADIYAH

PADA 24-26 Februari 2017 di kota Ambon, Muhammadiyah menggelar hajatan strategis, yakni Tanwir Muhammadiyah. Salah satu isu strategis internal yang dibahas bagaimana membangun kemandirian keuangan Muhammadiyah, terutama berkaitan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan secara terpadu dan efisien. Tentu, dengan makin membengkaknya jumlah amal usaha Muhammadiyah (AUM) telah berdampak semakin rumitnya pengelolaan jaringan keuangan.

Bayangkan, AUM di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dijumpai 7.651 sekolah dan madrasah, di bidang Pendidikan Tinggi 174 universitas, sekolah tinggi, institut, dan akademi.

Di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdapat rumah sakit 457, panti asuhan 318 buah, panti jompo 54 buah, dan rehabilitasi cacat 82 buah. Untuk bidang sarana ibadah terdapat masjid dan musolla sebanyak 11.198. Di samping itu, sejumlah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Matahari, minimarket, semakin memperlihatkan geliatnya yang signifikan (Abbas, 2015).

Demikian pula, secara akumulatif, jumlah dana likuid (jangka pendek) yang tersimpan pada rekening yang dimiliki Muhammadiyah dan AUM,

diperkirakan Rp15 triliun (Sudibyo, 2014). Dari jumlah sebesar itu, yang baru dimanfaatkan Muhammadiyah diestimasi Rp1,5 triliun atau hanya 10 persen.

Belum lagi total valuasi aset yang dimiliki Muhammadiyah yang dikalkulasi mendekati angka Rp 320 triliun. Lantas, ke mana angka 90 persen atau 13,5 triliun itu? Siapakah yang memanfaatkan dana sebesar itu?

Dana Menganggur?

Dalam konteks Muhammadiyah, semua AUM harus dipahami sebagai bentuk kekayaan Persyarikatan dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Semua aset tidak boleh diakui oleh pengurus, karena semua kekayaan dan amal usaha itu adalah milik Persyarikatan. Sesuai aturan di Muhammadiyah, semua pengurus dan warga Muhammadiyah harus tunduk pada aturan Persyarikatan.

Namun sayangnya, Muhammadiyah belum bisa menikmati manfaat maksimal dari potensi keuangan yang selama ini dikelola oleh perbankan. Maka, sebagai organisasi modern dan berkembang, tawaran model pengelolaan keuangan terpadu (*cash management*) dianggap tepat. Dari sisi pertanggungjawaban publik pun, transparansi pengelolaan keuangan model ini sangat penting untuk diterapkan oleh organisasi sekaliber Muhammadiyah.

Merujuk kembali dana Rp13,5 triliun, tentu itu adalah dana kas yang menganggur (*idle cash*). Sebagian besar disimpan dalam rekening giro (48,2 persen) dan sisanya ditempatkan pada deposito. Dengan kata lain dana itu, tidak dipergunakan oleh jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah (Yusuf, 2015).

Tak pelak lagi, dari sudut perbankan, dana tersebut tentu bukan dana menganggur. Dana itu menjadi dana beredar (*revolving*) yang dipinjamkan oleh bank kepada lembaga lain yang membutuhkannya. Dari dana yang beredar itu, Persyarikatan hanya mendapatkan nisbah bagi hasil lebih kurang sebesar 6 persen (Abbas, 2015).

Maka, apa yang tergambar di atas memperlihatkan, Persyarikatan belum mempergunakan dananya untuk sebesar-besar manfaat bagi Persyarikatan itu sendiri. Dana beredar itu dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan di luar Muhammadiyah. Sebab bila dana itu tidak dipergunakan oleh Muhammadiyah, sudah dipastikan dana tersebut dipergunakan oleh orang lain.

Dalam konteks spirit adanya dana cair yang menganggur itu dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar manfaat bagi Muhammadiyah, maka model *cash management* pun digulirkan. Ihwal ini sejatinya telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 36/ KEP/I.0/C/2012 tentang Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas.

Dalam SK itu, PP Muhammadiyah mengupayakan fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah/back to back* deposit kepada bank syariah mitra Muhammadiyah sampai mendekati 100 persen dari jumlah deposito yang diagunkan.

Penggunaan deposito sebagai agunan dilakukan dengan menggunakan deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah yang bersangkutan atau deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah yang lainnya. Dengan model itu, dalam tingkat implementasinya, sejatinya Muhammadiyah memperoleh manfaat maksimal (Supriyanto, 2015).

Spirit Ta'awun

Dana beredar dalam transaksi perbankan mitra Muhammadiyah yang dimiliki AUM tentu dapat dimanfaatkan oleh AUM yang memerlukannya. Semangat *ta'awun* (saling-tolong menolong) yang menjadi dasar pijakan idealisasi Persyarikatan dapat ditegakkan kembali. Selama ini dana Persyarikatan telah disimpan pada bank konvensional yang jumlahnya sebanyak 137 bank.

Dengan jumlah bank yang sebanyak itu, membuat dana persyarikatan

terserak-serak dalam jumlah kecil pada bank tersebut. Sehingga daya tawar (*bargaining position*) Persyarikatan berhadapan dengan bank menjadi rendah (Anhar, 2015).

Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret agar daya tawar Persyarikatan menjadi tinggi dengan cara memperkecil jumlah bank yang dipergunakan. Dengan memanfaatkan *idle cash* yang dimiliki oleh semua jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah, sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembangunan proyek Persyarikatan yang terhenti.

Kepastian ini agaknya mendekati kebenaran karena dana segar itu ada pada semua jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah. Agar dana itu tidak dipergunkan oleh orang lain, seyogianya disalurkan untuk pembiayaan proyek Persyarikatan yang sedang dilaksanakan oleh dan tersebar berbagai kawasan dan level Persyarikatan.

Dari struktur penempatan dana ini, Muhammadiyah telah mengalami kehilangan potensial yang cukup besar. Mengapa kehilangan potensial? Karena dananya terlalu besar ditempatkan di giro. Kalau dana itu ditempatkan di giro, *return* atau tingkat keuntungan yang bisa diraih secara kalkulatif hanya berkisar antara 0,5-1 persen. Oleh karena itu, supaya pendapatan Muhammadiyah meningkat, maka Muhammadiyah seyogianya membuat kesepakatan dengan bank-bank mitra, untuk membuat giro minimal dan membuka tabungan bisnis (Abbas, 20015). •

Terbit: Koran *Seputar Indonesia*, 24 Februari 2017

7 | BANK MUHAMMADIYAH?

SAYA terusik membaca tulisan Hardiansyah dalam rubrik Wawasan, yang berjudul Bank Muslim Indonesia, Karim Oey dan Saham Muhammadiyah untuk Perjuangan Bangsa (*Suara Muhammadiyah* No. 03/106, 11-15 Februari 2021, hlm 48-49).

Ada tiga yang menarik dalam tulisan itu, *pertama*, Muhammadiyah pernah memiliki bank, namanya Bank Muslim Indonesia (BMI) yang didirikan pada 1946, yang mayoritas sahamnya dimiliki Karim Oey. *Kedua*, BMI mengalami kerugian karena sebagian besar dananya digunakan oleh Bung Karno demi perjuangan kemerdekaan. Dengan gelora nasionalisme, para pemegang saham akhirnya mafhum dan tidak menyoal dana itu.

Ketiga, mendirikan bank, memang perlu sikap berjamaah. Perlu kekompakan dalam satu orkestra, antara pemegang saham, direksi, staf hingga stakeholder.

Lantas, apakah spirit para pendiri BMI itu masih kontekstual, di saat banyaknya warga Muhammadiyah berkeinginan mendirikan bank Syariah atau bank Muhammadiyah? Saya kira spirit itu penting.

Hanya masalahnya, di tengah perkembangan dunia perbankan yang makin kompleks, yang dibutuhkan tidak sekadar spirit, tapi juga profesionalitas dan kapabilitas terutama saat maraknya model *banking system*

yang berbasis teknologi informasi.

Banking System

Saat ini, perilaku nasabah mulai berubah di tengah muncul dan masifnya generasi milenial dan berkembang pesatnya pemanfaatan teknologi informasi pada setiap lini, termasuk dunia perbankan itu.

Dalam dunia perbankan, dengan merebaknya model *banking system*, telah membuka persaingan ketat, sehingga menuntut perbankan untuk lebih adaptif dan fleksibel terhadap pemanfaatan teknologi digital. Tentu, perbankan digital memberikan pelayanan seperti layaknya perbankan konvensional secara umum.

Dalam *banking system* seperti itu, segala urusan pelayanan perbankan dilakukan secara mandiri melalui aplikasi di smartphone. Perbankan digital memungkinkan nasabah memperoleh layanan perbankan secara *self service* tanpa harus datang langsung ke bank.

Layanan perbankan digital memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening.

Bahkan, nasabah bisa memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, sebagai misal nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah.

Kemajuan teknologi telah mengubah model dan lanskap bisnis perbankan nasional, sehingga tidak ada lagi bank yang membuka kantor cabang baru. Menurut OJK (2020), banyak bank yang sudah dan sedang mengkaji urgensi keberadaan kantor cabang untuk digantikan dengan agen banking. Bahkan, jumlah kantor cabang bank di Indonesia berkurang secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Tercatat OJK, jumlah kantor cabang bank hingga April 2020 sebanyak 3.613 kantor. Jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan dengan

April 2019, sebanyak 3.718 kantor cabang. Bahkan, di saat pandemi Covid-19, aktivitas keuangan yang dilakukan dengan digital banking mengalami peningkatan. Sebaliknya, transaksi *off line* selama pandemi menurun.

Misalnya, transaksi *off line* berupa cek mutasi rekening yang sebelum Covid-19 sebesar 31 persen, menurun menjadi 26 persen selama Covid-19. Begitu juga dengan transfer uang semula 68 persen menjadi 55 persen. Penggunaan layanan perbankan meningkat selama pandemi, yakni *top up wallet* menjadi 81 persen, transfer uang naik menjadi 78 persen, hingga pembayaran rutin seperti listrik dan air terdongkrak menjadi 55 persen.

Bank Muhammadiyah?

Dengan perkembangan perbankan digital seperti digambarkan di atas, maka bagi Muhammadiyah tidak relevan lagi untuk mendirikan bank yang baru. Yang dibutuhkan adalah, bagaimana mengoptimalkan puluhan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang dimiliki Muhammadiyah dikorporatisasi dalam satu jaringan perbankan berbasis digital. Disatukan dalam usaha Persero, di mana Muhammadiyah pemegang saham mayoritas Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

Selain sudah cukup banyak BPRS milik Muhammadiyah yang mempunyai rekam jejak yang layak, kredibel, dan telah berakar kuat di masyarakat, juga BPRS yang berada dalam satu jejaring itu akan lebih mudah dikelola karena telah memiliki akar di masyarakat, terutama bagi Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah.

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang jumlahnya 134 BTM, dengan total aset Rp 2,6 triliun (2020), bisa dijadikan pusat keuangan dan pemberdayaan ekonomi basis bawah (akar rumput). BTM sendiri telah memiliki induk BTM di tingkat nasional dan 4 (empat) pusat BTM. Sayang sekali, banyak AUM secara faktual kurang mengapresiasi eksistensi BTM, termasuk BPRS itu.

Dalam Tanfidz Muktamar Muhammadiyah di Makassar, untuk bi-

dang ekonomi diamanatkan agar pentingnya pendirian, penataan dan konsolidasi BTM/ BMT. Diharapkan adanya SDSB (Satu Daerah Satu BTM).

Sementara setiap PCM, membuka cabang BTM. Demikian pula untuk BPRS, diamanatkan adanya pendirian, penataan dan konsolidasi BPRS yang sudah ada, dan diharapkan berdiri SWSB (Satu Wilayah Satu BPRS).

Kalaupun didirikan bank yang baru, maka bank baru yang dimiliki Muhammadiyah itu merupakan penggabungan dalam satu induk BPRS. Sementara, BRPS dan BTM yang eksis menjadi kantor-kantor cabang, dengan memanfaatkan *banking system* berbasis digital. Dengan demikian bisa merambah ke seluruh basis masyarakat bawah. Secara genetikal, bank Muhammadiyah lebih cocok dalam fungsi-fungsi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Di sisi yang lain, AUM-AUM yang memiliki dana termasuk arus kas, simpanan, pembiayaan, hingga aset, seyogianya berkolaborasi (*atta'awun*) atau berjamaah dengan induk usaha BUMM yang mengelola BPRS. Dalam BUMM, pemegang saham terbuka dengan syarat persyarikatan Muhammadiyah adalah pemegang saham mayoritas. •

8

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)

DALAM sejarah Islam, koperasi diidentikkan dengan Baitul Maal. Lembaga ini sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan perdebatan seru para sahabat Nabi dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka, turunlah surat al-Anfal ayat 4.

Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan Baitul Maal, mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta keluar maupun masuk. Bahkan, Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

Tatkala Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, kekayaan negara di Baitul Maal meningkat signifikan. Umar berhasil menaklukkan Kisra (Persia) dan Kaishar (Romawi). Harta kekayaan pun mengalir deras ke kota Madinah.

Pada abad 16 H, Umar mendirikan kantor Baitul Maal di Madinah. Kemudian mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Selanjutnya, juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah, tata kelola usaha, dan menganggarkan dana angkatan perang

Umar sangat hati-hati dalam mengelola uang negara ini. Dalam kitab *Al-Bidayah wa an Nihayah* atau dikenal sebagai Tarikh Ibnu Katsir (1301-1373 M) menukil pidato Umar, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini selain dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang Quraisy biasa. Dan aku adalah orang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin.” (Aliefanto, 2018).

Baitut Tamwil

Dalam menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah, sejatinya harus ditopang dengan Baitul Maal. Namun, dalam Muhammadiyah dikenal dengan nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). BTM adalah sebuah gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah, dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), berbadan hukum koperasi.

Perdefinisi, Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua kata, yaitu *Bait*, yang artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *maal* atau harta. Secara keseluruhan, Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan.

Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai nomenklatur untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan warga. BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat-Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non-komersial, dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah, sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat (Lazismu).

BTM dalam menjalankan operasionalnya menggunakan jenis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di bawah otoritas Kementerian Koperasi/UKM dan sebagai koperasi LKMS di bawah Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Dengan dua pendekatan perizinan itu, ada fleksibilitas bagi BTM dalam mengembangkan diri dengan disesuaikan kearifan lokal.

Bagi Muhammadiyah, keberadaan BTM sekaligus sebagai implementasi dari Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang merekomendasikan bunga bank konvensional hukumnya haram. Selain itu, adanya BTM secara otomatis sebagai *best practices* bagi Muhammadiyah dan warganya dalam menjalankan sistem keuangan syariah dengan beragam produk dan akad yang dimilikinya.

Selain itu, keberadaan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah mampu mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Artinya, dengan adanya BTM sebagai tempat bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan warganya dalam menempatkan dana dan memanfaatkan akses pembiayaan.

Dengan demikian, keuntungan pengelolaan keuangan BTM bisa dimanfaatkan untuk membiayai gerakan dakwah dan jihad ekonomi ummat. Dan hingga saat ini, BTM memiliki jaringan induk, pusat sekunder dan primer dengan total 132 jaringan dan aset sebesar Rp 2,5 triliun.

Besarnya aset dan jumlah uang yang beredar di AUM, memantik banyak lembaga keuangan, terutama perbankan syariah untuk selalu melirik dan mengimingi berbagai fasilitas. Dengan fakta itu, sejatinya BTM harus bergerak lebih cepat lagi memberikan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dana besar itu untuk dikelola oleh BTM daripada dikelola oleh lembaga keuangan lainnya.

Manfaat BTM

Dengan gambaran di atas, jika AUM menempatkan dananya di BTM, beberapa manfaat yang optimal bisa diterima (Suud, 2018), *pertama*, jika mengakses pembiayaan ke BTM, maka BTM tidak memberikan bagi hasil alias *qard*, tidak perlu biaya admin dan notaris. Jika AUM menempatkan dananya ke BTM, sifatnya adalah *wadiah* (titipan) dan hal ini tidak berlaku di perbankan jika pembiayaan dikenakan bagi hasil yang besar.

Kedua, jika warga Muhammadiyah menempatkan dananya di BTM, sama dengan perbankan akan mendapatkan rerata bagi hasil. Keuntungan atau marjin dari penempatan dan pembiayaan di BTM, tentu untuk BOP gaji pegawai BTM, SHU 80 persen ke Muhammadiyah, pembangunan sarana AUM, dan pemberian dana *qordh* untuk orang miskin.

Sementara, jika AUM menempatkan dan mengakses dana di perbankan, marjin keuntungan perbankan tidak akan ke Muhammadiyah, dan tentu hanya dinikmati oleh perbankan. Bahkan, bisa jadi jatuh ke orang-orang kaya pemilik modal raksasa.

Dalam konteks gerakan dakwah ekonomi jamaah, BTM perlu menempatkan peran sekunder BTM, sebagai induk. Fungsinya antara lain sebagai akses permodalan, supervisi, evaluasi dan pengawasan terhadap BTM primer, peningkatan sumber daya insani, regulasi dan penguatan teknologi informasi (IT) (Yuliawan, 2019).

Dengan munculnya banyak pusat BTM diberbagai wilayah, Induk BTM menyakini akan segera terbentuknya Apex Syariah atau *holding microfinance*, sehingga akan memudahkan bagi pihak lain dalam bermitra dengan BTM untuk mendorong program Usaha Ultramikro, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara masif. •

(Terbit: *Suara Muhammadiyah*. Edisi 08 Th. 106, 16-30 Juli 2021

9 | MENTAL “SAUDAGAR” KIAI DAHLAN

PARA peletak dasar (*the founding fathers*) periode awal pergerakan Muhammadiyah, selalu diinisiasi kaum saudagar. Mereka ini berfungsi ganda, selain sebagai juru dakwah (*mubaligh*), juga sebagai saudagar ulet. Periode awal, para saudagar Muhammadiyah itu, sukses membangun kemandirian Persyarikatan. Figur Kiai Dahlan sebagai tokoh sentral dan prototipe saudagar sejati.

Bahkan, Kiyai Dahlan selalu mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri. Hasilnya, cukup mencengangkan. Pada 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah, secara numerikal mayoritas.

Etos saudagar telah terpatrit dalam diri generasi awal Muhammadiyah. Tatkala itu Muhammadiyah cukup disegani. Tidak heran, telah menjadi kenangan indah, bagaimana para saudagar Muhammadiyah di Sumatera Barat, Bugis-Makassar, Solo, Yogyakarta, Pekajangan-Pekalongan, Tasikmalaya, Garut, dan lainnya, mampu menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah dengan kekuatan bisnisnya.

Muhammadiyah selalu dimotori kaum saudagar telah menjadi cerita masa lalu. Generasi Muhammadiyah dalam empat dekade belakangan

ini bukan lagi dimotori kaum saudagar, tapi dijejali oleh kaum pamong praja. Bahkan, dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah dari Pusat ke Ranting, sulit lagi ditemukan kaum saudagar.

Motor Penggerak

Bagaimana seungguhnya karakter saudagar Kiai Dahlan sendiri? Secara geneologi, karakter saudagar Kiai Dahlan terbentuk dari ibunya, Nyai Abu Bakar. Padahal lazimnya, kehidupan masyarakat Yogyakarta, sejatinya adalah masyarakat agraris (petani). Sementara di perkotaan, dominan bertukang dan pengrajin (kerajian tanduk, perunggu, emas, perak dan lainnya). Mereka umumnya tinggal di Kampung Kemasan (Peacock, J.L, 1978).

Sementara, sebagian kecil masyarakat mengabdikan diri kepada Sultan, sebagai Abdi Dalem. Abdi Dalem, bertugas mengurus masalah keagamaan. Dan, mereka berdomisili di sekitar Masjid, di kampung Kauman. Merujuk Sukriyanto AR (2019), mereka itu dikenal sebagai abdi dalem pamethakaan.

Pendapatan sebagai *Abdi Dalem* ini, tentu sangat kecil. Kendati demikian, profesi itu sangat diidam-idamkan masyarakat Yogyakarta. Selain mereka merasa dekat dengan Sultan, ada rasa bangga dan tentu ada semacam panggilan (*calling*), meminjam istilah Max Weber dalam etika Protestan di Jerman. Panggilan itu seperti berkah yang bakal diperoleh dengan cepat. Mereka yang menjadi *Abdi Dalem*, otomatis strata sosialnya menjadi terangkat dalam struktur piramida masyarakat Yogyakarta.

Tentu, Kiai Abu Bakar, ayah Kiai Dahlan adalah *Abdi Dalem* pada dua kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Beliau juga menjadi imam di Masjid Sultonain (Masjid dua Sultan) di Kampung Nitikan. Kemudian ditarik dan ditetapkan sebagai imam dan khatib di masjid Gedhe Kauman. Kiai Abu Bakar adalah kiai yang sangat dekat dengan Hamengku Buwono (HB) VII, sehingga beliau pernah ditugasi untuk menghajikan (sebagai *badal haji*) ayahnya, HB VI. (Adaby Darban,

2000).

Kehidupan Kiai Abu Bakar diperoleh dari gajinya sebagai *Abdi Dalem* dan istrinya sebagai saudagar batik. Kehidupan seperti ini sudah menjadi *kegaliban* masyarakat di sekitar Keraton Kasultanan Yogyakarta. Justru yang laki-laki menjadi *Abdi Dalem Keraton*, yang perempuan (istri) menjadi saudagar.

Kerja keras dari Nyai Abu Bakar ini menjadikan usahanya maju dan populer sebagai saudagar batik yang cukup berhasil dan disegani. Karena itulah, keluarga Kiai Abu Bakar ini menjadi keluarga yang terpandang. Kaya, sekaligus sebagai *Abdi Dalem* Keraton (Adaby Darban, 2000).

Mental Saudagar

Dengan iklim keluarga seperti itu, karakter Kiai Dahlan di masa kecilnya mulai tertempa. Makanya, Kiai Dahlan pun seolah memperoleh *legacy* sebagai *Abdi Dalem* Kasultanan Yogyakarta, sementara istrinya, Nyai Walidah, yang juga tertempa sebagai karakter yang sama dengan keluarga Kiai Dahlan, juga menjadi saudagar batik. Sebagai *Abdi Dalem*, Kiai Dahlan mendapat gaji dari Kraton sebesar 15 gulden per bulan.

Alkisah, Kiai Dahlan pernah dimodali oleh orang tuanya sebesar 500 gulden. Namun, sebagian besar untuk membeli kitab. Beliau tanpa jenuh mendalami pelbagai kitab karena haus ilmu. Makanya, usahanya juga lebih banyak ditangani oleh istrinya. Tatkala Kongres Budi Utomo (BU) digelar di rumah Kiai Dahlan pada 1917, banyak peserta kongres yang berasal dari luar Yogyakarta berbelanja batik di rumahnya.

Sebagai seorang saudagar batik sekaligus sebagai *mubaligh*, Kiai Dahlan telah berkeliling ke pelbagai daerah untuk silaturahmi dengan para ulama setempat, berdagang sekaligus memberi pengajian.

Sebagai contoh, tatkala beliau berdakwah ke Solo, Magelang, Ponorogo, Gresik, Surabaya, Sumber Pocung (Kepanjen, Malang), Banyuwangi, Cianjur, Tasikmalaya, Jakarta, dan lainnya, selalu membawa cangkingan dagangan batik dan kitab (Adaby Darban, 2010). Apalagi jika bersama

istrinya. Kiai Dahlan selalu dengan biaya sendiri. Jika berkunjung ke pelbagai daerah, selalu membawa dagangan batik dan kitab. Kitab itu acap kali merupakan pesanan ulama yang dikunjungi.

Dengan silaturahmi, tentu dakwah dan dagang kelilingnya berkembang. Ada yang menyambut dengan baik, ada pula yang menyambut ala kadarnya. Bahkan, ada juga yang mengancam, mengintimidasi, dan mengusirnya, seperti tatkala Kiai Dahlan berdakwah di Ponorogo dan Banyuwangi.

Justru ada yang unik dan tidak diduga, tanggapan dan antusiasme yang diterima Kiai Dahlan ketika berkunjung di kota-kota dagang, seperti Kepanjen Malang, Gresik, Pekajangan-Pekalongan, Surabaya dan lain-lain. Malah, ada juga yang berlebihan. Merujuk data Sukriyanto AR (2019), ketika Kiai Dahlan berdakwah dan berdagang ke Cianjur, Jawa Barat, beliau dilarang pulang sebelum menikahi Aisyah, adik penghulu Cianjur.

Kasus itu hampir sama tatkala beliau meminta izin pada HB VII untuk mengajarkan agama Islam di lingkungan Keraton Yogyakarta. Oleh HB VII dijawab, boleh mendakwahkan agama Islam di Keraton, dengan catatan harus menikah dengan perempuan Keraton. Akhirnya KHA Dahlan menikah dengan Nyai Hj. Abdullah, seorang janda muda usia 15 tahun. Nama aslinya Sutijah Windyaningrum, yang menikahkan adalah Kiai Lurah Nur, kakak iparnya, kakak Nyai Walidah.

Kiai Dahlan adalah seorang ulama sekaligus *mubaligh* yang mobilitasnya sangat tinggi. Pelbagai kota, khususnya di Jawa, telah beliau kunjungi. Karena itu untuk mencukupi biaya dakwahnya yang padat itu, Kiai Dahlan juga sangat gigih dan intensif berdagang. Usaha dagang batik yang dilakoni Kiai Dahlan itu, lebih bertujuan mendanai perjalanan (mencari bekal untuk) dakwahnya ke pelbagai kota.

Dalam perkembangan saat ini, satu teladan yang bisa dicontoh dari Kiai Dahlan adalah bagaimana dakwah dibangun di atas kemandirian. Tentu, suasana di masa Kiyai Dahlan, komplikasi masalahnya sudah jauh

berbeda dengan dinamika saat ini. Di tengah jumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berlipat-ganda, besaran aset menanjak, dan sumber daya yang lainnya yang makin besar, terutama warga, mental saudagar (*entrepreneurship*) itu sejatinya harus terus dipupuk dan menopang syiar al-Islam dan kemuhammadiyaan di semesta ini. Semoga!•

(Terbit: *Suara Muhammadiyah*, Juni 2022)

10 | MUHAMMADIYAH, DERADIKALISME, DAN GERAKAN EKONOMI

MENGAPA Muhammadiyah begitu getol mengadvokasi kasus tewasnya almarhum Siyono, warga Dukuh Brengkungan Desa Pogung, Cawas, Klaten dari tangan “salah tangkap” Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Mabes Polri? Bahkan, Muhammadiyah “berani” melakukan autopsi dengan menurunkan 9 dokter Ahli Forensik ([www:sangpencerah.com](http://www.sangpencerah.com). Ahad, 3/4/16).

Kematian Siyono, sejatinya tidak terlepas dari fragmen proyek (program) deradikalisme yang digelar Pemerintah melalui instrumen Densus 88. Bagi Muhammadiyah, program deradikalisme seperti itu, sama halnya mengakui dan mencitrakan bahwa Indonesia sebagai negara yang dipenuhi oleh kaum radikal dan kaum teroris (Suara Muhammadiyah, 16-31/3).

Lantas, apa solusi Muhammadiyah untuk mengurangi tensi radikalisme? Untuk menyentuh akar masalah radikalisme dan terorisme, gerakan moderasi adalah jawabannya. Yakni, penanganan hanya pada kelompok atau wilayah yang diasumsikan sebagai pelaku atau area radikalisme.

Dengan pendekatan *blocking area*, menurut Muhammadiyah, radikalisme dapat diselesaikan secara bijaksana dan mengurangi efek lahirnya

radikalisme baru. Nilai-nilai Islam yang damai dan universal dapat dijadikan sebagai *cohesive force* (kekuatan pemersatu) untuk menangani radikalisme tersebut.

Gerakan moderasi merupakan gerakan pemersatu, yang mengidealisasikan kerukunan, kebersamaan, dan kegotong-royongan sesama warga di Tanah Air. Gerakan ini mengurangi tensi saling curiga, yang memojokkan satu kelompok tertentu. Gerakan moderasi adalah gerakan merangkul tanpa memukul.

Dalam bidang ekonomi, gerakan moderasi adalah program memberi ruang partisipasi dan aksesibilitas warga negara ke sumberdaya ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua.

Gerakan Ekonomi

Untuk mengurangi tensi radikalisme, kekecewaan pelaku radikalisme harus dikurangi. Dalam konteks gerakan ekonomi, kekecewaan bisa diminimalisir tentu melalui gerakan mengurangi ketimpangan ekonomi dan gerakan merangkul melalui “aliansi ekonomi”. Maka, ketimpangan ekonomi —sebagai biang radikalisme— terjadi bukan sekadar rakusnya kekuatan pasar, tapi lebih dipicu keputusan politik.

Joseph E Stiglitz dalam *The Price of Inequality* (2005), ketimpangan dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar (makro ekonomi). Itu artinya, ketimpangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri.

Tidak mengherankan, jika ketimpangan penguasaan tanah misalnya, seperti yang disampaikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lebih dilatari kebijakan sektoral yang sangat akomodatif terhadap korporasi, tetapi tidak pada rakyat.

Makanya, mengonfirmasi data BPN (2014), ketimpangan lahan berada dikisaran 0,64 (Gini Ratio). Sekitar 70% aset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun, dan properti hanya dikuasi oleh 0,2% penduduk. Tentunya, ketimpangan yang makin akut seperti itu telah menjadi biang pe-

mantik lahirnya kekecewaan, yang pada gilirannya melahirkan reproduksi radikalisme.

Selain mengurangi tensi ketimpangan ekonomi, “aliansi ekonomi” antara pelaku radikalisme dengan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu digelar sebagai manifestasi gerakan moderasi.

Seperti yang ditawarkan Fachry Ali (2016), bahwa BUMN berpeluang menjadi sarana deradikalisasi pandangan keagamaan melalui penciptaan “aliansi ekonomi” dengan rakyat. Jalannya adalah mendorong aktivitas ekonomi yang terjangkau penduduk kebanyakan melalui pembentukan dan mengorporasikan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di bawah koordinasi BUMN.

BUMR, menurut Fachry, diharapkan menjadi sarana moderasi dan praktis yang terinstitusionalisasi, di mana rakyat terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi nyata sehingga ujungnya menghilangkan alienasi rakyat terhadap fakta ketimpangan ekonomi dan mengurangi tensi *the millinneal beliefs* yang kerap menyulut aksi-aksi radikal (terorisme).

Selain melalui BUMR, ormas keagamaan semacam Muhammadiyah juga perlu menawarkan program pelibatan “pelaku” dalam gerakan-gerakan ekonomi. Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), pelibatan aliansi itu dimulai pada keterlibatan publik dalam keanggotaan koperasi, BTM/BMT Muhammadiyah, dan gerakan ekonomi Muhammadiyah lain, yang tentu didasarkan pada kompetensi dan idealisme Muhammadiyah.

Pemberdayaan Ekonomi.

Aliansi ekonomi dengan rakyat hanya bisa dilakukan jika prasyarat ketimpangan ekonomi sebagai biang pemantik radikalisasi bisa dienyahkan. Jika fakta itu secara struktural masih masif dan belum bisa diminimalisir, sangatlah sulit memberi ruang BUMR untuk dijadikan solusi moderasi mengurangi radikalisme.

Untuk menciptakan “aliansi ekonomi” dengan rakyat tidak mesti menggunakan entitas korporasi (BUMR), tapi diperlukan entitas pember-

dayaan. Tentu, entitas ini memberikan ruang partisipatif bagi rakyat dalam memberdayakan dirinya dengan penuh kesadaran terlembaga. Sehingga, ujungnya bukan secara politik dijadikan proyek deradikalisme melalui BUMR.

Maka, merujuk William et.al (1994) dan *the Human Development Report* (2005), pemberdayaan rakyat memiliki 3 (tiga) elemen, yakni *enabling*, *empowering*, dan *advocation*. Tiga elemen ini menjadi pilar moderasi gerakan ekonomi rakyat untuk mengurangi tensi radikalisme dengan pendekatan *blocking area*.

Dengan elemen *enabling*, berarti ekonomi rakyat diberi suasana dan lingkungan dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang paling tahu tentang potensi usahanya, rakyat itu sendiri. Karena itu, berikan ruang partisipatif dan aksesibilitas ke sumberdaya-sumberdaya ekonomi. Mereka adalah *the fortune at the bottom of the pyramid* dalam teori C.K. Prahalad (2009).

Untuk elemen *empowering*, ekonomi rakyat diberi ruang melalui dukungan usaha, pelatihan, penguatan kelembagaan usaha, dan jaringan. Gerakan moderasi seperti ini tentu membutuhkan *treatment* usaha, sehingga membutuhkan keterampilan teknis, organisatoris, dan jiwa *entrepreneurship*.

Sementara elemen *advocation*, memberi ruang ekonomi rakyat untuk memperoleh pendampingan, kebijakan pemihakan, dan perlindungan. Kekuatan pelaku ekonomi tidaklah simetris, maka perlu pembelaan bagi pelaku ekonomi rakyat yang bergerak dalam skala mikro dan kecil.

Intinya, gerakan moderasi untuk mengurangi tensi radikalisme melalui “aliansi ekonomi” dengan rakyat berarti memberi ruang, aksesibilitas, dan pemihakan. Institusionalisasi aliansi ekonomi diperlukan dalam konteks penguatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi rakyat seperti yang diungkap Amartya Sen (1992) di tingkat lokal. Gerakan moderasi seperti ini tidak akan melahirkan Siyono-Siyono baru sebagai korban proyek deradikalisme. •

Terbit: REPUBLIKA, Senin 3 Maret 2014

11 | MUHAMMADIYAH DAN RESESI EKONOMI

MILAD Muhammadiyah ke 108 digelar pada 18 November 2020, dengan tema menarik, “Meneguhkan Gerakan Keagamaan Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri”. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan tentang gerak, sikap, dan kebijakan Muhammadiyah dalam menghadapi keragaman paham, pandangan dan orientasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang. Tetapi, pada saat yang sama, Muhammadiyah juga senantiasa memberi solusi terhadap masalah negeri, termasuk di era pandemi ini.

Salah satu kontribusi Muhammadiyah dalam masa pandemi Covid-19 adalah menggerakkan segala potensi dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sejak 6 Maret 2020, didirikan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang beroperasi hingga di tingkat AUM dan ranting. Terdata ada 60.000 relawan di seluruh Indonesia dan aktif membantu dan merawat korban terpapar Covid-19.

Berdasarkan data MCCC, petugas medis yang bergerak 2.396 dokter, 7.225 perawat, 1.333 bidan, 1.255 penunjang medis, 1.009 petugas farmasi, 700 gizi dan 6.482 umum di Rumah Sakit. Pada sektor non-medis, ada 30 psikolog, 62 staf psikososial, 32 staf logistik, 45 staf administrasi dan beberapa jajaran pimpinan pusat, wilayah, cabang hingga ranting di seluruh Indonesia.

Gerakan Ekonomi

Bagaimana dengan bidang ekonomi? Semenjak perekonomian nasional menghadapi krisis dan dilanjutkan resesi ekonomi yang ditandai pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi selama dua kuartal berturut, tentu Muhammadiyah, juga tidak pernah diam mencari solusi pemulihan, paling tidak menguatkan basis ekonomi masyarakat level bawah.

Hasil survei BPS (Oktober 2020), merekam ada 82,85 persen pengusaha mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan paling banyak dialami usaha mikro kecil mencapai 84%, dibandingkan usaha menengah besar yang mencapai 82%. Perusahaan di sektor akomodasi dan makanan minuman paling terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 92,47 persen perusahaan pada sektor tersebut mengalami penurunan pendapatan.

Kendati demikian, survei tersebut menemukan lebih banyak Usaha Besar (UB) yang mengambil langkah pengurangan jumlah pegawai mencapai 46,64 persen. Persentase ini lebih banyak dibandingkan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencapai 33,23%. Merujuk survei McKensey, besarnya risiko pailit pada usaha mikro, membuat segmen usaha mikro mengalami dampak penurunan pendapatan terbesar. Dampak Covid-19 terkait dari sisi pasokan dan permintaan serta adanya pembatasan pergerakan.

Kontraksi yang terjadi sejatinya membersitkan harapan. Merujuk hasil survei McKensey (Agustus 2020), ada 69 persen responden cenderung menggunakan produk lokal masa pandemi. Ini artinya, ada peluang peningkatan kapasitas dan permintaan dalam negeri untuk produk lokal, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor, yang selama ini mendominasi pasar dalam negeri.

Maka, sangat tepat, jika mengonfirmasi survei Nielsen (Juni 2020), bahwa terdapat lima sektor bisnis yang dinilai tahan krisis, antara lain, bisnis makanan dan minuman atau *food and beverage* (F&B), usaha penjualan kebutuhan bahan pokok, sektor jasa atau produk kesehatan, usaha jasa pendidikan dan pelatihan, serta bisnis sektor digital.

Dengan peta tersebut, Muhammadiyah mengambil langkah-langkah, pertama, melakukan pelatihan, pendampingan, dan advokasi bagi usaha mikro dan kecil dengan menggerakkan jejaring Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah dengan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

Kemudian, dengan pihak pemerintah, bekerja sama Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam program penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan juga Kementerian BUMN berkaitan Program Pasar Digital (PaDi).

Bahkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Muhammadiyah melakukan penginputan kepesertaan bagi usaha mikro yang dikategorikan sebagai Bukan Penerima Upah (BPU). Dengan dasar itu, usaha mikro informal bisa memperoleh program stimulasi pemerintah.

Kedua, menggerakkan Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) hingga di tingkat daerah. Program “Ruang Toko JSM” yang dilakukan rutin secara *online* telah menjadi wahana menggerakkan saudagar-saudagar Muhammadiyah dengan saling berbagi pengalaman, dukungan dan informasi terutama kerjasama usaha.

Dalam kaitan itu, peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dimiliki Muhammadiyah, dengan nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) ikut mensupport dari sisi finansial/likuiditas. Ada sekitar 124 BTM, terdiri dari 1 Induk BTM, 4 Pusat BTM, dan sisanya BTM Primer. Demikian pula dukungan BPRS, BMT, LazisMu, dan Koperasi Syariah ikut berjamaah dalam memitigasi efek buruk pandemi Covid-19.

Harapan ke Depan

Meminjam indikator yang digunakan Komisioner Biro Statistik Perburuhan Amerika (1974), Julius Shiskin, dalam Boone & Kurtz (2007: 122), resesi ekonomi muncul, jika terjadi penurunan PDB riil selama dua kuartal berturut-turut, anjaknya 1,5 persen PDB riil, penurunan industri manufaktur selama enam bulan, tergerusnya daya beli non-pertanian,

pengurangan pekerjaan di bidang industri lebih 75%, dan peningkatan angka pengangguran sebesar dua digit.

Dengan proyeksi dan fakta ekonomi yang terjadi saat ini, cukup mengonfirmasi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19 akan terjebak pada kurva U ataukah bisa menyamai logo merek sepatu Nike.

Oleh karena itu, gerakan ekonomi seperti yang dilakukan Muhammadiyah dalam memitigasi efek buruk aktivitas ekonomi di level bawah dan dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Maka di tingkat makro, dengan momentum pandemi Covid-19, pemerintah seyogianya segera melakukan reorientasi paradigma pembangunan ekonomi yang didasarkan imperatif sila Keadilan Sosial. Dalam bahasa *World Economic Forum* (WEF), pemerintah perlu melakukan *great reset*, meliputi pembenahan tata kelola dan ekosistem ekonomi, politik, dan sosial yang adil.

Sementara, dalam tingkat strategi, dibutuhkan kebijakan serius dari pemerintah untuk melakukan *inward looking strategy* atau kerap kali disebut kebijakan Industri Substitusi Impor (ISI). Namun, kebijakan ini membutuhkan persyaratan, seperti, *political will* dan *power full* pemerintah untuk mengawalinya, juga perlu ketersediaan devisa yang besar dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan ini penting untuk menguatkan basis produk lokal yang dimiliki masyarakat. •

Tangerang, 15 November 2020

12 | MUHAMMADIYAH *METaverse*

MUKTAMAR Muhammadiyah ke-48 dijadwalkan berlangsung pada 18-20 November 2022 di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya, beberapa agenda yang dibahas, yakni, laporan pertanggungjawaban, program kerja, dan risalah Islam Berkemajuan, isu-isu strategis umat dan kemanusiaan global. Kemudian agenda itu dirajut dalam tema, “Memajukan Indonesia, Men-cerahkan Semesta”.

Dalam kaitan isu-isu strategis internal, Muhammadiyah perlu membahas pemanfaatan kemajuan teknologi virtual. Teknologi ini mengaitkan, bagaimana membangun gerakan jamaah Muhammadiyah yang berbasis ekosistem *metaverse*.

Selama ini, konsolidasi gerakan Muhammadiyah, masih terfragmen-tasi ke masing-masing Majelis/Lembaga, Pimpinan secara hirarki struk-tural, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Semua ini terjadi, karena lemahnya pemanfaatan teknologi informasi.

Banyak produk regulasi belum berjalan optimal di tingkat teknis, sa-lah satu penghambatnya karena AUM banyak didirikan dan diinisiasi se-cara *bottom up* (partisipasi) oleh beberapa warga persyarakitan di mana mereka berdomisili. Maka, lahirlah Rumah Sakit (PKU), perguruan tinggi, sekolah, pesantren, klinik, panti asuhan/jompo, BTM/BMT/koperasi sya-

riah, BPRS, lembaga mobilisasi zakat, infak, shodaqah, wakaf, hingga pelbagai bentuk hibah. Pendekatan *top down* melalui regulasi tidak sepenuhnya berjalan optimal karena harus diadaptasi dengan keadaan di lapangan.

Oleh karena itu, ekosistem *metaverse* yang berbasis teknologi virtual yang dikembangkan Muhammadiyah ke depan, sejatinya memberikan ruang bagi warga persyarikatan berkreasi dan berinovasi dalam realitas yang divirtualkan. Tanpa mereduksi makna partisipasi anggota. Keterbatasan jarak, waktu, dan ruang bisa dijawab dengan ekosistem *metaverse* ini.

Jamaah Metaverse

Ragam aktivitas Muhammadiyah, termasuk organisasi otonomnya (Ortom) bisa dikonversi dalam dunia virtual. Dua tahun lebih masa pandemi Covid-19, memaksa dan mengajarkan kita, bahwa keterbatasan jarak direspons dengan media teknologi virtual, misalnya, melalui *platform zoom meeting, google meet*, dan lainnya.

Ternyata jenis teknologi ini tidak memupus relasi silaturahmi, bahkan semakin mengakrabkan jejaring. Dalam dunia kerja, muncul *work from home* (WFH) yang berjalan dengan baik. Demikian pula dalam pembelajaran, *platform e-learning* atau *Learning Management System* (LMS) makin mengakrabkan masyarakat dengan pola *blended*. Tentu, terlepas pelbagai kekurangan yang *embedded* dalam teknologi tersebut.

Dengan pengalaman masa pandemi Covid-19 itulah, teknologi *metaverse* berpeluang dimanfaatkan oleh ekosistem jamaah Muhammadiyah ke depan. Teknologi ini menggunakan teknologi imersif, yakni mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi. Sehingga pengguna (*user*) dalam ekosistem itu bisa merasakan suasana atau sensasi yang nyaris sama dengan dunia nyata.

Maka, muncullah apa yang disebut realitas digital, yang menggabungkan aspek media sosial, *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR).

Bahkan, dalam dunia *metaverse*, konsep *closed loop economy* (dari kita, oleh kita dan untuk kita) dengan menggunakan teknologi *blockchain* makin memungkinkan interaksi antarpihak dalam ekosistem.

Setiap pihak atau orang (*user*) yang terlibat masuk dalam *metaverse* tentu teregistrasi kemudian direpresentasikan melalui avatar atau *meta-human*. Avatar ini dirancang semacam representasi *online* dari pengguna dengan kustomisasi identitas. Sehingga para pengguna yang terlibat berbeda dari orang ke orang dan dapat berupa statis atau animasi.

Dalam teknologi *metaverse*, interaksi dalam ekosistem menjadi modal utama. Muhammadiyah yang mencitakan membangun masyarakat utama (*khaira ummah*) (QS. 3: 110). Masyarakat utama mengajarkan, bagaimana semua terkoneksi, berinteraksi, bekerja, dan bermain dalam ekosistem yang serba transparan, terbuka, dan akuntabel.

Dalam bidang ekonomi misalnya, bisa dimanfaatkan dalam membangun *closed loop economy*. *Pertama*, pada sektor riil, Muhammadiyah memiliki jejaring produksi (petani, nelayan, peternak, *home industry*), jejaring distribusi (Surya Mart, *ritail* TokoMu), dan logistik (BulogMu, dan lainnya).

Kedua, sisi pasar, Muhammadiyah memilki warga puluhan juta, memiliki AUM dan struktur pimpinan dari Pusat hingga Ranting, serta memiliki jejaring organisasi otonom. *Ketiga*, Muhammadiyah juga memilki lembaga keuangan, misalnya, BPRS, BMT/BTM, koperasi syariah, dana pensiun. Bahkan *keempat*, persyarikatan ini juga memilki Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di pelbagai wilayah/daerah. Maka, modalitas seperti itu, memungkinkan Muhammadiyah juga menciptakan sistem pembayaran *e-money*, *token*, *NFT*, atau *crypto* berbasis *closed loop*.

Untuk merancang *metaverse* itu, perlu dibangun “Pulau Virtual” yang sifatnya terbuka. Dalam pulau itu, aktivitas dan ekosistem Muhammadiyah menjadi penyangga utama. Sementara pihak luar, yang ingin berinteraksi dengan ekosistem Muhammadiyah dan berinvestasi melalui lahan-lahan dan properti yang ditawarkan, diberikan keleluasaan untuk

memanfaatkan sesuai cita masyarakat utama (madani).

Dalam konteks ekosistem internal Muhammadiyah, aktivitas pertemuan antarpimpinan dengan warga Persyarikatan dalam mengulik isu-isu strategis dan implementatif, tidak semata menggunakan teknologi *teleconference*, tapi sudah berinteraksi menggunakan teknologi *metaverse*.

Suatu saat, Mukhtar, Tanwir, Rakernas, Musywil, Musyda, Musyca, dilakukan *blended meeting* bisa dilakukan secara terbuka dan terbatas, sehingga Pimpinan Muhammadiyah bisa memantau isu-isu lokal yang mengemuka. Ihwal ini juga memperlancar pengambilan keputusan dan lebih efisien.

Demikian juga interaksi tukar menukar informasi data, jasa, dan produk (komoditas). Informasi tentang potensi UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dimiliki warga Muhammadiyah misalnya, bisa terlihat di setiap daerah. Bahkan, pelaku usaha tidak hanya membuat konten sendiri, setiap pengguna bisa memiliki *owner ship* terhadap karya mereka dengan teknologi *blockchain*. Data yang kemudian berupa token tersebut lebih personal dan privasi sifatnya.

Lebih jauh, potensi masing-masing daerah/cabang/ranting juga terlihat. Aktivitas pembelajaran di seluruh sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta AUM-AUM, bisa lebih terpantau. Dalam kaitan inilah, manajemen bigdata Muhammadiyah menjadi sesuatu yang mendesak. Demikian pula aspek keamanan data menjadi persyaratan mutlak. Maka, di sinilah makna teologi al Ashr (QS: 103), teologi waktu, teologi inovasi menjadi relevan, di mana Muhammadiyah jangan sampai ketinggalan waktu dalam merespon dinamika revolusi teknologi yang membutuhkan inovasi. •

(terbit: Majalah MATAN, November 2022)

13 | MUHAMMADIYAH DAN AMNESTI PAJAK

PADA Rabu 14 September 2016, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kedatangan tamu istimewa, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Kehadiran Menkeu, tidak terlepas respons Pemerintah untuk mendengarkan hasil rumusan pleno Muhammadiyah di Surabaya pada 7 September 2016, yang mengagendakan salah satu opsi pengajuan *Judicial Review* (JR) terhadap UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau populer *Tax Amnesty*/TA (Amnesti Pajak).

Sayang sekali, dalam diskusi Menkeu dan PP Muhammadiyah itu sama sekali tidak menyinggung JR. Bahkan lebih bernuansa silaturahmi dan sosialisasi terhadap pentingnya UU tersebut (*Republika*, 15/9).

Sebelumnya, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melalui Rakonas 27-28 Agustus di Yogyakarta, telah mengkritisi beberapa materi UU TA. Setidaknya berkaitan, *pertama*, watak hukum pemihakan pada makna pasal 33 dan pasal 1 UUD 1945 tidak konkret.

Makna kebersamaan dan asas kekeluargaan serta pasal-pasal yang berkait dengan demokrasi dan HAM masih sumir, tidak jelas sarasannya. *Kedua*, karena ketidakjelasan sasaran, dampaknya masyarakat umum juga terkena sasaran dan menjadi resah dan bingung. Sejatinya, amnesti pajak

ditujukan untuk orang yang mengalami masalah dalam kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pengemplang pajak dan pemodal kakap yang memarkir belasan ribu triliun dananya di luar negeri.

Bahkan UU TA itu dianggap bersifat pragmatis karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan untuk menombok kerugian atau menambal kegagalan fiskal (APBN) 2016. Ihwal ini, tentu akan menemui kegagalan karena negara disandera oleh pihak-pihak tertentu yang punya rekaman jejak bermasalah dan penyimpanan dana besar di luar negeri.

Kontroversi Internal

Pernyataan Majelis Hukum dan HAM itu kemudian memicu dan menghangatkan perdebatan publik terhadap pentingnya JR. Terjadilah polarisasi antara pro dan kontra terhadap UU TA. Keinginan Majelis Hukum dan HAM mengusulkan JR, selain didasari pada materi UU TA yang sumir, juga pengalaman sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah sukses melakukan JR atau jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22 Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mengajukan JR terhadap tiga UU bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Adanya pernyataan pers Majelis Hukum dan HAM dan menyeruakannya perdebatan penting-tidaknya JR, menjadi pemicu dikeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. *Beleid* yang dikeluarkan 29 Agustus 2016 sudah mengalami penjelasan detail dan signifikan.

Tujuan *beleid* tentu menjawab keresahan masyarakat atas program amnesti pajak. Ihwal penting dalam beleid, bahwa orang pribadi seperti

petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Selain itu, harta warisan bukan merupakan obyek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Harta warisan juga bukan merupakan obyek pajak apabila sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris. Demikian juga ketentuan untuk harta hibahan yang bukan merupakan obyek pengampunan pajak.

Sementara itu, di internal Muhammadiyah sendiri, juga masih terjadi perdebatan hangat. Rapat pleno Muhammadiyah, 7 September 2016 di Surabaya, ternyata belum utuh mendukung rekomendasi JR. Pihak yang lebih netral terhadap UU PP setidaknya mengusulkan, *pertama*, UUTA tersebut justru menjadi momentum bagi Muhammadiyah atau masyarakat umum untuk menertibkan administrasi aset-aset yang dimilikinya. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang terdiri dari lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA, SLB, dan PTM), kesehatan (PKU, RS, Klinik, BKIA, BP), lembaga sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi cacat), masjid dan musholla hingga tanah hak milik, tanah wakaf, tanah hibah, yang jutaan hektar luasnya, perlu dilibatkan.

Merujuk pasal 4 UU TA yang berkaitan tarif uang tebusan atas harta atau aset yang dimiliki di mana menetapkan tarif 2 persen (hingga 30 September 2016), 3 persen (hingga 31 Desember 2016), dan 5 persen (hingga 31 Maret 2017) menjadi peluang karena nilai tarif nya dianggap sangat rendah.

Melewati tiga tahapan waktu tersebut, tentu kembali berlaku tarif pajak biasa beserta sanksi dua kali lipat atas keterlambatan pelaporan. Selain itu, dengan diberlakukan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pada 2017, maka era keterbukaan informasi menjadi keniscayaan. Aset-aset Muhammadiyah dan masyarakat umum, yang tidak ikut dalam program

amnesti pajak akan bisa terdeteksi.

Kedua, diakui rentang waktu sosialisasi dan tiga tahapan seperti bunyi pasal 4 UU TA dianggap sangat singkat dan sulit dipahami oleh publik atau Wajib Pajak. Maka, pihak netral ini tidak mengajukan JR, tapi mengajukan pentingnya mengubah materi pasal 4 ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Perpu harus diajukan ke DPR RI dan ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kepentingan memaksa. Ataukah melalui perubahan terbatas terhadap UU TA, berkaitan perubahan redaksi rumusan suatu ketentuan. Usulan ini bertujuan agar klausul pasal 4 memberikan waktu kepada masyarakat untuk menarik nafas dalam memahami makna pelaksanaan UU TA.

Edaran Muhammadiyah

Setelah perdebatan hangat di internal Muhammadiyah dan mengakomodasi aspirasi publik, maka pada 15 September 2016, PP Muhammadiyah melansir Surat Edaran tentang Masalah UU Pengampunan Pajak No. 448/EDR/1.0/I/2016. Edaran itu setidaknya mengusulkan kepada Pemerintah berkaitan pelaksanaan UU TA. *Pertama*, perlunya sosialisasi secara maksimal kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur baik aparatur pajak maupun masyarakat.

Kedua, meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas aparatur pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. *Ketiga*, memaksimalkan usaha mengembalikan uang negara yang tersimpan di luar negeri, khususnya dari kalangan konglomerat yang terindikasi menyimpan dana di luar negeri dan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Selanjutnya *keempat*, memastikan agar amnesti pajak tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hajat hidup rakyat serta tidak menoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kecurangan pajak. Dan *ke-*

lima, melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan usaha-usaha penarikan pajak dari wajib pajak sesuai Undang-Undang dengan cara yang lebih sistematis, intensif, elegan, dan santun sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus tingkat rasio pajak.

Edaran PP Muhammadiyah tidak otomatis menganulir adanya keinginan sebagian pihak melakukan JR. Namun yang pasti, menengok pengalaman beberapa negara yang melaksanakan amnesti pajak, tingkat kegagalan masih sangat tinggi. Kasus India misalnya, pemberlakuan amnesti pajak justru menemui kegagalan karena tidak berhasil mendorong penerimaan pajak secara signifikan.

Hal itu terkait ketidaksiapan administrasi dan petugas pajak di lapangan. Maka, mengonfirmasi studi Najeeb Memon dalam “Designing a Tax amnesty – One Size Does Not Fit All,” *Asia-Pacific Tax Bulletin*, Vol 21, No. 1 (2015), menunjukkan fakta miris dan mengkhawatirkan, yakni sebagian besar pelaksanaan pengampunan pajak di negara berkembang tidak berhasil. •

Terbit: *Kedaulatan Rakyat*, 12 Oktober 2016)

14 | PERILAKU *FLEXING* PADA BULAN SUCI

PANDEMI Covid-19 yang berlangsung lebih dua tahun terakhir, telah mengubah pola perilaku manusia. Aktivitas proses belajar-mengajar dan bekerja dari rumah menjadi habitus baru, setalian kemudahan pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan, aktivitas *e-commerce* yang memediasi antara produsen, penjual, distributor, dan konsumsi (pembelanjaan) semakin semarak.

Demikian juga aktivitas media sosial (medsos) telah mendisrupsi keberadaan media-media konvensional. Medsos ini memberikan kemudahan kepada siapa, di mana, dan kapan pun untuk mengakses sekaligus menjadi kanal informasi, komunikasi, dan media aktualisasi diri. Dalam konteks seperti inilah, perilaku *flexing* mendapat tempat untuk berkembang biak.

Per definisi, *flexing* (Inggris) artinya pamer. Perilaku ini banyak menyruak di dunia maya (duma) atau medsos, menyusul fenomena kemunculan para *crazy rich* (orang kaya gila). Banyak netizen menyematkan, *flexing* acapkali dilakukan oleh orang kaya palsu, yang suka pamer harta kekayaan di ruang publik.

Banyak riset psikologi pemasaran menyebutkan, perilaku *flexing* di-

picu. *Pertama*, untuk memantik perhatian lawan jenis. Dalam buku *Spent Speed Summary: Sex, Evolution, and Consumer Behavior* (Viking, 2009), Geoffrey Miller, semua perilaku konsumerisme bisa disusuri, dan berakar pada usaha seseorang untuk menarik perhatian lawan jenis atau orang yang disukainya. *Galibnya*, perilaku seperti ini dominan terjadi pada usia-usia muda (milenial) yang sedang mencari identitas diri, sehingga mereka butuh rekognisi (pengakuan).

Kedua, ingin mendongkrak rasa percaya diri. Riset yang dirujuk Hestianingsih (2022), menunjukkan tatkala seseorang merasa sedih atau rendah diri, cenderung akan membeli barang-barang mewah.

Dalam buku *Brandwashed: Tricks Companies Use to Manipulate Our Minds and Persuade Us to Buy* (2011), Martin Lindstrom, menjelaskan, bahwa anak-anak dengan tingkat kepercayaan diri rendah akan lebih mengandalkan menggunakan barang-barang harga mahal, ketimbang mereka dengan rasa percaya diri yang tinggi.

Bahkan, perilaku *flexing* disebabkan dirinya merasa *insecure*, meragukan diri sendiri sehingga butuh validasi dari lingkungan.

Ketiga, adanya masalah personality. Masalah kepribadian. yang bisa dikaitkan dengan perilaku histrionik dan narsistik (Hestianingsih, 2022). Histrionik adalah orang yang suka mencari perhatian, sementara narsistik, mereka yang cenderung merasa dirinya lebih hebat dari yang lain.

Galibnya, kekayaan yang mereka pamer itu dilacak berasal dari beberapa sumber, misalnya, hasil *money laundering* yang dilakukan orang-orang tertentu kemudian hasil “pencucian uang” itu dititip ke mereka. Bisa juga dari hasil kejahatan, *trading* berbasis *virtual cryptocurrency* tanpa *underlying asset*, permainan *binomo*, *binary option*, mirip seperti judi ketimbang sebagai instrumen investasi.

Dalam penggunaan *binomo*, biasanya perlu melakukan registrasi pada penyedia *platform binary option* dan melakukan deposit. Bahkan, menggunakan *influencer* dan medsos (*followers*) milenial.

Artinya, perilaku *flexing* ini bukan berasal dari kalangan mereka yang

berada secara materi. Karena, fakta menunjukkan orang yang benar-benar kaya, tentu saja jarang sekali memamerkan hartanya. Malah, mereka ini tidak pernah terlintas dibenaknya untuk pamer kekayaan.

Dalam perkembangan berikutnya, perilaku *flexing* ini sejatinya tidak semata disematkan kepada mereka yang memamerkan kekayaan di tengah penderitaan banyak orang. Ada jenis *flexing* yang justru lebih berbahaya, yakni memamerkan amal atau kegiatan ibadah di medsos atau di ruang publik. Seperti, memamerkan donasi, sedekah, puasa, shalat tahajud, berdoa, kurban, umrah, haji, wisata spiritual, dan lainnya.

Di bulan Ramadhan ini, menjadi lahan empuk berkembangbiaknya perilaku *flexing* amal itu. Padahal, puasa merupakan suatu ibadah yang sangat rahasia, tersembunyi, bersifat pribadi dan hanya Allah yang tahu. Karena puasa merupakan ibadah rahasia, maka setiap orang yang melakukannya hanya karena Allah SwT, bukan karena orang lain.

Maka, perilaku *flexing* pahala atau amal (*riya'*) ditegur Allah SwT: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya' (flexing) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir."*

Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (QS.2: 264).

Tentu, Allah Maha Tahu apakah donasi, infaq, atau sedekah itu dilakukan dengan ketaatan atau kemaksiatan. Sehingga memberikan dua pilihan baik ditampakkan atau dirahasiakan. Hal ini sesuai hadits orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.

Menampakkan sedekah agar orang lain meneladani itu baik. Namun menyembunyikan tanpa memberitahu siapa pun itu lebih elok untuk

menghindari munculnya *riya'* dan *sum'ah* atau gemar menunjukan amal yang dilakukan agar mendapat sanjungan atau pujian.

Namun, ada hal yang penting dan perlu diluruskan terhadap rizki yang perlu disampaikan kepada publik, sebagai pengejawantahan rasa syukur tanpa mengundang *riya'*.

Seperti dinukil dalam sebuah kisah, mengutip Muhtahrul Alif (2022), bahwa suatu ketika Malik Ibn Nadhrah al-Jusyami bersandingan dengan Nabi. Melihat pakaian Malik yang sangat jelek, Nabi pun bertanya, “Apakah engkau mempunyai harta?” Malik menjawab, “Saya punya berbagai harta.”

Nabi pun lalu menasehatinya, “Bila Allah menganugerahkanmu harta, maka baiknya terlihat tanda atau bekas anugerahnya pada dirimu.” Nabi dalam suatu riwayat bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha indah, menyukai keindahan dan suka bila melihat tanda/bekas nikmat (anugerah-Nya) kepada hamba-Nya.”

Akhirnya, perlu mendalami ayat yang mengisahkan Qarun, pelaku *flexing* dengan tujuan menyombongkan diri. Artinya, *flexing* materi dan pahala (amal) sama saja, bahkan *flexing* amal lebih berbahaya karena terlihat taat beribadah tapi sesungguhnya mereka pongah. •

(Terbit: REPUBLIKA, 8 April 2022)

15 | SERTIFIKASI PRODUK HALAL

TERHITUNG 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), secara bertahap mulai mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal produk di Tanah Air. Ihwal ini, tentu merujuk UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Lantas, apa pentingnya produk disertifikasi halal? Dan, apa kontribusinya bagi perekonomian nasional?

Sudah banyak diulas, bahwa persaingan ekspor produk halal global meningkat signifikan bertalian peningkatan pertumbuhan konsumen. Mengonfirmasi data Sidang Tahunan *Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture* (ICCIA) pada 22-24 Oktober 2018 di Jakarta, perdagangan produk halal di dunia mencapai US\$ 2,8 triliun atau sekitar Rp 39.527,04 triliun.

Nilai jumbo perdagangan produk halal itu terdiri dari US\$ 1,4 triliun (Rp 19.763,52 triliun) untuk perdagangan makanan dan minuman, US\$506 miliar (Rp 7.143,1 triliun) untuk obat dan farmasi, kosmetik US\$ 230 miliar (Rp 3.246,86 triliun) dan produk lain US\$ 660 miliar (Rp 9.317,09 triliun).

Bahkan, merujuk data *State of the Global Economy Report* (2015), terdapat 15 negara di dunia yang memiliki nilai GIE (*Generate Islamic Economy*). Malaysia adalah peringkat pertama industri halal dan Indonesia berada

dalam peringkat ke 10. Selain itu, perkembangan industri halal juga cukup pesat di negara-negara mayoritas non-Muslim, seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol.

Ekonomi Dunia Melepuh

Di tengah optimisme terhadap industri halal dunia, di sisi lain kita selalu dikagetkan terhadap laporan melepuhnya dinamika ekonomi global. Dalam pidatonya yang berjudul *“Decelerating Growth Call for Accelerating Action”* pada 8 Oktober 2019, pemimpin baru Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menyampaikan kinerja ekonomi dunia ke depan. IMF memprediksi, pada 2019 pertumbuhan ekonomi lebih lambat di hampir 90% dunia. Ekonomi global sekarang berada dalam perlambatan yang tersinkronkan. Ini berarti, pertumbuhan 2019 ini akan anjlok ke tingkat terendah sejak awal dekade.

Demikian pula Bank Dunia, pada April 2019, juga memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 2,6% pada tahun 2019. Itu merupakan tingkat pertumbuhan paling lambat dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan, Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2019 sebesar 5,8 persen melambat dibandingkan 2018 yang sebesar 6,3 persen. Pelepuhan pertumbuhan ekonomi akan berlanjut tahun 2020 dan 2021, masing-masing 5,7 persen dan 5,6 persen.

Indonesia sendiri, mengonfirmasi laporan *Weathering Growing Risk East Asia and Pacific Economic*, (Edisi 10/10/2019), memprediksi pertumbuhannya hanya 5% pada 2019 ini. Angka ini turun dari prediksi April 2019, yakni 5,1%. Lembaga global ini melaporkan, kendati makro ekonomi Indonesia yang kuat dan telah menopang pertumbuhan, namun investasi tumbuh *slow down* dibanding 2018.

Defisit transaksi berjalan makin menganga, dipicu pertumbuhan ekspor melambat. Meski permintaan domestik kuat, ketegangan perdagangan internasional dan volatilitas keuangan global bakal membawa risiko besar bagi Indonesia.

Kontribusi Industri Halal

Dengan kondisi pelambatan ekonomi global, peluang besar bagi industri halal Tanah Air untuk meresponnya. Bahkan, pemerintah dan dunia usaha menaruh perhatian besar agar industri halal ini memberi kontribusi signifikan dalam pemulihan ekonomi domestik. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, telah menjadikan industri dan produk halal sebagai penopang pemulihan ekonominya.

Laporan *State of the Global Islamic Economy* pada 2016 dan 2017, menyampaikan hasil surveinya yang dilakukan di 76 negara yang terdiri dari 57 negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan 16 negara non OKI. Ternyata, sektor makanan halal memiliki pendapatan yang paling besar di antara sektor lainnya.

Pada 2017, negara yang memiliki industri makanan halal terbanyak adalah United Arabia Emirates (UAE). Brasil yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas non-muslim menempati peringkat ke-2 dalam industri makanan halal.

Brasil menduduki peringkat kedua karena negara ini mampu mengekspor daging halal terbanyak di seluruh dunia. Pendapatan Brasil yang diperoleh dari hasil ekspor ini mencapai US\$ 5,19 miliar. Sementara sektor keuangan, peringkat pertama masih diduduki oleh Malaysia.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan jumlah populasi Muslim terbesar dunia, seyogianya menjadi pemain utama. Mengonfirmasi data *State of the Global Islamic Economy* (2017), penduduk Muslim Indonesia menghabiskan US\$ 218,8 miliar untuk sektor ekonomi Islam. Sayang sekali, Indonesia belum optimal memainkan potensi pasar tersebut.

Merujuk riset Waharini dan Purwantini (2018), dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit sekitar 57 juta. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 per-

usaha dan UMKM.

Kendati jumlah sertifikasi halal meningkat, belum seimbang dengan potensi pasar domestik dan global. Selain faktor persaingan dari produk impor produk halal, tantangan berikutnya yakni tingkat kesadaran produsen mendaftarkan sertifikasi halal.

Jumlah produsen yang baru memiliki kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sangat kecil. Pada 2018, tercatat hanya sekitar 70% dari 13.136 industri di Indonesia. Bisa jadi, faktor prosedur sertifikasi yang rumit, panjang dan biaya besar dalam pembuatan sertifikasi halal.

Malaysia merupakan negara pesaing terbesar, memiliki sertifikasi halal dan penerapan syariah secara menyeluruh. Untuk mencontoh Malaysia, Indonesia harus memiliki pengelolaan industri halal yang *good governance*, akuntabel dan transparan. Sehingga pangsa pasar yang potensial di Tanah Air, tidak akan diambil alih oleh negara lain yang lebih memiliki kesiapan dan tata kelola dalam industri halal.

Dengan mulai diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal sejak 17 Oktober 2019, maka menjadi momentum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja keras memberi kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, maka BPJPH harus secara bertahap menggantikan peran MUI, yang sebelumnya merupakan lembaga tunggal menerbitkan sertifikat halal.

Selain itu, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) harus segera berdiri di daerah dan di organisasi kemasyarakatan dengan dukungan lembaga riset dari kalangan akademisi. Bagi Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan telah mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal-Thoyyib (LPH-KHT) dan telah siap beroperasi baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan dukungan 15 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Lembaga ini wujud partisipasi dalam mengurangi pelepasan ekonomi bangsa. •

(Terbit: *Republika*, 17 Oktober 2019)

16 | TOKEN WAKAF

MENGINFORMASI data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama RI (2021), wakaf tanah di Indonesia potensinya mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Jika direvaluasi, diperkirakan nilainya Rp 2.000 triliun. Merujuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf tunai, potensinya mencapai Rp 180 triliun per tahun.

Di beberapa organisasi keagamaan pun, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Hidayatullah, Al-Washilyah, Mathlaul Anwar (MA), hingga Yayasan Al Azhar, setali tiga uang, potensi itu belum juga maksimal digerakkan secara nyata. Bahkan disinyalir hanya di bawah angka 10 persen.

Jika dipeta masalahnya, terletak pada rendahnya literasi wakaf, regulasi yang acap kaku, tata kelola, korporatisasi dan moneteisasi aset wakaf, kapasitas *nazhir* hingga pada pemanfaatan teknologi yang masih lemah.

Implikasinya, kapasitas wakaf belum mampu menggerakkan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menekan jumlah ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan yang makin akut.

Teknologi Blockchain

Di era digitalisasi, pemanfaatan instrumen token dalam menggerak-

kan potensi wakaf menjadi keniscayaan. Token menjadi instrumen investasi, termasuk dalam *crowdfunding* (galang dana), karena ia menjadi aset digital yang dibangun di atas jaringan *blockchain*. Dalam konteks korporatisasi pengelolaan aset wakaf, misalnya melalui skema syariah, token wakaf bisa menjadi pilihan instrumen galang dana untuk proyek pengelolaan dan pelayanan wakaf dari dan untuk *muwakif*.

Tentu, instrumen token dalam wakaf tidak akan berfungsi jika tidak ada teknologi *blockchain*. Namun, teknologi ini selalu disalahartikan dan diidentikan sebagai *crypto currency* oleh sebagian pihak di Tanah Air.

Padahal, jika dianalogikan *crypto currency* itu adalah kendaraan mobil, maka teknologi *blockchain* adalah mesinnya. *Blockchain* adalah teknologi netral dan universal, yang salah satunya sering digunakan dalam *crypto currency*.

Blockchain sendiri memiliki makna, *block* adalah catatan dan *chain* adalah ikatan (rantai). Sehingga teknologi ini bisa menjadi tempat penyimpanan data atau dokumen, hash atau suatu kode dari hasil enkripsi (baru dan lama), *cryptography* yang akurat dan jalin-berkilindan dalam ekosistem mahadata (*bigdata*) yang bisa diakses oleh siapa pun yang teregistrasi atau sebagai peserta (*members*).

Data yang terinput harus valid, transparan, akuntabel, tidak bisa diubah, dan *traceable*. Jika input datanya tidak jujur, maka akan mempengaruhi ekosistem data dan pengambilan keputusan usaha ke depan.

Maka, merujuk Sukmana (2019), teknologi *blockchain* dalam wakaf produktif memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dari dua sisi, yaitu *pertama*, jika *nazhir* dan *wakif* terhubung dalam satu sistem *blockchain*, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi cukup tinggi. *Kedua*, apabila wakaf berbasis *blockchain* dapat menjangkau *nazhir* global, sangat memungkinkan *wakif* dari suatu negara untuk berwakaf di negara lain, utamanya negara yang sedang membutuhkan pendanaan untuk pembangunan.

Namun demikian, calon wakif atau investor tentu membutuhkan in-

formasi yang lengkap, akuntabel, dan transparan. Dokumen atau data aset wakaf, status hukum, kredibilitas *nazhir*, *master plan* proyek, studi kelayakan, skema bisnis atau *business model*, hingga *cash flow* dan gambar 3D-nya, dan lainnya harus disiapkan secara matang.

Tentu, pengelolaan aset-aset wakaf ini perlu dibuatkan dalam skema korporatisasi, seperti dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) atautkah koperasi, yang dikelola dengan manajemen modern dan profesional. Korporasi ini harus dipisahkan dari *nazhir* sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Token Wakaf

Sebagai bagian dari instrumen investasi atau media galang dana, token wakaf diciptakan untuk suatu proyek wakaf yang sudah ditetapkan data dan dokumennya dalam *blockchain*. Token ini kemudian bisa digunakan sebagai media pembayaran wakif agar dapat menikmati layanan yang disediakan proyek tersebut.

Lazimnya, token beroperasi di *blockchain* dengan menggunakan konsep *smart contract* yakni pengaplikasian kode *blockchain* dengan tujuan mengikat perjanjian antara beberapa pihak. Contoh, *blockchain* yang kerap digunakan oleh token-token adalah *ethereum*, yang juga menggunakan sistem *smart contract*.

Tentu, fungsi token dapat digunakan sebagai alat tukar saat menjalankan sebuah layanan proyek wakaf yang menyediakan token. Harap dicatat token, meski memiliki nilai pasar, tapi secara teknis token bukanlah mata uang.

Dengan instrumen token memungkinkan penggunaanya untuk mengakses berbagai layanan dan fitur yang disiapkan dalam *platform* proyek wakaf yang sudah disiapkan oleh *nazhir* dan korporasi yang ditunjuk sebagai pengelola profesional.

Namun demikian, ide token wakaf ini perlu hati-hati diimplementasikan karena bisa melabrak regulasi, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2011

tentang mata uang dan berbagai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian pula, perlu didiskusikan oleh berbagai Ormas keagamaan. Tapi, secara generik, *blockchain* dan instrumen token hanyalah teknologi netral, dan operasionalnya telah memiliki basis *underlying asset* berupa aset wakaf yang dijadikan obyek proyek. •

Terbit: *Republika*, 18 Maret 2022

17 | ROKOK DAN KEMISKINAN

BADAN Pusat Statistik (BPS) melansir, rokok kretek filter sebagai komoditi terbesar kedua penyumbang garis kemiskinan di Indonesia. Secara nasional, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK, Maret 2018 sebesar 73,48 persen. Beras berkontribusi 20,95 persen terhadap kemiskinan di perkotaan dan 26,79 persen di perdesaan. Kemudian rokok kretek filter menyumbang 11,07 persen terhadap kemiskinan di perkotaan serta 10,21 persen di perdesaan (*Republika*, 17/7).

Menurut BPS, fluktuasi harga beras berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Permasalahannya bukan pada beras, tapi pada komoditas rokok. Selama ini, kendati harga rokok mulai mahal, cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi. Lazimnya naik bertahap dan terukur.

Rokok memengaruhi tingkat kemiskinan karena sebenarnya bukan bahan makanan pokok, namun tingkat konsumsinya tinggi. Bahkan penduduk di bawah garis kemiskinan pun banyak ditemui masih mengonsumsi rokok. Jika pola konsumsi rokok ini tidak mengalami perubahan, potensi bonus demografi segera mengalami kepunahan. Akankah fatwa agama bisa efektif dalam menekan pola konsumsi rokok di Tanah Air?

Dalam pandangan ormas keagamaan, misalnya Muhammadiyah, sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

No. 6 /S M/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok, secara tegas mendeklarasikan, merokok hukumnya haram. Mengapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Ada beberapa alasan, yakni normatif, saintifik, dan fakta sosial ekonomi.

Secara normatif, setidaknya yakni, *pertama*, merokok adalah perbuatan *khaba'is* (segala yang buruk), *kedua*, menciptakan lingkungan tidak sehat dan tidak sesuai tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*); *ketiga*, merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri secara perlahan; *keempat*, membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. *Kelima*, pembelanjaan untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir.

Secara saintifik, didasarkan bahwa rokok sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Selain itu, merujuk studi WHO (*World Health Organization*) (2008), epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang per tahun akibat kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain. Artinya, satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang 2030.

Pada aspek sosial ekonomi, terdapat fakta dalam pelbagai studi tentang rokok dan kemiskinan, bahwa terjadi surplus ekonomi masyarakat kelas bawah bergeser menjadi surplus ekonomi pemilik modal (industri rokok).

Justifikasi historis seperti itu telah mengonfirmasi fakta-fakta teranyar. *Pertama*, harga rokok di Indonesia termasuk salah satu negara termurah setelah Pakistan, Vietnam, Nikaragua, Kamboja, Filipina dan Kazaksthan. Sementara komposisi perokok di dunia, 80 persen adalah negara-negara miskin dan berkembang.

Di antara negara-negara tersebut, Indonesia meraih predikat pertama jumlah pria perokok di atas 15 tahun. Merujuk data *the Tobacco Atlas* (2015), sebanyak 66 persen pria di Indonesia adalah perokok. Ini artinya, dua dari tiga pria usia di atas 15 tahun adalah perokok.

Kedua, merujuk hasil riset Lembaga Studi Demografi FE UI, banyak rumah tangga termiskin atau berpenghasilan rendah di Indonesia terpe-rangkap konsumsi rokok; sebanyak tujuh dari sepuluh rumah tangga (hampir 70 persen) memiliki pengeluaran membeli rokok. Sedangkan, enam dari sepuluh rumah tangga termiskin (57 persen) memiliki penge-luaran membeli rokok.

Ketiga, hasil Survei Sosial Ekonomi BPS (2015), merujuk data alokasi belanja dikeluarkan masyarakat telah melampaui besaran belanja beras. Hingga akhir 2016, menyebutkan alokasi belanja rokok mencapai Rp 64.769 per kapita sebulan atau 6,79 persen terhadap pengeluaran total. Pengeluaran per kapita membeli beras terpaut angka tidak jauh yakni Rp 64.759 atau 6,79 persen. Sementara rerata jumlah batang rokok dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan.

Keempat, merunut data kemiskinan BPS (Maret 2017), kontribusi pe-ngeluaran rokok pada GKM sebesar 8,08 persen (perkotaan) dan 7,68 per-sen (pedesaan). Data ini berbicara, orang dikategorikan miskin banyak yang mengonsumsi rokok. Namun, bukan berarti orang kaya tidak me-rokok tetapi bagi mereka *share* pengeluaran rokok ini sangatlah kecil di-bandingkan pengeluaran barang mewah lainnya (*inelastis demand*).

Kontras fakta miris itu, kinerja tiga pemain besar industri rokok di Ta-nah Air, yakni: PT Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Djarum terdongkrak signifikan. PT Sampoerna Tbk misalnya, dalam laporan keuangan 2016 menorehkan laba bersih Rp10,355 triliun atau terdongkrak dari tahun sebelumnya Rp10,015. Sejak dibeli *Philip Morris International* pada 2005, Sampoerna Tbk menunjukkan rerata pertumbuhan laba bersih per tahun hingga 13 persen.

Demikian juga PT Gudang Garam Tbk membukukan laba bersih Rp 6,43 triliun pada 2016. Capaian itu naik 19,05 persen dari pendapatan pada 2015 yakni Rp 5,4 triliun. Selanjutnya, PT Djarum, melalui anak-anak perusahaannya makin agresif menjadi pemain di pelbagai sektor bisnis seperti *e-commerce*, properti, media, hingga sektor pertanian.

Bahkan, Majalah *Forbes* (2016) masih menempatkan keluarga Hartono —Robert Budi Hartono dan Michael Hartono— pemilik PT Djarum sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya, diperkirakan mencapai US\$15,4 miliar atau ekuivalen Rp 210,98 triliun atau sekitar seperlima dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun (2016).

Fakta ketimpangan dan pengalihan surplus ekonomi ke pemilik modal besar (industri rokok), menjadikan ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah terpanggil. Bukan semata memberi fatwa haram, tapi Muhammadiyah terus bergerak melakukan studi, sosialisasi, kampanye, dan advokasi ke masyarakat miskin dan tertindas akibat masifnya kapitalisasi industri rokok ke seluruh lini.

Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui gerakan teologi *al-Ma'un* harus memastikan bahwa sungguh banyak korban masyarakat miskin (perokok dan petani tembak), hilangnya generasi masa depan, makin eskalatifnya penyakit tidak menular terutama akibat paparan asap rokok, hingga makin eksploitatifnya industri rokok karena kuatnya transaksi ekonomi-politik yang dimilikinya. Segenap korban struktural seperti itu harus diadvokasi Muhammadiyah.

Dalam konteks sosialisasi dan kampanye, Muhammadiyah setidaknya, minimal melakukan gerakan penyadaran di tingkat komunitas (ranting, cabang dan AUM), menanamkan nilai-nilai dan penyadaran di tingkat publik serta kolaborasi masif dengan pihak lain yang *concern* dengan gerakan ini. Tentu, semua ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan generasi muda bangsa kita. •

(Terbit: *Republika*, 3 Agustus 2018)

18 | KAMPUS MERDEKA, DOSEN TERKEKANG?

PADA Selasa (21/3), saya diundang sebagai peserta Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah III, DKI Jakarta. Banyak rektor, pimpinan dan penyelenggara perguruan tinggi, serta mahasiswa berprestasi yang hadir. Tema yang disuguhkan: “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Terobosan Berani Yang Penuh Arti”.

Tema ini, tentu menggelitik, karena memberi pesan tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan kebebasan peserta didik (mahasiswa) untuk luwes mencari sumber-sumber pembelajaran, tidak semata bersumber dari dosen.

Dalam teori pembelajaran disebut andragogi, sebagai teori dan praktik pembelajaran orang dewasa yang dibiakkan Malcom Knowles (1913-1997). Maka, dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator.

Dalam konsep MBKM yang dilansir melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, merdeka belajar, sejatinya memberi ruang kebebasan dan otonomi kepada pendidikan tinggi. Pun merdeka dari birokrasi administratif yang berbelit.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sementara, kampus merdeka, sejatinya memberikan peluang besar kepada mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi.

Dalam konteks kampus merdeka, ada belasan opsi (pilihan) medan kemerdekaan yang diberikan ke mahasiswa, termasuk hal berkaitan aktivitas sosial, kemanusiaan, kewirausahaan, studi independen, mobilitas belajar dan magang di kampus luar negeri, riset, dan aktivitas pembelajaran lainnya.

Dosen Terkekang

Tentu, konsep MBKM ini adalah terobosan yang perlu kita “angkat topi”. Kendati ukuran *outcomenya*, masih pada kisaran klasikal, misalnya: luaran siap kerja, lama mendapatkan pekerjaan, gaji pertama, di mana mereka bekerja, dan lainnya. Ukuran seperti itu, masih menekankan, perguruan tinggi adalah wahana fabrikasi untuk menghasilkan tukang.

Ibarat industri manufaktur, ada *input*, proses, dan *output*. Indikator kemanfaatan bagi masyarakat, misalnya, seberapa mampu luaran itu menghasilkan lapangan kerja baru, karya kreatif dihasilkan, dan inovasi bagi masyarakat, belum terukur dalam konsep MBKM.

Walapun peran dosen makin minimalis dalam MBKM, tapi kemerdekaan atau kedaulatan dosen sangat limitatif. Dosen makin terikat, bahkan terkekang oleh pelbagai produksi dan reproduksi aturan. Padahal Permendikbud No 3 Tahun 2020 secara imperatif menegaskan kebebasan dosen dalam birokrasi berbelit.

Jika mahasiswa merdeka, maka dosen dijejali aturan-aturan dan akronim, misalnya, Sister, PPDikti, Siharka, Sinta, Sijali, Sijampang, Seruni, SiBKD, Simlitabmas, Mojang, Silat, dan lainnya, dengan sistem digitalisasi yang makin teknokratik dan menjenuhkan. Bahkan aturan-aturan itu di lapangan kerap kali tumpang tindih dan kurang sinkron,

Ujungnya, banyak dosen hanya berfokus pada pemenuhan aturan

dari akronim itu. Laporan periodik telah memperbudak dosen, sehingga waktunya terkuras untuk rutinitas birokratif.

Tugas keilmuan atau kecendekiannya terbengkalai, sehingga “pelit” melahirkan karya-karya ilmiah yang transformatif dan inspiratif. Dosen menjadi tumpul dalam membangun narasi dan improvisasi, serta miskin solusi, kendati semakin banyak yang telah memiliki pangkat dan jenjang akademik yang hebat-hebat.

Hal ini kian parah karena demi meningkatkan kesejahteraannya, para dosen rela dipasung oleh rutinitas itu. Kalaupun tidak, mereka akan “ngamen” dan menjadi selebritas di panggung-panggung akademik dan proyek menggiurkan di luar kampus.

Mengakali Aturan

Maka tidak heran, jika aturan dan akronim-akronim itu terus diproduksi dan direproduksi, maka peluang “mengakali” alias “membohongi” itu juga makin terbuka lebar. Dalam sosiologi hukum, dikenal bahwa semakin banyak produk hukum, artinya masyarakat diasumsikan memiliki rerata tingkat kesadaran sosial yang rendah, maka perlu diatur ketat.

Sejurus dengan itu, teringat uraian Francis Fukuyama dalam *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995), pada masyarakat negara berkembang, seperti Indonesia, dikategorikan *low trust society*. Ihwal ini menegaskan, reproduksi aturan dan akronim itu, mengirim pesan, pemerintah tidak percaya terhadap dosen.

Dengan demikian, lahirnya pelbagai tindak manipulasi karya akademik, perjokian kepangkatan akademik, plagiasi, dan seabrek kejahatan akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu, mendapat justifikasi bahwa perbudakan dari pelbagai aturan itu memberi ruang lahirnya kejahatan akademik. Bahkan banyak perguruan tinggi melakukan perilaku itu dengan “penuh kesadaran”. Logika “penuh kesadaran” itulah yang justru menjadi barometer, apakah kampus itu dianggap “unggul”.

Dalam konteks itu, kemerdekaan terhadap dosen harus diberikan secepatnya. Pelbagai akronim pemasungan itu harus segera dihentikan. Bangun relasi saling percaya antara pengambil kebijakan dengan masyarakat (dosen). Perlu interpersonal *trust*.

Meminjam istilah sosiolog kenamaan dunia, Gunnar Myrdal, dalam *the Asian Drama* (1968), jadikan Indonesia sebagai negara dengan budaya *hard state*. jenis budaya yang tegas, konsisten, taat pada *rule of law*, disiplin tinggi, produktif, dan berpandangan jauh ke depan.

Jika pemasungan ini dirawat, maka kampus akan terus-menerus melahirkan ketidakjujuran akademik. Maka, bagaimana nasib bangsa kita ke depan, jika perguruan tinggi yang diharapkan mampu melahirkan ilmuwan dan cendekiawan yang berkelas dunia, justru rusak citranya. Bisa jadi, itulah musabab, mengapa tingkat korupsi sangat tinggi di Tanah Air, karena kampus kehilangan ruh kejujuranya. •

Diskusi Dosen ITB Ahmad Dahalan Jakarta, Tangerang, 30 Maret 2023

19 | AKREDITASI PTS

PADA Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI, terutama berkaitan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Selasa (20/9/2022), penulis dan beberapa rektor dari asosiasi PTS diundang menyampaikan masukan. Ihwal ini juga terkait untuk menyerap aspirasi dalam dinamika pengayaan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Satu hal menarik yang kami sampaikan dalam RDP itu tentang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). LAM ini merujuk UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama dalam pasal 5 ayat 8), yang secara terang benderang menyebutkan Akreditasi Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) diatur melalui Peraturan Menteri (Permen).

Kemudian Kemendikbud Ristek pun mengeluarkan Permen No 5 Tahun 2020. Spirit pasal dalam UU dan Permen itu, adalah adanya keinginan menggeser (*shifting*) beban biaya akreditasi dari APBN ke masyarakat atau sektor swasta. Artinya, pemerintah ingin “cuci tangan” urusan pengelolaan PT. Tentu, Permen ini ingin menerpedo semangat Pasal 31 UUD 1945, di mana kewajiban pemerintah ada dua, yakni menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara.

Dan benar adanya, Permen itu telah melahirkan berbagai LAM (Lem-

baga Akreditasi Mandiri) berkaitan rumpun ilmu. Sudah ada 5 (lima) LAM, yakni Lamsama, LAM Pendidikan, Lamemba, LAM Infokom, dan LAM Teknik). Semua LAM, pengelolaan dan pembiayaannya diserahkan ke masyarakat atau swasta, tidak bersifat opsional. Setiap Program Studi (Prodi) yang tercatat dalam LAM wajib membayar rentang antara Rp 57 juta hingga Rp 110 juta, tergantung LAM-nya.

Itu pun belum termasuk biaya-biaya operasional dan biaya Rp 29,7 juta jika Prodi itu mengajukan banding ke LAM, termasuk untuk akreditasi tingkat institusi. Bayangkan, berapa anggaran yang harus dikeluarkan bagi 30.000 Prodi dan 4.000-an PT di Tanah Air?

Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu tidak ada masalah serius, anggarannya dari negara. Demikian juga bagi PTS “papan atas”, terutama bagi PTS yang mapan dan dibiayai atau dimiliki investor kakap (konglomerat) dengan dalih CSR (*Corporate Social Responsibility*). Tapi bagi PTS menengah ke bawah yang hidupnya dari sumber Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari keluarga masyarakat marjinal, jelas menjadi persoalan antara hidup dan mati.

Sementara, bagi PTS menengah ke bawah, selain *ngos-ngosan* mencari mahasiswa baru akibat kapal “keruk” PTN merekrut sebanyak-banyaknya mahasiswa baru, terutama melalui dalih jalur mandiri yang tidak ada kebijakan pembatasan dari pemerintah, juga PTS menengah ke bawah ini dibebani dengan berbagai ongkos lain yang tinggi.

Dampaknya, likuiditas dana PTS itu pasti seret. Padahal 70 persen mahasiswa di Indonesia ada di PTS menengah ke bawah. Bagaimana mungkin, kita bisa mendongkrak APK (Angka Partisipasi Kasar) PT agar sejajar dengan negara-negara tetangga, jika PTS bawah ini terus menerus dimarjinalkan? Bagaimana mungkin, kita tingkatkan akses dan kualitas pendidikan jika negara mengorbankan mereka? Kasihan masyarakat level bawah jika tidak memiliki akses pendidikan tinggi, sehingga adagium bahwa pendidikan tinggi hanya untuk orang berduit, mendapat justifikasi empirik.

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Kewajiban negara membiayai. Jangan lepas tangan. Pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan untuk membiayai sektor ini. Nasib dan masa depan bangsa, ada di sektor pendidikan. Jangan sampai sektor pendidikan yang merupakan domain kebijakan publik, tapi diselesaikan secara privat/swasta.

Karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang keberadaan LAM dan perlu mengembalikan fungsi akreditasi ini ke Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. Kalau tidak, Permen dan regulasi terkait ini perlu Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA).

Maka, seandainya LAM swasta ini ingin dipertahankan, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, LAM harus dibiayai Negara, bisa mandatory atau subsidiary. Jika disimulasi biaya akreditasi setiap Prodi di Tanah Air, yang jumlahnya kisaran 30.000, maka rata-rata Rp 70 juta dikali 30.000= Rp 2,1 triliun. Penulis menganggap, biaya sebesar ini bisa ditanggung negara. Ataukah mengurangi unit *cost* akreditasi per Prodi hingga rata-rata Rp 30 juta. Ini lebih murah dan manfaatnya bagi masyarakat sangat besar untuk meningkatkan APK PT.

Kedua, perlunya dipertimbangkan klaterisasi Prodi berdasarkan pada jumlah mahasiswa, UKT atau biaya SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan). Kebijakan pembiayaannya jangan disamaratakan antara setiap Perguruan Tinggi dan atau setiap Prodi. Jika biaya diasamaratakan, tentu PT menengah ke bawah akan mengompensasikan pada peningkatan biaya UKT per mahasiswa. Tentu berdampak, PT golongan ini akan sulit menaikkan biaya, maka ujungnya mereka akan bertumbangan.

Ketiga, perlunya LAM dibentuk oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki perguruan tinggi dalam jumlah relatif banyak. Penulis merekomendasikan organisasi semacam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), PGRI, Taman Siswa dan organisasi-organisasi pendidikan Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan lainnya perlu

mendirikan LAM. Dan tentu, perlu dibuatkan aturan dan desainnya oleh Kemendikbud Ristek RI. Semoga. •

Terbit: *Republika*, 27 September 2022

Tentang Penulis



MUKHAER PAKKANNA. Lahir di Bantaeng, Sulawesi Selatan, 14 Januari 1969. Menamatkan pendidikan doktoral bidang ekonomi pembangunan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta 2024 - sekarang.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta 2010-2023. Selain sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, juga Tenaga Ahli (TA) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES).

Pernah menjadi Tenaga Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan di DPR RI 1999-2004 dan TA lepas di beberapa lembaga riset. Penulis lepas di beberapa media massa nasional (*Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Bisnis Indonesia*, *Koran Sindo*, dan lainnya) dan telah menulis beberapa artikel di jurnal bereputasi internasional dan nasional, terutama bidang kajian lembaga keuangan mikro, ekonomi perempuan, ekonomi pedesaan,

dan lainnya.

Telah menulis buku *Bara Di Maluku: Upaya Mencari Jalan Keluar*, Penerbit: Yayasan Lukman Harun Juli 2000; *Dinamika Ekonomi Minus Kesejahteraan*. Penerbit: CIDES Jakarta 2008, *Pengantar Bisnis untuk Mahasiswa*. Penerbit STIAM I Jakarta dan Editor beberapa buku yang diterbitkan *Kompas* dan *Cidesindo*, misalnya “*Muhammadiyah Menjemput Perubahan*; *Tafsir Baru tentang Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik* (Terbit: 2005); *Hatta dan Ekonomi Islam* (Terbit: 2009); *Menggagas Sistem Infrastruktur Terpadu: Tinjauan Ekonomi* (Terbit 2004), *Angkasa Reformasi Terus Bergerak: Ke mana Sang Pelopor* (Terbit: 2005); *Mozaik Pembangunan, Kalimantan Timur dalam Berbagai Spektrum Pembangunan* (Terbit: 2007), dan lainnya. •

Indeks

A

Abbas 35, 157, 175, 176, 178
Abdul Mu'ti 35, 39, 122
Abu Su'ud 14, 28
Adaby Darban 188, 189
ad-Daruqutni 141
Adnyana 23, 24, 25, 28
Afkar Aristoteles Mukhaer xix, 117
Afrika Selatan 116
agresif 24, 26, 51, 171, 225
Ahmad Dahlan xvi, xix, 15, 33, 35, 40,
41, 121, 122, 153, 157, 172, 235
Aisyiyah xi, xxi
Aji Sofyan Effendi 109
Akademi Kateketik Katolik
Yogyakarta 123
Alang xiii, 91
Albert Einstein 98
Alberto Knox 119
Alexander Adam Mukhaer xix
Ali bin Abi Thalib 142
al-Qur'an 34, 41, 121, 174
Al-Washilyah 219
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
125, 128, 157, 167, 185, 191, 197,
201, 207
Amartya Kumar Sen ix, 10, 17, 196
Ambon 37, 175

Amerika 106, 139, 199
amil (petugas zakat) 35
Andre Gunder Frank 50
Anggaran Rumah Tangga (ART) 125
Aparatur Sipil Negeri (ASN) xvii
APBN 114, 116, 206, 231
aplikasi *online* 139, 140, 142
aplikasi Uber 140
Arab Saudi 131, 133
Argawala 27
Arisan Hari Raya 115
Aristoteles viii, xix, 117
Asia 15, 25, 29, 114, 209, 216;
Development Bank (ADB) 25;
Research Institute (ARI) 114
Asmorowati 10
asnaf (kelompok penerima zakat) 35
ath-Thabrani 141
Attaku 97, 99
Attamu 97, 99
Azhar Basyir 123
Az-Zahra Einstenia Mukhaer xix

B

Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT
233
Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 235
 Badan Pusat Statistik (BPS) 29, 43, 217, 223
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 195
 Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) 195
 Badan Wakaf Indonesia (BWI) 219
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 28
Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) 125, 175, 181, 184, 199
 bandara Soekarno-Hatta 122
 Bandung 118, 135, 136
 Bangladesh 45
 bani Israil 36
 Bank Dunia 52, 114, 146, 162, 216
 Bank Indonesia 6, 113, 131, 132
 Bank Muslim Indonesia (BMI) 179
 Bantaeng 97, 100, 235
 Bantuan Sosial (Bansos) xiv
 Belanda 50, 107, 122, 155
 Benjamin 4
 Bhinneka Tunggal Ika 144
 bias gender 24
 bisnis xv, xvi, xvii, 26, 40, 44, 51, 126, 127, 128, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 159, 164, 167, 168, 171, 173, 178, 180, 198, 221, 225
Blakely and Bradshaw xii
blessing in disguise 138
Blockchain 219, 220
 BNP2TKI 114, 132, 133
 Boedi Utomo 122
 Boelaars 25
bottom of the pyramid xvii, 142, 163, 164, 196
 BPJS Ketenagakerjaan 199
 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 181
 BPS 4, 9, 12, 16, 17, 29, 43, 51, 109, 163, 198, 217, 223, 225
Breman 45
BRI Research Institute 4
bubble economy 139
 budaya x, xi, xii, 22, 23, 24, 25, 91, 92,

93, 110, 143, 158, 159, 170, 173, 230
 bumi pertiwi 105, 111
 BUMM (Badan Usaha Milik Muhammadiyah) 127, 167, 168, 169, 181, 182
 Bung Hatta 44, 145
 Bung Karno 110, 112, 148, 179
 buruh migran 131, 133

C

Center for Information and Development Studies (CIDES) 235
 Chandra & Deryandri 174
Charities Aid Foundation (CAF) 43, 138
 China xviii, 107, 162, 164
 Christophe Béné xiii, 91
 Circle K 107
 Cisauk 24
 citra (*image*) 131
 CK Prahalad 142, 196
 Clyayton Christensen 141
Comprehensive Economic Development Strategy (CEDS) viii
Country Gender Assessment (CGA) 6
 Covid-19 xviii, 9, 10, 43, 118, 135, 136, 138, 181, 197, 198, 199, 200, 202, 211
Covid-19 Command Center (MCCC) 197
cultuurstelsel (tanam paksa) 50, 106

D

daeng 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103
 Dakwah Muhammadiyah 127
 Dana Pensiun Muhammadiyah (DPM) 125
 Darul Arqam Dasar (DAD) 121
 demografis 25
 Demokrasi ekonomi 110, 148
 Denpasar 125, 128
 Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) 109
 desa (adat) xiii, 91
 Desa Migran Produktif 116
 Desa Sumberboto 115

Detasemen Khusus 88 (Densus 88) 193
 devisa negara 133, 134
 Digitalisasi 12
 Dinas Perlindungan Perempuan,
 Perlindungan Anak, dan
 Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana (DP3APKB)
 38
disruptive innovation 140, 141
 Dunia Sophie 118, 120

E

Economic Development
Administration's (EDA) viii
 efek berganda (*multiplier effect*) 128
 egaliter 24
 ekonomi vii, viii, ix, x, xi, xii, xiv, xv,
 xvi, xvii, xviii, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,
 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
 27, 28, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 50, 91,
 92, 93, 97, 105, 106, 107, 108, 109,
 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
 117, 118, 125, 126, 127, 128, 133,
 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147,
 148, 149, 161, 162, 163, 164, 165,
 166, 167, 168, 169, 181, 182, 184,
 185, 186, 194, 195, 196, 198, 199,
 200, 203, 206, 216, 217, 218, 219,
 224, 226, 235; global xvii, 4, 216,
 217; Islam 128, 140, 142, 217
 ekspor 5, 105, 134, 159, 215, 216, 217
 era globalisasi v
 Eropa 106, 139

F

fakir (kaum papa) 35
 Ferdinands 122
 Ferry Yanthy Burhan xix, 117
 Filipina 132, 134, 224
financial inclusion (inklusi keuangan) 11
 fintech 5
fisabilillah (orang yang berjuang di
 jalan Allah) 35
flexing 211, 212, 213, 214

Flückiger 18, 29
Food Agriculture Organization (FAO) 17
 Ford 141
Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) 49
 Franz Magnis Suseno 117, 119

G

Galuh xiii, 91
 Garut xvi, 172, 187
 General Motors 141
 geoekonomi global xviii
 geografis xi, 23, 25, 26, 112
 Gerakan ekonomi Muhammadiyah vi
 Gerakan Nasional Wakaf Uang
 (GNWU) 14
ghairu mu'ayyan 15
 Ghana 50
gharim (orang yang tak mampu
 membayar utang) 35
 Giant 107
 Gianyar 92
 GIE (*Generate Islamic Economy*) 215
 Ginkel 24
Global Cities Index 146
 Google 12
 gotong-royong 22, 111, 165
 Grotberg, E ix
 Gunnar Myrdal 230

H

habluminallah 33, 34
habluminanas 34
 hak asasi manusia (HAM) 18
halaqah 102
 Hardiansyah 179
 Hari Ibu Nasional 3
 Hari Tanpa Tembakau Sedunia
 (HTTS) 49
 Hasyim Muzadi 143, 149
Hero 107
 Hertz 141
 Hidayatullah 219
 Hilde Møller Knag 118

Hindharno 113
 hipertensi paru 121
homo homini lupus (eksploitasi dari ekonomi kuat kepada ekonomi yang lemah) 148
homo homini socius (ekonomi berwatak sosial) 148
 Hongkong 131

I

ibadah *mahdhah* 34, 169
 Ibn Hazm 14, 28
 Ibnu Abbas RA 35
ibnu sabil (musafir yang kekurangan bekal) 35
 ibu rumah tangga 24, 26, 27, 53
 ideologi pembaruan 122
 Idul Fitri 113
 IHT (Industri Hasil Tembakau) 52
 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 104, 121
 Ilmu ekonomi vii
 ILO 44, 52
 Imam az-Zuhri 13
 IMF 216
 Immanuel Kant viii
 Immawan Wahyudi iv
 Indeks Gini Ratio (IGR) 108
 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 5
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 44
 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 5
 India 29, 134, 139, 159, 162, 209
 Indonesia xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 89, 108, 109, 111, 113, 116, 123, 126, 128, 131, 132, 134, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 178, 179, 180, 193, 197, 201, 207, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 232, 235
 Indosat 107
 Industri Substitusi Impor (ISI) 200
 infak wajib 40

informasi xiv, 37, 106, 168, 180, 186, 199, 201, 204, 207, 211, 220
 Inggris 107, 142, 211
inna shalataka sakanun 39
 Institute For Global Justice (IGJ) 146
 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta 15, 35, 235
International Conference of Islamic Scholars (ICIS), 143
International Finance Corporation (IFC) 6
International Labor Organization (ILO) 44
 Intoleransi Ekonomi 145
 investasi 5, 27, 106, 107, 132, 163, 180, 212, 216, 220, 221
 Islam xvi, xix, 14, 15, 33, 35, 36, 40, 41, 123, 128, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 171, 172, 174, 183, 190, 191, 194, 201, 217, 236
Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) 215
 Italia 30, 142
 ITB Ahmad Dahlan Jakarta xix, 33

J

Jakarta xix, 15, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 89, 120, 121, 122, 130, 139, 146, 147, 189, 215, 227, 230, 235, 236
 Jaminan Produk Halal (JPH) 215
 Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) 127, 161, 164, 169, 171, 199, 203
 Jatiuwung 136
 Jawa Barat 90, 147, 190
 Jawa Tengah 52, 90, 201
 Jawa Timur 52, 90, 161
 Jean-Paul Sartre 119
 Jenewa 143
 Jepang 142, 158, 159, 160, 162, 216
 Jerman 107, 142, 188
 jiwa entrepreneurship xvii
jongos 112, 148
 Jostein Gaarder 118, 120

JR Anderson 95

K

Kabeer 7, 27, 29, 45

Kabupaten Timur Tengah Utara 121, 122

Kalimantan Tengah 90

Kalimantan Timur 109, 236

Kamerun 116

kampus Sang Pencerah 122

kanca wingking (teman pendamping) x

karakter individualisme 26

Karim Oey 23, 179

Katolik 121, 122, 123, 233

kaum *mustadl'afin* 36

Kazakhstan 50

kearifan ekonomi lokal v, xii

kearifan *Leuit* xiii, 91

kearifan lokal v, xi, xii, xiii, xiv, xv, 84, 90, 91, 92, 93, 111, 115, 185

Kebayoran Baru 122

Kediri 52

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) 36

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 38

Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) 36

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 38

kekerasan seksual 36, 37, 38, 39

kekurangan keuangan (*lack of financial*) 17

kelaparan 45, 135, 138

keluarga *dhuafa* 41

keluarga inti (*nucleus family*) 114

Kemandirian perempuan x, 11, 26, 27

Kemendikbud Ristek 231, 234

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) 114

Kementerian Koperasi dan UKM xvii, 164, 199

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 90

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 16, 29

Kementerian Pertahanan 90

Kementerian Pertanian 90

Kementerian PPPA 38

Kementerian PUPR 90

Kementerian Tenaga Kerja RI 116

kemiskinan ix, x, xiv, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 45, 50, 51, 53, 97, 98, 103, 107, 108, 110, 113, 114, 116, 138, 154, 219, 223, 224, 225

kemiskinan ekonomi ix, 11

Kenya 116

kesenjangan sosial 45, 97

ketahanan pangan lokal (*local food security*) xiii, 91

ketidakadilan gender 45

Keuangan Inklusif xi, xxi

keuangan mikro 6, 7, 25, 28, 46, 115, 184

KH. Ahmad Dahlan xvi

Kiai Abu Bakar 188, 189

Kiai Syudja 153

Knight Frank 146

Koentjaraningrat xiv, 45, 93

kolonialisme 106, 154

kolonialisme primitif 106

komersialisasi pasar, 23

Komisi X DPR RI 231

Kompas 47, 53, 89, 90, 123, 235, 236

konservatif-primitif vii

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 194

konstitusi ekonomi nasional 147

konsumsi xviii, 5, 17, 20, 50, 51, 107, 110, 114, 128, 132, 146, 211, 223, 225

Koperasi xi, xvii, xxi, 28, 44, 45, 46, 115, 164, 167, 175, 184, 199

Koperasi Perempuan xi, xxi, 45, 115

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 184

korporatokrasi global 107

kredit mikro 46
 Kristalina Georgieva 216
 Kristen 122, 159
 Kristen-Muhammadiyah (Kris-Mu)
 122
 KSU Bina Sejahtera 115
 Kuncoro 22, 29
 Kusnadi 25, 29

L

LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)
 231
 laporan keuangan 28, 51, 225
 LazisMu 43, 199
Learning Management System (LMS) 202
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 (LIPI) 9
 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 199
 Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 (LKMS) 184
 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 (LLDikti) 227
 Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
 108
 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 92
 Lembaga Studi Demografi UI 50
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 12, 206
 lembaga ZIS/wakaf xv
 Lestariningsih 12
 liberalisasi investasi 106, 107
 Lombok xiii, 91
 lumbung pangan (*food estate*) 89
 Luzzi 18, 29
 Lynch 27

M

Mahkamah Agung (MA) 233
 majalah *Forbes* 108
 Majelis Ekonomi, Bisnis dan
 Pariwisata (MEBP) PP
 Muhammadiyah 235
 Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 (MEK) 161, 171

Majelis Pemusyawaratan Rakyat
 Republik Indonesia (MPR RI) 89
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 14, 217
 Makassar xv, 100, 125, 161, 172, 181,
 187
 Malaysia 107, 131, 133, 159, 162, 163,
 215, 217, 218
 Malcom Knowles 227
maliyah ijtima'iyyah 34
 Maluku Tengah 122
 Markusen 22
 Masjid Nabawi 35
 masyarakat lokal xii, 90, 91, 93
 Mathlaul Anwar (MA) 219
 Mauk 24
Mauquf alaih 15
mauquf alaih mu'ayyan 15
 Mayoux 27, 29, 116
 McKensey 198
 MDGs (Millenium Development
 Goals) 20
 Mekar Baru 24
 membumikan zakat 34
 mental saudagar xvii, 169, 191
 Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 (MBKM) 227
 Michael Hartono 226
 Mila Arlini 114
 Minangkabau xiii, 91
 Miomaffo Barat 122
miskin (kaum ekonomi prasejahtera) 35
 modal sosial (*social capital*) xi, 25, 111,
 126, 159
 modernisasi ekonomi 107, 148
mu'alaf (lemah iman) 35
muamalah 34, 169
mu'ayyan 15
 Mubyarto 109
 mudik 113, 116
 Muhammadiyah iii, iv, v, vi, vii, ix,
 xv, xvi, xvii, xviii, xix, xxii, 35, 41,
 102, 104, 121, 122, 123, 125, 126,
 127, 128, 153, 154, 155, 156, 157,
 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188,
191, 193, 195, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 218, 219, 223, 224, 226,
233, 235, 236

Muhammadiyah Incorporated 158

*Muhammadiyah International Business
Forum (MIBF)* 125, 128

Muhammad Yunus 45, 98

Muhtahrul Alif 214

Mukhaer Pakkanna iv, xix, 235

Muktamar Muhammadiyah xv, 125,
157, 161, 181, 201

Multi National Corporation (MNC)
109

multiplier effect 113, 128

muslim xvi, 14, 34, 35, 123, 128, 141,
144, 171, 217; kontemporer 35

N

Nahdlatul Ulama (NU) 219, 233

nasionalisme ekonomi 140, 142, 147, 148

*National Association of
Counties (NACO)* viii

nazhir (pengelola wakaf) 13

negara berkembang 15, 16, 45, 114,
142, 209, 229

negara kapitalis 105, 106

negeri penjajah 106

negeri terjajah 106

Nielsen 198

Nigeria 50

NKRI 143

Nobel 45, 98

non-muslim 123, 217

NPL (*non performing loan*) 46

Nusa Tenggara Barat (NTB) 113

Nusa Tenggara Timur 90, 121

Nusa Tenggara Timur (NTT) 121

O

OKI (Organisasi Konferensi Islam) 217

oligarki ekonomi 145

organisasi kemasyarakatan (Ormas)
12, 233

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
49

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 184, 222

P

paceklik 45

pahlawan devisa 131, 132, 133, 134

Pakistan 45, 50, 224

Pakuahaji 24

Pancasila 107, 110, 145, 147

panggilan batin (*inner call*) 36

Panongan 24

Papua 90

Paraguay 50

Partai Komunis Indonesia (PKI) 123

pasar xviii, 6, 7, 16, 23, 90, 96, 100, 128,
142, 146, 147, 159, 164, 194, 198,
203, 217, 218, 221

Pastur van Lith 122

Pedoman Hidup Islami (PHI) 123

pegawai negeri sipil (PNS) 172

Pejuang Devisa 129, 134

Pekajangan xvi, 187, 190

Pekalongan xvi, 172, 187, 190

pelajaran filsafat 118, 119

pemeriksaan 37

pencitraan ekonomi nasional 111

pendekatan kelompok (tanggung
renteng) 46

pendekatan multidimensional 17, 18

pendekatan tradisional 17

pendidikan tinggi 227, 232

penduduk miskin 16, 134

pendusta agama 41

pengangguran 18, 134, 135, 138, 162,
200

pengembangan masyarakat
(*community development*) 92

perempuan ix, x, xi, xviii, xix, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 98,
114, 115, 116, 136, 189, 190, 235
perempuan kepala keluarga 41
Perempuan miskin 46
Perguruan Tinggi Muhammadiyah
(PTM) 123, 125, 199, 218
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 232
perikanan xviii, 164
perokok aktif 49
perokok anak 50
Persyarikatan xv, 126, 160, 178
pertanian xi, xviii, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
51, 92, 108, 114, 164, 199, 225
PGRI 233
Philip Morris 51, 107, 225
PHK 135, 136, 137, 138
Piprek 4
platform online 140
political will 53, 92, 200
politik xii, xiv, 35, 89, 91, 105, 106, 110,
112, 122, 123, 138, 144, 145, 146,
147, 148, 155, 194, 196, 200, 226
PPATK 4
PP Muhammadiyah 35, 123, 127, 161,
168, 171, 177, 185, 197, 205, 208,
209, 223, 235
Pralhad, C.K 163
Pramoedya Ananta Toer 109
Prancis 107, 142
Presiden Jokowi 89
prinsip utang-piutang 40
priyayi 123
Produk Domestik Bruto (PDB) xii, 4
Produk Nasional Bruto (PNB) 4
Program Strategis Nasional (PSN) 90
PSK xxii, 135
PT Djarum 51, 225, 226
PT Gudang Garam Tbk 51, 225
PT Sampoerna Tbk 51, 225
PT Shyang Yao Fung 136
PTS “papan atas” 232
PT Unilever Indonesia xix
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P2TP2A) 37
Pusat Studi Islam Perempuan dan
Pembangunan (PSIPP) xix, 15

Q

Qatar 107

R

Raja Fir'aun 36
Rajivan 25, 30, 46
Rangkiang xiii, 91
Rasulullah saw 13, 36, 142, 169, 172,
174
Remi Iusfay 122
remitansi 113, 114, 115, 116, 131, 132,
133, 134
resiliensi ekonomi viii, ix, xi, xii, xiv,
xv, xviii, 11
Resiliensi ekonomi lokal xiv
resiliensi perempuan ix, x, 10, 11
Restorasi Meiji 159
riqab (budak) 35
Riset Kesehatan Dasar Nasional
(Riskesdas) 50
riya' 102, 213, 214
Robert Budi Hartono 226
Rokok xi, xxi, xxii, 51, 223
ruang publik 119, 211, 213
Rumah Sakit Sari Asih 121

S

Sadli 10, 53
safety first 24, 26
Sambik xiii, 91
Satria 23, 30
saudagar Muhammadiyah 128, 161,
162, 164, 171, 172, 187, 199
sawit mentah (CPO) 5
Scott 22, 23, 30
Seferiana Eka Pasih 121
Sekolah Kajian Strategik dan Global
Pusat Kajian Jaminan Nasional
Universitas Indonesia 49
semen Cibinong 107

semen Gresik 107
 sertifikasi halal 215, 217, 218
 shalat fardhu 40
 Side Event Presidensi G20 5
 Sigaret Kretek Tangan (SKT) 52
 Simfoni PPA 38
 Singapura 107, 162
single parent 137
 Sistem Informasi Online Perlindungan
 Perempuan dan Anak (Simfoni) 38
slow down 128, 216
 SMA Muhammadiyah Ende 122
 SMAN I Bantaeng 97
 Socrates 119
 Soemardjan 45
 Solo xvi, 172, 187, 189, 201
 Sophie Amundsen 118
sophisticated 106, 154, 155
sorogan 102
 sosial-ekonomi xiv, 105, 147
 Sri Mulyani Indrawati 205
 Srirahayu 115
 Sritua Arief 105
State of the Global Economy Report 215
State of the Global Islamic Economy 128,
 217
 Suara Muhammadiyah (SM) iv, xix
 sub-sistem ekonomi yang sentralistik
 144
 Sudibyo 176
 Sukriyanto AR 188, 190
 Sulawesi Selatan 235
 Sumatera Barat xvi, 172, 187
 Sumatera Utara 90
 sumber daya pribadi 27
 Sunda xiii, 91
 Survei Angkatan Kerja Nasional 53
 SuryaMart 128
 Suyanto 173
 Swiss 107, 143
 Syamsul Anwar 39

T

ta'abbudi 34

ta'aqquli 34
 TABF (Teologi Al-Ma'un Berperspektif
 Feminisme) 40
 Taman Siswa 233
 Tanah Toraja xiii, 91, 122
tanfidz xv, 125
 Tangerang 22, 23, 24, 121, 135, 136,
 138, 200, 230
tasamuh (toleran) 143
 Tasikmalaya xvi, 172, 187, 189
tawassuth (moderat) 143
tawazun (seimbang) 143
 teknologi *metaverse* 202, 203, 204
 Telkomsel 107
 Temanggung 52
 Tembakau 49, 52
 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 132
 teologi *al-ma'un* 40, 165
 teori kapabilitas (*capability*) 17
 Thailand 107, 162, 216
*The International Fund for Agricultural
 Development* (IFAD) 15, 30
 Theresia 122
the Tobacco Atlas 50, 224
 Tigaraksa 24
 tiga Roda 107
 Timor Leste 50
 TKI 113, 114, 115, 131, 132, 134
treatment policy 141
 Tukirah 115
 turbulensi sosial-ekonomi xiv
 Turki 14

U

Uganda 116
 UIN Sunan Kalijaga 39
 UKT 232, 233
 ultramikro 4, 6, 9, 12
 UMKM 5, 9, 186, 217, 218
 UNDP 12, 18, 20, 21, 22, 30, 44
 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 121
 universalisme kemanusiaan 119
 Universitas Sebelas Maret (UNS)
 Surakarta 235

Universitas Tarumanagara 147
unreported economy 4
USA 29, 141
usaha distribusi xviii, 164
usaha kerajinan rakyat xviii, 164
usaha padat karya xviii, 164
usaha retail xviii
usaha ultramikro 4, 6, 9, 12

V

Van der Plas 155
Vietnam 50, 224
Viladecans-Marsal 22, 31
VOC 50

W

wakaf uang 13, 14, 15, 25, 27, 28
Weathering Growing Risk East Asia and Pacific Economic 216
Weber 18, 29, 188
Widodo 120
William 196
Wonotirto Blitar 115
work from home 118, 136, 202
World Bank x, 6, 11, 19, 28, 30, 52, 108
World Bank Indonesia 6
World Conference on Religions for Peace (WCRP) 143
World Economic Forum (WEF) 200
World Giving Index (WGI) 43

X

XL 107

Y

Yacob 4
yang berhak menerima zakat
(*mustahik*), 35
Yaron 4
Yayasan Al Azhar 219
Yogyakarta iv, xvi, xix, 3, 29, 38, 90,
102, 123, 171, 172, 187, 188, 189,
190, 205
Yuliawan 186
Yusuf 176

Z

Zai 129
Zakat xi, xxi, 33, 34, 39
Zimbabwe 116

RESILIENSI EKONOMI:

Gerakan Ekonomi Perempuan, Kearifan Ekonomi Lokal &
Gerakan Ekonomi Muhammadiyah

Resiliensi ekonomi harus mampu berkorespondensi dan berkoherensi dengan fakta-fakta kehidupan. Harus *engagement* dan mampu memformulasi kebijakan dan praksis ekonomi untuk beradaptasi, yang kemudian menawarkan solusi konkret.

Resiliensi ekonomi, bukan menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi, melainkan membangun ekonomi yang *strong, sustainable and balanced growth*. Kendati bukan menjadi tujuan utama, bukan berarti resiliensi ekonomi dinegasikan. Pasalnya, pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, tidak akan bisa dicapai jika resiliensi ekonomi tidak terejawantah dan terbangun dengan solid.

Dengan proposisi tentang resiliensi ekonomi itu, buku ini, sejatinya berpretensi hendak memotret dinamika resiliensi ekonomi, yang diwakili 3 (tiga) aktor, yakni gerakan ekonomi perempuan, kearifan ekonomi lokal, dan Muhammadiyah sebagai entitas yang tidak sekadar organisasi, tapi ia adalah pranata persyarikatan.

Untuk melihat peran masing-masing aktor itu, dapat dibaca dalam buku anyaman dari pelbagai artikel penulis di media-media terkemuka.

